



Digital Receipt

This receipt acknowledges that **Turnitin** received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Fx. Baskara T. Wardaya
Assignment title: Baskara T. Wardaya
Submission title: Membongkar Supersemar: Dari CIA...
File name: Membongkar_Supersemar_ed4_ce...
File size: 10.19M
Page count: 242
Word count: 63,021
Character count: 401,372
Submission date: 17-Jan-2018 01:36PM (UTC+0700)
Submission ID: 903513798

— edisi ke-4 —
**MEMBONGKAR
SUPERSEMAR**

Membongkar Supersemar: Dari CIA hingga Kudeta Merangkak Melawan Bung Karno

by Fx. Baskara T. Wardaya

Submission date: 17-Jan-2018 01:36PM (UTC+0700)

Submission ID: 903513798

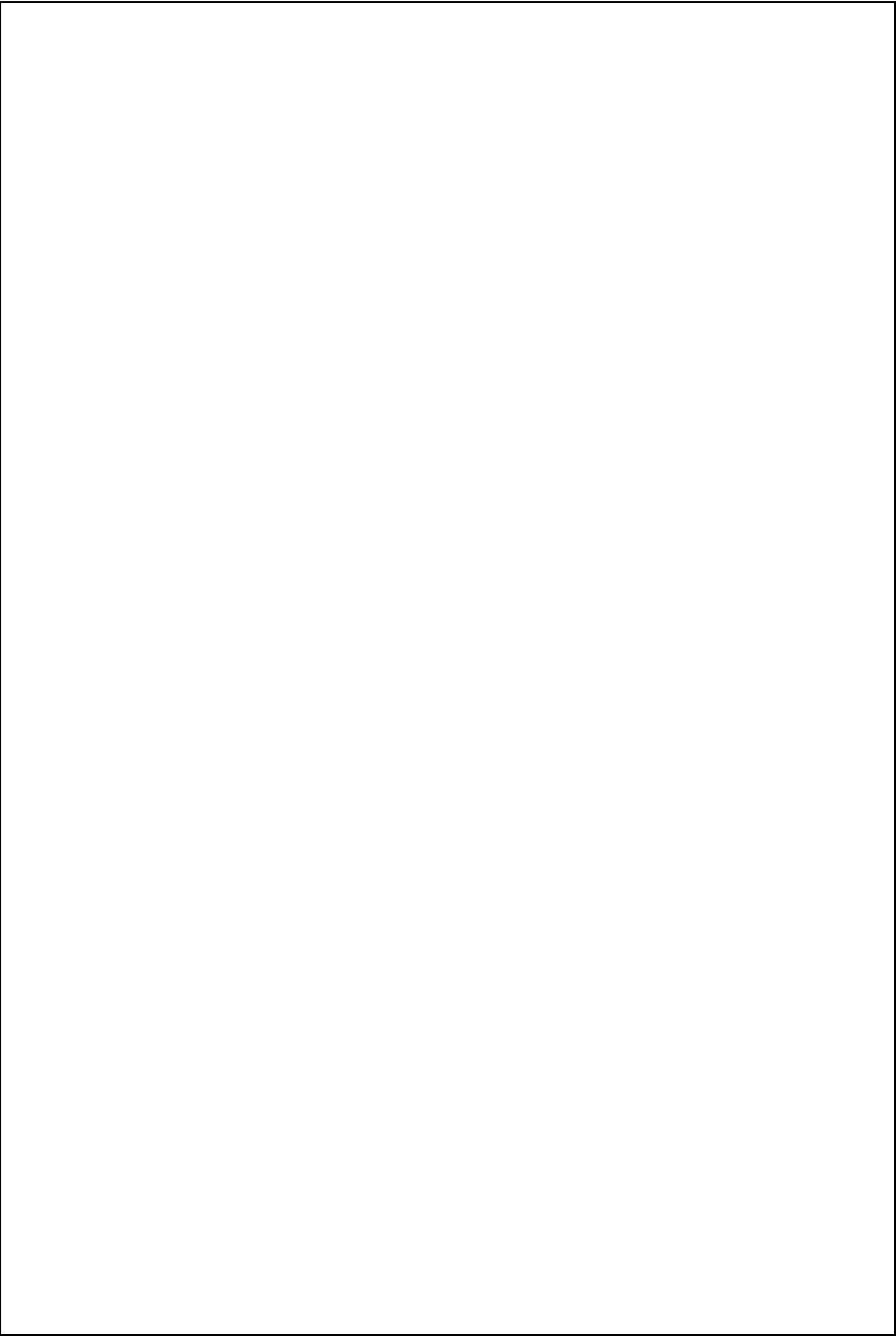
File name: Membongkar_Supersemar_ed4_cetak.pdf (10.19M)

Word count: 63021

Character count: 401372

— edisi ke-4 —

MEMBONGKAR SUPERSEMAR



— edisi ke-4 —

MEMBONGKAR SUPERSEMAR

*Dari CIA hingga Kudeta Merangkak
Melawan Bung Karno*

1

Baskara T. Wardaya, SJ



MEMBONGKAR SUPERSEMAR

Dari CIA Hingga Kudeta Merangkak Melawan Bung Karno

Penulis : Baskara T. Wardaya, SJ
Penyunting : Islah Gusmian & JF Tualaka
Perancang grafis : Teguh Prastowo

Cetakan I & II, 2007

Cetakan III, 2009

Cetakan IV, 2017

69

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

All Right Reserved

Diterbitkan oleh:

Jogja Bangkit Publisher

Jln. Mawar Tengah No.72 Baciro Yogyakarta 55225

Tel. (0274) 554985, 554986 Faks. (0274) 556086

Email: jogjabangkitpublisher@gmail.com

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Wardaya, Baskara T.

1

Membongkar Supersemar: Dari CIA Hingga Kudeta Merangkak Melawan Bung Karno

Yogyakarta, Jogja Bangkit Publisher

Cet. IV, 2017; 155 x 230 mm; xxxiv + 208 hlm.

ISBN: 978-602-0818-56-6

I. Sejarah/Politik

II. Judul

III. Gusmian, Islah & JF Tualaka

Cetakan I, II, dan III diterbitkan oleh Penerbit Galangpress. Ilustrasi sampul depan diolah dari foto karya Co Rentmeester.

Untuk G.

*“Sukarno terus diisolasi dan tidak dilibatkan dalam pengambilan
keputusan-keputusan pemerintahan Soeharto.”*

Donald W. Ropa
Staf Dewan Keamanan Nasional A.S.
18 April 1966

Supersemar dan Angin Segar

Sebuah Pengantar

Bambang K. Prihandono*

BICARA TENTANG Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar) adalah seperti bicara tentang rembulan yang tersembunyi di balik awan. Kita tahu rembulan itu ada dan sinarnya terpancar di bagian-bagian langit yang tak tertutup awan, namun kita tak tahu bagaimana persisnya bentuk dari bulan yang tersembunyi itu. Mungkin bulat purnama, mungkin juga kurang bulat karena purnama telah lewat.

Demikian pula dengan Supersemar. Kita tahu bahwa surat itu ada, ditandatangani oleh Presiden Sukarno, hanya ada satu yang asli, dan menjadi titik-balik sejarah politik Indonesia sejak 1966. Namun demikian sulit untuk memastikan bagaimana sebenarnya bentuk surat itu aslinya. Alasannya, sebagaimana kita tahu, ada beberapa surat yang diklaim sebagai “asli”, lengkap dengan tanda tangan yang seolah-olah tanda tangan Bung Karno. Berbagai spekulasi dan teori konspirasi pun bermunculan. Akibatnya Supersemar menjadi salah satu topik yang amat kontroversial dalam sejarah Indonesia.

Tamasya Intelektual-Historis

Berhadapan dengan kontroversi macam itu, buku *Membongkar Supersemar* ingin menawarkan “cara lain” dalam memandang Supersemar. Dengan sengaja buku ini berusaha menghindari spekulasi dan teori konspirasi macam itu, atau bicara tentang Supersemar *per se*. Dalam melihat kembali

Supersemar, titik tolak yang digunakan adalah pemahaman akan sejarah sebagai suatu proses “dialog kritis” yang berkesinambungan antara sejarawan masa kini dengan fakta-fakta historis yang ia miliki tentang masa lalu. Penulisnya mengajak para pembaca untuk tidak terjebak ke dalam berbagai kontroversi tentang dokumen tersebut. Sebaliknya, ia ingin mengajak pembaca untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada prakondisi yang mendorong lahirnya Supersemar serta dampak luas yang timbul akibat kemunculannya.

Bertumpu pada gagasan macam itu buku ini secara apa adanya memaparkan kembali rangkaian dokumen di seputar Supersemar yang dikeluarkan oleh berbagai institusi dan pejabat Amerika maupun Indonesia. Dokumen-dokumen tersebut disusun secara kronologis dari bulan ke bulan, sejak bulan Januari hingga bulan September 1966. Sumber dari dokumen-dokumen ada banyak, termasuk Gedung Putih, Departemen Luar Negeri AS, Kedubes AS di Jakarta, Pentagon, *Central Intelligence Agency* (CIA), serta sumber-sumber lain. Hampir semua dokumen yang tercantum di sini aslinya berkode “rahasia”, “konfidensial”, “tidak untuk disebar ke negara lain”, dan sebagainya. Namun dalam risetnya selama beberapa tahun di AS, penulisnya berhasil mendapatkan akses ke dokumen-dokumen tersebut setelah mengalami proses “sanitasi” dan “deklasifikasi.” Aslinya dokumen-dokumen itu berbahasa Inggris, namun oleh penulisnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Selain pengantar umum untuk keseluruhan buku, penulis memberikan pengantar yang amat menarik dan informatif atas kumpulan dokumen tiap bulannya. Selain itu diberikan pula pengantar untuk masing-masing dokumen yang termuat di dalamnya. Alhasil, buku ini menjadi semacam “tamasya intelektual-historis” untuk memasuki kembali dinamika politik yang bergolak di Indonesia tahun 1966, khususnya sejauh yang terungkap dari perspektif politik luar negeri AS. Cara penyampaian yang deskriptif-analitis membuat paparan dalam buku ini terasa seperti sebuah perjalanan pribadi meniti bagian dari masa lalu yang begitu penting dalam dinamika kita bersama sebagai bangsa.

Dari dokumen-dokumen itu tampak misalnya, bagaimana berbagai kepentingan internasional maupun domestik bertempur memperebutkan kekuasaan. Di arena internasional, kelihatan bagaimana Perang Dingin amat mempengaruhi perkembangan politik dalam negeri Indonesia. Dalam hal ini jelas sekali Amerika Serikat (AS) sebagai pemimpin pertentangan melawan blok Komunis di bawah dominasi Uni Soviet sangat berkepentingan untuk menyingkirkan Bung Karno beserta kekuatan anti-kapitalis lainnya, agar tidak menghambat kepentingan negara adikuasa tersebut di bumi Nusantara.

Titik Balik

Selain itu kita juga diingatkan bahwa baik kekuatan dalam negeri maupun luar negeri itu sama-sama bersekutu untuk menyingkirkan Presiden Sukarno secara bertahap, suatu proses yang sering disebut sebagai “kudeta merangkak.” Pertama-tama berbagai kekuatan itu bersekutu menyingkirkan orang-orang di sekitar Bung Karno, sebelum akhirnya mereka bergegas untuk menyingkirkan Bung Karno-nya sendiri. Berbagai upaya dilakukan termasuk melalui politik bantuan, pengerahan mahasiswa, penggalangan kekuatan melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan, jalur-jalur militer, dan sebagainya.

Di atas semuanya, menjadi tampak bagaimana Supersemar merupakan puncak dari aneka konflik politik dan sekaligus merupakan titik-balik sejarah bangsa Indonesia. Supersemar adalah pengesah bagi perubahan arah orientasi ekonomi bangsa Indonesia menuju pada sikap pro-Barat Kapitalis dan orientasi politik yang berciri otoritarian. Ditunjukkan, titik-balik sejarah yang dimulai dan disahkan oleh Supersemar itu ditokohi oleh Triumvirat Soeharto, Adam Malik dan Sultan Hamengkubuwono IX. Tiga orang inilah yang dengan gencar melakukan kontrol politik dalam negeri serta lobi-lobi politik internasional (hlm. 150–153). Selain peran sosial, politik, dan ekonomi, Triumvirat itu juga menunjukkan keunikan dinamika politik Indonesia. Kehadirannya tak hanya mewakili perpaduan kekuatan militer dan sipil, namun juga menunjukkan komposisi Jawa dan Luar Jawa dalam kekuatan politik Orde Baru.

Jikalau ditarik benang merah atas dampak dari keluarnya Supersemar, kita akan melihat adanya perubahan fundamental dari struktur politik luar negeri maupun dalam negeri Indonesia. Sejak dikeluarkannya Supersemar sistem dan struktur politik-ekonomi Indonesia tak hanya menampilkan ciri pro-kapitalis dan otoritarian, melainkan juga aktif mereproduksi kekerasan di berbagai bidang. Reproduksi kekerasan itu telah dimulai sejak dilancarkannya pembantaian massal pada paruh kedua tahun 1965.

Ketika harus berhadapan dengan pertanyaan “siapa sebenarnya dalang Supersemar?”, buku ini memilih untuk tidak menjawabnya secara langsung. Menurut penulisnya, seandainya pun ada “dalang” dalam peristiwa Supersemar, dalangnya bukanlah dalang tunggal. Yang ada adalah banyak dalang yang saling bertemu dan bekerja sama karena adanya konvergensi alias titik temu kepentingan.

Tetap Relevan

¹⁰ Buku ini setidaknya memiliki tiga relevansi. *Pertama*, ia mengajak pembaca untuk melihat Supersemar tidak hanya sebagai selembar surat perintah dengan segala kontroversi dan teori konspirasi di baliknya, melainkan mencermatinya dalam konteks yang lebih luas. Konteks itu meliputi prakondisi yang melahirkan maupun dampak yang ditimbulkan oleh Supersemar. Termasuk di sini adalah prakondisi dan dampak domestik maupun internasional.

¹⁰ *Kedua*, buku ini pada gilirannya bukanlah sekadar buku tentang Supersemar. Buku ini lebih merupakan ajakan untuk berpikir, bagaimana dengan melalui sebuah pintu masuk tertentu (dalam hal ini Supersemar) kita dapat semakin mampu “berdialog” dengan masa lalu kita. Berkat dialog macam itu, diharapkan setiap jengkal pengalaman sejarah menjadi pelajaran penting bagi kekinian dan masa depan bersama. Prinsip yang sama kiranya dapat digunakan untuk melihat berbagai peristiwa sejarah yang lain.

¹⁰ *Ketiga*, buku ini dapat dijadikan salah satu contoh upaya alternatif terhadap dogmatisasi sejarah yang biasanya datang dari kalangan penguasa. Selama ini narasi mengenai sejumlah peristiwa penting dalam sejarah Indonesia (khususnya sejak tahun 1965) sering didominasi oleh kepentingan

politik kelompok-kelompok tertentu yang sedang berkuasa. Buku ini seakan ingin mengatakan, penuturan oleh sejarawan dari kalangan masyarakat umum juga penting perannya, apalagi jika penuturan itu bebas dari kepentingan-kepentingan politik praktis. Selanjutnya, penerbitan buku ini ... seakan hendak mengingatkan kita bahwa Supersemar tetap relevan untuk terus dibahas dan dijadikan bagian dari dialog kritis dengan masa lalu demi kepentingan masa kini dan selanjutnya.

Angin Segar

Sedikit sayang memang, dokumen-dokumen yang ada di buku ini berhenti pada dokumen-dokumen bulan September 1966. Akibatnya apa yang berlangsung setelah itu tidak termasuk dalam pembahasan. Jika saja ditambahi dengan dokumen-dokumen yang lebih panjang periode waktunya, tentu kita akan bisa lebih jelas dalam melacak dampak lebih jauh dari sebuah surat yang bernama Supersemar itu. Pembatasan penggunaan dokumen yang hanya mencakup bulan Januari hingga September 1966 kiranya terlalu singkat.

Namun demikian, secara umum buku ini telah membawa angin segar bagi penulisan dan pemahaman sejarah Indonesia modern. Di tengah samar-samarnya keaslian dokumen Supersemar yang bagaikan rembulan tersembunyi di balik awan, buku ini telah menawarkan cara lain dalam memandang dokumen bersejarah tersebut. Para peminat dan pengajar sejarah, serta siapa pun yang tertarik untuk menelusuri kembali jejak masa silam bangsa Indonesia, akan menarik manfaat dari buku ini. Pemaparannya yang tak menggurui telah mampu menyuguhkan buku ini sebagai buku dengan perspektif terbuka, yang tentunya amat berguna entah sebagai bahan bacaan pribadi, atau sebagai bahan kajian akademis. Sungguh, buku ini adalah buku sejarah yang mencoba menawarkan sejarah sebagai sebuah proses dialog kritis.

**Bambang K. Prihandono, Pengajar pada Program Studi Sosiologi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta; belajar Sosiologi, Antropologi, dan Sejarah pada Universitas Muenster, Jerman. Pengantar ini pernah dimuat sebagai resensi dalam rubrik Pustakaloka harian Kompas, Senin, 7 Mei 2007.*

1
“Sejarah adalah suatu interaksi yang berkesinambungan antara sejarawan (atau siapa pun yang melakukan studi sejarah) dengan fakta masa lampau yang dimilikinya. Dengan demikian sejarah merupakan semacam proses “dialog” terus-menerus antara sejarawan atau peminat sejarah yang hidup pada masa kini dengan peristiwa atau pelaku-pelaku peristiwa di masa lampau.”

—E.H. Carr (1990)

Cara Lain Memandang Supersemar

Catatan Pendahuluan

JIKA ANDA termasuk orang yang berpandangan bahwa yang namanya sejarah itu hanyalah urusan masa lalu, mungkin Anda perlu duduk tenang, lalu berpikir ulang. Coba Anda simak sejenak pendapat ini. Sejarah, menurut sejarawan Edward Hallett Carr (1990), adalah suatu interaksi yang berkesinambungan antara sejarawan (atau siapa pun yang melakukan studi sejarah) dengan fakta masa lampau yang dimilikinya. Dengan demikian sejarah merupakan semacam proses “dialog” terus-menerus antara sejarawan atau peminat sejarah yang hidup pada *masa kini* dengan peristiwa atau pelaku-pelaku peristiwa di masa lampau.¹ Dengan kata lain, dalam penulisan sejarah tekanan tidak hanya terletak pada “apa sebenarnya yang terjadi di masa lampau”, melainkan juga pada bagaimana sejarawan atau kita semua “berdialog” dengan fakta masa lalu itu. Itulah sebabnya sering dikatakan bahwa penulisan sejarah harus terus dilakukan dan setiap generasi perlu menulis sejarahnya sendiri.

Dipahami dengan cara demikian menjadi semakin jelas bahwa sejarah bukan hanya menyangkut urusan masa lampau, melainkan juga erat kaitannya dengan masa kini—dan tentu saja dengan masa depan. Dengan cara demikian pula kiranya kita akan terbantu untuk lebih bersemangat dalam meneliti dan mengkaji masa lalu kita, entah sebagai individu maupun

sebagai bagian dari bangsa secara keseluruhan. Bangsa ini memiliki masa lalu yang kaya dan ia “memanggil” kita semua untuk tak enggan “berdialog” dengan masa lalunya. Dengan begitu sebagai individu maupun warga bangsa kita akan terus diperkaya dalam menapaki perjalanan selanjutnya.

Agak Berbeda

Bertolak dari gagasan tersebut, kita menjadi tertarik untuk terus mengadakan dialog macam itu dengan berbagai peristiwa penting dari masa yang telah lewat, termasuk di antaranya peristiwa lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang dikenal sebagai Supersemar. Supersemar menjadi penting karena kelahirannya telah menandai arus-balik (kalau tak mau dikatakan “pembelokan”) berbagai kebijakan dalam negeri maupun luar negeri Indonesia. Supersemar, misalnya, menandai makin merosotnya kekuatan Presiden Sukarno dan makin naiknya kekuasaan Letnan Jenderal Soeharto. Bersamaan dengan itu terjadi pula arus-balik arah perpolitikan Indonesia dari sipil ke militer, dari berorientasi kiri ke haluan kanan, dari arah kerakyatan menjadi berkiblat ke elite politik, dari anti-nekolim (anti neo-kolonialisme dan imperialisme) menjadi pro-modal asing, dan sebagainya. Melihat berbagai bentuk arus-balik itu kita ingin tahu: bagaimana semua itu bisa terjadi? Kita pun terdorong untuk bertanya: pelajaran apa yang kita bisa tarik dari semua itu?

Setiap tahun, khususnya setiap bulan Maret tiba, orang selalu bicara tentang Supersemar. Pada tanggal 11 bulan itu di tahun 1966 di Istana Bogor, Bung Karno sebagai Presiden yang sekaligus Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, Pemimpin Besar Revolusi dan Mandataris MPRS menandatangani sebuah *surat perintah harian* yang menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk “mengambil segala tindakan yang dianggap perlu” dengan maksud demi “terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya Pemerintahan dan jalannya Revolusi”.

Selengkapnya surat perintah harian itu berbunyi:²

9

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERINTAH

I. Mengingat:

1.1. Tingkatan Revolusi sekarang ini, serta keadaan politik baik Nasional maupun Internasional.

1.2. Perintah Harian Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/Presiden/Panglima Besar Revolusi pada tanggal 8 Maret 1966.

II. Menimbang:

2.1. Perlu adanya ketenangan dan kestabilan Pemerintahan dan djalannja Revolusi.

2.2. Perlu adanya djaminan keutuhan Pemimpin Besar Revolusi, ABRI dan Rakjat untuk memelihara kepemimpinan dan kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi serta segala adjaran-adjarannja.

III. Memutuskan/Memerintahkan:

Kepada: LETNAN DJENDERAL SOEHARTO, MENTERI PANGLIMA ANGKATAN DARAT.

Untuk: Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi:

1. Mengambil segala tindakan jang dianggap perlu, untuk terdjaminnja keamanan dan ketenangan serta kestabilan djalannja Pemerintahan dan djalannja Revolusi, serta mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala adjaran Pemimpin Besar Revolusi.

2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan² lain dengan sebaik-baiknya.

3. Supaja melaporkan segala sesuatu jang bersangkutan-paut dalam tugas dan tanggung-djawabnja seperti tersebut diatas.

IV. Selesai.

Djakarta, 11 Maret 1966
PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI/ PEMIMPIN
BESAR REVOLUSI/MANDATARIS M.P.R.S.

(tanda tangan)

SUKARNO

1

Tak lama setelah surat itu ditandatangani oleh Bung Karno dan kemudian diterima oleh Letnan Jenderal Soeharto, iklim politik Indonesia menjadi berubah secara drastis. Kurang dari dua puluh empat jam setelah ditandatanganinya surat itu, si penerima surat langsung membubarkan sebuah partai politik, dalam hal ini Partai Komunis Indonesia (PKI). Selanjutnya ia mengatur keanggotaan partai, menangkap belasan menteri, menyingkirkan orang-orang yang pro-Bung Karno, untuk akhirnya nanti bahkan mendongkel Sang Penanda Tangan Surat itu sendiri dari kursi kepresidenan. Sungguh tragis.

Kesadaran akan sisi tragis itu akan makin mendalam bila kita ingat bahwa lahirnya Supersemar telah didahului oleh banjir darah sekitar setengah juta rakyat Indonesia yang tewas di tangan sesama warga negara Indonesia. Dalam pembantaian massal yang berlangsung antara pekan ketiga bulan Oktober hingga bulan Desember 1966 dan setelahnya itu, berbagai kekuatan sipil dan militer saling menopang untuk menghabisi hidup sekian banyak orang tanpa ada proses pengadilan. Nyaris tak ada jejak-jejak kemanusiaan sebagaimana layaknya dalam sebuah masyarakat yang ingin mengedepankan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kelak kita akan tahu bahwa meskipun pembunuhan itu berskala massal dan di luar hukum, hampir tak ada satu pihak pun yang secara resmi mengklaim tanggung jawab dan mencoba mencari solusi bersama atas masalah pembantaian itu. Bahkan upaya untuk mengadakan rekonsiliasi antara para korban dan pelaku pun selalu dihalang-halangi dengan berbagai macam alasan. Benar-benar tragis.

Sebenarnya garis besar dari apa yang berlangsung pada hari Jumat tanggal 11 Maret 1966 itu telah secara umum diketahui. Pagi itu, di Istana Merdeka, Bung Karno memimpin Sidang Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan. Ketika Bung Karno sedang berbicara, Brigadir Jenderal M. Sabur, Komandan Resimen Cakrabirawa, masuk ke ruang sidang, ingin memberi tahu Brigadir Jenderal Amir Machmud, Pangdam V/Jaya yang juga hadir dalam sidang itu, bahwa di luar sedang ada sejumlah pasukan tak dikenal dan ini menimbulkan kekhawatiran. Berhubung Brigjen Sabur tak berhasil meminta Brigjen Amir Machmud untuk keluar, ia lalu menyampaikan nota kepada Bung Karno, memberi tahu soal pasukan tak

dikenal itu. Bung Karno kelihatan menjadi gugup, sehingga kemudian menyerahkan pimpinan sidang ke Waperdam II Leimena, sedang ia sendiri bersama Dokter Soebandrio bergegas meninggalkan Istana. Keduanya segera naik helikopter menuju ke Istana Bogor.

Tak lama setelah mendengar berita tentang apa yang terjadi di istana itu, Soeharto—satu-satunya menteri yang tak hadir dalam sidang kabinet dengan alasan “sakit”—mengutus tiga orang, yakni Brigadir Jenderal M. Jusuf, Brigadir Jenderal Basuki Rachmat, dan Brigadir Jenderal Amir Machmud, untuk menyusul Bung Karno ke Bogor. Pertemuan antara ketiga Jenderal tersebut dengan Bung Karno berakhir dengan ditandatanganinya surat perintah harian, yakni Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), dengan segala kelanjutan dan konsekuensi politis yang telah kita sebut di atas tadi.

Dilihat dengan cara demikian, kronologi lahirnya Supersemar menjadi tampak jelas dan gagasannya menjadi mudah diikuti. Namun demikian, kalau dicermati secara lebih jauh, ternyata ada sejumlah pertanyaan yang masih perlu dicari jawabnya. Misalnya, *pertama*, apakah surat itu dibuat Bung Karno secara sukarela atau di bawah tekanan? Yang jelas proses lahirnya surat itu diawali dengan perginya Bung Karno dari tengah-tengah Sidang Kabinet yang ia pimpin di Jakarta. Ia lari ke Bogor karena ia merasa keselamatan pribadinya tidak terjamin. Selain itu, yang mengusulkan dikeluarkannya surat itu adalah tiga orang Jenderal militer yang diutus oleh Men/Pangad Letjen Soeharto, dan bukan Bung Karno sendiri. Perlu diingat, ketiga Jenderal itu tidak datang karena dipanggil oleh Bung Karno sebagai Presiden atau Panglima Tertinggi ABRI, melainkan karena adanya inisiatif dari Letjen Soeharto setelah mereka bertemu di kediaman Soeharto di Jln. H. Agus Salim 98, Jakarta.

Kedua, timbul pertanyaan siapa sebenarnya yang mengetik naskah asli surat itu? Apakah Bung Karno sendiri, apakah Bung Karno mendiktekannya pada seorang pengetik di Istana Bogor, ataukah surat itu sebenarnya telah dibuat sebelumnya dan Bung Karno tinggal tanda tangan. Benedict Anderson, misalnya, berpendapat bahwa naskah asli surat itu dibuat di Markas Besar AD, sehingga kop suratnya adalah kop surat MBAD, dan bukan kop surat kepresidenan.

Ketiga, apakah surat yang sempat beredar di kalangan elite politik dan militer waktu itu adalah surat yang asli ditandatangani oleh Bung Karno ataukah salinannya yang telah diubah-ubah sesuai kepentingan pihak-pihak tertentu? Ada sejumlah dugaan bahwa begitu sampai di Jakarta surat yang ditandatangani oleh Bung Karno itu mengalami perubahan dan diberi tanda tangan palsu, sehingga menjadi tak jelas lagi mana yang asli dan mana yang palsu. Di Sekretariat Negara saja ada dua naskah surat berbeda yang masing-masing terdiri dari satu halaman, lengkap dengan tanda tangan Bung Karno, namun cara pengetikan dan tanda tangannya agak berbeda satu dengan yang lain. Sementara itu Alm. Jenderal M. Jusuf juga memiliki naskah Supersemar “asli” lengkap dengan tanda tangan Bung Karno, namun dengan cara pengetikan yang juga berbeda dan (anehnya) terdiri dari dua halaman.³ Aneh tapi nyata.

Keempat, di mana sebenarnya naskah asli surat perintah itu kini? Mengingat bahwa surat itu penting sekali dan merupakan dokumen negara yang ditandatangani Presiden, kecil kemungkinan bahwa surat itu hilang begitu saja. Besarlah kemungkinan bahwa surat itu sengaja dihilangkan atau disembunyikan. Pertanyaannya, mengapa dihilangkan atau disembunyikan? Dan siapa yang harus bertanggung jawab? Mengapa semua orang yang terlibat dalam kelahiran surat itu bila ditanya soal naskah Supersemar cenderung bungkam seribu bahasa? Ketika buku ini disusun kebanyakan saksi peristiwa itu telah meninggal, kecuali Soeharto. Namun Soeharto pun selalu tutup mulut kalau ditanya soal naskah Supersemar. Mengapa?

Hampir semua pertanyaan itu sampai kini tak terjawab secara memuaskan. Seandainya pun ada jawaban, tentu berbeda-beda. Bahkan pertanyaan mengenai apakah Jenderal yang datang hari itu tiga orang atau empat orang, masih merupakan tanda tanya. Melihat kenyataan seperti itu mengapa kita tidak mencoba mencari cara lain untuk memandang Supersemar? Kita tidak lagi ingin berfokus pada masalah naskah surat itu *per se* (atau naskah itu saja), melainkan pada pra-kondisi yang melahirkan surat perintah itu serta pada berbagai dampak yang telah timbul akibat adanya bermacam tindakan yang dilakukan atas nama surat perintah tersebut. Dengan latar belakang itulah, kali ini kita bermaksud “membongkar” kembali Supersemar.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, buku yang sedang Anda baca ini ingin mengajak Anda untuk membongkar dan memandang Supersemar dengan cara yang agak berbeda itu. Sebagai salah satu caranya, buku ini ingin mengundang Anda untuk mencermati kembali lembar-lembar “rekaman” dinamika sosial, politik, militer yang berlangsung pada bulan-bulan menjelang dan setelah munculnya Supersemar. Yang dimaksud dengan lembar-lembar rekaman itu adalah dokumen-dokumen dari pemerintah Amerika Serikat yang ternyata banyak mencatat berbagai peristiwa di Indonesia pada kurun waktu sekitar dikeluarkannya Supersemar itu. Berhubung hampir semua dokumen yang akan kita lihat itu aslinya berasal dari Amerika—dan secara lebih khusus berkaitan dengan politik luar negeri Amerika—maka marilah kita secara singkat melihat dinamika internasional yang menjadi konteks politik luar negeri Amerika waktu itu.

Hujan Pertama

1

Amerika Serikat pada tahun 1966 adalah sebuah negeri adikuasa yang sedang terlibat dalam Perang Dingin, suatu konflik internasional yang sudah dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945. Perang Dingin menimbulkan pertentangan antara kubu negara-negara Barat-Kapitalis yang dipimpin oleh Amerika Serikat melawan kubu negara-negara Komunis-Sosialis di bawah pengaruh Uni Soviet. Perang itu disebut “dingin” karena tidak disertai konflik fisik langsung antara pemimpin kedua kubu. Namun demikian di luar kedua negara adidaya itu Perang Dingin tidak selalu “dingin” karena melibatkan konflik bersenjata yang “panas” dan mematikan, seperti misalnya di Korea, Vietnam, dan Afghanistan.

Berkaitan dengan Indonesia, waktu itu Amerika amat khawatir melihat negeri ini yang dirasa semakin condong ke kiri dan dengan demikian makin mengancam kepentingan AS beserta sekutu-sekutunya. Tempat kedudukan (*ranking*) sebagai partai pemenang terbesar keempat dalam Pemilu tahun 1955 yang diraih PKI membuat kekhawatiran itu semakin nyata. Semangat untuk melawan perkembangan pengaruh komunis inilah yang antara lain mendorong keterlibatan Amerika dalam Pemberontakan PRRI/Permesta

pada pertengahan tahun 1950-an. Setelah pemberontakan itu gagal, berbekal semangat yang sama, Amerika mulai mengundang para perwira militer Indonesia untuk dididik di sekolah-sekolah militer di AS.

Secara lebih khusus, Amerika waswas mengikuti pesatnya perkembangan PKI, yang pada tahun 1964 telah tumbuh menjadi partai komunis terbesar di dunia, di luar blok Uni Soviet-Cina. Menjadi lebih waswas lagi ketika disadari bahwa antara Bung Karno dan PKI terjalin hubungan yang makin erat dan saling mendukung. Retorika Bung Karno yang sangat anti neo-kolonialisme dan anti neo-imperialisme Barat juga turut meresahkan Washington. Amerika sadar, Bung Karno tidak hanya memiliki pengaruh yang kuat di dalam negeri, melainkan juga di luar negeri, khususnya di antara negara-negara Non-Blok. Bagi Amerika dan sekutunya, politik Konfrontasi Indonesia melawan pembentukan Federasi Malaysia adalah salah satu contoh dari ambisi Bung Karno untuk memperluas pengaruh militernya di luar batas-batas Indonesia.

Melihat dinamika seperti itu Amerika berupaya mempengaruhi Indonesia agar menghentikan orientasi kirinya dan agar membelokkan orientasi itu ke arah yang sesuai dengan kepentingan Barat. Amerika pun terus berusaha menggerogoti kekuasaan dan pengaruh Bung Karno dan PKI, sekaligus berharap pemerintahannya suatu saat diganti dengan pemerintahan baru yang pro-Barat, pro-Kapitalis. Di tengah harapan Amerika yang seperti itulah Supersemar lahir. Kelahiran surat itu, serta bagaimana nantinya ia menjadi legitimasi bagi lahirnya pemerintahan yang pro-Barat, seakan merupakan hujan pertama yang membasahi bumi setelah musim kemarau yang panjang.

Kontroversi dan Konsekuensinya

¹ Mirip dengan kekhawatiran Amerika, di dalam negeri pun kekhawatiran akibat makin berkembangnya PKI juga melanda sejumlah kalangan. PKI yang setelah Peristiwa Madiun 1948 ditumpas, pada awal tahun 1950-an sudah bisa mulai bangkit lagi dengan kepemimpinan yang lebih muda dan dinamis. Sebagaimana telah kita singgung, pada Pemilu 1955 PKI bahkan

menduduki *ranking* keempat sebagai partai terbesar pemenang Pemilu. Kemenangan ini membuat waswas-nya banyak kalangan yang anti-komunis di dalam negeri. Pelan tapi pasti mereka berusaha meminimalkan atau kalau bisa bahkan menyingkirkan sama sekali pengaruh PKI di negeri ini.

Sementara itu Bung Karno yang dengan konsep NASAKOM (Nasionalisme, Agama dan Komunisme)-nya tampak makin dekat dengan PKI juga membuat khawatir banyak pihak. Seakan mengamini kekhawatiran pihak-pihak luar negeri, berbagai elemen dalam negeri juga mulai khawatir bahwa Bung Karno tidak hanya akan membawa Indonesia ke arah yang ditentukan oleh PKI, melainkan juga tunduk di bawah kepentingan komunis internasional, khususnya Republik Rakyat Cina.

Apa yang terjadi pada dini hari 1 Oktober 1965 menjadi katalisator untuk makin cepatnya dinamika politik di Indonesia berkaitan dengan situasi di atas. Ketika pada hari itu enam orang Jenderal dan seorang perwira tinggi Angkatan Darat tewas akibat operasi militer yang dilakukan oleh Gerakan Tiga Puluh September, pihak Angkatan Darat langsung melemparkan tuduhan bahwa PKI-lah yang secara penuh bertanggung jawab atas peristiwa berdarah itu. Berbagai bentuk kampanye media massa dilakukan untuk memperkuat tuduhan itu, dan tiga minggu kemudian (sekitar 20 Oktober 1965) mulailah pembantaian massal di Jawa Tengah. Pada bulan November pembantaian massal berlanjut di Jawa Timur, untuk selanjutnya meluas ke Bali pada bulan Desember. Banyak laporan mengatakan, pembunuhan dilakukan oleh kombinasi kekuatan sipil dan militer. Dalam waktu tiga bulan, pembantaian massal itu menelan korban sekitar setengah juta orang.

Berhadapan dengan situasi demikian, Bung Karno tampak kaget dan kewalahan. Tampaknya ia tak pernah menyangka bahwa bangsa yang telah ia bantu dalam perjuangan menuju kemerdekaan itu akan sedemikian tega membunuh sesama warga negaranya. Ia lantas menjanjikan “solusi politik” untuk situasi ini, namun tak kunjung jelas apa yang ia mau lakukan. Ia mengatakan bahwa sejumlah pemimpin PKI “keblinger” dan terlibat dalam peristiwa berdarah itu, namun menolak untuk secara resmi membubarkan Partai Komunis tersebut. Dalam situasi demikian, kalangan anti-komunis semakin tak sabar. Mereka ingin supaya PKI segera dibubarkan (meskipun

praktis kepemimpinannya sudah kocar-kacir dan anggotanya yang masih hidup bercerai-berai). Sekaligus mereka juga menghendaki bahwa orang-orang kiri di sekitar Bung Karno disingkirkan—atau kalau perlu Bung Karno-nya sendiri yang disingkirkan. Dalam konteks domestik seperti itulah pada tanggal 11 Maret 1966 itu muncul Supersemar dengan segala kontroversi dan konsekuensinya.

Memberhentikan Sukarno

Sebagaimana bisa kita lihat di depan, naskah Supersemar sendiri tidak panjang, seperti layaknya sebuah surat perintah harian. Namun demikian ternyata ia memiliki dampak atau implikasi yang amat luas dan panjang bagi Indonesia, baik dalam kebijakan luar negeri maupun dalam negeri. Dengan adanya Supersemar dan naiknya kubu Soeharto, orientasi politik luar negeri menjadi berbelok arah. Amerika yang dulunya menjadi “musuh” Bung Karno kini berubah menjadi sahabat pemerintahan pasca-Bung Karno. Persahabatan juga dibina dengan sejumlah negara kapitalis lain. Sementara itu Konfrontasi Malaysia dihentikan. Padahal oleh Bung Karno sejak 1963 Konfrontasi Malaysia telah dijadikan salah satu simbol konkret perlawanan terhadap hegemoni kapitalis. Pada saat yang sama utang luar negeri yang pada zaman Bung Karno masih relatif terbatas, sejak naiknya kubu Soeharto utang itu menjadi besar-besaran. Indonesia yang sebelumnya menyatakan diri keluar dari organisasi-organisasi internasional (termasuk PBB), akhirnya bergabung kembali dengan organisasi-organisasi itu.

Yang lebih pokok untuk kita lihat dan perlu untuk terus kita dialogkan tentu saja adalah dampak dari Supersemar terhadap situasi dalam negeri Indonesia sendiri. Sebagaimana telah kita lihat, berkat adanya Supersemar itu kalangan militer—di bawah pimpinan Jenderal Soeharto—nyaris bisa melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Termasuk di sini adalah pembubaran partai politik (dalam hal ini PKI) yang sebenarnya adalah wewenang Presiden. Penangkapan menteri-menteri, rekayasa keanggotaan MPRS, penetapan Supersemar sebagai Ketetapan (TAP) MPRS dan sebagainya adalah contoh-contoh lain mengenai bagaimana Supersemar itu mempunyai dampak yang amat luas.

Tak kalah penting tentu saja adalah bahwa berkat Supersemar itu Jenderal Soeharto berhasil mempengaruhi MPRS untuk tidak hanya menjadikan surat perintah itu menjadi TAP MPRS, melainkan juga mencabut status Bung Karno sebagai Presiden Seumur Hidup. Tidak hanya itu, MPRS yang sudah diatur oleh Soeharto ini nanti akhirnya akan berani menolak pidato pertanggung jawaban Presiden Sukarno (pidato *Nawaksara*) berikut perbaikannya, dan akhirnya memberhentikan Sukarno sebagai Presiden Indonesia. Dan sejak itu Indonesia dipimpin oleh Jenderal Soeharto bersama Orde Baru dengan segala implikasinya.

Mengadakan Dialog

Melihat bagaimana sejumlah faktor tahap demi tahap melatarbelakangi munculnya Supersemar, sekaligus bagaimana Supersemar tahap demi tahap menyingkirkan kekuasaan dan pengaruh Bung Karno sebagai Presiden RI, dapat dikatakan bahwa Supersemar merupakan bagian dari pelengseran kekuasaan (dengan kata lain “kudeta”) yang bergerak secara bertahap terhadap Presiden Sukarno. Y. Pohan (1988) menyebut periode 1 Oktober 1965 sampai 11 Maret 1966 sebagai *a creeping coup* alias kudeta merangkak. Kudeta merangkak itu diawali dengan percobaan operasi militer Gerakan Tiga Puluh September pada tanggal 1 Oktober 1966, dan diakhiri dengan pemberian Surat Perintah 11 Maret (1966) yang dikenal sebagai Supersemar. Salah satu dokumen dari Amerika yang akan kita baca nanti menyebut Supersemar ini sebagai suatu “kudeta yang khas Indonesia.”

Apa pun bentuknya, yang penting bagi kita bukanlah masalah apakah kudeta itu merangkak, berjalan atau berlari, melainkan bahwa di negeri ini telah pernah terjadi peralihan kekuasaan yang keabsahannya bisa dipertanyakan karena tidak melibatkan rakyat sebagaimana misalnya dalam bentuk Pemilu. Wakil-wakil rakyat yang duduk di MPRS juga tidak semuanya duduk di sana karena dipilih oleh rakyat melalui Pemilu.

Sebagaimana kita semua tahu, apa yang sudah terjadi memang sudah terjadi, dan kita tak dapat mengubahnya. Namun demikian, dalam spirit untuk belajar sejarah kita ingin terus mengadakan “dialog” dengan masa lalu itu agar dapat terus-menerus belajar darinya.

Melihat Pasang-Surut

Sebagaimana dikatakan di depan, apa yang akan dijadikan objek (atau lebih tepat dikatakan “*partner dialog*”?) dari studi sejarah kita melalui buku ini adalah dokumen-dokumen Amerika Serikat. Meskipun demikian, dengan membaca buku ini kita tidak hanya akan tahu mengenai seluk-beluk kebijakan AS terhadap Indonesia, melainkan juga dinamika politik dalam negeri Indonesia sendiri, beserta sepak terjang para pemain politik yang ada di dalamnya. Akan bisa kita ketahui misalnya bagaimana sebenarnya sikap tentara terhadap demonstrasi mahasiswa, posisi politis yang diambil oleh Adam Malik, hingga seberapa sebenarnya besarnya utang luar negeri Indonesia saat itu dan bagaimana upaya pembayarannya.

Buku ini bukan terutama mau menjawab pertanyaan-pertanyaan di seputar *naskah* Supersemar, melainkan ingin mengeksplorasi berbagai permasalahan yang timbul sebelum dan setelah penandatanganan naskah tersebut. Yang kita jadikan *partner* adalah dokumen-dokumen Amerika Serikat karena sejauh ini dokumen-dokumen itulah yang dimiliki penulis.

Di tempat asalnya, dokumen-dokumen itu merupakan dokumen-dokumen yang sejauh ini sudah bisa diakses dan terbuka untuk publik, setidaknya untuk para peneliti di bidang yang bersangkutan. Dengan membaca dokumen-dokumen itu, diharapkan Anda akan dapat belajar mengenai dinamika yang terjadi di dalam negeri Indonesia seputar peristiwa bersejarah yang mengubah arah dan haluan politik Indonesia itu. Demikian pula, kita akan mengikuti berbagai reaksi Amerika terhadap apa yang berlangsung di Indonesia. Akan tampak misalnya, pemerintah Amerika Serikat begitu antusias untuk menyingkirkan Bung Karno, namun pada saat yang sama unsur-unsur anti-Komunis di Indonesia sendiri, baik dari kalangan sipil maupun militer, juga tak kurang antusiasnya dalam upaya memotong kuasa dan pengaruh Sang Proklamator.

Melalui dokumen-dokumen itu kita akan dapat sekilas melihat pasang surut peranan berbagai elemen yang ikut bermain dalam bermacam peristiwa di sekitar munculnya Supersemar itu. Elemen-elemen itu amat beragam. Dari pihak Amerika elemen-elemen itu antara lain: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, CIA, Presiden Lyndon B. Johnson, National Security

Agency, dan sebagainya. Sedang dari pihak Indonesia elemen-elemen itu misalnya: Presiden Sukarno, Jenderal Soeharto, Adam Malik, Dr. Soebandrio, Angkatan Darat, Mahasiswa, Partai-Partai Politik, dan lain-lain.

Perpustakaan Kongres

Buku ini banyak menggunakan sumber-sumber primer. Artinya, sumber-sumber yang dipakai di sini adalah sumber-sumber asli yang berasal dari masa ketika peristiwa yang dibahas sedang berlangsung. Sebagaimana telah kita singgung, bentuknya adalah dokumen-dokumen resmi dari pemerintah AS, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan AS terhadap Indonesia pada delapan bulan pertama tahun 1966 (Januari–September). Dokumen-dokumen itu aslinya cukup “kacau”, dalam arti tidak runtut topik dan gagasan-gagasannya. Sejumlah naskah berasal dari teks telegram, sehingga banyak kata disingkat atau salah ketik, atau sebagiannya lagi tertutup warna hitam dalam proses pengirimannya. Maklum, dokumen-dokumen itu semula memang ditulis dan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan sesaat waktu itu, serta seturut gelombang naik turunnya dinamika politik yang saat itu berlangsung di Indonesia dari hari ke hari. Oleh para petugas arsip dan perpustakaan sudah coba diatur dan disistematisasi, namun tetap saja tidak bisa seruntut sistematisasi sebuah buku. Hal itu terjadi juga mengingat bahwa dokumen-dokumen yang ada di sini berasal dari berbagai instansi yang berbeda, meskipun semua terkait dengan kebijakan luar negeri AS. Ada yang berasal dari Kedutaan Besar AS di Indonesia di Jakarta, ada yang berasal dari Departemen Luar Negeri Amerika di Washington, ada yang berasal dari CIA (Central Intelligence Agency), atau dari Gedung Putih, atau dari kantor National Security Agency, ada pula yang berasal dari sejumlah pejabat pemerintah di Indonesia. Berhubung asalnya berbeda-beda, maka biasanya isi, gaya bahasa, dan tekanan yang diberikan oleh dokumen-dokumen itu juga berbeda-beda, sesuai dengan instansi asal masing-masing.

Terjemahan atas dokumen-dokumen itu dilakukan sedapat mungkin apa adanya, tidak diolah, meskipun subjektivitas penerjemah pasti turut berpengaruh. Perlu dicatat di sini bahwa dalam menerjemahkan suatu

dokumen penulis belum tentu setuju dengan apa yang dikatakan dalam dokumen-dokumen tersebut. Penulis sadar, entah kita setuju atau tidak, dokumen-dokumen itu telah menjadi bagian dari masa lalu bangsa ini dan oleh karena itu perlu diterjemahkan dan dipelajari. Diharapkan, dokumen-dokumen yang ada dalam buku ini dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut mengenai Indonesia selama periode yang dibahas.

Untuk mempermudah Anda dalam membaca dokumen-dokumen itu, penulis mengkategorikannya menurut bulan. Maksudnya supaya Anda bisa melihat dinamika politik di Indonesia waktu itu secara kronologis, serta bagaimana Amerika Serikat bereaksi terhadapnya. Pada setiap awal dokumen penulis berusaha memberikan keterangan singkat, dengan maksud untuk membantu melihat konteks dari dokumen itu serta beberapa butir gagasan yang kiranya perlu mendapat perhatian. Pengantar singkat pada setiap awal bulan juga ditulis dengan maksud serupa, tetapi mungkin dalam ruang lingkup yang sedikit lebih luas. Jika Anda tidak merasa terbantu, Anda dipersilakan untuk mengabaikan saja pengantar-pengantar itu dan langsung masuk ke dokumennya. Penulis ingin supaya Anda mendapat kesempatan seluas mungkin dalam membaca dan menafsirkan dokumen-dokumen yang tersedia.

Hampir semua dokumen itu aslinya berkode “Rahasia” atau “Konfidensial”, “Distribusi Terbatas” atau “Tidak untuk Distribusi di Luar Negeri”, dan sebagainya. Namun penulis berhasil mendapatkan akses ke dokumen-dokumen itu karena memang dokumen-dokumen itu telah “lolos sensor” melalui proses yang disebut proses “sanitasi” atau “deklasifikasi”. Artinya, isi dokumen-dokumen itu (kecuali yang di-blok dengan tinta hitam atau penutup putih) sudah boleh dibaca oleh publik.

Sedikit catatan teknis: dalam menerjemahkan dokumen kadang-kadang penulis menyisipkan beberapa tanda khusus guna mempermudah pembacaan dokumen tersebut. Untuk bagian-bagian yang belum di-deklasifikasi alias masih dirahasiakan, akan diberi keterangan, misalnya: [*satu kata dirahasiakan*]. Itu berarti pada dokumen aslinya bagian tersebut masih di-blok atau ditutup karena adanya suatu item yang masih perlu dirahasiakan. Tanda [] biasanya menunjuk pada tambahan item dari penulis

dalam proses penerjemahan naskah atau penyusunan buku ini. Maksudnya untuk memperjelas sesuatu, entah itu untuk melengkapi nama seseorang atau memperjelas sebuah daftar urutan tertentu. Penulis memilih menggunakan nama “Sukarno” dan bukan “Soekarno”, karena yang lebih dipilih oleh Bung Karno sendiri adalah penulisan nama “Sukarno”, sebagai salah satu tanda ditinggalkannya ejaan Belanda dan digantinya dengan ejaan Indonesia. Namun demikian dalam tanda tangan ia tetap menggunakan ejaan Belanda “Soekarno” karena sudah terlanjur bertahun-tahun menggunakan tanda tangan itu.⁴

Untuk sekadar informasi, penulis mendapatkan dokumen-dokumen itu selama penelitian penulis di AS pada periode 1998–1999 dan 2004–2005. Selama dua periode itu penulis melakukan penelitian di Perpustakaan Kongres dan di Arsip Nasional I (keduanya di Washington, D.C.), serta di Arsip Nasional II (di College Park, Maryland) maupun di sejumlah Perpustakaan Kepresidenan yang tersebar di berbagai kota di AS. Berkaitan dengan politik luar negeri AS terhadap Indonesia pada tahun 1966, penulis mendapatkan banyak bahan ¹⁰³ di Lyndon B. Johnson Library di Austin, Texas. Selain itu, bahan juga penulis dapatkan dari seri *Foreign Relations of the United States* yang berisi penulisan kembali dokumen-dokumen yang terkait dengan politik luar negeri Amerika Serikat. Sementara itu banyak sumber sekunder penulis dapatkan di Perpustakaan Pusat University of Wisconsin-Madison.

Lebih dari sekadar berkulat di sekitar teori konspirasi mengenai naskah Supersemar itu sendiri (yang nota bene masih simpang siur itu), buku ini bermaksud mengajak Anda untuk membuka kembali lembar-lembar sejarah bangsa ini di seputar peristiwa munculnya Supersemar, khususnya antara bulan Januari hingga September 1966. Pada periode itulah terjadi transisi kekuasaan terbesar yang terjadi di negeri ini sejak dicapainya kemerdekaan. Kita ingin membongkar dan menyimak kembali dinamika sosial, politik, ekonomi dan diplomatik yang terjadi pada saat itu. Kali ini pembongkaran dan penyimakan kembali itu berdasar pada dokumen-dokumen yang dimiliki sebuah negara adikuasa yang saat itu memiliki kepentingan besar di Indonesia, yakni Amerika Serikat. Oleh karena itu selain dokumen-dokumen

yang menjadi bagian pokok buku, akan disampaikan juga lampiran-lampiran berisi *copy* dari sejumlah dokumen sebagaimana tampak dalam keasliannya.

Banyak Terima Kasih

Perkenalkan sekarang penulis menyampaikan ucapan terima kasih, mengingat banyaknya pihak yang telah membantu sehingga buku Anda ini bisa terwujud dan sampai ke tangan Anda. Pertama-tama penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta, khususnya Program Pasca-Sarjana dan Jurusan Sejarah USD karena telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyiapkan penerbitan ulang buku ini di antara tugas-tugas resmi yang diberikan. Kepada rekan-rekan sesama pengurus dan staf PUSDEMA (Pusat Kajian Demokrasi dan Hak-hak Asasi Manusia) USD yakni Yoseph Yapi Taum, Tjipto Susana, A. Herujiyanto, Y.R. Subakti, Hendra Kurniawan, A. Sumarwan SJ, Yerry Wirawan, Dyah Merta, Keving Rinangga Adriyan, Clara Monica Susanto, dan Veronica Oyon, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam.

Kepada Almamater penulis, Marquette University di Milwaukee, Wisconsin (AS) dan seluruh Staff Fulbright/AMINEF di Jakarta maupun Washington penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih. Berkat bantuan dana dari Marquette University dan Fulbright penulis dapat melakukan penelitian, baik penelitian doktoral maupun *post-doctoral* di Amerika, sehingga bisa mendapatkan berbagai bahan mengenai sejarah Indonesia yang amat penting untuk menyusun buku Anda ini. Dalam mendapatkan bahan-bahan itu di Amerika penulis telah dibantu oleh Profesor Bradley Simpson yang telah berbagi begitu banyak dokumen kepada penulis serta oleh rekan-rekan staf di Center for Southeast Asian Studies, Jurusan Sejarah dan Perpustakaan Pusat University of Wisconsin-Madison. Penulis juga banyak dibantu oleh staf Perpustakaan Lyndon B. Johnson di Austin, Texas, maupun oleh staf Perpustakaan Kongres di Washington D.C. Kepada mereka semua penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya.

Tentu saja rasa terima kasih yang tak terhingga juga ingin penulis sampaikan kepada Julius Felicianus Tualaka serta S. Hendricus SW Jatmiko, Direktur Galangpress, beserta seluruh staf-nya, khususnya editor Antonius Sigit Suryanto dan perancang grafis Teguh Prastowo. Berkat desakan, dukungan dan kerja sama dengan mereka dan dengan teman-teman lain di Galangpress penulis termotivasi untuk menyiapkan penerbitan ulang dari buku yang sedang Anda tekuni ini. Kepada seluruh anggota jajaran Galangpress penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih.

Memberikan Kritik

Melalui buku ini kita ingin melihat sejauh mana sebenarnya badan-badan yang terlibat dengan kebijakan terhadap Indonesia mengikuti, mencatat, melaporkan, dan sekaligus berusaha mempengaruhi apa yang sedang berlangsung di Indonesia saat itu. Akan tetapi lebih dari itu semua, sekaligus sambil mengingat kembali apa yang dikatakan oleh E.H. Carr di depan, kita ingin membaca dokumen-dokumen itu karena kita ingin melakukan “dialog terus-menerus” dengan masa lalu kita. Dalam dialog itu diharapkan kita akan dapat lebih memahami masa lalu kita, yang selanjutnya akan memantapkan langkah kita di masa kini dan yang akan datang.

Akhir kata, mengingat keterbatasan penulis dalam memahami peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam dokumen-dokumen berikut, tentu ada banyak kekurangan dalam buku ini, baik menyangkut penggunaan istilah, waktu terjadinya peristiwa, maupun urutan gagasan. Jika itu terjadi, penulis ingin dengan rendah hati memohon maaf. Sekaligus penulis sangat berharap bahwa Anda berkenan memberikan kritik, saran, komentar, maupun koreksi demi lebih baiknya buku kita ini. Atas kebaikan hati Anda, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Selamat membaca. ***

Catatan akhir:

- 1 Edward Hallett Carr, *What is History?: The George Macaulay Trevelyan Lectures Delivered in the University of Cambridge* (Penguin: 1990). Dibahas dalam Asvi Warman Adam, *Soeharto Sisi Gelap 67 Tahun Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2004), 113.
- 2 *30 Tahun Indonesia Merdeka*, Jilid III, Setneg RI, 1985, hlm. 91.
- 3 Lihat A. Pambudi, *Supersemar Palsu: Kesaksian Tiga Jenderal* (Yogyakarta: Media Pressiondo, 2006), 68–82.
- 4 Dalam otobiografinya, Bung Karno mengatakan, “*In School my signature had to be spelled Soekarno—the Dutch way. In independent Indonesia I have ordered all ‘OE’ spelling back to ‘U’. The spelling of Soekarno is now Sukarno. However, it is difficult to change one’s signature after fifty years so when I myself sign my name, I still write S-O-E.*” Sukarno, *An Autobiography As Told to Cindy Adams*. (New York: The Bobbs-Merill Company, Inc., 1965), 26–27.

Daftar Isi

Supersemar dan Angin Segar: Sebuah Pengantar — vii
Cara Lain Memandang Supersemar: Catatan Pendahuluan — xiii

Bab 1

Januari 1966: Amerika, Mahasiswa, dan Tentara — 1

1. Pengantar — 1
2. Harapan Amerika terhadap Tentara — 2
3. RPKAD Kembali dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali — 9
4. Amerika Ragu-ragu Membantu Indonesia — 11
5. Soeharto dan Demonstrasi Mahasiswa di Bogor — 13
6. Rencana Demonstrasi Mahasiswa dan Sikap Militer — 16
7. Amerika Khawatirkan Putusnya Hubungan Indonesia-Amerika — 20

Bab 2

Februari 1966: CIA, Tentara, dan “Potret Ganjil” — 23

1. Pengantar — 23
2. Amerika Bersikap Ekstra Hati-hati — 25
3. Cindy Adams Ingin Membantu — 29
4. CIA dan “Potret Ganjil” Indonesia — 31
5. Bantuan Militer Rahasia untuk Indonesia? — 38
6. Indonesia Belum Butuh Bantuan — 41
7. Amerika dan Transisi yang Berkepanjangan — 43
8. A.S. Menolak Membantu Indonesia — 46
9. Soeharto Mengancam Amerika Serikat? — 47

Bab 3

Maret 1966: Amerika, Supersemar, dan Kudeta Khas Indonesia — 51

1. Pengantar — 51
2. Bantuan Militer untuk Indonesia — 54
3. Menyingkirkan Bung Karno dalam Dua Tahap — 55
4. Tegang Menjelang Supersemar — 59
5. Supersemar sebagai Kudeta Militer — 63
6. Supersemar sebagai Kudeta Sukses yang Harus Didukung — 66
7. Supersemar sebagai Pembawa “Pemerintahan Baru” — 67
8. Sikap Hati-hati dalam Membantu “Pemerintahan Baru” — 70
9. Menghindari Tuduhan “Udang di Balik Batu” — 73
10. Lima Puluh Ribu Ton Beras untuk “Pemerintah Baru” — 74
11. “Pemerintah Baru” Ingin Mempererat Hubungan — 76

Bab 4

April 1966: Amerika Serikat dan Sikap Hati-hati — 79

1. Pengantar — 79
2. Senang Namun Hati-hati — 80
3. Inggris Dianjurkan Tidak Membantu Dulu — 82

Bab 5

Mei 1966: Soeharto Tak Mau Sebut Nama Bung Karno — 87

1. Pengantar — 87
2. Membengkaknya Utang Indonesia — 88
3. Soeharto Tak Lagi Sebut Nama Bung Karno — 92

Bab 6

Juni 1966: Adam Malik Minta Bantuan AS — 99

1. Pengantar — 99
2. Adam Malik Meminta Bantuan AS — 100
3. Sultan Hamengku Buwono IX Mengharapkan Hubungan Baik dengan AS — 101
4. Rencana AS Membantu Indonesia Pasca-Bung Karno — 102
5. CIA tentang Kelompok-kelompok Pemuda di Indonesia — 109

Bab 7

Juli 1966: Supersemar dan Upaya De-Sukarnoisasi — 119

1. Pengantar — 119
2. Perjuangan Panjang De-Sukarnoisasi — 120
3. Supersemar, Tekanan Militer, dan TAP MPRS No. XXV/1966 — 123
4. Kabinet Baru Makin Meninggalkan Bung Karno — 136
5. Kabinet Baru Sebagai Kekalahan Bung Karno — 138
6. Wayang dan Realitas Politik di Indonesia — 139
7. Kabinet Baru, Kemenangan Bagi Soeharto — 143

Bab 8

Agustus 1966: Supersemar dan Berakhirnya Konfrontasi — 151

1. Pengantar — 151
2. Mencegah Bangkitnya Kembali Sukarnoisme — 152
3. Pemerintahan Baru dan Berakhirnya Konfrontasi — 157

Bab 9

September 1966: Menghangatnya Hubungan Indonesia-Amerika Serikat — 163

1. Pengantar — 163
2. Kongres AS dan Rencana Pemberian Bantuan untuk Indonesia — 164
3. Soeharto dan Ancaman Terselubung terhadap Bung Karno — 166
4. Persiapan Pertemuan Presiden Johnson-Adam Malik — 168
5. Pertemuan Presiden Johnson dan Adam Malik — 169
6. Pertemuan Wapres Hubert Humphrey dengan Menlu Adam Malik — 172

Bab 10

Penutup — 177

Daftar Pustaka — 181

Indeks — 187

Tentang Penulis — 191

Lampiran-lampiran — 193



78

Anti Amerika! Demonstrasi di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 1965. (Sumber: Deppen RI)

Januari 1966: Amerika, Mahasiswa, dan Tentara

1. Pengantar

BULAN JANUARI 1966 adalah bulan yang penuh ketegangan. Puncak rangkaian pembunuhan massal di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali baru saja usai, namun pengejaran dan penangkapan terhadap mereka yang dianggap terkait dengan PKI terus berlanjut. Di banyak tempat, tindakan-tindakan itu berubah menjadi praktik-praktik kekerasan yang acak dan lepas kontrol. Sebagaimana besar personil RPKAD yang selama ini ditugaskan di ketiga provinsi itu sudah mulai berdatangan kembali ke Jakarta. Tampaknya waktu itu beredar rumor bahwa kembalinya tentara itu berkaitan dengan antisipasi bahwa pada bulan Januari akan terjadi kerusuhan besar di Jakarta. Beredar pula rumor bahwa Bung Karno akan bepergian ke luar negeri dalam jangka waktu yang tak ditentukan, sehingga timbul dugaan bahwa akan terjadi pergantian kekuasaan.

Sementara itu di Jakarta dan Bogor demonstrasi mahasiswa berlangsung dengan semakin gencar. Pada tanggal 15 Januari, misalnya, terjadi demonstrasi besar-besaran di sekitar Istana Bogor, memprotes susunan

Kabinet Dwikora yang menurut mahasiswa tidak mencerminkan keinginan masyarakat. Karena meningkatnya ketegangan antara para demonstran dan pengawal istana, nyaris terjadi bentrok fisik antara kedua pihak. Menariknya, di tengah situasi nyaris bentrok itu tiba-tiba muncul Soeharto yang tampil untuk menenangkan situasi. Ia muncul selama dua kali. Tak ada penjelasan mengenai apa posisi dia di situ, atau apa sebenarnya kaitan antara dia dengan para demonstran.

Melihat perkembangan situasi yang ada di Indonesia, Amerika tampak gembira. Kegembiraan itu terutama berkaitan dengan dihabisinya kekuatan PKI baik di tingkat elite partai maupun di daerah-daerah. Washington sadar bahwa perihal keterlibatan PKI dalam operasi militer 1 Oktober 1965 masih belum jelas, namun tidak keberatan bahwa PKI dituduh sebagai otaknya dan bahwa tuduhan itu dijadikan alasan bagi ditumpasnya partai tersebut. Harapan Amerika, bukan hanya PKI yang akan hilang dari panggung politik Indonesia, melainkan kalau bisa juga Presiden Sukarno karena dianggap terlalu kiri.

Pada saat yang sama Amerika berusaha sebisa mungkin mengambil jarak untuk tidak ikut campur tangan dalam dinamika politik Indonesia. Bahkan desakan Ibnu Sutowo supaya Amerika mengirim beras untuk Indonesia ditolak secara halus oleh pemerintah AS. Alasannya, AS masih ingin menunggu kepastian situasi.

2. Harapan Amerika terhadap Militer

Dalam dokumen di bawah, yang dikeluarkan oleh CIA pada tanggal 3 Januari 1966, kelihatan sekali bahwa pihak Amerika sangat puas dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia setelah Peristiwa 1 Oktober 1965, yang oleh sejumlah kalangan disebut sebagai “kudeta” itu. Dalam peristiwa tersebut ada enam Jenderal tertinggi Angkatan Darat terbunuh, dan selama beberapa bulan kemudian disusul dengan terbunuhnya setengah juta rakyat sipil Indonesia yang lain. Pada satu sisi Amerika mengakui bahwa “fakta di balik kudeta yang merenggut nyawa enam Jenderal tertinggi AD itu belum sepenuhnya diketahui.” Pada sisi lain, Amerika tampak sangat senang dengan makin naiknya posisi militer serta makin tersingkirnya pemerintahan sipil

di bawah Presiden Sukarno. Dalam kaitan itu, tampaknya Amerika sempat turut berspekulasi bahwa yang akan menggantikan Sukarno adalah Nasution.

PERUBAHAN POLITIK DI INDONESIA¹ (Memorandum Intelijen, Central Intelligence Agency)

Ringkasan

1. Sekarang menjadi jelas bahwa percobaan Kudeta 1 Oktober yang gagal itu membawa Indonesia kepada sebuah titik pembalikan sejarah. Era dominasi Sukarno sudah berakhir. Semula kekuatan Sukarno didasarkan, *pertama*, pada kepribadiannya dan kehormatannya yang hebat sebagai perwujudan nasionalisme Indonesia. *Kedua*, pada kemampuannya mempertentangkan unsur-unsur kekuatan pokok Indonesia satu sama lain pada tahun-tahun belakangan ini, terutama Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Angkatan Darat (AD). Namun dalam tiga bulan terakhir ini kehormatannya benar-benar terkikis. Dia bukan lagi Bapak dan tokoh sentral politik bagi Indonesia. Dia lebih terkesan sebagai seorang tua yang cerewet. Yang lebih penting, perimbangan politik telah berubah secara signifikan: AD benar-benar telah menghancurkan PKI. Namun kekacauan politik ini belum sedikit pun memecahkan masalah-masalah pokok Indonesia. Bahkan kemampuan AD untuk mengatasi masalah-masalah itu pun tidak dapat dinilai terlalu tinggi, terutama jika dilihat dari kinerja mereka selama ini.

Pendahuluan

2. Presiden Sukarno telah menjadi tokoh sentral Indonesia selama 20 tahun setelah Proklamasi kemerdekaan Indonesia dari Belanda pada tahun 1945. Ketika pandangan politiknya bergeser, Sukarno membawa seluruh struktur negara ini bersamanya. Seiring dengan pergeserannya yang konsisten ke arah kiri, dia mendukung perkembangan PKI. PKI mengidentikkan dirinya dengan Sukarno dan memanfaatkan pengakuan dan dukungan dari Sukarno. Dari situ PKI berkembang dari sebuah partai kecil yang tidak dihitungkan menjadi organisasi massa yang paling kuat di Indonesia. Pada tahun 1965 PKI mengklaim memiliki tiga juta orang anggota dan mendapat dukungan dari lebih dari lima belas juta orang yang tersebar dalam organisasi-organisasi front yang berafiliasi dengannya. Satu-satunya kelompok yang memiliki kemampuan dan kecenderungan untuk menghentikan kelompok komunis adalah AD. Para pimpinan AD, yang secara pribadi anti-komunis namun juga setia kepada Sukarno, dengan ragu mengikuti pergerakan Sukarno ke arah kiri. Selama bertahun-tahun harapan AD untuk sebuah perubahan arah politik Indonesia tertumpu pada adanya

kemungkinan PKI menentang Sukarno atau pemerintah, sehingga AD akan memiliki alasan untuk memukul balik PKI.

3. Sejak September 1965 pertumbuhan kekuatan komunis semakin kentara berkat dukungan Sukarno di belakangnya. Atmosfer politik di Indonesia benar-benar terasa seperti sebuah totalitarianisme komunis. Elemen masyarakat moderat lumpuh dan terpecah-pecah. Para tokoh non-komunis oportunis, misalnya Menteri Luar Negeri Soebandrio, berusaha mendekati kubu komunis. Sementara itu para pemimpin AD berpura-pura sejalan dengan kelompok nasionalis ekstrim pendukung Sukarno dan kelompok pro-komunis, namun pada saat yang sama melindungi diri terhadap usaha Presiden dan PKI untuk meningkatkan pengaruh komunis dalam tubuh AD. Meskipun demikian, sepertinya AD akan kalah.

Percobaan Kudeta

4. Namun, situasi ini hampir sepenuhnya berbalik berkat adanya reaksi 47 at dari AD terhadap usaha Kudeta 1 Oktober tersebut. Kudeta yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menamakan diri “Gerakan 30 September” itu melibatkan elemen-elemen komunis dan kemungkinan didalangi oleh PKI sendiri. Fakta di balik kudeta yang merenggut nyawa enam Jenderal tinggi AD itu belum sepenuhnya diketahui, tapi AD telah mengeluarkan pernyataan bahwa kudeta itu adalah usaha komunis untuk menggulingkan pemerintahan, dan berdasarkan tuduhan ini mereka menyerang para pemimpin dan anggota PKI.

5. Para pimpinan AD yakin bahwa Sukarno juga terlibat dalam kudeta itu, sehingga kesetiaan mereka padanya justru berubah menjadi ketidakpercayaan. Meskipun pengaruh politik mereka sedang naik, AD masih menahan diri untuk tidak mengungkapkan keterlibatan Sukarno dalam Gerakan 30 September dan tidak juga berusaha menggulingkannya. Sukarno sendiri dengan setengah hati menyetujui serangan terhadap elemen-elemen yang terlibat dalam Kudeta, tetapi sekaligus menyangkal tuduhan AD bahwa ia melindungi PKI.

Perluasan Peranan AD

6. Militer, khususnya AD, jelas-jelas telah tampil sebagai kekuatan yang paling siap di Indonesia. Entah para pemimpin AD yang masih hidup sadar atau tidak, Kudeta berikut reaksi balik atasnya telah menempatkan militer pada posisi dominan. Penolakan Sukarno untuk bekerja sama sepenuhnya dengan AD dan kritik-kritiknya yang terus terlontar (tapi tak banyak dampaknya) memaksa AD untuk memperluas kewaspadaannya dalam melindungi diri dari kemungkinan serangan balasan. Kompromi gaya Jawa masih mungkin terjadi antara Sukarno dengan militer, namun semakin hari semakin kecil kemungkinan itu. Tampaknya kian jelas bahwa dengan semakin besar kekuasaan politiknya, militer akan semakin merasa berkurang

kepentingannya untuk berkompromi dengan Sukarno. Militer juga tidak akan memberikan kekuasaan yang telah diperoleh itu kepada partai-partai tradisional. Militer telah menggunakan elemen-elemen anti-komunis untuk mempercepat proses dalam mencapai tujuan-tujuannya, namun juga tidak ingin bahwa elemen-elemen itu merasa diri sejajar dengan militer. Seperti Sukarno sendiri, selama bertahun-tahun AD menunjukkan ketidakpercayaan dan ketidaksukaan yang mendalam terhadap politikus-politikus tradisional yang cenderung suka bertengkar dan tidak begitu jelas manfaatnya.

7. Khususnya bulan lalu AD sudah mulai menampakkan peran yang lebih besar di pemerintahan. Menteri Pertahanan Nasution dan Kepala Satuan AD Soeharto secara resmi berpidato tentang beberapa hal yang justru tidak begitu berkaitan dengan urusan militer dan keamanan. Namun, setelah pada awalnya sempat ragu-ragu, AD akhirnya mendesak adanya reorganisasi pada tubuh Komando Operasi Tertinggi Indonesia (KOTI). Sekarang ini KOTI bertanggung jawab atas hampir semua kehidupan politik di Indonesia dan tampaknya akan tumbuh menjadi semacam “Supra Kabinet”. AD mendominasi organisasi ini sehingga mempercepat pengesahannya. Militer juga melakukan kontrol ketat atas semua media massa di Indonesia.

8. Angkatan-angkatan lain dalam Angkatan Bersenjata juga telah tunduk pada AD. Sejak semula Angkatan Laut telah mendukung sepenuhnya prakarsa AD. Meskipun semula Angkatan Udara—khususnya Komandan terdahulunya yakni [Omar] Dani—dianggap terlibat dalam pemberontakan, sekarang ini AU tampak sibuk membersihkan jajarannya dari unsur-unsur PKI. Komandan Angkatan Udara yang baru, Muljano Herlambang, [*beberapa kata dirahasiakan*] sekarang tampak bekerja sama secara baik dengan Jenderal Nasution dan Soeharto, dan juga telah menyerukan seruan anti-PKI dalam minggu-minggu terakhir ini. Dalam situasi demikian, makin kecil kesempatan bagi Sukarno untuk menjalankan “taktik adu domba”—nya—sebuah taktik yang sudah sering dipakainya pada masa lalu untuk menjaga agar militer tetap tunduk pada keinginannya.

PKI dan Komunisme

9. Sebenarnya bahaya bahwa PKI akan mengambil alih Indonesia telah diantisipasi, mungkin sejak bertahun-tahun ⁸ lalu. Namun sekarang ini PKI adalah sebuah kekuatan yang lemah. Hampir semua anggota Politbiro PKI sudah ditangkap. Banyak dari mereka telah dibunuh, termasuk tiga pemimpin tertinggi PKI, yakni Aidit, Lukman, dan Nyoto. Jaringan partai tersebut telah dihancurkan, sehingga cabang-cabang partai terpaksa berusaha bertahan tanpa arahan dari pusat. Organisasi massa PKI telah dilumpuhkan dan dihentikan kegiatannya.

10. Meskipun secara resmi PKI belum dilarang, namun kiranya tindakan pelarangan itu nanti hanya akan menjadi semacam formalitas

saja. Sebagian komandan AD di provinsi-provinsi di Indonesia sudah berinisiatif untuk melarang PKI. Meskipun untuk sementara waktu organisasi PKI hampir tanpa pemimpin, tapi masih ada kemungkinan bahwa mereka akan melakukan sabotase-sabotase terbatas untuk mempertahankan diri. Akan tetapi, AD tidak perlu lagi khawatir akan perlawanan serentak PKI. Serangan mereka atas PKI telah memporak-porandakan kubu PKI, dan sepertinya serangan itu masih akan terus berlanjut. Sementara itu pembunuhan atas anggota dan simpatisan PKI di Sumatra Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali masih terus berlangsung.

11. Namun demikian, pemikiran Marxis dan khususnya komunis masih tetap ada di Indonesia. Sepertinya cukup sulit bagi sebagian rakyat Indonesia untuk beralih dari jargon dan pandangan yang terlanjur mereka miliki sejak beberapa tahun belakangan ini. Meskipun berkali-kali Sukarno menyatakan bahwa “Indonesia tidak akan ada tanpa komunisme”, AD tetap yakin bahwa hal itu tidak akan memicu berdirinya partai baru yang akan menggantikan PKI. Penting bahwa militer tetap berada pada posisi demikian.

12. Tampaknya PKI tidak lagi mempunyai masa depan kecuali sebagai gerakan bawah tanah revolusioner, seperti gerakan-gerakan serupa yang mendapat dukungan dari Beijing. Tapi gerakan bawah tanah yang melawan rezim yang sedang berkuasa, meskipun hanya karena alasan berseberangan prinsip, selalu akan mendapat tekanan luar biasa dari pemerintah, sebagaimana yang terjadi di Yugoslavia. Dalam hal ini, kasus Mesir dan Syria dapat menjadi contoh yang menarik. Oleh karena itu, kiranya permusuhan antara sisa-sisa PKI dengan pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh AD tidak akan terelakkan.

Status Sukarno Terkini

13. Sejalan dengan meningkatnya kekuasaan AD, kekuasaan Sukarno menjadi semakin kecil. Meskipun pernah menjadi orang yang kekuasaannya tak tertandingi di Indonesia, sekarang ini Sukarno semakin tersingkirkan. Nasihat-nasihatnya diabaikan; pernyataan-pernyataan yang ia keluarkan tampaknya tidak memberikan pengaruh apa pun pada apa yang terjadi belakangan ini. Di mana-mana pidato-pidatonya dipelintir dan kadang-kadang diubah-ubah melalui pers yang dikontrol oleh AD. Radio Indonesia tidak diizinkan untuk menyiarkan pidato Sukarno, bahkan pidato yang singkat sekalipun. Berdasarkan laporan Kedutaan Besar Amerika, pidato-pidato Sukarno tidak lagi berpengaruh pada pendengarnya. Sukarno sering terdengar memekakkan telinga dan cenderung rewel, dan ia semakin kelihatan tersingkir dari kehidupan politik. Ia tampaknya gagal dalam melindungi pendukung-pendukung politiknya.

14. Sukarno tentu saja masih tetap berusaha menjaga unsur “KOM” dalam NASAKOM—kependekan dari Nasionalisme, Agama, dan

Komunisme yang menurutnya merupakan pilar-pilar revolusi Indonesia. Akan tetapi tampaknya kecil kemungkinan bahwa ia akan berhasil menyelamatkan PKI yang sekarang ini, maupun menghidupkan kembali suatu partai dengan nama lain dalam waktu dekat. Sukarno takut bahwa dengan kekalahan PKI, barisan kiri revolusinya akan mengendur atau mundur. Akan tetapi hancurnya PKI juga berarti berakhirnya sebuah partai yang paling disiplin, dinamis, dan terorganisir dengan baik di Indonesia, dan hal ini juga menambah beban pikiran Sukarno. Sukarno yang tidak berafiliasi ke partai politik apa pun kini tidak lagi mempunyai partai massa yang bisa mendukung ide-ide dan teori-teorinya, dan tidak ada pula kekuatan politik yang memadai baginya untuk mengimbangi kekuatan AD.

15. Semua itu tidak hanya mengurangi pengaruh politik Sukarno, tapi sepertinya juga telah mempengaruhi kerangka pikirnya. Penampilan-penampilannya yang sering kacau sepertinya menunjukkan bahwa ia sudah mulai kehilangan kepercayaan diri. Secara realistis posisi Sukarno hanya tinggal sebagai kepala negara simbolis saja. Jenderal Soeharto yang oleh Sukarno sendiri disebut sebagai “penjaga ketertiban dan keamanan Indonesia” jelas telah naik statusnya melebihi Sang Presiden dan sering kali ia berhasil meloloskan kepentingan-kepentingan AD dalam banyak hal. Satu-satunya tindakan penting Sukarno dalam beberapa pekan terakhir ini adalah mengubah nilai tukar mata uang Indonesia—sebuah tindakan yang diambil tanpa persetujuan AD. Namun demikian sepertinya tindakan itu hanya kecil saja pengaruhnya pada sektor ekonomi dan tidak akan menolong posisi Presiden secara politis.

Masa Depan Sukarno

16. Mungkin saja Sukarno akan mampu menyesuaikan diri dengan keadaan politik yang kini sedang berubah untuk kemudian bangkit lagi, namun untuk sementara ini ia telah kehilangan sentuhan politiknya. Lebih dari itu, sebagai indikasi atas semakin terpuruknya karier politik Sukarno, para politikus oportunis tampaknya mulai berpikir bahwa dekat dengan Sukarno semakin tak ada gunanya.

17. Banyak pendukung politik Sukarno juga semakin kehilangan peran politik mereka. Mungkin ini hanya masalah waktu saja, sampai suatu saat nanti Soebandrio dipecat dari jabatannya. Perombakan pemerintahan seperti yang diisukan akan menyingkirkan tokoh-tokoh lain yang sudah lama dekat dengan Sukarno. Menteri Penerangan Roeslan Abdul Gani mendapat posisi utama di KOTI, tapi—seperti layaknya seorang oportunis—ia kini kelihatan mau bekerja sama dengan AD. Wakil Perdana Menteri Ketiga Chaerul Saleh masih aktif, tapi dia juga kelihatan mulai khawatir dan mulai mendekatkan diri dengan AD, sehingga baru-baru ini ia membuat pernyataan yang cenderung mirip dengan pernyataan-pernyataan Nasution dan Soeharto.

18. Presiden Sukarno kemungkinan hanya akan punya sedikit waktu untuk membuat keajaiban politik yang sekian tahun telah menempatkannya di pusat segala sesuatu mengenai Indonesia. Kesehatannya semakin memburuk. Ada juga rumor yang semakin santer bahwa Sukarno akan sepenuhnya “disingkirkan dari panggung” setelah tahun baru. Banyak pimpinan senior AD percaya bahwa Sukarno terlibat dalam percobaan Kudeta itu. Beberapa orang—termasuk Soeharto—tinggal punya sedikit rasa hormat kepada Presiden Sukarno dan mungkin akan senang melihatnya disingkirkan dari tampuk pimpinan. Akan tetapi, tampaknya penurunan status kepresidenan menjadi kantor seremonial akan berlangsung perlahan. Perubahan macam itu akan terjadi lebih karena dorongan keadaan daripada karena adanya perombakan pemerintahan secara resmi. Kebanyakan pimpinan AD merasa bahwa Sukarno masih berguna bagi mereka sebagai simbol kesatuan Indonesia dan sebagai legitimasi bagi orde politik yang baru. Lagi pula, suatu gerakan langsung melawan Sukarno akan dapat menyulut aksi yang kemudian dapat memecah belah kekuatan AD. Hal itu mungkin terjadi mengingat bahwa beberapa pejabat senior masih setia kepada Presiden Sukarno.

Masalah-masalah dalam AD

19. Seiring dengan berjalannya waktu, tumbuh beberapa kelompok dalam AD yang memungkinkan terjadinya perpecahan. Meskipun tidak akan mempengaruhi posisi Nasution dan Soeharto secara serius, namun kelompok-kelompok itu mungkin saja menawarkan pada Sukarno kemungkinan untuk manuver baru. Angkatan Bersenjata sepertinya juga mulai berhadapan dengan banyaknya problem ekonomi dan masalah pemerintahan di Indonesia. Meskipun para pemimpin militer baru-baru ini telah didesak untuk memberikan perhatian lebih besar pada masalah-masalah ekonomi, namun tidak ada tanda-tanda bahwa mereka telah menyusun sebuah program yang terpadu untuk mengatasi masalah ekonomi maupun masalah-masalah mendesak yang lain. Pihak militer sedang mempertimbangkan untuk menunjuk Sultan Yogyakarta guna menangani masalah ekonomi melalui KOTI, namun tampaknya kecil kemungkinan bahwa para Jenderal akan sungguh-sungguh mempercayai orang dari kalangan sipil untuk membantu militer dalam menjalankan pemerintahan. Apalagi mengingat bahwa sekarang ini militer sedang berusaha menghancurkan PKI dan melakukan berbagai manuver melawan Sukarno. Meskipun sebenarnya militer sendiri sangat berharap untuk bisa memegang tampuk pemerintahan, namun agaknya mereka akan melakukannya melalui suatu pemerintahan yang seolah-olah dipimpin oleh kelompok sipil. Tidak ada tanda-tanda bahwa mereka berencana untuk mendirikan suatu pemerintahan diktaktor militer, meskipun Nasution telah disebut-sebut oleh beberapa tokoh Angkatan Bersenjata sebagai calon pengganti Sukarno.

20. Akan tetapi, mengingat makin meningkatnya desakan untuk mencari jalan keluar bagi masalah-masalah Indonesia—khususnya masalah ekonomi—Angkatan Bersenjata mungkin merasa bahwa pemerintahan sipil akan merupakan sesuatu yang terlalu “mewah”. Karena sekarang ini kekuasaan praktis ada di tangan militer, sangat mungkin bahwa mereka akan disalahkan jika jalan keluar bagi masalah-masalah Indonesia tidak kunjung ditemukan. Oleh karena itu, para pemimpin militer mungkin akan merasa perlu untuk mengambil tindakan langsung dalam mengatasi masalah-masalah yang ada. Dalam keadaan darurat seperti sekarang ini, Angkatan Bersenjata sudah cukup jauh terlibat dalam administrasi negara.

21. Berdasarkan pengalaman di masa lalu, militer tidak terlalu kompeten dalam menangani administrasi negara. Pada periode 1957–1960, ketika tentara mendapat tanggung jawab administratif yang besar, ternyata keadaan negara tidak menjadi lebih baik. Persediaan dan penyaluran bahan makanan kacau, sementara korupsi terjadi di hampir semua lapisan di AD. Mungkin saja para pemimpin AD sudah belajar dari petualangan yang gagal tersebut, namun tidak bisa dijamin bahwa mereka tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama.

3. RPKAD Kembali dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali

Dokumen berikut ditulis oleh Dubes AS untuk Indonesia Marshall Green tanggal 5 Januari 1966. Dalam dokumen yang ditujukan ke Departemen Luar Negeri di Washington ini ia antara lain melaporkan kembalinya pasukan RPKAD dari pelaksanaan tugas menumpas mereka yang dituduh sebagai anggota PKI, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Menurut Green, salah satu alasan kembalinya pasukan itu adalah untuk memperkuat posisi AD karena diduga akan ada suatu kerusuhan pada awal Januari. Saat itu katanya situasi politik di Jakarta tak menentu, antara lain ditandai dengan rumor mengenai rencana kepergian Bung Karno ke luar negeri untuk jangka waktu yang tidak jelas.

6 TELEGRAM DARI KEDUBES AMERIKA SERIKAT (JAKARTA) UNTUK DEPARTEMEN LUAR NEGERI (WASHINGTON)²

1. Situasi umum sampai jam 17.00 tanggal 5 Januari 1966

Situasai politik menjadi lebih tidak jelas daripada biasanya sebagai akibat dari meningkatnya manuver-manuver di belakang layar

dan ketidakpastian tentang rencana Sukarno pergi ke luar negeri. Kembalinya pasukan RPKAD (Resimen Para-Komando Angkatan Darat) dari daerah juga menimbulkan pertanyaan tentang arah perkembangan politik.

2. Rencana perjalanan Sukarno dan manuver politik

A. Berdasarkan berbagai laporan bahwa Sukarno sedang merencanakan (atau pura-pura merencanakan) perjalanan ke luar negeri Soebandrio dan Leimena mengumumkan pernyataan publik pada tanggal 4 Januari bahwa Sukarno tidak merencanakan perjalanan ke luar negeri dan bahwa laporan-laporan mengenai rencana perjalanan itu adalah propaganda Nekolim [Neo-kolonialisme dan imperialisme]. Perjalanan itu masih mungkin tetapi tidak akan segera. Seorang Asisten Menteri mengatakan bahwa AD masih secara diam-diam menentang kepergian Sukarno. [*Satu kata dirahasiakan*] mengatakan “solusi politik” yang sudah lama dijanjikan. Ada kemungkinan-kemungkinan lain tentang mengapa laporan rencana perjalanan Sukarno tidak menentu. Misalnya Sukarno ragu-ragu, kesehatan Sukarno sedang tak menentu, Istana sengaja menyebarkan kebingungan, atau perbedaan pandangan mengenai siapa yang harus menggantinya selama dia pergi, dan lain-lain.

B. Rapat Kabinet yang ketiga sejak Kudeta diadakan pada tanggal 2 Januari. Asisten Menteri yang tersebut di atas juga mengatakan bahwa tak ada hal yang penting dalam pertemuan Kabinet itu, kecuali pernyataan Sukarno yang menyangkal tuduhan mengenai keterlibatannya dalam Gestapu sebagaimana terkait dengan laporan mengenai penahanan Aidit. Media juga melaporkan tentang Rapat Presidium pada tanggal 4 Januari di mana tiga Waperdam (Wakil Perdana Menteri) menghindari pertanyaan pers. Pertemuan-pertemuan itu serta ketidakjelasan mengenai rencana perjalanan Sukarno memberikan kesan tentang adanya manuver-manuver politik yang semakin intens di belakang layar. [*Beberapa kata dirahasiakan*] menunjukkan bahwa Sukarno telah memerintahkan untuk meningkatkan Konfrontasi dengan Malaysia dengan jalan mentransfer pasukan ke Kalimantan dan menunda taktik AD. Akibatnya beberapa hari terakhir ini timbul perang kata antara Nasution dan Sukarno.

3. Kembalinya pasukan Raiders Kostrad

RPKAD—yang adalah ¹² pasukan elite yang telah menjadi pelaksana penumpasan PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali—telah dikembalikan ke Jakarta pada tanggal 31 Desember 1965 kecuali sekelompok kecil pasukan di Bali yang baru akan kembali minggu depan. Alasan untuk mengembalikan pasukan itu adalah karena situasi keamanan sudah mulai normal. Menurut laporan yang belum dikonfirmasi yang berasal dari Kostrad, kembalinya RPKAD itu

berkaitan dengan kemungkinan adanya kerusuhan pada tanggal 1 Januari. Apa pun alasannya, kembalinya RPKAD memperkuat posisi AD di Ibu kota dan mungkin kemampuan AD untuk menekan Sukarno. Menurut laporan [*beberapa kata dirahasiakan*] terjadi ketegangan antara RPKAD yang baru kembali dengan Cakrabirawa (pasukan pengawal Presiden) sehingga timbul tawuran di jalanan.

4. Perkembangan media massa

Beberapa saat terakhir ini telah muncul sejumlah surat kabar ... yang dimaksudkan untuk mengembalikan momentum kampanye anti-PKI dan anti-Sukarno yang sudah dimulai sejak pertengahan Desember 1965. Dua dari surat kabar itu, *Djiwa Revolusi* dan edisi Jakarta dari *Jihad* milik Perti (yang selain terbit dalam edisi “nasional” juga terbit secara lokal) secara terbuka meminta Presiden Sukarno untuk menunjuk Wakil Presiden, memperingatkan dia bahwa “Indonesia tidak membutuhkan partai Marxis”, dan mengecam komposisi Kabinet yang ada sekarang ini. Jenderal Soekendro, yang baru kembali ke Indonesia dua minggu yang lalu, dikenal sebagai [*satu kata dirahasiakan*] surat kabar dan membuat sentimen anti-Sukarno kembali merebak. Sehubungan dengan itu, kekuatan-kekuatan pro-Sukarno juga menerbitkan sejumlah koran untuk membantu Menteri Penerangan Kabinet Dwikora dalam mengembalikan kharisma [*satu kata dirahasiakan*] yang kini semakin meredup. Salah satu koran itu, *Genta*, diketuai oleh Komandan Pasukan Gerak Cepat Angkatan Udara, yang sebagiannya telah melatih Pemuda Rakyat pada bulan September 1965. Tetapi *Genta* terkesan kurang profesional dan tidak mendapat dukungan dari Menteri Penerangan Ahmadi. Ahmadi sendiri telah mengambil sikap *low profile* sejak mendapat serangan dari kedua belah pihak. Koran-koran baru yang pro-AD mengikuti tradisi sensasional dari korannya Soekendro yakni *Api* yang kini sudah tidak terbit, dengan rubrik-rubrik seperti “Apalagi?... Apa yang akan terjadi?”, “Operasi militer sudah siap...”, kemudian “Angkatan Bersenjata telah siap...”. Semua itu berakibat semakin memanas dan tidak menentunya situasi politik di Jakarta.

Green

4. Amerika Ragu-ragu Membantu Indonesia

Tampaknya Ibnu Sutowo pernah mencoba mendekati orang-orang dari kalangan pemerintah Jepang agar membantu mendesak pemerintah Amerika supaya mengirim bantuan ke Indonesia. Alasan yang dipakai, kalau Indonesia tak dibantu ada kemungkinan komunisme akan bangkit lagi. Selain itu Ibnu juga sedikit mengancam dengan mengatakan bahwa kalau AS tidak mau

bantu, maka Indonesia akan berpaling ke Uni Soviet, musuh bebuyutan AS dalam Perang Dingin. Terhadap desakan itu kelihatannya pemerintah Amerika menolak secara halus. Alasan Amerika adalah bahwa Washington masih menunggu kepastian situasi ekonomi dan politik di Indonesia.

Aslinya dokumen ini adalah telegram dari Departemen Luar Negeri AS di Washington untuk Kedubes AS di Jakarta.

BANTUAN EKONOMI UNTUK INDONESIA

*Telegram dari Departemen Luar Negeri (Washington) untuk
Kedubes Amerika (Jakarta)³*

1. Michio Kawabe, rekan dekat mantan Perdana Menteri Jepang Kishi mengatur pertemuan makan siang melalui Harry Kern dengan maksud bicara mengenai bantuan untuk Indonesia. Sebelumnya Kawabe pernah mengusahakan acara ini melalui Charles Symington, tetapi kemudian memutuskan bahwa Kern akan lebih bisa punya akses dengan pemerintah Amerika.
2. Kawabe mengatakan bahwa Jenderal Ibnu Sutowo dalam kunjungannya ke Tokyo bulan Desember lalu telah mencoba menghubungi Kishi supaya membantu mengusahakan program bantuan dari Amerika untuk Indonesia melalui perantara dari Jepang. Ibnu mengatakan kepada Kishi bahwa suatu cara telah disiapkan dengan pemerintah Amerika, dan bahwa yang perlu dikerjakan tinggal soal pembayarannya saja. Ibnu mengatakan, tanpa bantuan tersebut ada bahaya bahwa PKI akan bangkit lagi di Indonesia, dan jika bantuan Amerika tidak datang Indonesia akan terpaksa berpaling ke Uni Soviet. Kawabe mengatakan bahwa menurut Kishi langkah ini merupakan kesempatan terakhir untuk membantu kekuatan-kekuatan konstruktif di Indonesia. Kawabe juga pernah datang ke Washington atas perintah Kishi untuk mengecek kebenaran tentang berita-berita mengenai Indonesia dan, jika berita-berita itu betul, perlu untuk mencari perantara dari Jepang guna mengusahakan bantuan Amerika untuk Indonesia. Kishi telah memberi tahu Perdana Menteri Sato (mungkin juga Menteri Keuangan Fukuda) tentang permintaan Ibnu Sutowo, tetapi pemerintah Jepang di bawah eselon itu belum pernah diberi tahu dan Kedubes Jepang di Washington juga belum tahu mengenai isi dari misi Kawabe.
3. Atas permintaan Kawabe kita memberi tanggapan berikut:
 - a. Sekarang ini Amerika belum memikirkan bantuan dalam jumlah besar kepada Indonesia entah langsung atau tak langsung;

- b. Posisi ini diambil berdasarkan pembacaan atas ketidakpastian yang melingkupi baik politik internal Indonesia sekarang ini maupun arah ke depan politik luar negeri dan dalam negeri Indonesia;
- c. Ketidakpastian itu terutama mencakup: kebijakan ekonomi dan keuangan; kelanjutan dari kemerosotan ekonomi sebagai akibat dari konfrontasi Malaysia; sikap terhadap perusahaan-perusahaan minyak Amerika yang sekarang merupakan sumber utama pendapatan luar negeri; dan arah umum hubungan Indonesia-Amerika.
- 4. Kawabe merasa puas dan mengatakan bahwa pemerintah Jepang juga punya problem yang sama berkaitan dengan masalah pertanyaan-pertanyaan di seputar bantuan untuk Indonesia.

5. Soeharto dan Demonstrasi Mahasiswa di Bogor

12

Pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 1966 terjadi demonstrasi besar-besaran di sekitar Istana Bogor. Waktu itu di Istana sedang berlangsung rapat Kabinet yang dipimpin oleh Presiden Sukarno. Sebagaimana dilaporkan oleh Dubes Green dalam dokumen tertanggal 17 Januari 1966 ini pihak Amerika tampak senang bahwa para mahasiswa berdemo dengan penuh semangat melawan pemerintahan Bung Karno. Mereka datang dari tempat-tempat lain, khususnya Jakarta dan Bandung. Dilaporkan, para mahasiswa bahkan berani melawan pasukan Cakrabirawa, hingga nyaris terjadi bentrok fisik. Di tengah itu semua, kata Green, tiba-tiba muncul Jenderal Soeharto untuk menenangkan situasi. Ia kemudian menghilang, tetapi lalu muncul kembali. Tidak disebutkan bagaimana Soeharto bisa tiba-tiba muncul, tapi juga tiba-tiba hilang.

Dikatakan bahwa dalam rapat itu Bung Karno sempat geram kepada mahasiswa yang berdemo. Ia sempat menunjukkan adanya pamflet yang menuduhnya terlibat dalam “Gestapu” dan ia menolak tuduhan itu. Adam Malik yang hadir dalam rapat itu menyatakan bahwa kemungkinan besar pamflet itu dibuat oleh orang-orangnya. Pada bagian akhir dokumen dikatakan adanya indikasi bahwa militer akan menarik dukungan kepada mahasiswa yang berdemonstrasi. Pertanyaannya, mengapa?

**TELEGRAM DARI KEDUBES AMERIKA
(JAKARTA) UNTUK DEPARTEMEN LUAR NEGERI
(WASHINGTON)⁴**

1. Demonstrasi mahasiswa di Bogor pada hari Sabtu, yang diadakan bersamaan dengan pidato Sukarno di depan rapat Kabinet, hampir menjadi sebuah titik balik karena nyaris terjadi bentrokan antara mahasiswa dengan pasukan keamanan Istana. Semangat dan disiplin mahasiswa tetap tinggi, dan mereka berencana melakukan demonstrasi lebih lanjut selama pekan ini, termasuk demonstrasi besar yang direncanakan untuk hari Selasa, jika diizinkan oleh AD. (Tujuan lebih lanjut dari para mahasiswa dan sikap AD dilaporkan dalam telegram terpisah).

2. Berdasar berbagai sumber di kalangan mahasiswa, berikut adalah kronologi dari apa yang terjadi pada tanggal 15 Januari di Bogor: sekitar 150–200 truk berisi mahasiswa datang dari Jakarta (jumlah persisnya berbeda-beda) dan turun di Bogor mulai Jumat petang dan bergabung dengan kelompok-kelompok mahasiswa dari Bandung maupun Bogor sendiri. Datang pula rombongan Pasukan Khusus dari Divisi Siliwangi (disebut Kujang) dan dari Resimen Mahasiswa Jakarta dan Bandung. (Resimen Mahasiswa adalah salah satu unit AD yang terdiri dari mahasiswa paruh-waktu). Empat kendaraan lapis baja, yang semua atau sebagiannya berasal dari Resimen Mahasiswa, berada di gerbang Istana. Ketika mereka dilarang masuk ke pelataran Istana salah satu dari kendaraan lapis baja itu ditabrakkan ke pintu gerbang, sementara tiga yang lain berjaga-jaga.

3. Pada titik ini pasukan pengawal Istana (Cakrabirawa) mulai melepaskan tembakan ke udara. Beberapa peluru jatuh ke tengah-tengah kerumunan massa. Meskipun sejumlah mahasiswa menyatakan terluka, namun tidak ada korban jiwa meskipun sumber lain mengatakan bahwa salah seorang pemimpin KAMI wajahnya kena popor senjata. Sebagai reaksi atas insiden penembakan ini seorang anggota Menwa dari Universitas Kristen di Jakarta melompat ke salah satu kendaraan lapis baja dan mengarahkan moncong senjata ke arah Cakrabirawa, sementara beberapa tentara Siliwangi juga mengarahkan senjata mereka ke Cakrabirawa. Tak lama kemudian insiden tembak-menembak hampir terjadi, namun bisa dihindari ketika seorang Kapten AD berteriak dan memerintahkan untuk tidak menembak. Jenderal Soeharto yang didampingi Admiral Martadinata dan Jenderal Polisi Sutjipto, dengan cepat muncul di tengah massa dan menenangkan para demonstran.

4. Selama berlangsungnya rapat Kabinet dan pidato Sukarno, Istana Bogor sepenuhnya dikepung oleh mahasiswa demonstran dan para Menteri dilarang melewati pintu gerbang sampai jam 16.00, kecuali delapan orang menteri yang dipandu oleh Adam Malik—berkat

popularitas pribadi Adam Malik. (Sebuah sumber melaporkan bahwa sejumlah Menteri yang lain pergi dengan naik helikopter). Akhirnya, Jenderal Soeharto muncul lagi, dan membujuk para mahasiswa untuk membubarkan diri. Dia mengumumkan bahwa PKI telah dilarang atau bahwa dia sendiri yang akan melarang PKI jika Presiden Sukarno tidak mau melakukannya (laporan-laporan berbeda dalam hal apa yang sebenarnya dia katakan). Soeharto meminta kesabaran berkaitan dengan soal penurunan harga.

11

5. Semangat dan disiplin para mahasiswa sangat tinggi, dan mereka semakin jelas mengarahkan demons¹¹si mereka ke arah Sukarno. Banyak sumber melaporkan bahwa tembok-tembok di Bogor dan khususnya rumahnya Hartini dicoret-coret dengan tulisan yang menyatakan bahwa Hartini (istri Sukarno) adalah “pelacur” atau “pelacur Gerwani” (Gerwani adalah *onderbouw* PKI). Sumber lain yang layak dipercaya mengatakan bahwa sebuah jalan di Djatinegara yang menuju rumah seorang istri simpanan terbaru Sukarno ditulis “Jangan terlalu sering mengunjungi istri simpananmu, Bung”.

6. Salah satu aspek dari pidato Sukarno yang tidak dilaporkan dalam telegram terdahulu mungkin penting. Pada akhir pidato Sukarno mengatakan: “Ini aku, Sukarno. Aku tidak bisa menjadi orang lain. Siapa yang ingin mengikuti aku, ikuti! Siapa yang menyukai aku, belalah aku. Aku melihat ada gejala-gejala upaya untuk menjatuhkan Sukarno. Aku tidak akan menyerah satu milimeter pun. Bentuklah barisanmu tapi jangan bertindak liar. Tunggu komandoku.” Banyak orang Indonesia menafsirkan kata-kata itu, yang disampaikan dengan nada-suara tertentu, sebagai perintah tersembunyi kepada PKI dan kekuatan-kekuatan pro-komunis lain untuk menyiapkan diri guna melakukan pertempuran habis-habisan. Kurang dari satu jam setelah selesainya pidato itu, di jalan-jalan di Jakarta muncul spanduk-spanduk yang menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap Bung Karno. Spanduk-spanduk itu kebanyakan dibuat oleh “Gema Sukarno”, yang ternyata merupakan singkatan dari Gerakan Mahasiswa Sukarno. Spanduk-spanduk itu sangat bertentangan dengan nada demonstrasi di Bogor, di mana para saksi mata mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda pro-Sukarno. Poster atau bahkan pekikan “Hidup Sukarno!” juga tak ada. Poster-poster pro-Sukarno yang muncul berasal dari BPI (sebuah badan intelejen yang diketuai Soebandrio), dengan menggunakan GMNI (mahasiswa PNI) yang berhaluan kiri.

7. Sejumlah sumber menerima informasi dari Adam Malik bahwa dalam rapat Kabinet terakhir, Sukar¹¹ tampak geram terhadap para mahasiswa tetapi tetap tampak sehat. Dalam pidatonya Sukarno sempat menyinggung pamflet yang menuduhnya sebagai pengkhianat bangsa karena dalam menyebut Gerakan 30 September ia menggunakan istilah “Gestok” dan bukan istilah “Gestapu”. Adam Malik juga mengatakan bahwa pada kesempatan itu Sukarno sempat mengeluarkan dokumen dari saku dan melambai-lambaikannya seakan-akan sebagai barang

bukti terhadap apa yang dikatakannya. Beberapa saat kemudian (tampaknya tak lama setelah pidato tersebut) Sukarno memerintahkan Soebandrio untuk menyelidiki asal-usul pamflet tersebut. Adam Malik tidak dapat melihat pamflet itu dari dekat tetapi yakin bahwa pamflet itu dibuat oleh orang-orang dari kubunya.

8. Komentar: Demonstrasi yang berlangsung pada hari Sabtu lalu merupakan salah satu demonstrasi yang paling penting dalam beberapa tahun terakhir ini. Kalau saja ada demonstrasi yang kehilangan kepala karena tertembak, atau ada yang meninggal atau terluka, ada kemungkinan besar Istana Presiden akan diserbu. Para mahasiswa tampak semakin percaya diri dan makin solid, serta semakin jauh meninggalkan sikap hati-hati yang dianjurkan oleh Nasution. Pihak Istana maupun para Menteri benar-benar gentar menyadari tekad para mahasiswa, sebagaimana tercermin dalam laporan yang mengatakan bahwa pada hari Minggu Istana dikelilingi oleh tumpukan karung pasir dan personil militer yang dilengkapi dengan senjata otomatis. Semangat para mahasiswa tercermin dengan jelas dalam pembicaraan dengan staf Kedutaan kita. Pada kesempatan itu mereka secara terbuka dan bangga menunjukkan kesamaan antara demonstrasi mahasiswa di Jakarta dengan demonstrasi mahasiswa Korea dalam menumbangkan Presiden Syngman Rhee, atau demonstrasi untuk menumbangkan Menderes di Turki. Salah seorang mantan aktivis mahasiswa Angkatan 1945 yang dulu pernah mendesak Sukarno untuk memproklamakan Kemerdekaan Indonesia menyamakan semangat mahasiswa sekarang ini dengan semangat 1945. Dia mengatakan: "Kami telah melakukan Revolusi. Mungkin mahasiswa-mahasiswa ini akan melakukan hal yang sama." Optimisme ini kemudian dimentahkan oleh sikap AD yang tampaknya mau menarik dukungannya terhadap demonstrasi mahasiswa.

6. Rencana Demonstrasi Mahasiswa dan Sikap Militer

Dokumen ini aslinya adalah telegram yang ditulis oleh Dubes Green di Jakarta untuk Departemen Luar Negeri di Washington. Tak puas dengan demonstrasi keras yang terjadi hari Sabtu tanggal 15 Januari 1966, begitu menurut dokumen ini, para mahasiswa bermaksud mengadakan demonstrasi lebih besar dan lebih lama di Jakarta guna menekan Bung Karno. Suasana tarik-ulur terjadi antara mahasiswa anti-komunis dan mahasiswa pro-komunis serta kubu tentara. Ketiganya tampak bersemboyan membela Bung Karno dan membela kepentingan rakyat, namun sebenarnya mereka memiliki agenda yang berbeda-beda.

Sementara itu terjadilah tawar-menawar antara kubu tentara dan kubu Bung Karno. Kubu tentara ingin supaya PKI secara resmi dibubarkan, namun kubu Bung Karno selalu mengulur waktu dengan menjanjikan akan diumumkannya suatu “solusi politik”. Kedubes AS di Jakarta tampaknya masih belum yakin ke mana situasi politik yang demikian itu nantinya akan mengarah.

6

**TELEGRAM DARI KEDUBES AMERIKA
(JAKARTA) UNTUK DEPARTEMEN LUAR NEGERI
(WASHINGTON)⁵**

1. Sebagai kelanjutan atas kerusuhan di Bogor hari Sabtu lalu, mahasiswa anti-komunis tetap berapi-api selama akhir pekan dan merencanakan untuk mengadakan demonstrasi lebih lanjut guna meningkatkan tekanan pada Sukarno. Sementara itu sikap militer terhadap demonstrasi mahasiswa semakin kuat, dan beredar pertanyaan apakah militer, demi alasan taktis, akan menarik dukungan dari gelombang demonstrasi mahasiswa.
2. Sumber-sumber dari kalangan mahasiswa selama akhir pekan mengindikasikan bahwa mereka merencanakan untuk melanjutkan demonstrasi selama seminggu ke depan.
 - A. Sasaran utama demonstrasi pada hari Senin adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN).
 - B. Demonstrasi itu akan dilanjutkan dengan demonstrasi yang lebih besar pada hari Selasa di Istana Negara. Menurut rencana, mahasiswa Jakarta akan berdemonstrasi pada Senin pagi. Sementara itu para mahasiswa dari Bogor akan mulai bergerak ke Jakarta Senin sore. Karena pagi ini ada keragu-raguan apakah para demonstran dari Bandung akan bisa mencapai Jakarta dalam waktu satu hari, maka demonstrasi itu akan ditunda sampai hari Rabu. Seorang sumber berita mengatakan bahwa tiga atau empat truk akan dilepaskan dalam puncak demonstrasi guna menyerbu Kedubes Cina (RRT). Sumber lain (Darmawan Moenaf) direncanakan akan ikut dalam penyerbuan itu tetapi tidak memberi keterangan detail mengenai tujuan penyerbuan maupun kerusakan yang akan ditimbulkan. Seorang sumber dari Masyumi melaporkan adanya rencana untuk melakukan serbuan atas instansi-instansi telekomunikasi pada hari Kamis.

3. Sikap militer terhadap rencana demonstrasi mahasiswa itu sekarang menjadi lebih jelas dibanding dengan minggu sebelumnya. Komandan militer Jakarta Amir Machmud menyatakan pada tanggal 16 Januari bahwa demonstrasi-demonstrasi mahasiswa itu “tidak disiplin dan bahkan cenderung anarkis”. Machmud menyatakan bahwa para mahasiswa telah bergeser dari tujuan semula yakni untuk menurunkan harga. Mereka telah menyebabkan kemacetan lalu lintas dan memaksa pom-pom bensin untuk menjual bahan bakar lebih rendah daripada harga yang telah ditentukan oleh pemerintah. Ia menyatakan bahwa satuan-satuan keamanan telah diperintahkan untuk “mengambil tindakan-tindakan preventif”. Sebenarnya militer telah berusaha mengembalikan harga bahan bakar ke harga resmi. Pada hari Minggu para komandan militer (Nasution, Soeharto, Martadinata, Sutjipto, dan Herlambang) juga telah mengeluarkan pernyataan: (A) kesetiaan pada Bung Karno dan (B) “kekompakan” Angkatan Bersenjata dengan rakyat “demi suksesnya revolusi, terutama demi mempertahankan revolusi”.

4. Pada hari Minggu pula sejumlah elemen anti-komunis khawatir mengenai perpecahan di antara para mahasiswa. Seorang sumber dari PSI, setelah mendengarkan pernyataan Amir Machmud, menghabiskan sepanjang hari Minggu itu untuk mengunjungi sumber-sumber dari kalangan militer dalam upaya untuk membujuk militer agar tetap mendukung para mahasiswa dan menyampaikan pesan-pesan kepada mahasiswa secara langsung, dan bukan melalui pernyataan-pernyataan publik. Alasannya karena pernyataan-pernyataan publik macam itu akan membuat kesan bahwa para mahasiswa itu berada pada posisi yang keliru, serta dapat menimbulkan dukungan untuk Sukarno. Sumber-sumber dari kalangan mahasiswa menyatakan bahwa militer membutuhkan mahasiswa, sebagaimana halnya mahasiswa juga membutuhkan militer. Selanjutnya melalui mahasiswa militer akan memiliki posisi yang lebih kuat.

5. Pada tanggal 16 Januari KAMI mengeluarkan pernyataan bahwa, setelah mempelajari pidato Sukarno, KAMI: (A) mendukung Sukarno sepenuhnya, (B) siap untuk bergabung dengan gerakan demi kepentingan rakyat, negara dan Revolusi, (C) menyambut perintah Presiden untuk membentuk Dewan Mahasiswa Nasional, dan (D) menghimbau para mahasiswa untuk menegakkan disiplin, daya juang, dan kewaspadaan.

6. Pada tanggal 17 Januari hanya ada sedikit kegiatan KAMI yang tampak di Jakarta, sementara para mahasiswa kiri, sebagaimana di laporkan oleh BPI, memasang spanduk-spanduk untuk mendukung Sukarno. Staf Kedutaan juga melihat spanduk-spanduk yang bertebaran dari Germino (kelompok mahasiswa yang terkait dengan Partindo, yang berbau komunis). Dalam pidato hari Sabtu malam Soebandrio mendesak dibentuknya “Front Sukarno” dan pada hari Senin sore Ahmadi menyatakan bahwa para pegawai Departemen Penerangan

menjadi anggota dari front tersebut. (Tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai bagaimana sebenarnya “front” itu).

7. Komentar:

- A. Sebagai dampak dari apa yang berlangsung selama akhir pekan, situasi politik di Jakarta lebih membingungkan daripada biasanya. Sekarang suasana menjadi tegang dan harap-harap cemas, sebagaimana tampak dari pernyataan Menteri Pendidikan Tinggi Sjarif Thajeb kepada staf pendidikan Amerika (Beers) tadi pagi, yakni bahwa “akan ada perubahan besar di Indonesia dan saya kira hal itu akan terjadi pekan ini”. Dugaan bahwa sesuatu akan terjadi diperkuat oleh pernyataan Soebandrio yang disiarkan radio tadi pagi, bahwa “solusi politik akan diumumkan sebelum akhir bulan puasa (24 Januari)”.
- B. Pertanyaan terbesar adalah mengapa militer menarik dukungan terhadap demonstrasi mahasiswa (setidaknya untuk sementara). Kemungkinan jawabannya: (1) militer agak ketakutan karena demonstrasi di Bogor Sabtu lalu nyaris menjadi kerusuhan terbuka; (2) Militer menarik diri dari konfrontasi langsung melawan Sukarno; dan (3) ada kesepakatan khusus antara militer dan Sukarno soal “solusi politik”.
- C. Berkaitan dengan kemungkinan terakhir kami mendapat laporan sementara dari seorang aktivis Masyumi yang sekarang menjadi penasihat Subchan bahwa tiga minggu yang lalu Sukarno telah menyampaikan tiga alternatif kepada Soeharto berkaitan dengan pelarangan PKI, yakni: (1) PKI dilarang tetapi dibentuk partai komunis baru setelahnya, (2) PKI tidak dilarang tetapi berada di bawah pengawasan partai-partai lain dalam sebuah front nasional, atau (3) larang semua partai dan bentuk satu saja sebuah front nasional. Sebuah sumber mengatakan bahwa Soeharto menyampaikan usulan itu kepada Nasution, dan Nasution menolak alternatif (2) dan (3), tetapi setuju pada alternatif (1), dengan pemikiran bahwa pembentukan partai komunis baru dapat ditunda.
- D. Berdasar pada sikapnya selama ini, kami tidak yakin bahwa militer akan menarik dukungannya kepada para mahasiswa dan partai-partai jika situasi makin meruncing. Namun ada kemungkinan militer setuju untuk menghentikan demonstrasi-demonstrasi untuk sementara sambil menunggu “solusi politik” yang diajukan oleh Sukarno. Apa pun yang terjadi, kebangkitan dari gerakan kiri di bawah “Front Sukarno” mendorong terjadinya pemisahan yang jelas antara dua kubu dan akan semakin membuka kemungkinan terjadinya krisis.

Green

7. Amerika Khawatirkan Putusnya Hubungan Indonesia-Amerika

Di tengah memanasnya situasi, pihak Amerika khawatir bahwa Indonesia akan memutuskan hubungan dengan Amerika. Salah satu alasannya, karena Sukarno-Soebandrio ingin memotong dukungan Amerika terhadap Angkatan Darat. Pihak Amerika sendiri mengandalkan bantuan dari AD supaya bisa tetap mempertahankan kehadirannya di Indonesia. Menteri Luar Negeri AS Dean Rusk yang menulis telegram ini untuk Dubes Green di Jakarta mengusulkan supaya Amerika menunggu sambil melihat perkembangan situasi dulu.

TELEGRAM DARI DEPARTEMEN LUAR NEGERI (WASHINGTON) UNTUK KEDUBES AMERIKA (JAKARTA)⁶

1. Upaya Sukarno-Soebandrio untuk mengusir Amerika tampaknya lebih merupakan taktik untuk menekan militer melalui kita, dengan maksud untuk mengisolir militer tidak hanya dari Amerika melainkan juga dari setiap sumber dukungan Barat.
2. Gagalnya suap sebesar US\$150 juta, tuduhan konspirasi CIA, kontrol militer terhadap demonstrasi-demonstrasi media dan mahasiswa—semua itu tampaknya akan membuat Sukarno-Soebandrio mengalami kesulitan dalam melawan upaya untuk menggulingkan mereka. Meskipun demikian... ada kemungkinan bahwa Sukarno akan menyampaikan pengumuman secara mendadak.
3. Apa pun yang terjadi hanya militerlah kekuatan yang dapat meredam ketegangan yang ada. Jika militer mau bertindak, upaya Sukarno-Soebandrio akan gagal. Tetapi jika militer tidak bertindak, tidak akan ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mempengaruhi keputusan Sukarno.
4. Bahkan jika militer sebelumnya tidak sadar akan adanya rencana Sukarno-Soebandrio, peringatan Dahlan terhadap Soeharto, dan pembicaraan Anda [Green] dengan Adam Malik sudah cukup untuk mengingatkan militer agar berjaga-jaga. Kepentingan militer untuk mencegah putusnya hubungan dengan Amerika sudah jelas dengan sendirinya sehingga tidak perlu menjelaskan lagi, dan [kecil] kemungkinan untuk [adanya] salah tafsir (maksudnya kita siap untuk tawar-menawar atau menawarkan prinsip *quid pro quo* supaya kita tetap bisa berada di Indonesia). Meskipun demikian jika Anda benar-benar ragu bahwa militer tidak menyadari bahwa kepentingannya

sedang dipertaruhkan, silakan mendekati Nasution melalui *channel* sebagaimana pernah diusulkan....

5. Lebih dari itu semua itu kita cenderung untuk tidak mengambil keputusan apa-apa dulu. Saya setuju bahwa rencana pembicaraan dengan Jepang dan Australia ditunda dulu sampai jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Sukarno-Soebandrio memang benar-benar dimaksudkan untuk memutus hubungan dengan kita.

Rusk

Catatan akhir:

1 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY Dokumen OCI No. 0481/66, Kantor Urusan Intelijen, 3 Januari 56, *Memorandum Intelijen*, "Perubahan Politik di Indonesia". Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #116.

6 Telegram dari Kedubes Amerika (Jakarta) untuk Departemen Luar Negeri (Washington), 5 Januari 1966. Rahasia. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #37.

3 Telegram dari Departemen Luar Negeri (Washington) untuk Kedubes Amerika (Jakarta), 13 Januari 1966. Status: Konfidensial. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #114a.

4 Telegram dari Kedubes Amerika (Jakarta) untuk Departemen Luar Negeri (Washington), 17 Januari 1966. Status: Konfidensial. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #31.

6 "Rencana Demonstrasi Mahasiswa dan Sikap Militer", Telegram dari Kedubes Amerika (Jakarta) untuk Departemen Luar Negeri (Washington), 17 Januari 1966. Status: Konfidensial. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #30.

5 Telegram dari Departemen Luar Negeri (Washington) untuk Kedubes Amerika (Jakarta), 21 Januari 1966. Status: Rahasia. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #86.



Langkah awal kekuasaan. Jenderal Soeharto beberapa saat setelah peristiwa 1 Oktober 1965. (Sumber: Deppen RI)

Februari 1966: CIA, Tentara dan “Potret Ganjil”

1. Pengantar

DEMONSTRASI MAHASISWA yang berlangsung mulai bulan Januari terus berlanjut pada bulan Februari 1966. Didukung oleh tentara, mahasiswa berseberangan dengan Bung Karno karena Bung Karno tak kunjung menyampaikan “solusi politik” yang ia janjikan berkaitan dengan peristiwa berdarah 1965. Dengan lantang para mahasiswa menyerukan “Tritura” atau Tiga Tuntutan Rakyat. Ketiga tuntutan itu adalah: “Bubarkan PKI, *retool* (bubarkan) Kabinet Dwikora, dan turunkan harga”¹.

Menanggapi tuntutan mahasiswa itu pada tanggal 21 Februari Bung Karno me-*retool* (atau re-*shuffle*) Kabinet Dwikora dan mengantikannya dengan “Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan”. Dalam Kabinet ini Nasution dicopot kedudukannya sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Ia digantikan oleh Letjen Sarbini sebagai Menko Pertahanan.² Soeharto sendiri ditetapkan sebagai Menteri/Panglima AD dan Kepala Staf Komando Tertinggi.³ Oleh Bung Karno dua orang yang dicurigai terlibat dalam insiden berdarah 1 Oktober 1965 yakni Omar Dhani dan Soebandrio dipertahankan dalam Kabinet. Melihat pencopotan Nasution dan dipertahankannya

orang-orang kiri dalam Kabinet mahasiswa dan tentara kecewa. Mereka menyebut Kabinet itu sebagai “Kabinet Seratus Menteri” atau “Kabinet Gestapu”. Pada hari pelantikan Kabinet itu, yakni tanggal 24 Februari, mahasiswa mengadakan demonstrasi besar-besaran di seputar Istana Negara, sehingga sejumlah menteri harus datang dengan berjalan kaki atau naik helikopter. Dalam bentrokan antara mahasiswa dan pasukan pengawal Istana Cakrabirawa seorang mahasiswa, Arief Rahman Hakim, tewas. Insiden ini membuat mahasiswa makin berani dalam demo-demo mereka.⁴

Sebagai reaksi terhadap demonstrasi mahasiswa, pada tanggal 25 Februari 1966 Bung Karno atas nama Kogam (Komando Ganyang Malaysia) memutuskan untuk membubarkan KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). Namun tak lama kemudian peran KAMI diambil alih oleh organisasi-organisasi lain, seperti KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda-Pelajar Indonesia), KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia), KABI (Kesatuan Aksi Buruh Indonesia), KAWI (Kesatuan Aksi Wanita Indonesia), dan lain-lain. Ketika pada tanggal 28 Februari Soebandrio menyatakan bahwa setiap kekerasan akan dijawab dengan kekerasan, para mahasiswa membalas dengan membakar boneka Soebandrio.

Perlu dicatat pula bahwa pada tanggal 1 Februari Soeharto naik pangkat militernya dari Mayor Jenderal menjadi Letnan Jenderal guna mengimbangi jabatannya sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat.⁵ Sementara itu pada tanggal 13 Februari dimulailah sidang Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) untuk mengadili mereka yang dituduh terlibat dalam Gerakan Tiga Puluh September. Hingga tahun 1978 ada sekitar 900 orang yang diadili oleh Mahmilub.

Amerika tampak mengamati semua perkembangan itu dari dekat, sambil menunggu siapa yang nantinya akan menjadi “pemenang” dari tarik-ulur antara mereka yang pro-Sukarno dan pro-Soeharto dengan sikap dan pandangan politis masing-masing. Washington masih belum paham, mengapa meskipun sudah memiliki kekuatan yang semakin meningkat tentara masih saja enggan untuk mendongkel Bung Karno.

2. Amerika Bersikap Ekstra Hati-hati

Pada satu sisi, Amerika tampak gembira bahwa proses penindasan terhadap kelompok komunis dan kaum kiri pada umumnya berjalan dengan lancar. Pada sisi lain, negeri itu juga belum yakin betul bahwa tentara akan berani melawan Presiden Sukarno secara terang-terangan. Sebagaimana dicatat dalam telegram tertanggal 2 Februari 1966 dari Dubes Green ke Washington di bawah ini, militer makin tak sabar karena “solusi politik” yang dijanjikan Bung Karno tak kunjung tiba. Meskipun demikian mereka juga tak berani untuk terus menekan Sang Presiden. Green bahkan kecewa karena gara-gara kerusuhan demonstrasi mahasiswa di Bogor tanggal 15 Januari itu, kini ada indikasi bahwa militer makin renggang hubungannya dengan kalangan sipil dan justru makin dekat dengan Presiden.

Namun demikian Green tampak terhibur oleh pemikiran bahwa militer tidak akan memutuskan hubungan dengan Amerika. Sekaligus ia menganjurkan supaya Amerika mengambil sikap ekstra hati-hati dalam pembicaraan mengenai Indonesia di tingkat internasional, guna menghindari kesan bahwa Washington sedang bersekongkol dengan negara-negara lain melawan pemerintahan Sukarno.

PERKEMBANGAN SITUASI POLITIK DI INDOENSIA⁶

1. Catatan berikut mencoba merangkum beberapa pendapat pribadi mengenai kejadian-kejadian di Indonesia serta implikasinya terhadap kebijakan Amerika Serikat.
2. Selama tiga minggu pertama bulan Desember, kubu militer memperoleh kemenangan yang cukup signifikan dalam perebutan kekuasaan dengan pihak Istana. Saat itu banyak hal telah terjadi. Misalnya: dibentuknya triumvirat dengan anggota-anggota yang disegani dan bertugas membawahi KOTI (Komando Operasi Tertinggi, badan tertinggi urusan kebijakan dan koordinasi) yang kekuasaannya diperluas; Soebandrio berada dalam posisi yang makin sulit; dilaporkan bahwa kantor intelijen yang dipimpin Soebandrio yakni BPI telah dialihkan untuk berada di bawah kontrol KOTI; KOTOE (Komando Tertinggi Operasi Ekonomi) dihapuskan; rencana pengadilan terhadap para pelaku Gestapu diumumkan; dan kelompok-kelompok politik sayap kiri terus ditekan hingga mereka harus bersembunyi. Sejumlah

gangguan kecil dan ringan yang selama ini agak mengganggu hubungan Amerika-Indonesia telah tersingkirkan. Pada akhir Desember, beredar desas-desus yang sebagiannya berasal dari sumber terpercaya, yang mengatakan bahwa akan terjadi perubahan besar di Indonesia pada bulan Januari, antara lain ditandai dengan perjalanan Presiden Sukarno keluar negeri untuk jangka waktu yang lama.

3. Akan tetapi, bulan Januari terjadi sejumlah kekalahan kubu militer serta oleh penyegaran dan penyatuan kembali kekuatan kelompok Istana. Jika dilihat kembali, tampaknya suatu pertempuran hebat telah terjadi pada tanggal 18 Desember, yakni pada acara penutupan rapat KOTI yang berlangsung selama tiga hari. Pada kesempatan itu Presiden Sukarno menolak untuk membubarkan PKI dan menyatakan ingin supaya seluruh kekuasaannya kembali. Sebelum hal itu terjadi, para pemimpin militer masih berandai-andai bahwa Presiden Sukarno masih bisa diajak bicara mengenai hal-hal penting seperti pelarangan PKI dan penataan kembali pemerintahan agar dapat segera mengatasi masalah ekonomi yang makin parah itu. Ternyata Sukarno tetap *ngotot*, sehingga dalam pertemuan KOTI tanggal 16–18 Desember itu para peserta sadar bahwa Presiden tidak akan mengalah sedikit pun. Sebuah pertanyaan muncul: apa yang sekarang harus dilakukan oleh militer dan kalangan moderat? Atas pertanyaan macam itu muncullah ketidakpastian di mana mayoritas kelompok militer, di bawah pimpinan Nasution, menolak untuk melakukan suatu tindakan tegas dan langsung terhadap Sukarno. Keengganan mereka untuk menentang Sukarno secara langsung itu didasari oleh kekhawatiran bahwa kalau para pemimpin militer itu menentang Sukarno secara terang-terangan, mungkin para prajurit akan menolak untuk ikut. Mungkin militer juga berpikir, kalau memang Sukarno dan orang-orang di sekitarnya menolak untuk berkompromi, biarkan saja mereka berkuasa dan biarkan saja mereka nanti dituntut untuk bertanggung jawab atas kacaunya ekonomi negara.

4. Ketika pada akhir Desember lalu Presiden Sukarno tahu bahwa militer tidak akan mau mengambil tindakan tegas terhadapnya, ia melihat hal itu sebagai kesempatan yang baik untuk melakukan *move-move* politik.

5. Reaksi masyarakat selama dua minggu pertama [*tulisan tidak jelas*—“Januari”?] terhadap tingginya harga beras, minyak tanah, transportasi, dan lain-lain, memungkinkan militer untuk dapat bergerak di belakang opini publik dan mendukung mahasiswa untuk berdemonstrasi di jalan guna mengecam PKI, Soebrandio, monumen-monumen mewah yang dibangun Sukarno, serta hal-hal lain yang dipandang merugikan oleh militer dan kaum moderat. Agitasi tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 15 Januari, ketika ribuan mahasiswa menyerbu gerbang Istana Bogor, meminta supaya Soeharto secara pribadi datang guna meredakan suasana. Presiden Sukarno terpaksa

berjanji bahwa para menteri ekonominya akan meninjau situasi untuk melihat kemungkinan menurunkan harga-harga.

6. Apa yang terjadi di Istana Bogor itu tampaknya mengejutkan militer. Juga Sukarno sendiri. Mereka menjadi sadar akan apa yang bisa terjadi jika demonstrasi-demonstrasi itu lepas kendali, sebagaimana yang memang hampir terjadi di Bogor hari itu. Oleh karena itu, militer dan Presiden benar-benar bersatu untuk mencegah kekacauan lebih lanjut dan bersama-sama mulai mengambil tindakan terhadap mahasiswa, terhadap [kelompok agama tertentu], dan terhadap siapa saja yang cenderung bertindak ekstrem. Kepada kelompok-kelompok itu militer menunjukkan diri di mana mereka berdiri.

7. Akibat dari apa yang terjadi itu adalah surutnya semangat kalangan sipil yang selama ini telah menjadi sekutu militer dan dengan demikian Sukarno memperoleh lebih banyak ruang gerak untuk melakukan manuver-manuver. Para pemimpin sipil moderat sekarang ini memandang militer sebagai *partner* yang tak dapat dipercaya, yang mau mengagitasi kelompok sipil untuk maju, tapi yang lantas meninggalkan mereka ketika harus berhadapan dengan Sukarno. Sikap seperti itu akan mengurangi kemampuan militer untuk menggunakan kelompok sipil di kemudian hari.

8. Saya duga sekarang ini Sukarno menentukan langkah-langkah politiknya berdasarkan keyakinan bahwa semakin lama dia dapat menunda “solusi politik” yang ia janjikan itu, akan semakin besar pula kesempatan baginya untuk mewujudkan cita-citanya mengenai NASAKOM dan CONEFO (*Conference of the New Emerging Forces*). Ada kemungkinan dia merasa bahwa kalau ia mengumumkan “solusi politik”-nya itu sekarang, mungkin akan timbul reaksi kontra yang merugikan. Sementara itu kalau ia mengumumkan solusi itu kemudian, katakanlah dua bulan dari sekarang, risikonya akan lebih kecil karena saat itu akan terjadi berbagai perpecahan di kalangan militer, partai-partai politik, kelompok-kelompok agama, dan organisasi-organisasi kepemudaan. Lebih dari itu, ketidakpastian soal solusi politik mungkin akan menimbulkan perbedaan kebijakan di kalangan militer sendiri. Sejauh Sukarno dapat menimbulkan kesan bahwa suatu saat nanti ia akan melarang PKI, atau akan mengambil suatu keputusan lain yang sesuai dengan harapan militer, tampaknya sejumlah pihak di kubu militer akan tetap sepakat untuk “tidak mengobok-obok situasi”.

9. Di sisi lain, Sukarno berada dalam tekanan berat untuk segera mengumumkan “solusi politik”-nya itu. [Sukarno tahu, tanpa ada kejelasan soal itu] negara-negara asing dari mana Sukarno berharap akan mendapat bantuan tambahan dan kelunakan dalam pembayaran utang, akan ragu-ragu untuk membantu Indonesia. Keragu-raguan itu mudah muncul jika situasi politik di Indonesia terus-menerus tak menentu, dan lebih penting lagi jika Indonesia tidak mampu

menyodorkan rencana-rencananya secara jelas serta penataan kembali sistem pemerintahannya.

10. Baru-baru ini kita menerima laporan dari setidaknya dua sumber terpercaya bahwa dalam waktu dekat Sukarno mungkin akan mengumumkan keputusan politik mengenai NASAKOM. Meskipun demikian tampaknya yang lebih mungkin adalah bahwa Sukarno akan mengumumkan adanya perubahan-perubahan kecil dalam kabinetnya, dengan maksud memberi kesan seolah-olah dia sedang sungguh-sungguh mengusahakan jalan keluar bagi permasalahan ekonomi yang sedang melanda Indonesia sekarang ini. Dengan langkah seperti itu, begitu Sukarno berpikir, ia akan dapat mengirim misi ke negara-negara asing guna mencari bantuan luar negeri dan mengupayakan pelunakan pembayaran utang. Kelihatannya dia pikir hanya itu yang diperlukan, terutama jika orang-orang yang ditunjuk untuk urusan ekonomi nasional entah itu di Jakarta atau untuk menjalankan misi ke luar negeri itu adalah orang-orang yang memiliki nama baik di negara-negara yang dituju.

11. Meskipun pemecahan masalah macam itu adalah solusi yang sifatnya semu, ada kemungkinan para pemimpin militer akan menerimanya atas dasar beberapa pertimbangan. Mereka berpikir, suatu keputusan politik yang sifatnya komprehensif atau menyeluruh mungkin akan membuat Sukarno mengumumkan langkah-langkah yang bisa jadi justru bertentangan dengan kepentingan militer. Atau, mungkin saja dapat menimbulkan kerusuhan sosial yang justru mau dihindari oleh militer. Sementara itu kalangan militer juga berpikir, kalau situasi ekonomi terus memburuk dan kalau nanti ternyata orang-orang yang dikirim ke luar negeri itu pulang dengan tangan kosong, mungkin saja Presiden Sukarno akan terpaksa menyusun ulang kabinetnya dan terpaksa pula mencari solusi bagi masalah ekonomi sebagaimana yang diharapkan oleh kelompok militer beserta unsur-unsur moderat dari kalangan sipil. Dalam situasi demikian, diharapkan Sukarno akhirnya bisa ditundukkan.

12. Saat ini atau setidaknya sampai beberapa waktu mendatang tampaknya Nasution melihat bahwa dalam dinamika perebutan kekuasaan ini peran militer adalah menjamin keamanan dan ketertiban, serta mencegah dampak buruk yang bisa timbul entah itu dari mahasiswa, kelompok agama tertentu, atau mungkin bahkan dari Presidium. Reaksi dari Presidium yang mungkin timbul dan mau dihindari oleh militer misalnya terang-terangan mensahkan PKI sebagai partai politik, atau membina hubungan dekat antara Jakarta dan Beijing. Atau mungkin juga Presidium akan melakukan tindakan-tindakan yang membuat Indonesia semakin terisolasi dari negara-negara sahabat yang kelak diperlukan dukungannya jika militer dan kalangan sipil moderat naik ke tampuk pemerintahan. Saya kira militer sama sekali tidak menginginkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat....

13. Saya tetap merasa bahwa selama Sukarno masih mempunyai kekuasaan sebesar seperti sekarang ini kekacauan politik dan ekonomi akan terus berlangsung atau bahkan semakin memburuk. Saya juga merasa bahwa dia akan tetap berusaha sekuat tenaga untuk mengarahkan revolusi Indonesia ke kiri, sejalan dengan prinsipnya mengenai NASAKOM dan CONEFO.

Strategi militer untuk mengurangi kekuasaan Presiden sebagaimana dilakukan sekarang ini mungkin saja berhasil, tetapi menurut saya hal itu sama mungkinnya dengan keberhasilan Presiden Sukarno untuk bisa memecah belah dan menguasai kelompok-kelompok yang menentangnya.

14. Kemungkinan bagi Amerika Serikat untuk ikut mempengaruhi apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini amat kecil, namun kita mempunyai kepentingan yang sama dengan negara-negara seperti Jepang yang telah banyak memberikan bantuan kepada Indonesia dan mempunyai pengaruh yang cukup berarti atas negara itu. Ada kemungkinan negara-negara itu menuntut pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang realistis guna memecahkan masalah ekonominya sebagai syarat bagi mereka untuk memberikan bantuan kepada Indonesia. Jika hal itu yang terjadi, mungkin akan timbul dampak positif bagi Indonesia dan akan kuatlah posisi orang-orang Indonesia yang sekarang ini sedang memperjuangkan perbaikan ekonomi.

15. Penting kiranya bahwa kita bersikap ekstra hati-hati kalau suatu saat membicarakan masalah ini dengan negara-negara yang terkait. Hal ini perlu supaya tidak timbul kesan bahwa kita sedang bersekongkol dengan negara-negara sahabat untuk melawan Indonesia. Sebagaimana ditekankan dalam Telegram no. 2195 [dari Kedubes AS di Jakarta tanggal 31 Januari 1966—*pen.*], negara-negara donor memiliki alasannya tertentu ketika menuntut Indonesia supaya terlebih dulu menata kehidupan politik dan ekonominya sebelum negara-negara itu mau memberi bantuan kepada Indonesia.

Green

3. Cindy Adams Ingin Membantu

Kekhawatiran mengenai memburuknya hubungan Indonesia-Amerika ternyata tidak hanya melanda kalangan politisi atau korps diplomatik Amerika saja, melainkan juga masyarakat umum. Hal itu mendorong warga masyarakat Amerika untuk juga membantu meredakan suasana. Di bawah adalah kutipan surat tertanggal 3 Februari 1966 dari Cindy Adams, seorang

wartawati yang dikenal luas karena telah membantu Bung Karno untuk menyusun otobiografinya.⁷ Ia akan berkunjung ke Indonesia dan meminta seorang staf Gedung Putih, Jack Valenti, supaya memberinya otoritas untuk membantu mendekati Presiden Sukarno agar memperbaiki hubungannya dengan AS.

MR. JACK VALENTI⁸

Gedung Putih

Washington, D.C.

Yang terhormat Mr. Valenti,

Saya ingin berterima kasih atas sambutan yang hangat dan pengertian Anda.

Atas saran Anda, kami bertemu dengan Mr. Berger dan asistennya, Dave Cuthell, di Departemen Dalam Negeri. Kami bergurau sejenak dan mereka menunjukkan dengan jelas bahwa mereka tidak setuju jika hubungan internasional dianggap sebagai hubungan antar manusia dalam skala yang lebih besar. Tampaknya, dengan pemikiran yang sederhana ini, masalah di Asia Tenggara tidak pernah menghasilkan strategi yang baik bagi diplomat profesional. Entah kenapa saya terus teringat dengan sebuah ayat yang indah dari Alkitab yang berkata, “Kata yang diucapkan dengan baik adalah seperti apel emas....”

Atas undangan pribadi Presiden Sukarno, suami saya Joey dan saya kembali ke Indonesia pada tanggal 14 Februari—dengan alasan untuk membawakan salinan resmi dari bukunya, *Sukarno: Sebuah Autobiografi Sebagaimana Diceritakan kepada Cindy Adams*—tetapi khususnya untuk merajut kembali hubungan yang renggang antara negara kita dan Indonesia. Undangan tersebut bisa diperluas. Jalan sudah terbuka. Sukarno akan mendengarkan kami. Yang kami butuhkan hanyalah “Sabda”. Selama dua tahun berada di Indonesia, kami mengunjungi Presiden Sukarno empat–lima jam sehari. Akan sayang sekali kalau dua warga Amerika yang cinta pada negerinya ini tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk melayani Presidennya dan mengabdikan tanahnya.

Seperti yang dikatakan suami saya, dia bekerja untuk Lyndon Baines Johnson selama masa kampanye. Sebagai Presiden Serikat Artis Amerika, dia menyokong hiburan yang bersifat nasional dan juga konvensi di Atlantic City dan pada rapat umum partai buruh untuk Presiden Johnson di Madison Square Garden. Semua anggota keluarga

kami ingin menunjukkan kembali pengabdian kami pada Presiden Johnson.

Mr. Valenti yang saya hormati, ini merupakan kesempatan terakhir kami untuk mendapatkan masukan dan pengarahan dari Anda. Kami tahu kami bisa menjadi alat untuk membantu menyembuhkan kembali hubungan kedua negara yang kini sedang terluka.

Ketika Anda menerima surat ini, kami sudah akan berada di rumah kami, di 1050 5th Avenue, New York City. Nomor telepon kami adalah TE-1-8877. Kami menunggu balasan Anda sebelum kami berangkat.

Hormat saya,

Cindy Adams

4. CIA dan “Potret Ganjil” Indonesia

Dalam dokumen tertanggal 4 Februari 1966 berikut ini CIA (Central Intelligence Agency) melaporkan adanya ketegangan yang makin meningkat antara kubu Presiden Sukarno ⁷⁷ di satu pihak, dengan kubu militer di pihak lain. Akibatnya terdapat dua “pusat kekuasaan”. Yang menjadi pokok persoalan, menurut CIA, adalah sikap yang berbeda antara kedua pihak berkaitan dengan masalah kelompok kiri di Indonesia. Sementara militer ingin supaya PKI beserta seluruh komponen kiri di negeri ini dilarang secara resmi, Bung Karno terkesan enggan untuk melakukan hal tersebut sekaligus menunda-nunda pembicaraan tentangnya.

Berkaitan dengan Peristiwa 1 Oktober, CIA mencatat bahwa di bawah pimpinan Soeharto militer berhasil memadamkan “kelompok kudeta” dalam hitungan jam—suatu hal yang sebenarnya bisa menimbulkan tanda tanya. Pada bagian lain dilaporkan bahwa yang menjadi korban pembantaian massal setelah itu bukan hanya orang-orang yang dituduh komunis melainkan juga para “pedagang eceran keturunan Cina”.

Akhirnya CIA memandang Indonesia sebagai sebuah “potret yang ganjil”: kubu militer makin besar pengaruh dan kekuasaannya dalam berhadapan dengan Bung Karno, namun anehnya tetap saja enggan menggunakan pengaruh dan kekuasaan itu untuk bergerak lebih jauh melawan Sang Presiden.

KELUMPUHAN TOTAL INDONESIA⁹

(Central Intelligence Agency, Office of Current Intelligence)

Rangkuman

1. Sejak adanya percobaan kudeta 1 Oktober 1965, Indonesia mengalami kelumpuhan total dalam hal administrasi pemerintahan. Situasi ini muncul akibat adanya dua pusat kekuasaan, yakni Presiden Sukarno dan militer. Tidak satu pun dari keduanya bisa memaksakan kehendaknya pada yang lain. Berhubung ada kebutuhan mendesak akan adanya pemerintahan pusat di Indonesia yang bisa diterima oleh keduanya, kompromi antara kedua kubu itu tak mungkin dihindari. Kapan dan bagaimana kompromi itu akan terjadi hanya bisa diduga.
2. Isu pokok yang dipermasalahkan di antara keduanya adalah peranan kaum kiri di Indonesia. Sukarno tampaknya percaya bahwa waktu ada di pihaknya. Dengan bergerak sedikit demi sedikit untuk mengembalikan kehidupan politik yang monolitik dengan dirinya sebagai pusat—suatu teknik yang membuat militer kesulitan untuk melawan—dia berharap bahwa nantinya ia akan dapat menempatkan kembali kaum kiri Indonesia pada posisi penting.

Latar belakang

3. Setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaan pada bulan Desember 1949, Sukarno pada awalnya mentolerir dan kemudian mendorong serta mendukung perkembangan dan pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI). Dengan melalui kombinasi antara kedekatan dengan Sukarno, organisasi yang bagus, serta kerja keras, PKI tumbuh dari partai kecil yang dikecam menjadi organisasi sipil yang paling kuat di Indonesia. Pada pertengahan 1965, Sukarno—yang melalui berbagai cara mendapatkan dorongan dan dukungan dari PKI—tampak akan mempercepat pengambilalihan kekuasaan negara secara bertahap oleh PKI.
4. Sukarno juga mengeksploitasi militer Indonesia yang non-komunis dengan cara memakai militer bersama PKI untuk membantunya dalam menjalankan suatu rezim otoriter antara tahun 1957 dan 1960. Pada tahun-tahun itu dan selama beberapa tahun setelahnya, dia berhasil mempertahankan kekuasaannya dengan mempermainkan keseimbangan antara militer dan PKI. Akan tetapi dalam dua tahun terakhir ini Sukarno menempatkan militer di bawah kontrolnya sembari mengurangi peranan politik mereka. Seakan-akan dia itu tidak mau melihat PKI sebagai ancaman bagi kepemimpinannya, dan justru mencurigai para pemimpin militer.
5. Sejak 1948, ketika para pemberontak komunis mencoba menggulingkan pemerintahan Indonesia yang masih muda, militer memandang PKI sebagai ancaman bagi peran politik mereka, sekaligus

sebagai sebuah ideologi yang jahat, yang asing bagi cara hidup orang Indonesia. Selama bertahun-tahun militer secara konsisten mencoba untuk menindas komunis, namun Presiden selalu menghalangi mereka. Ketika Sukarno secara berangsur-angsur bergerak ke kiri, militer dengan setengah hati mengikutinya. Satu-satunya harapan bagi militer adalah bahwa pada suatu saat PKI akan kembali melakukan suatu tindak kekerasan sehingga militer memiliki alasan untuk melakukan serangan balasan.

6. Percobaan Kudeta pada tanggal 1 Oktober, yang telah menewaskan enam Jenderal tertinggi, memberikan kesempatan itu. PKI jelas terlibat dan mungkin malah merupakan dalang dari peristiwa tersebut. Militer percaya bahwa Sukarno juga terlibat, namun mereka memilih untuk mengabaikan perannya dan mempropagandakan penjelasan bahwa kudeta itu adalah usaha PKI untuk merebut pemerintahan. Atas dasar pemikiran tersebut militer dengan kejamnya telah menumpas anggota PKI dan sekarang ini sedang menghancurkan PKI sebagai organisasi terbuka yang efektif.

Tujuan Militer

7. Kepentingan politis yang paling pokok bagi militer pasca-kudeta itu adalah penghancuran PKI. Militer, di bawah Jenderal Soeharto dan Menteri Pertahanan Jenderal Nasution, tidak punya keinginan untuk mengambil alih pemerintahan, namun kedua Jenderal tersebut ingin memainkan peran penting dalam politik serta mengatur kembali arah kebijakan dalam negeri maupun luar negeri Indonesia.

8. Para pemimpin militer juga ingin mempertahankan Sukarno paling tidak sebagai Kepala Negara simbolis. Sementara berharap bahwa dirinya menjadi simpul politik Indonesia serta lambang kemerdekaan nasional, Sukarno masih tetap mempunyai dukungan dan kesetiaan massa yang cukup kuat. Nasution dan Soeharto takut jika mereka berusaha menyingkirkan Sukarno secara terang-terangan, hal itu bisa memecah belah militer Indonesia, membuat bingung rakyat, dan kemungkinan bisa menimbulkan perang saudara. Di mata kedua Jenderal tersebut Sukarno dan kubunya juga bermanfaat sebagai “bumper” melawan ketidakpuasan rakyat atas memburuknya kehidupan ekonomi. Akhir-akhir ini militer telah menjadi tidak populer di mata rakyat, dan oleh karena itu akan senang kalau ada pihak yang bisa dijadikan tempat sembunyi agar tak dituntut bertanggung jawab atas tingginya harga-harga, langkanya barang kebutuhan sehari-hari, serta merosotnya standar hidup masyarakat.

Aktivitas Militer Setelah Kudeta

9. Pada tanggal 1 Oktober, militer—di bawah pimpinan Soeharto—mampu mengerahkan kekuatan hanya dalam beberapa jam saja setelah kelompok kudeta melancarkan operasinya. Secara cepat dan tanpa

kompromi militer menggulung upaya kudeta itu, memburu senjata dan pelaku kudeta, mencari siapa yang bertanggung jawab, dan menghancurkan PKI. Pada awalnya militer bertindak sendirian. Dalam perjalanan waktu mereka mendapat persetujuan setengah hati dari Presiden Sukarno untuk mencari dan mengadili para pelaku kudeta, namun pada saat yang sama militer terus bergerak melakukan operasi penumpasan PKI meskipun hal itu bertentangan dengan kehendak Sukarno.

10. Sampai sekitar pertengahan Desember, tekad militer untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan yang ingin mereka capai telah membuat terjadinya suatu konfrontasi langsung antara militer dan Sukarno. Dalam konfrontasi itu militer berhasil memegang kendali politik, sedang Sukarno menciptakan kesan mengenai dirinya sebagai seorang Presiden yang pantang menyerah—namun ternyata hal itu tak banyak pengaruhnya.

11. Begitu PKI dinyatakan tak berkuat lagi, militer lantas mengalihkan perhatiannya ke urusan pemerintahan. Akan tetapi dalam hal ini militer tidak dapat melakukan tindakan langsung seperti ketika memburu PKI. Berhubung sudah bertekad untuk tidak menggulingkan Sukarno, serta mengingat bahwa secara publik dan berulang-ulang telah menyatakan kesetiaan pada Sukarno, militer hanya bisa melakukan manuver dan tekanan-tekanan politik. Penangkapan dan eksekusi di tempat tak lagi dipandang sebagai cara yang efektif untuk menghabisi lawan politik.

12. Militer mengharapkan adanya perubahan besar dalam Kabinet. Akan tetapi satu-satunya keberhasilan yang mereka peroleh dalam hal ini adalah digantinya Panglima Staf Angkatan Udara sekaligus Menteri Perhubungan Udara Omar Dhani yang keterlibatannya dalam Kudeta 1 Oktober sudah umum diketahui. Keberhasilan itu pun tidak penuh, mengingat bahwa di mata para pemimpin Angkatan Darat pengganti Omar Dhani sama-sama tidak memuaskannya.

13. Pengorganisasian KOTI (Komando Operasi Tertinggi) pada akhir November sempat memperkuat militer secara politis. Secara khusus, pengangkatan Sultan Yogyakarta sebagai “Wakil Komandan Tertinggi untuk Urusan Ekonomi” tampak menandakan upaya militer untuk melakukan tindakan-tindakan konstruktif guna mengatasi masalah ekonomi yang sudah sedemikian parah.

14. Akan tetapi pada bulan berikutnya, baik Kabinet maupun KOTI sama-sama tertarik untuk bermain-main dengan ekonomi. Upaya mereka bersama hanya menimbulkan kekacauan dan ketidakpuasan. Hal itu masih ditambah dengan masalah kekurangan beras. Sementara itu usaha sebagian pedagang eceran keturunan Cina juga mengalami kemacetan, karena banyak dari mereka yang dihabisi bersama dengan orang-orang yang dituduh komunis. Pada bulan Januari, usaha militer untuk menangani masalah ekonomi hancur total. Jenderal Nasution

secara publik mengumumkan bahwa jalan keluar bagi masalah ekonomi tergantung sepenuhnya pada presidium Kabinet.

15. Pada bulan Januari, dengan harapan akan menaikkan reputasi melawan Kabinet, militer mempersilakan kelompok-kelompok mahasiswa untuk melakukan demonstrasi mengecam kenaikan harga dan melawan para anggota Kabinet. Ketika demonstrasi-demonstrasi itu mulai secara terbuka mengecam Sukarno dan menimbulkan kekerasan melawan Istana, militer mulai mengontrol para mahasiswa secara lebih ketat. Demonstrasi di Surabaya yang semula dimaksudkan sebagai kelanjutan dari demonstrasi-demonstrasi yang berlangsung di Jakarta, Bogor, dan Bandung, akhirnya dibatalkan.

Hal-hal yang Mau Dicapai Sukarno

16. Dengan dikalahkan dan dicerai-beraikannya PKI sebagai pendukungnya, Sukarno berjuang mati-matian untuk mendapatkan kembali peran sentralnya di Indonesia. Pada saat yang sama, ia mencoba mempertahankan sebisa mungkin kelompok kiri—entah itu PKI maupun non-PKI. Modal terbesarnya adalah: kemampuannya untuk melakukan manuver politik, penolakan militer untuk melawan dia, pernyataan publik pihak militer untuk tetap setia padanya, serta kesadaran dalam tubuh militer akan meningkatnya kebutuhan untuk membangun kembali sebuah pemerintahan yang mempersatukan.

17. Dalam upaya untuk mengorganisir kembali dan memperkuat kelompok-kelompok kiri serta memanfaatkan persaingan yang terjadi antara militer dan front non-komunis dari kalangan sipil, Sukarno terutama dibantu oleh Soebandrio yang adalah Wakil Perdana Menteri I dan Menteri Luar Negeri. Sebenarnya dalam hal bakat politik Soebandrio itu bukan apa-apa dibanding dengan Sukarno, tetapi Soebandrio itu cerdik dan cekatan. Sekaligus ia juga merupakan pelaksana yang andal bagi gagasan-gagasan Sang Presiden.

Kegiatan Sukarno Sejak Kudeta

18. Sukarno telah secara konsisten bertindak dengan semboyan “dia yang bisa memperoleh kekuasaan harus menggunakannya”. Meskipun kekuasaannya kini telah banyak berkurang, ia tetap berusaha menggunakan dan memperluas apa yang masih ia miliki. Banyak inisiatif-inisiatifnya tidak mendapat sambutan, namun hal ini tidak membuatnya jera. Ia terus saja melakukan plot-plot baru atau mengulangi plot-plot lama.

19. Selama empat bulan terakhir ini Sukarno telah mengubah taktik, dari posisi mundur dan menunggu ke posisi ofensif politik secara terbatas. Semula jawaban dia atas tekanan dari militer cenderung negatif, dengan penyesuaian setengah hati terhadap struktur kekuasaan yang baru. Meskipun berkali-kali ia menjanjikan “solusi politik” ia tetap bersikeras untuk tidak membubarkan PKI dan menolak

mengganti anggota Kabinet yang berhaluan kiri dan yang mendukung kudeta kecuali Marsekal Dhani. (Bahkan Dhani, meskipun dipecat sebagai Menteri Perhubungan Udara dan Kepala Staf Angkatan Udara, tetap saja menduduki posisi di Kabinet, sebuah posisi yang dibuat khusus untuk dia sejak terjadinya Kudeta. Ia menjabat sebagai Menteri Industri Pesawat Terbang dan kabarnya sedang hidup tenang di luar negeri). Berulang-ulang Sukarno menyatakan bahwa Soebandrio, yang merupakan sasaran utama militer dan kelompok-kelompok sipil non-komunis yang mendukung militer, akan tetap dipertahankan sebagai pembantu utamanya.

20. Serangan politik Sukarno sejauh ini terdiri dari dua tindakan yang berbeda. Yang *pertama* adalah tindakan yang ia ambil pada akhir November lalu dalam rangka menghalangi upaya KOTI untuk menguasai Kabinet yang ada. Ia menyendirikan sejumlah menteri di sebuah vila dekat Bogor dan menuntut mereka untuk secepatnya menyusun langkah-langkah guna mengatasi masalah ekonomi Indonesia. Semula langkah-langkah itu berupa kekuasaan resmi untuk menaikkan harga-harga setinggi mungkin dan kemudian devaluasi drastis atas mata uang [Rupiah] dan suatu upaya untuk mengontrol harga-harga dan distribusi barang-barang kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi penolakan rakyat terhadap kenaikan harga begitu kuat, sehingga pada bulan Januari Kabinet menurunkan sejumlah harga dan melepaskan kontrol atas harga-harga maupun distribusi barang.

21. Meskipun nilai ekonominya dipertanyakan, keterlibatan Sukarno dalam bidang ekonomi membawa akibat timbulnya keinginan untuk menghentikan inisiatif-inisiatif politik KOTI. KOTI tampaknya menjadi sadar bahwa campur tangan dalam bidang ekonomi itu secara politis berbahaya. Dengan cepat-cepat KOTI mengembalikan segala tanggung jawab di bidang ekonomi kepada Kabinet. Dalam bidang-bidang non-ekonomi pun tampaknya KOTI juga telah gagal dalam usaha untuk menandingi Kabinet.

22. Tindakan *kedua* yang diambil Sukarno sebagai bagian dari serangan politiknya dilancarkan pada pertengahan Januari lalu ketika Soebandrio, rupanya atas perintah boss-nya, mendesak dibentuknya Front Sukarno. Se jauh ini respons masyarakat terhadap front tersebut sangat kecil dibanding dengan besarnya kekuatan massa yang berhasil digalang oleh militer sejak 1 Oktober atau massa yang biasanya mendukung Sukarno selama sebelum terjadi kudeta. Akan tetapi tidak ada indikasi bahwa Sukarno akan membubarkan front itu. Selanjutnya front tersebut mau dijadikan kendaraan bagi pengembangan politik kiri yang baru.

Kesimpulan dan Antisipasi

23. Situasi Indonesia selama empat bulan setelah percobaan kudeta adalah sebuah potret yang ganjil. Militer jelas-jelas mendapatkan kekuasaan politik yang lebih besar, dan—berkat kekuasaan itu—sekarang ini dalam arti tertentu secara politis sedang naik daun. Sementara itu dukungan kaum kiri terhadap Sukarno makin kecil dan tak terorganisir. Anehnya, militer tetap saja enggan untuk bergerak lebih jauh melawan Presiden.

24. Militer, setelah berhasil menghancurkan PKI dan memaksa para pengikutnya yang masih hidup untuk bergerak di bawah tanah, sedang menunggu-nunggu Sukarno untuk merajut kembali kehidupan politik Indonesia dan menawarkan “solusi politik” [yang sudah sering ia janjikan]. Akan tetapi Sukarno tak kunjung menyodorkan solusi yang diharapkan oleh militer, yakni pembubaran PKI. Dalam keadaan tarik-ulur begini Sukarno menunda-nunda solusi yang mau ia tawarkan.

25. Meskipun demikian, operasi anti-komunis yang dilakukan oleh militer telah memaksa Sukarno untuk menyesuaikan posisi politisnya. Secara publik ia telah mengakui keterlibatan unsur-unsur PKI dalam kudeta itu dan telah setuju untuk diadakannya pengadilan bagi orang-orang yang mendorong terjadinya peristiwa 1 Oktober. Di luar konsesi-konsesi itu tampaknya ia tak berubah pikiran. Selanjutnya kecil kemungkinan akan adanya perubahan dalam hal pendirian politiknya.

26. Tampaknya Sukarno bertindak dengan keyakinan bahwa sang waktu sedang berpihak padanya. Dia sadar bahwa militer tidak akan menumbangkannya dan bahwa secara umum rakyat Indonesia tidak bisa menemukan orang lain selain Sukarno sebagai simbol nasional. Strategi dia yang paling baru adalah mengabaikan masalah kelompok politik kiri, sementara menekankan perlunya kesatuan nasional dan kebutuhan rakyat Indonesia untuk mempertahankan dirinya sebagai pemimpin tertinggi. Sepanjang bulan Januari, strategi ini memang telah berhasil membantu memperbaiki posisi politisnya.

27. Sekarang ini Sukarno masih tetap menolak diskusi terbuka mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan kaum kiri, serta terus mencoba untuk menjadikan dirinya sendiri kembali menjadi pusat dari kehidupan politik Indonesia yang monolit.

28. Berhadapan dengan langkah Sukarno di atas militer hanya bisa melancarkan perlawanan minimal. Dalam suasana seperti sekarang ini tampaknya Sukarno akan semakin baik posisinya, meskipun untuk sementara waktu kelompok kiri akan tetap lemah secara politis. Akan tetapi jika Sukarno tetap hidup, kaum kiri akan mampu untuk secara bertahap memasuki wilayah politik yang lebih luas, dan tampaknya militer akan menyesuaikan diri terhadap perkembangan seperti itu.

5. Bantuan Militer Rahasia untuk Indonesia?

Dokumen berikut ditulis oleh anggota National Security Council Robert W. Komer tanggal 12 Februari 1966 sebagai bahan *briefing* untuk Presiden Lyndon B. Johnson yang akan bertemu dengan Dubes AS untuk Indonesia Marshall Green hari Selasa, 15 Februari 1966. Dalam *briefing* itu antara lain disebutkan adanya ketegangan antara Jakarta dengan perusahaan-perusahaan minyak milik Amerika di Indonesia. Presiden diminta bertanya kepada Green apakah kemungkinan Sukarno untuk kembali berkuasa seperti dulu masih kuat. Sekaligus diusulkan untuk bertanya, bagaimana kalau Amerika membantu militer Indonesia secara rahasia guna memperbaiki posisi militer dalam berhadapan dengan Bung Karno.

PERTEMUAN DENGAN DUTA BESAR MARSHALL GREEN¹⁰

Marshall Green berkunjung ke Washington untuk berkonsultasi pada saat di mana kelihaihan politik Sukarno kini menggantikan sebagian besar dari kekuasaannya yang telah diambil alih oleh militer setelah kudeta PKI yang gagal akhir tahun lalu.

Setelah menerapkan taktik “salami” yang brilian dalam menumpas PKI sebagai sebuah kekuatan politik yang efektif, Jenderal *Nasution* dan *Suharto* saat ini menggunakan kesempatan untuk memanfaatkan pengaruh yang telah mereka galang selama ini untuk melawan Sukarno. *Militer* takut bahwa kesatuan mereka akan pecah kalau mereka menyerang Sukarno secara langsung. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk kembali kepada kebijakan *pencapaian target-target politik terbatas*. Sementara itu Sukarno memanfaatkan keraguan militer untuk *memperjuangkan kembali* kekuasaan penuhnya dan *meneruskan* politik dalam negeri dan luar negeri yang bercorak *radikal kiri*.

Sebagai akibatnya, sekarang ini di Indonesia ada semacam “dua pemerintahan” yang *saling bersaing* untuk mendapatkan kekuasaan dan berusaha memerintah negara tersebut. Persaingan tersebut tampaknya akan berlangsung selama beberapa bulan mendatang tanpa penyelesaian yang jelas, namun tampak pula Sukarno telah berhasil melakukan *manuver-manuver tertentu sehingga memiliki posisi yang agak lebih baik*.

Tanpa pemerintahan yang efektif, *inflasi yang sudah parah* sekarang ini akan menjadi semakin parah dan ekonomi Indonesia akan terus memburuk dan menyebabkan kekacauan. Kalangan militer berusaha melemparkan tanggung jawab atas buruknya pemerintahan nasional pada Sukarno, namun pada saat yang sama mereka berusaha mencari bantuan beras yang kini sangat dibutuhkan oleh rakyat melalui kontak-kontak pribadi mereka di luar negeri.

Kebijakan kita selama ini adalah *menjaga hubungan baik* dengan pemerintah Indonesia, namun sengaja tidak berusaha menawarkan paket bantuan baru atau program-program bantuan lain. Kita *tidak mau membantu Sukarno* dengan program stabilisasi moneter atau menawarkan bantuan-bantuan lain. Kita masih menunggu bagaimana krisis politik yang ada sekarang ini akan diselesaikan. Kita juga ingin mengaitkan bantuan yang kita berikan dengan *kebutuhan meningkatkan hubungan diplomatik serta mengaitkannya dengan perubahan dalam kebijakan-kebijakan* Indonesia. Pihak Militer Indonesia telah menyatakan menolak bantuan ekonomi luar negeri yang sifatnya publik hingga tercapainya suatu perubahan politik tertentu—apa perubahan yang dimaksud, tidak jelas.

Kehendak kita untuk memenuhi permintaan bantuan oleh Indonesia mungkin akan terhalang oleh *ketegangan antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan-perusahaan minyak A.S. di Indonesia*. Tekanan terhadap perusahaan-perusahaan minyak itu terus berlanjut sejak Kudeta 1 Oktober.

25

Menurut Green, *enam bulan ke depan adalah bulan-bulan yang amat menentukan*. Tn. Presiden mungkin bisa menanyakan beberapa hal ini padanya:

1. Apakah kebijakan kita saat ini masih bisa diteruskan mengingat masih kuatnya keinginan Sukarno untuk merebut kembali kekuasaannya.
2. Sebuah pertanyaan yang lebih konkret dapat diajukan padanya, yakni *apakah bantuan* rahasia untuk militer akan bisa membantu menempatkan mereka pada posisi yang lebih baik dalam rangka menghentikan upaya Sukarno untuk kembali pada kebijakan-kebijakan radikal kirinya.¹¹

Kita memiliki *channel* dengan kelompok militer yang dapat kita mintai tolong jika bantuan rahasia yang lebih besar dirasa perlu untuk diberikan. Sejauh ini kita telah membatasi diri pada penyediaan alat-alas medis dan perlengkapan komunikasi.

R.W. Komer



Duta Besar Marshall Green berbincang-bincang dengan Presiden Soeharto di kediamannya. (Dok: ANRI)

Duta Besar Marshall Green

44

Dubes Green pernah menjabat sebagai **Deputi Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Timur Jauh**. Dia asli Massachusetts, lulusan Sekolah Groton dan Universitas Yale. Ia telah bertugas sebagai Dubes untuk Indonesia sejak bulan Juni 1965.

Dubes Green memulai kariernya di luar negeri sebagai sekretaris pribadi Dubes Joseph Grew di Tokyo persis sebelum mulainya Perang Dunia II. Selama perang ia bekerja sebagai petugas bahasa untuk Angkatan Laut.

Sebagai Pejabat Urusan Luar Negeri ia telah ditugaskan di Auckland, Stockholm, the National War College, Seoul, dan Hong Kong, serta Biro Urusan Timur Jauh. Pangkatnya adalah Career Minister dan, pada tahun 1959, oleh Departemen Luar Negeri ia mendapat medali Meritorius Service Award.

Ia menikah dengan Lispenard Seabury Crocker dari New York dan dikaruniai tiga orang anak laki-laki.

6. Indonesia Belum Butuh Bantuan

Dokumen berikut berisi catatan dari percakapan antara Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Dean Rusk, Dubes Marshall Green, dan H. Kent Goodspeek, seorang Staf Menlu untuk Urusan Indonesia. Dalam percakapan yang diadakan di Washington tanggal 14 Februari 1966 itu dibahas situasi terakhir di Indonesia. Green melaporkan adanya banyak perkembangan di Indonesia sejak 1 Oktober 1965, namun gerakan ke arah perubahan masih pelan. Kharisma Bung Karno masih kuat, sementara itu tentara masih ragu-ragu untuk menyingkirkan Sang Presiden. Satu-satunya harapan, menurut Green, datang dari kelompok-kelompok mahasiswa.

Sementara itu ekonomi Indonesia rusak berat. Sampai saat itu utang Indonesia mencapai US\$2,5 miliar. Dalam situasi demikian sejumlah utusan militer Indonesia mendekati Amerika secara diam-diam untuk menyatakan bahwa mereka tidak membutuhkan bantuan asing.

Satu hal yang juga menarik untuk disimak adalah posisi Uni Soviet berkaitan dengan Tragedi 1965. Oleh dokumen ini dikatakan bahwa Soviet berada dalam situasi yang “memalukan”. Militer Indonesia (khususnya Angkatan Darat) yang selama ini mereka bantu justru dengan antusias menghancurkan Partai Komunis Indonesia. Pada saat yang sama, Soviet juga tidak terlalu kecewa mengingat bahwa partai komunis yang ditindas itu adalah partai komunis yang tidak lagi berorientasi ke Uni Soviet, melainkan ke Cina.

Atas itu semua Menlu Rusk menanggapi dengan mengatakan bahwa bantuan kepada Indonesia hanya diberikan dengan syarat-syarat tertentu.

INDONESIA-KONSULTASI¹²

1. Duta Besar Green menjelaskan situasi terkini Indonesia, empat setengah bulan setelah kegagalan kudeta yang didalangi komunis pada 1 Oktober. Dia menyampaikan adanya beberapa hasil yang menggembirakan, meskipun kebanyakan bersifat negatif: PKI telah dihancurkan sebagai sebuah kekuatan politik yang efektif masa depan; poros Jakarta-Peking berantakan; solidaritas Afrika-Asia tidak jelas; citra pribadi Sukarno kini sedang dipertanyakan. Pada saat yang sama ideologi Sukarno masih tetap menjiwai rakyat Indonesia,

Soebandrio dan sejumlah menteri lain masih mampu mempertahankan kekuasaan mereka, dan momentum yang ada pada bulan November dan Desember berkaitan dengan kemungkinan untuk memperbaiki struktur pemerintahan secara drastis telah hilang, antara lain karena militer takut akan terjadinya kerusuhan sosial. Dalam arti tertentu militer lebih mementingkan persatuan di atas segalanya, sehingga enggan bertindak. AD serta kelompok-kelompok politik Muslim yang sama-sama berkepentingan untuk mencegah bangkitnya kembali kelompok komunis yang telah dihancurkan melalui pembunuhan besar-besaran, akan tetap mencegah bangkitnya kembali PKI. Militer juga akan mencegah dibukanya kembali hubungan dengan Cina Komunis. Lebih dari itu, tampaknya militer enggan untuk secara terang-terangan melawan Sukarno. Sementara itu, ternyata Sukarno tetap mampu mempertahankan kharismanya di mata rakyat Indonesia dan tetap dihormati oleh generasi tua di lingkungan politik maupun militer.

2. Sejauh ini dorongan untuk perubahan datang dari kalangan generasi muda, khususnya dari kelompok-kelompok mahasiswa. Hal itu muncul akibat adanya ketidakpuasan atas pemerintahan yang kacau dan kondisi ekonomi yang semakin runyam. Inflasi dan peningkatan dalam peredaran uang terus berlangsung, dan daerah-daerah tertentu kekurangan bahan pangan. Lebih lanjut, kehidupan ekonomi yang selama bertahun-tahun bertumpu pada pinjaman asing telah menimbulkan krisis mata uang asing yang berat yang kemungkinan akan mendorong perubahan politik. Utang luar negeri Indonesia sekarang ini kira-kira US\$2,5 miliar, dan yang harus dibayar pada tahun 1966 ini kira-kira US\$470 juta. Mengingat bahwa pendapatan dalam bentuk mata uang asing akan berkisar antara US\$450 juta, pembayaran utang luar negeri harus dijadwal ulang. Meskipun begitu, sampai sejauh ini Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda ingin bicara dengan kelompok negara-negara pengutang atau menunjukkan diri siap memecahkan masalah-masalah yang ada secara rasional guna menarik negara-negara lain untuk memberi bantuan lebih lanjut. Militer mengambil posisi jaga jarak terhadap masalah-masalah ekonomi yang melanda Indonesia. Dan meskipun pihak militer telah mengirim orang-orang untuk bicara mengenai situasi yang ada sekarang, secara diam-diam mereka menyatakan bahwa untuk sementara ini tidak butuh bantuan asing.

3. Ketika memberi penjelasan mengenai hubungan Indonesia dengan negara-negara lain, Dubes Green mengatakan bahwa posisi AS sekarang ini sedikit lebih baik daripada sebelum 1 Oktober. Sementara itu hubungan Indonesia dengan Komunis Cina semakin memburuk, dan hubungan Indonesia-Uni Soviet sedang sulit. Pihak Rusia sedang berada dalam situasi yang memalukan: militer Indonesia yang selama ini mereka bantu justru sedang menghancurkan sebuah partai komunis, yakni PKI. Namun pada saat yang sama mereka senang juga, karena yang dihancurkan itu adalah sebuah partai komunis yang berorientasi

ke Cina. Uni Soviet mungkin tidak keberatan kalau perkembangan di Indonesia nantinya menyerupai India, di mana Uni Soviet dan Amerika Serikat sama-sama memberi bantuan, sedang Cina ngacir keluar.

4. Menlu Rusk mengatakan bahwa jika AS mampu memainkan peran di Indonesia lagi, terutama berkaitan dengan pemberian bantuan ekonomi, ada dua persyaratan yang harus dipenuhi. *Satu*, harus ada pemecahan yang memuaskan atas masalah Konfrontasi Malaysia. *Dua*, harus ada kebijakan yang sifatnya rasional terhadap perusahaan-perusahaan minyak AS yang ada di Indonesia. Pengambilalihan perusahaan-perusahaan itu oleh Indonesia akan membuat diberlakukannya Amandemen Hickenlooper.¹³ Dubes Green mengatakan bahwa militer Indonesia menganggap Konfrontasi sebagai penghambur-hamburan sumber daya Indonesia yang justru mengurangi kemampuan militer untuk mengatasi masalah-masalah dalam negeri. Menurutny masalah Konfrontasi ini tidak akan diselesaikan melalui perundingan resmi, melainkan dengan cara mengurangi kekuatan militer di Malaysia sedikit demi sedikit sampai nanti berhenti sendiri. Perusahaan-perusahaan minyak AS kini sedang mengalami problem serius, namun Dubes Green berharap bahwa melalui pendekatan yang berwawasan luas dan tenang dalam melakukan negosiasi, perusahaan-perusahaan itu akan tetap bisa beroperasi di Indonesia. Namun jika perusahaan-perusahaan itu dipaksa untuk keluar, semoga saja mereka keluar sedemikian rupa sehingga tidak akan menimbulkan reaksi anti-Amerika yang justru akan sangat merugikan.

7. Amerika dan Transisi yang Berkepanjangan

Pada hari Selasa, 15 Februari 1966 jadi diadakan pertemuan antara Presiden Lyndon B. Johnson dengan Dubes Marshall Green di Gedung Putih, Washington. Selain Presiden dan Dubes, hadir pula dalam pertemuan itu Asisten Sekretaris William P. Bundy dan anggota National Security Council Robert W. Komer. Pertemuan berlangsung antara jam 11:15 hingga 12:20 waktu setempat.

Dalam pertemuan itu Green antara lain melaporkan bahwa Indonesia sedang berada dalam “fase transisi berkepanjangan dari Sukarno ke seorang pengganti yang sampai sekarang masih belum jelas.” Dalam situasi demikian ia menganjurkan agar Amerika mengambil sikap low profile dan tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan publik yang akan dapat menimbulkan salah tafsir. Berkaitan dengan soal keinginan Amerika untuk memberikan bantuan, Green menganjurkan untuk menahan diri dulu mengingat bahwa

para pejabat tinggi militer di Indonesia telah secara sembunyi-sembunyi menyatakan “menolak bantuan apa pun dari luar”. Militer takut bahwa bantuan dari luar akan menguntungkan kubu Sukarno-Soebandrio.

Berikut ini adalah bagian dari laporan resmi atas pertemuan tersebut.

INDONESIA¹⁴

Sesuai permintaan Presiden, Dubes Green membicarakan perkembangan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini serta prospeknya ke masa depan. Ia kemudian menutup pembicaraannya dengan memberikan sejumlah rekomendasi umum mengenai kebijakan Amerika Serikat terhadap Indonesia. Dubes Green mengemukakan bahwa, meskipun hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat masih jauh dari memuaskan, kudeta yang gagal pada tanggal 1 Oktober lalu telah mengakibatkan [a] hancurnya Partai Komunis; [b] hilangnya prestise internasional Peking, yang diduga terlibat di dalamnya; [c] semakin memburuknya hubungan antara Indonesia dan Cina Komunis; [d] hancurnya mimpi Sukarno sebagai pemimpin “kekuatan baru yang bangkit” (*the new emerging forces*) melawan dunia Barat; serta [e] hilangnya kehormatan dan harga diri Sukarno di mata rakyatnya sendiri. Meskipun demikian, Sukarno masih tetap berdiri sebagai Presiden dan Pemimpin Revolusi. Dalam arti tertentu dia berhasil mempermainkan perpecahan dan ketakutan yang ada pada pihak lawan-lawannya dalam rangka merebut kembali kekuasaan. Dia tampaknya tetap bersikukuh untuk kembali mengarahkan revolusi ke kiri. Dia itu cerdik dan sangat persuasif, dan kelihatannya masih menyimpan kekuatan fisik yang luar biasa.

Menurut Dubes Green, kelompok perlawanan terhadap Sukarno yang dipimpin oleh militer, meskipun tidak ingin secara langsung atau frontal menghadang Sukarno, sangat menentang kebangkitan kembali Partai Komunis dalam bentuk apa pun dan sangat ingin memutus hubungan diplomatik dengan Cina. Kelompok oposisi juga ingin supaya bisa mengorganisir diri dengan lebih baik dan langkah-langkah yang lebih pragmatis di dalam pemerintahan. Akan tetapi, karena takut akan adanya kemungkinan terjadinya kerusuhan sosial, karena khawatir akan terbaginya loyalitas para personel militernya, dan mengingat bahwa banyak dari mereka telah terjangkit Sukarnoisme, militer enggan untuk secara langsung melawan Sukarno. Militer juga enggan memikul terlalu banyak tanggung jawab terhadap berbagai peristiwa yang terjadi selama ini di Indonesia, kalau yang terjadi terus-menerus di Indonesia adalah kemerosotan ekonomi dan politik.

Dubes Green merasa bahwa kekacauan ekonomi yang semakin parah, terutama krisis pertukaran mata uang asing dan kecenderungan

berbagai kementerian untuk menghindari Bank Pusat, tampaknya akan membuat suasana makin tegang selama kira-kira enam bulan mendatang. Selama beberapa waktu mendatang situasi di Indonesia akan menjadi sangat kacau, katanya, dan tidaklah mudah untuk melakukan prediksi secara akurat mengenai bagaimana nanti akhir dari semuanya ini. Apa yang tampaknya relatif jelas adalah bahwa saat ini kita sedang berada di dalam sebuah fase transisi berkepanjangan dari Sukarno ke seorang pengganti yang sampai sekarang masih belum jelas.

Dalam situasi seperti ini, menurut Dubes Green, Amerika Serikat harus terus tetap bersikap *low profile* dan menahan diri. Dubes mengatakan, dia sangat menghargai sekaligus menganjurkan bahwa pemerintah Ameril⁸ mulai dari Presiden sampai para bawahannya telah menahan diri untuk tidak memberikan pernyataan-pernyataan publik mengenai Indonesia. Terus mempertahankan sikap *low profile* ini penting, mengingat bahwa apa pun yang dikatakan atau dilakukan oleh Amerika Serikat mengenai Indonesia sangat rentan terhadap distorsi dan misinterpretasi. Kita terus⁸ ja dicurigai mau turut campur dalam urusan mereka. Pahadal hal itu tidak kita lakukan dan memang jangan sampai kita lakukan.

Presiden Johnson menanyakan apakah seluruh bantuan Amerika Serikat kepada Indonesia, termasuk bantuan kepada militer Indonesia, telah dihentikan. Dubes Green mengatakan bantuan ke Indonesia memang telah dihentikan, dan dia merekomendasikan agar Amerika Serikat tidak memperluas bantuan lain kepada Indonesia sampai Indonesia bisa menata diri kembali. Dia mengatakan bahwa Sukarno terang-terangan menolak bantuan apa pun dari Amerika Serikat kepada Indonesia, sementara para petinggi militer Indonesia telah secara sembunyi-sembunyi menyampaikan kepada kita dan kepada Jepang bahwa untuk saat ini mereka menolak bantuan apa pun dari luar, karena bantuan dari luar akan menguntungkan Sukarno dan Soebandrio.

Namun demikian, Dubes merasa bahwa berkaitan dengan soal bantuan, kita harus tetap bersikap terbuka terhadap berbagai kemungkinan. Siapa tahu, suatu keadaan tertentu tiba-tiba muncul, dan membantu Indonesia dengan beras dalam jumlah terbatas ternyata penting. Bisa jadi bantuan macam itu penting berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, atau untuk mencegah kerusuhan dan kekacauan yang bisa timbul karena kurangnya pangan, sehingga bisa membahayakan orang-orang asing yang ada di Indonesia.

Jika Indonesia sungguh-sungguh mengambil langkah serius untuk menata diri kembali, maka menurut Dubes Green kita harus siap untuk mengulurkan tangan, terutama melalui usaha-usaha bersama secara internasional, atau melalui badan-badan internasional seperti ADB (Asian Development Bank).

Rekomendasi

Presiden mengatakan bahwa dia sangat menghargai hasil-hasil pengamatan yang telah disampaikan tadi, dan bahwa dia akan menyerahkan kepada Dubes Green soal apa dan bagaimana langkah-langkah praktis yang perlu diambil berkaitan dengan waktu dan pertimbangan-pertimbangan yang tepat bagi Amerika Serikat untuk memberikan bantuan kepada Indonesia.

8. AS Menolak Membantu Indonesia

Di tengah keinginan Washington untuk bersikap hati-hati dalam hal memberi bantuan kepada Indonesia, muncul seorang spekulan bernama Achmad yang mengaku mewakili pemerintah Jakarta. Achmad ingin mendesak pemerintah Amerika untuk membantu Indonesia. Caranya Amerika membeli beras dari Thailand, lalu Thailand mengirimkan beras itu ke Indonesia. Achmad bermaksud “mewakili” pihak Indonesia sebagai penerima beras itu. Sebagaimana tampak dalam telegram 15 Februari dari Menlu AS Rusk kepada Dubes AS di Bangkok dan Jakarta ini, Amerika menolak permintaan tersebut. Alasannya, Soeharto dan Nasution masih belum mau menerima bantuan asing.

Belakangan diketahui bahwa Achmad adalah seorang pialang yang klaim-klaimnya tidak benar.

BANTUAN BERAS UNTUK INDONESIA¹⁵

1. Meskipun kita bersimpati kepada masalah-masalahnya militer Indonesia, kita tidak bisa memenuhi permintaan Achmad. Keputusan ini telah disetujui oleh Dubes Green, dengan berdasar pada pertimbangan-pertimbangan berikut:

- A. Sementara kita tidak punya alasan untuk mempertanyakan otoritas yang dimiliki oleh Achmad untuk membeli beras dari Thailand, dia belum mendapat kuasa untuk meminta Amerika terlibat dalam hal ini. Lebih dari itu kita tidak punya bukti yang menunjukkan bahwa Nasution dan Soeharto telah berubah pendapat soal belum dibutuhkannya bantuan luar negeri.
- B. Tidak ada perubahan situasi politik internal di Jakarta yang mendorong kita untuk mengubah kebijakan kita terhadap Indonesia. Sehubungan dengan hal ini perlu diingat bahwa

Sukarno telah memberikan pernyataan publik yang mendukung PKI dalam pidato di depan massa pada tanggal 13 Februari, menyerang kebijakan Amerika, dan mengulangi slogan-slogan lama.

- C. Ada indikasi bahwa militer memiliki akses langsung kepada pendapatan luar negeri Indonesia yang akan dapat mereka alokasikan untuk membeli beras jika situasi menjadi genting.
 - D. (Untuk diketahui, pemerintah Indonesia praktis sudah memenuhi pembayaran sebesar US\$18 juta untuk membayar dua buah pesawat DC-8 yang akan dikirim dalam beberapa bulan mendatang. Selain itu pemerintah Indonesia juga telah memerintahkan pengeluaran sebesar US\$11 juta untuk proyek CONEFO.)
2. Saya mengusulkan supaya Anda menghubungi Achmad, [*beberapa kata dirahasiakan*] memberi jawaban dengan pokok-pokok sebagai berikut:
- A. Kita bersimpati terhadap permasalahan Indonesia;
 - B. Setelah mempertimbangkannya secara masak-masak, kita melihat tidak mungkin merahasiakan permohonannya;
 - C. Bantuan terbuka dari pemerintah Amerika tidak dimungkinkan karena penolakan resmi pemerintah Indonesia terhadap bantuan AS;
 - D. Pada satu sisi kami ingin membantu, tapi pada sisi lain situasi belum mengizinkan.

Rusk

9. Soeharto Mengancam Amerika Serikat?

Dokumen berikut ini sangat menarik. Tampaknya Jenderal Ali Moertopo pernah memberi kesan kepada Soeharto bahwa Amerika akan mau membantu Indonesia dengan mengirim 200 ribu ton beras, jika Soeharto mau menyelesaikan masalah Malaysia dengan damai. Ternyata hal itu tidak benar, karena Amerika memang belum berencana untuk membantu Indonesia. Atas keengganan AS mengirim beras ke Indonesia Soeharto “marah dan kecewa”. Ia pun mengancam akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika. Bahkan sempat dikatakan mengenai adanya kaset di tangan Soeharto dan Ali Moertopo yang dapat membuktikan bahwa Amerika telah

turut mendanai demonstrasi-demonstrasi mahasiswa. Amerika menolak tuduhan itu.

Aslinya dokumen ini adalah telegram rahasia dari Departemen Luar Negeri AS di Washington untuk Kedubes AS di Jakarta, tanggal 17 Februari 1966.

BANTUAN UNTUK INDONESIA DAN MASALAH KONFRONTASI¹⁶

1. Daan Mogot—ditemani oleh Jan Walandouw dan pengacara dari Washington Max Kampelman (yang memiliki rekanan bisnis Amerika di Indonesia)—menemui Berger dan menceritakan hal berikut ini:
2. Sebagai kelanjutan atas pertemuannya dengan Berger tanggal 14 Januari, ia kembali ke New York dan bertemu dengan Kepala Intelijennya Jenderal Soeharto, yakni Kolonel Ali Moertopo. Di sana Moertopo bertemu secara pribadi dengan [*beberapa kata dirahasiakan*]. Melalui sebuah pembicaraan yang panjang lebar dengan Moertopo, [wakil pihak Amerika] membahas soal kemungkinan pembelian 200.000 ton beras melalui pihak ketiga [*beberapa kata dirahasiakan*] dan memberi kesan bahwa Amerika akan menyediakan beras itu jika Jenderal Soeharto dapat menyelesaikan masalah Malaysia melalui “penyelesaian diplomatik”.
3. Moertopo kemudian kembali ke Jakarta dan melaporkan hasil pembicaraan [*satu kata dirahasiakan*] Soeharto kemudian mengadakan pertemuan dengan para komandan militer tanggal 1–5 Februari. Militer setuju untuk mulai melakukan upaya diplomatik guna menyelesaikan masalah Malaysia. Moertopo kemudian melakukan kontak dengan seorang staf Kedutaan AS di Kebayoran yang namanya “mirip nama Polandia”. Staf itu mengatakan bahwa Amerika tidak dapat memberikan bantuan kepada militer Indonesia sampai situasi politik internal menjadi lebih jelas. Moertopo melaporkan hal itu kepada Soeharto. Soeharto marah dan kecewa, lalu bersama para panglima militer memutuskan untuk tidak jadi mengupayakan solusi diplomatik bagi penyelesaian masalah Malaysia. Selanjutnya dalam beberapa bulan mendatang operasi militer terhadap Malaysia akan ditingkatkan. Meningkatnya tekanan militer ini akan disertai dengan pemutusan diplomatik dengan Inggris dan Amerika.
4. Berger mengatakan bahwa Jenderal Soeharto bersedia untuk berkomunikasi dengan Dubes kita di Jakarta setiap saat. Dubes diberi kekuasaan penuh untuk bicara atas nama pemerintah Amerika mengenai hubungan kedua negara. Dia mengatakan bahwa 94 kita bersimpati terhadap masalah-masalah Indonesia namun tidak banyak hal yang dapat kita lakukan untuk membantu sampai pihak Indonesia

mampu menciptakan situasi di mana bantuan dari kita dapat diberikan secara terbuka dan akan efektif hasilnya. Dia menanyakan apakah kita perlu memahami pernyataan Daan Mogot bahwa Jendral Soeharto mengancam tindakan militer terhadap Malaysia jika kita tidak mengirim beras ke Indonesia.

5. Daan Mogot menolak pemikiran itu tetapi mengatakan bahwa Soeharto berharap, beras itu akan dapat menjadi “jembatan” bagi sikap saling memahami antara pemerintah Amerika dengan militer. Ia kemudian mengatakan bahwa Soeharto dan Moertopo memiliki bukti dalam bentuk rekaman pembicaraan bahwa sejumlah Jenderal telah diberi dana oleh “staf Kedutaan”. Sejumlah Jenderal mengklaim bahwa uang itu digunakan untuk mendanai demonstrasi-demonstrasi mahasiswa serta kegiatan politik kelompok-kelompok [agama tertentu] dan kelompok-kelompok kanan lain. Berger menolak tuduhan ini.

6. Dalam pembicaraan itu Daan Mogot memberikan komentar tambahan berikut ini:

- A. Misi pembelian beras Achmad ke Bangkok itu berdasar persetujuan dengan Atase Militer Thailand, dilaksanakan melalui keponakan Atase Militer tersebut di Bangkok. Soeharto mendapatkan bahwa ternyata perusahaan yang diwakili keponakan itu fiktif, dan bahwa pemerintah Thailand tidak mendukung kesepakatan tersebut.
- B. Sebulan sebelum tanggal 1 Oktober [1965] pihak komunis melakukan pembunuhan-pembunuhan atas elemen-elemen muslim di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Setelah terjadinya kudeta elemen-elemen muslim tersebut melakukan pembalasan. Sebagai akibatnya hanya ada sedikit padi yang ditanam di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan beras yang dihasilkannya akan sangat sedikit.
- C. Soebandrio akan terkena imbas dari pengadilan-pengadilan yang sedang berlangsung sekarang dan pasti akan tersingkir setelah pengadilan-pengadilan itu selesai.
- D. Soeharto berharap Amerika dapat memainkan peran sebagai penengah dalam penyelesaian masalah Malaysia.

7. KOMENTAR: Laporan mengenai pembicaraan Ali Moertopo di New York [*beberapa kata dirahasiakan*] menunjukkan bahwa tuduhan mengenai Amerika membantu mengirim beras sebagai imbalan atas penyelesaian masalah Malaysia secara damai sama sekali tidak berdasar. Tampaknya Ali Moertopo sedang memainkan suatu permainan berbahaya. Mungkin demi kepentingannya sendiri ia mencoba menipu Soeharto tentang niat Amerika Serikat. Mohon komentar dari Kedutaan [*satu kata dirahasiakan*].

Ball

Catatan akhir:

- 1 A. Pambudi, *Supersemar Palsu: Kesaksian Tiga Jenderal* (Yogyakarta, Media Pressindo, 2006), hlm. 109.
- 2 Pambudi, 133.
- 3 Pambudi, 110.
- 4 Pambudi, 113.
- 5 Pambudi, 109.
- 6 Telegram dari Kedutaan Besar AS (Jakarta) kepada Departemen Luar Negeri (Washington), 2 Februari 1966. Sumber: *Foreign Relations of the United States, 1964–1968, Vol. XXVI. Indonesia; Malaysia-Singapore; Philippines* (Washington: United States Government Printing Office, 2001), n. 395–399.
- 7 Sukarno, *An Autobiography As Told to Cindy Adams*. New York: The Bobbs-Merill Company, Inc., 1965.
- 8 Surat dari Cindy Adams kepada Mr. Jack Valenti, 3 Februari 1966. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, Gen CO 122 Indonesia. #3.
- 9 Central Intelligence Agency, Office of Current Intelligence, “Kelompok Total Indonesia”, Memorandum Intelejen, 4 Februari 1966. Status: Rahasia. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #113.
- 10 W. Komer, bahan *briefing* untuk Presiden Johnson, Washington, 12 Februari 1966. Status: Rahasia. *Foreign Relations of the United States, 1964–1968, Vol. XXVI. Indonesia; Malaysia-Singapore; Philippines* (Washington: United States Government Printing Office, 2001), hlm. 402–404. Sumber: Johnson Library, National Security File, Data-data Robert W. Komer, Indonesia, Nov 63 hingga Mar 66, (1 sampai 3). Rahasia. Catatan ini sebenarnya dipersiapkan sebagai *draft* memorandum kepada Presiden, tetapi Komer merubahnya menjadi Catatan *Briefing* untuk pertemuan Presiden dengan Marshall Green pada tanggal 15 Februari; Lih. Document 194 [FRUS]. Tersisip tetapi tidak tercetak, sebuah sketsa biografi singkat mengenai Green. Di Departemen Luar Negeri juga telah menyiapkan sebuah makalah singkat 12 Februari untuk Presiden (National Archives and Records Administration, RG 59, EA/Indonesia Files: Lot 70 D 3, PER 9-3 Consultation).
- 11 Tanggal 10 Februari Komer mengirim sebuah memorandum kepada Presiden guna mendapatkan persetujuan mengenai pertemuan dengan Green. Di dalam memorandum tersebut, dia menuliskan bahwa “Perjuangan kekuasaan antara Sukarno dan Angkatan Darat merupakan cerita terbesar kedua di Asia Tenggara” dan hasilnya masih belum pasti. Komer mengusulkan untuk memberi “sedikit lagi bantuan tersembunyi kepada Angkatan Darat; atau paling tidak memberi tahu mereka bahwa kita akan melakukannya jika dan ketika mereka sungguh-sungguh dapat menempuh langkah-langkah yang tepat. Sepatah kata dari Tn. Presiden kepada Green akan mendorongnya untuk memikirkan kemungkinan pengiriman bantuan sementara.” (Johnson Library, National Security File, Memos to the President, McGeorge Bundy, Vol. 20, Feb. 5–28, 1966). # 111 dan 111a.
- 12 Memorandum Percakapan, “Indonesia-Konsultasi”, Washington, 14 Februari 1966. *Foreign Relations of the United States, 1964–1968, Vol. XXVI. Indonesia; Malaysia-Singapore; Philippines* (Washington: United States Government Printing Office, 2001), hlm. 399–401.
- 13 Amandemen Hickenlooper adalah amandemen terhadap Undang-undang Bantuan Asing tahun 1961 yang kemudian direvisi tahun 1963. Amandemen itu melarang pemerintah Amerika memberikan bantuan kepada negara asing yang mengambil alih perusahaan dan aset milik Amerika tanpa kompensasi.
- 14 “Memorandum Pertemuan” Perihal: Indonesia. Washington, 15 Februari, 1966 (11.55 a.m.–12.20 p.m.). *Foreign Relations of the United States, 1964–1968, Vol. XXVI. Indonesia; Malaysia-Singapore; Philippines* (Washington: United States Government Printing Office, 2001), hlm. 404–406. Sumber: National Archives and Records Administration, RG 59, Central Files 1964–66, POL INDON-US. Rahasia. *Draft* disusun oleh Green dan disetujui di Gedung Putih tanggal 23 Februari. Pertemuan ini bersifat *off the record*. Catatan mengenai waktu pertemuan diambil dari buku harian Presiden. (Johnson Library).
- 15 Telegram dari Menlu Dean Rusk untuk Bangkok dan Jakarta, 15 Februari 1966. Status: Rahasia/Distribusi Terbatas. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #110d.
- 16 Telegram Dari Departemen Luar Negeri (Washington) ke Kedutaan Besar Amerika (Jakarta), 17 Februari 1966. Status: Rahasia. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #82.

Bab 3

Maret 1966: Amerika, Supersemar dan Kudeta Khas Indonesia

1. Pengantar

¹² PADA BULAN Maret 1966 tampaknya ketegangan antara kubu Bung Karno dan kubu Soeharto makin tak terhindarkan. ⁴ Pada tanggal 6 bulan itu Soeharto menyampaikan *warning* kepada Bung Karno bahwa ada ketidakpuasan di kalangan perwira ABRI. Dua hari kemudian, yakni tanggal 8 Maret, Bung Karno mengeluarkan surat kepada jajaran ABRI untuk mengatakan bahwa dia masih Presiden RI. Tiga hari setelah itu, yakni bulan Maret tanggal 11, adalah tanggal yang sulit terlupakan dari ingatan kolektif bangsa ini. Itulah tanggal di mana terjadi salah satu peristiwa yang paling bersejarah dalam perjalanan bangsa ini sejak Proklamasi Kemerdekaan.

Sebagaimana telah kita lihat di depan, hari itu, Jumat 11 Maret 1966 ³⁷ sedianya Bung Karno memimpin Sidang Kabinet Yang Disempurnakan di Istana Merdeka, Jakarta. Dengan alasan sakit, Soeharto adalah ⁴⁴ satu-satunya menteri yang tidak hadir dalam sidang tersebut. Sementara itu di luar istana mahasiswa berdemo untuk menyampaikan tuntutan-tuntutan mereka. ¹ Ketika Bung Karno sedang menyampaikan sambutan pembukaan Brigadir Jenderal M. Sabur (Komandan Resimen Cakrabirawa) masuk ke ruang

sidang. Dengan ekspresi agak panik ia bermaksud memberi tahu Brigjen Amir Machmud yang juga hadir dalam sidang itu, bahwa di sekitar Monas sedang bergerak pasukan tak dikenal, pasukan yang tidak mengenakan atribut kesatuan mereka. Berhubung Amir Machmud menolak untuk keluar, Sabur langsung memberi tahu Bung Karno. Bung Karno juga ikut panik dan menyerahkan pimpinan sidang pada Waperdam II Leimena. “Saya serahkan pimpinan sidang ke *you*,” kata Bung Karno ke Leimena waktu itu. Selanjutnya ia bergegas keluar dan bersama Waperdam Soebandrio naik helikopter ke Bogor.

Belakangan diketahui bahwa “pasukan tak dikenal” atau “pasukan liar” itu adalah pasukan Angkatan Darat yang berjumlah dua kompi atau 80 personil yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edhi Wibowo. Sarwo Edhi mendapat perintah dari Kemal Idris, sedang Kemal Idris sendiri mendapat instruksi mengenai pengerahan pasukan tanpa atribut itu dari Letjen Soeharto. Dikatakan, semula mereka ditugaskan untuk menangkap menteri-menteri yang dipandang dekat dengan Bung Karno dan berhaluan kiri seperti Soebandrio. Apa pun latar belakangnya, kehadiran pasukan liar itu telah membuat Brigjen Sabur panik, dan selanjutnya juga membuat Bung Karno turut panik dan lari ke Bogor.

Tak lama setelah kepergian Bung Karno ke Bogor itu tiga orang Brigadir Jenderal, yakni Basuki Rachmat, M. Jusuf, dan Amir Machmud bertandang ke rumah Letjen Soeharto di Jalan Agus Salim no. 98 Jakarta. Di sana mereka berembuk dan siang itu juga ketika Brigadir Jenderal itu ditugaskan untuk menemui Bung Karno di Bogor. Tampaknya agak lama mereka berargumentasi soal penting atau tidaknya dibuat suatu surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengamankan situasi. Setelah agak lama terjadi tarik-ulur antara Bung Karno dan ketiga tamunya itu akhirnya Bung Karno setuju untuk menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar, sebagaimana juga telah kita lihat pada bagian Pengantar buku ini.

Berbekal naskah Supersemar tersebut ketiga Brigadir Jenderal itu kembali ke Jakarta untuk menyerahkannya kepada Soeharto dan kawan-kawan yang memang telah menunggu-nunggu. Apa persisnya yang terjadi

Setelah itu, ada banyak versi cerita. Yang jelas malam itu juga Soeharto dan kawan-kawan bekerja keras untuk melahirkan surat Keputusan Presiden No. 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966 yang ia tanda tangani. Pagi hari jam 06:00 tanggal 12 Maret 1966 surat itu diumumkan, dan isinya adalah secara resmi PKI dibubarkan. Kelihatan di sini bahwa Supersemar telah dimanfaatkan oleh Soeharto untuk membubarkan partai, meskipun hal itu sebenarnya merupakan wewenang Presiden. Lebih dari itu, pada hari Sabtu tanggal 13 Maret, Soeharto mengeluarkan seruan agar aparaturnegara di tingkat Pusat maupun Daerah supaya menjaga kelancaran roda pemerintahan (Pambudi: 126).

Pada hari berikutnya, yakni tanggal 14 Maret, melalui Panglima Angkatan Udara Sri Muljono Herlambang, Bung Karno menanyakan kepada Soeharto mengapa tindakan pembubaran PKI itu tidak dilakukan dalam koordinasi dengan Angkatan Udara. Atas pertanyaan itu Soeharto hanya memberi jawaban singkat: "Itu atas tanggung jawab saya." (Pambudi, 56) Setelah itu pada hari yang sama Soeharto mengeluarkan dua keputusan penting. *Pertama*, menyerukan agar semua anggota eks-PKI melaporkan diri. *Kedua*, melarang partai-partai politik dan organisasi massa menerima mantan anggota PKI (Pambudi: 47).

Melihat semakin jauhnya pelaksanaan Supersemar dari maksud semula, pada tanggal 16 Maret Bung Karno berusaha menerangkan isi Supersemar sambil menekankan bahwa dirinya masih berkuasa penuh, termasuk atas Kabinet yang ada. Dia tegaskan, misalnya, sebagai Presiden dialah yang berhak mengangkat atau mencopot seorang menteri Kabinet. Akan tetapi tampaknya Soeharto tidak terlalu peduli pada apa yang dikatakan Bung Karno. Pada tanggal 18 Maret ia justru secara sepihak mengambil keputusan untuk "mengamankan" (artinya menangkap dan menahan) 15 orang menteri Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan. Di antara mereka yang "diamankan" itu adalah orang-orang yang justru dipercaya dan sudah bekerja sama dengan Bung Karno dalam waktu yang lama.¹ Mereka itu misalnya Waperdam I Soebandrio dan Waperdam II Leimena serta Ketua MPRS Chairul Saleh.²

Tampak sekali bahwa Soeharto menggunakan Supersemar yang sebenarnya adalah perintah Presiden (*executive order*) itu sebagai sebuah

“transfer of authority”. Seolah-olah Bung Karno menyerahkan seluruh kekuasaannya kepada Soeharto sehingga Soeharto boleh melakukan apa saja untuk menangani masalah keamanan dan ketertiban seakan-akan negara sedang dalam keadaan perang.³ Dilihat demikian, tampak bahwa yang sedang berlangsung adalah sebuah kudeta, meskipun kudeta itu dilakukan secara perlahan-lahan, atau secara bertahap, atau sebagai sesuatu yang jalannya merangkak.

Melihat itu semua tampaknya Amerika tak keberatan. Sebagaimana dapat dilihat dalam dokumen-dokumen bulan Maret, kelihatan bahwa Amerika sangat mendukung upaya-upaya untuk meminggirkan Bung Karno. Dalam dokumen-dokumen bulan ini, istilah yang sering dipakai untuk kepemimpinan Soeharto adalah istilah “pemerintahan yang baru”. Artinya ada sebuah pemerintahan baru yang menggantikan pemerintahan sebelumnya. Salah satu dokumen bahkan menyebut Supersemar sebagai sebetulnya kudeta, meskipun ditambahi keterangan kudeta yang “khas Indonesia,” yakni kudeta yang dilakukan melalui beberapa tahap. Memang terjadi kesan yang kuat bahwa melalui Supersemar itu telah terjadi suatu perubahan pemerintahan dari pemerintahan di bawah Bung Karno dengan tekanan tertentu menjadi pemerintahan di bawah Letjen Soeharto dengan tekanan yang berbeda. Padahal resminya Bung Karno adalah Presiden RI yang sah.

2. Bantuan Militer untuk Indonesia

Menteri Pertahanan AS, Robert S. McNamara merasa bahwa Amerika Serikat perlu meningkatkan bantuan militer kepada Indonesia melalui program MAP [*Military Assistance Program*]. Hal itu penting, menurut McNamara, demi mempertahankan orientasi non-komunis kalangan militer Indonesia.

Sementara itu militer Indonesia banyak menggunakan bantuan itu untuk Operasi Karya, serta mendesak AS agar membantu mengusahakan penjadwalan kembali pembayaran utang-utang Indonesia. Pada saat yang sama McNamara berusaha melobi Kongres agar bantuan militer untuk Indonesia dapat berjalan mulus. Semua itu dapat dilihat dalam memorandum

tertanggal 3 Maret 1966 yang dikirim oleh Ketua Policy Planning Council W.W. Rostow untuk Presiden Johnson di bawah ini.

**MEMORANDUM DARI W.W. ROSTOW KEPADA
PRESIDEN JOHNSON⁴**

Tn. Presiden:

Menteri Pertahanan McNamara melaporkan kepada Anda dalam memorandum tentang efektifnya program MAP [*Military Assistance Program*] Indonesia dalam mempertahankan orientasi non-komunis di antara orang-orang kunci militer yang sekarang sedang memegang kekuasaan. Ia menyampaikan adanya penghentian program tersebut pada awal 1965 pada puncak kesulitan kita dengan Sukarno, dan dimulainya kembali program itu September lalu setelah terjadi perubahan politik yang radikal di Indoneia.

Level MAP untuk tahun fiskal 1967 adalah US\$2,5 juta. Untuk tahun fiskal 1968, Menhan McNamara memperkirakan jumlahnya akan mencapai US\$6 juta, khususnya untuk membeli peralatan Operasi Karya (*Civic Action*), suku cadang, dan pelatihan di AS. Sebuah tim CINCPAC baru saja menyelesaikan survei di Indonesia tentang efektifnya program level MAP yang baru.

Para pemimpin "Orde Baru" di Indonesia telah memberikan prioritas kepada Operasi Karya. Dengan tepat mereka memandang jaminan dari Dubes Green tentang peningkatan program MAP serta bantuan kita dalam mengupayakan penjadwalan kembali pembayaran utang dan bantuan luar negeri sebagai bukti dukungan kita pada mereka dalam upaya membangun kembali Indonesia.

Menhan McNamara sekarang sedang mempertimbangkan penjelasan tambahan kepada Kongres guna meratakan jalan bagi disahkannya program MAP yang baru.

W.W. Rostow

3. Menyingkirkan Bung Karno dalam Dua Tahap

Ada tiga pemain utama yang menurut Kedubes Amerika berperan dalam dinamika sosial-politik Indonesia pada periode ini. Masing-masing adalah Mahasiswa, Tentara, dan Bung Karno. Amerika senang bahwa mahasiswa makin berani, dan Bung Karno makin kehilangan pamornya. Akan tetapi

tetap saja ada satu hal yang mengganjal, yakni ketidaktegasan militer untuk memihak mahasiswa dan melawan Bung Karno. Masih terdapat indikasi bahwa militer enggan mendukung mahasiswa, sehingga justru mahasiswa yang menurut dokumen di bawah harus “menggiring tentara agar segera bergerak”.

Selanjutnya Amerika memperkirakan kecilnya kemungkinan militer secara langsung menyingkirkan Sukarno. Yang lebih mungkin dilakukan adalah bahwa tentara akan menggeser Bung Karno dari panggung kekuasaan melalui dua tahap, mengikuti prinsip “kudeta merangkak”. Pada tahap yang pertama, yang mau disingkirkan adalah orang-orang di sekitar Bung Karno, seperti Soebandrio, dan lain-lain. Baru pada tahap kedua, Presiden Sukarno akan menjadi sasaran utama. Apa pun yang terjadi, pihak Amerika sangat berharap bahwa cepat atau lambat pemerintahan Bung Karno akan runtuh.

16

**TELEGRAM DARI KEDUTAAN BESAR (JAKARTA)
UNTUK DEPARTEMEN LUAR NEGERI
(WASHINGTON)⁵**

1. Berikut ini adalah analisis pihak Kedutaan Besar atas situasi politik dan proyeksinya ke masa depan yang ditulis berdasarkan pengamatan atas situasi Indonesia yang kini masih sangat cair dan mudah berubah itu.
2. Pada minggu-minggu terakhir ini taktik-taktik para pelaku politik utama sudah semakin terlihat jelas. Para pelaku itu adalah:
 - A. **Mahasiswa.** Para mahasiswa tampaknya menyadari bahwa mereka tidak akan bisa menumbangkan Pemerintah Indonesia dengan kekuatan mereka sendiri, dan bahwa tentaralah yang akan mampu melakukannya. Akan tetapi, mereka merasa bahwa pihak tentara sudah terlalu lama menunggu-nunggu, dan terdorong untuk menggiring tentara agar segera bergerak. Maka dari itu, demonstrasi dan aktivitas-aktivitas mereka yang lain dirancang untuk memaksa tentara supaya segera bertindak.
 - B. **Tentara.** Menurut [*kurang satu baris dirahasiakan*] melaporkan bahwa militer berharap untuk bisa menggunakan mahasiswa serta kelompok lain untuk membuat panas suasana. Kemudian militer akan bergerak melawan Soebandrio dan juga para elite sayap kiri lainnya dengan dalih untuk menertibkan keamanan. Sukarno bukanlah target pokok, tetapi beberapa orang di tubuh

tentara menyadari bahwa Presiden pasti akan menentang tindakan perlawanan terhadap Soebandrio. Jika itu terjadi, tentara haruslah siap untuk berhadapan langsung dengan Sang Presiden. (Catatan: strategi tentara dan mahasiswa ini sangatlah klop jika tentara betul-betul bergerak sebelum demonstrasi mahasiswa terlanjur kehabisan energi).

- C. **Sukarno.** Sukarno percaya bahwa sikap yang tegas akan memecah belah dan melemahkan lawan-lawannya. Pada minggu terakhir ini, ia kembali telah menempatkan beberapa orang dari sayap kiri radikal pada posisi penting, melarang KAMI, melarang demonstrasi, dan menutup sebuah universitas. Ia sadar bahwa beberapa orang dalam tubuh militer segan untuk melawannya secara terang-terangan. Ia juga percaya bahwa sikap tegas nantinya akan membuat militer takut, seperti yang telah terjadi sebelumnya, dan dengan demikian ia dapat mengurangi kemungkinan bersatunya militer dan rakyat sipil untuk menjatuhkannya.

3. Sejauh ini terbukti bahwa “sihir” Sukarno tidak mampu lagi bekerja seperti biasanya. Kegiatan mahasiswa terus berlangsung meskipun jelas-jelas ia menentangnya. Selama ini, aktivitas itu digunakan untuk menyerang. Sejauh ini apa yang dilakukan oleh mahasiswa kemarin merupakan serangan yang paling terbuka terhadap Soebandrio, sementara Sukarno sendiri pun tak luput dari kritik-kritik tajam. Kian hari, selama demonstrasi berlangsung, para mahasiswa terlihat kian percaya diri dan berkeinginan besar untuk terlibat dalam peristiwa bersejarah ini. Kesungguhan ini semakin meningkat apalagi didukung oleh kenyataan bahwa mayoritas rakyat Jakarta ada di pihak mereka.

4. Tak ada indikasi jelas bahwa militer akan bertindak walaupun akhir-akhir ini beberapa orang Indonesia yang tahu mengenai masalah ini telah bersikap optimis. Jenderal Sukendro, berlawanan dengan komentar pesimis yang ia utarakan sebelumnya, menyatakan kepada *Charge New Zealand* pada tanggal 2 Maret bahwa para Jenderal akan segera memilih untuk “menjadi patriot daripada menjadi tentara”. Akan tetapi masih belum jelas kapan dan bagaimana militer akan bergerak untuk menyingkirkan Soebandrio dan beberapa orang penting lainnya. Tampaknya pihak militer belum mengambil keputusan yang tegas mengenai dua hal penting tersebut.

5. Walaupun sekarang ini keadaan masih simpang siur, namun ada beberapa faktor yang membuat situasi saat ini lebih menjanjikan dibanding dengan waktu-waktu sebelumnya:

- A. Mahasiswa dan masyarakat sipil lainnya sepertinya menyadari (lebih dari sebelumnya) bahwa mereka harus memimpin militer daripada menunggu militer untuk bertindak.
- B. Kalangan perwira yunior merasa tidak puas terhadap pemimpin mereka karena minimnya tindakan yang diambil. Hal ini

merupakan unsur tambahan yang pada titik tertentu akan mendorong militer untuk bertindak.

C. Taktik militer untuk mengumpulkan petisi dari tentara berpangkat rendah dapat juga meningkatkan peran unsur aktivis dalam menentukan kebijakan tentara. Soeharto, yang diberitakan telah meminta petisi tersebut untuk memperkuat tekanannya pada Sukarno, tampaknya akan mendapat lebih daripada apa yang ia harapkan.

D. Meningkatkan aktivitas mahasiswa mendesak pihak Istana untuk melakukan tindakan balasan. Peningkatan frekuensi demonstrasi membahayakan pihak Istana, karena pada akhirnya hal itu dapat mendorong intervensi tentara untuk memihak mahasiswa.

6. Keseimbangan antara unsur-unsur yang menguntungkan kita ini tetap mungkin untuk dimanipulasi oleh Sukarno, sebagaimana yang dilakukannya terhadap NU dan Muhammadiyah. Posisi militer sendiri punya beberapa kelemahan. Masalah utama mereka adalah taktik-taktik mereka yang terlalu berbelit-belit dan tidak terfokus, khususnya dalam hal ketidakberanian untuk mengakui bahwa Sukarno-lah masalah pokok yang mereka hadapi. Sebenarnya militer tidak perlu memakai merosotnya keamanan sebagai alasan untuk bertindak jika mereka memang punya keinginan kuat untuk menjatuhkan Sukarno. Terlebih lagi, dengan terus-menerus menghindarkan mahasiswa dari target yang sebenarnya, pihak militer sesungguhnya menunda terciptanya "kerusuhan" yang mereka harap akan bisa mereka eksploitasi. Ada juga kemungkinan bahwa Sukarno-Soebandrio akan mampu menyatukan berbagai unsur yang saat ini bertentangan dengan mereka lewat suatu gerakan dramatis di tingkat internasional. Kemungkinan diadakannya pertemuan puncak mengenai Malaysia, peningkatan program Konfrontasi, masalah dengan Filipina, krisis yang semakin meruncing dengan AS atau isu lain bisa digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Apalagi jika Sukarno dan para pendukungnya telah putus asa karena banyaknya tekanan yang ditujukan kepada mereka.

7. Dugaan kami, untuk jangka waktu dekat, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada, kemungkinan munculnya tindakan militer untuk menyingkirkan Sukarno sangatlah tipis. Yang lebih mungkin terjadi adalah tindakan untuk meruntuhkan Sukarno dalam dua tahap, dengan pertama-tama menyingkirkan Soebandrio dan pemimpin kiri lainnya. Tetapi besarnya kemungkinan itu tidak lebih dari 50:50. Meskipun demikian hal ini merupakan suatu perkembangan yang lebih menggembirakan dibandingkan dengan sebelumnya.

8. Walaupun dalam waktu dekat militer tidak akan bertindak, namun dalam jangka panjang mungkin mereka akan bertindak, sebagai akibat dari demonstrasi-demonstrasi mahasiswa yang kini telah memberi warna baru dalam atmosfer politik Indonesia.

- A. Para mahasiswa yang tadinya pasif dan lemah, kini telah dipenuhi oleh entusiasme dan semangat kepahlawanan yang turut mendorong perlawanan terhadap rezim Sukarno. Contohnya, beberapa intelektual Indonesia yang berorientasi Barat tiba-tiba muncul di jalanan bersama mahasiswa. Padahal mereka sudah lama mundur dari kegiatan politik. Kami juga mendapat laporan bahwa ada sekelompok ibu rumah tangga kelas menengah yang secara terorganisir memberi pakaian dan makanan pada para mahasiswa. Bahkan para pedagang asongan serta unsur kelas bawah lainnya secara spontan juga membagikan makanan gratis kepada para demonstran ini.
- B. Mahasiswa juga telah menorehkan noktah pada doktrin politik yang mengidentikkan Sukarno dengan negara dan yang membuatnya mampu mengalahkan lawan-lawan politiknya yang lebih kuat. Para mahasiswa juga telah menunjukkan pada generasi tua bahwa seseorang bisa menjadi patriotik tanpa harus menjadi pro-Sukarno atau pro-pemerintah. Mereka melakukan hal ini dengan memasukkan tuntutan yang mencakup kepentingan orang banyak (menurunkan harga dan mengurangi jumlah pemimpin yang dinilai tidak efektif) dan dengan mengadakan demonstrasi secara teratur yang tidak mengarah pada anarki atau pemberontakan.
9. Singkat kata, kami percaya bahwa perjuangan politik ini akan panjang. Demonstrasi mahasiswa akan terus berjalan meskipun Sukarno telah berusaha melarang mereka. Mereka tidak akan membawa perubahan dalam waktu dekat kecuali jika tentara membentuk aliansi. Dan kami melihat kemungkinan untuk ini hanyalah 50:50. Akan tetapi, jika dilihat dalam kerangka jangka panjang, demonstrasi mahasiswa ini telah memulai suatu orientasi yang lebih sehat pada ranah pemikiran politik di Indonesia. Semua itu akan bergerak melawan Sukarno dan pada akhirnya nanti akan meruntuhkan pemerintahannya.

Lydman

4. Tegang Menjelang Supersemar

Pada malam tanggal 9 Maret 1966 tampaknya telah terjadi pertemuan rahasia (*rendesvouz*) antara Dubes Green dan Menlu Adam Malik. Dalam pertemuan itu Malik mengungkapkan berbagai perkembangan politik terakhir di Jakarta. Kelihatan Malik begitu bahagia karena kubu Sukarno-Soebandrio semakin sulit posisinya. Tergambar dengan jelas Malik tidak hanya dekat dengan kubu Nasution-Soeharto, melainkan bahkan menjadi

semacam “juru bicara” kubu tersebut. Malik berharap supaya kubu Sukarno-Soebandrio melakukan tindakan drastis (seperti misalnya menyingkirkan Soeharto), supaya dengan begitu militer marah dan melakukan tindakan balasan. Tergambar pula dalam telegram tertanggal 10 Maret 1966 dari Green di bawah bahwa Malik sangat anti terhadap kelompok-kelompok kiri.

Green agak cemas mengenai keselamatan warga Amerika di Indonesia, namun Adam Malik meyakinkan Green bahwa tentara akan selalu melindungi mereka. Yang penting warga Amerika di Indonesia mengambil posisi *low profile* dan menghindari tempat-tempat umum. Ia juga memberi indikasi bahwa dalam seminggu mendatang suasana Jakarta akan menjadi sangat tegang. Kebetulan minggu itu adalah minggu di mana peristiwa Supersemar akan terjadi.

15

**TELEGRAM DARI KEDUTAAN BESAR AS
(JAKARTA) UNTUK DEPARTEMEN LUAR NEGERI
(WASHINGTON)⁶**

1. Menteri Adam Malik terlihat lebih bersemangat daripada ketika saya bertemu dengan dia sebelumnya. Ia mengatakan kepada saya pada pertemuan rahasia⁸ malam bahwa situasi politik bisa meledak sewaktu-waktu. Militer telah siap untuk bergerak setiap saat dengan mengerahkan 22 batalion yang setia pada Jenderal Nasution dan Jenderal Soeharto di Jakarta dan sekitarnya.

2. Saya katakan bahwa Sukarno sedang berencana untuk menyingkirkan Soeharto. Benarkah demikian? Dia mengatakan bahwa Presiden memang s⁸ang berencana untuk menyingkirkan Soeharto atau [Ibrahim] Adjie. Dan Malik berharap Sukarno akan benar-benar melakukan hal itu, karena tindakan macam itu⁸ akan merangsang Angkatan Bersenjata untuk bergerak secara fisik melawan Presidium dan akan membawa perubahan yang memang sudah lama didambakan.

3. Saya katakan bahwa sebelum-sebelumnya, begitu tentara terlihat sudah seia-sekata, biasanya Sukarno akan mengambil inisiatif untuk mengumpulkan para petinggi militer beserta para komandan wilayah dan mempesona mereka dengan penampilan dan pidatonya yang membuat pihak militer merasa tidak tahu lagi bagaimana harus bersikap satu sama lain. Akibatnya mereka pun akhirnya menjadi ragu pada saat harus menga⁸il keputusan penting. Kalau tak salah akhir pekan ini Sukarno akan mengadakan pertemuan serupa. Apakah sejarah akan terulang?

4. Malik menjawab bahwa hal itu tidak akan terjadi. Semua panglima sekarang berada di belakang Soeharto dan menunggu perintahnya. Walaupun demikian, tentara tidak akan mengambil inisiatif melawan Sukarno/Soebandrio guna menghindari tuduhan sebagai agresor. Tentara hanya akan melakukan tindakan balasan (*counter-action*) terhadap tindakan yang dimulai oleh pihak lawan.

Dengan demikian mahasiswa dan buruh akan terus demonstrasi, hingga kubu Sukarno-Soebandrio terprovokasi untuk mengambil tindakan-tindakan yang akan menjustifikasi operasi pembalasan (*counter-moves*) oleh tentara. Hal ini dapat dipicu oleh pemecatan Soeharto atau Adjie atau Sarwo Edhie atau Mokoginta, atau oleh pasukan Cakrabirawa yang menembaki para mahasiswa. Salah satu contoh kejadian yang hampir saja mendorong tentara untuk melakukan tindakan macam itu adalah ketika tanggal 9 Maret Sukarno dan Soebandrio menginspeksi kantor Kementerian Luar Negeri yang baru saja dirusak. Sukarno begitu murka, sehingga dia nyaris memerintahkan Cakrabirawa untuk menembak mahasiswa.

5. Malik melanjutkan, bahkan para perwira yunior Angkatan Udara sekarang ini sedang mengorganisir diri ke dalam kelompok-kelompok yang mendukung gerakan anti-Presidium dan berencana untuk menyabotase setiap pesawat udara yang digunakan para menteri sayap kiri kabinet untuk melarikan diri dari Jakarta.

6. Kata Malik, sejak kami bertemu sebulan lalu hingga sekarang ini, gerakan mahasiswa melawan Soebandrio dan para menteri sayap kiri merupakan unsur baru yang paling penting dalam situasi politik sekarang ini. Kekuatan mahasiswa lebih besar dibandingkan dengan kekuatan partai-partai politik jika disatukan. Mereka juga memiliki lebih banyak simpati dan dukungan masyarakat. Sebenarnya gerakan-gerakan anti-pemerintah yang dilakukan sebelumnya kurang mendapat dukungan masyarakat. Para mahasiswa demonstran ini terdiri dari anak-anak dari keluarga-keluarga sangat terpandang, termasuk dari keluarga-keluarga yang berpihak pada Sukarno. Tentu saja apa yang mereka lakukan ini amat berpengaruh pada orangtua mereka. Lebih dari itu, tentara dan polisi enggan untuk menembak mahasiswa yang berdemonstrasi. Malik mencontohkan dilema yang dialami seorang polisi yang bertugas melindungi kantor Kementerian Luar Negeri pada tanggal 8 Maret. Ketika perwira tersebut menodongkan pistol ke arah salah satu mahasiswa demonstran, dia langsung menyadari bahwa mahasiswa tersebut merupakan putra dari salah seorang atasannya. Begitu kagetnya polisi itu, hingga ia memutuskan untuk meninggalkan lokasi. Hal serupa terjadi juga pada anggota batalion Cakrabirawa, sehingga beberapa dari mereka memutuskan untuk desersi.

7. Selain itu, serikat-serikat buruh sudah mulai melibatkan diri. Kebanyakan dari serikat-serikat buruh itu akan secara aktif mendukung

59 i mahasiswa dalam demonstrasi dan akan melakukan aksi mogok yang dimulai minggu ini.

8. Saya bertanya kepada Malik, apakah pemberhentian Nasution merupakan kekalahan yang serius bagi kekuatan anti-Soebandrio. Malik mengatakan sama sekali tidak; Nasution, yang tetap dihormati secara nasional, sekarang justru bisa menjalankan perannya dari balik layar secara lebih efektif dibandingkan ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Nasution dan Soeharto tetap dekat, namun lebih baik jika Soeharto berada di depan. Saya bertanya mengenai Jenderal Machmud (Komandan Kodam V yang bertanggung jawab atas wilayah Jakarta). Machmud sepenuhnya berada di pihak Soeharto, jawab Malik.

9. Yang terakhir dan sekaligus terpenting, saya menanyakan pada Malik tentang situasi keamanan umum berkaitan dengan keselamatan warga Amerika dan aset-aset milik Amerika. Saya katakan bahwa reaksi Soebandrio atas serangan mahasiswa terhadap Kementerian Luar Negeri dan dirinya secara pribadi dapat berupa balas dendam dan usaha untuk mengalihkan perhatian. Soebandrio tidak akan dapat membidik langsung tentara maupun para mahasiswa. Oleh karena itu sangatlah mungkin bahwa dia menghasut preman-premanya untuk menyerang Kedubes Amerika. Sudah ada dua contoh seperti itu dalam dua minggu terakhir ini.⁷ Saya juga mendapat informasi dari sumber yang belum teruji kebenarannya, bahwa dalam kemarahannya Sukarno mengancam akan melakukan suatu tindakan terhadap Amerika, persis dengan apa yang pernah ia lakukan terhadap Inggris. Ini berarti bahaya bagi tempat tinggal orang-orang Amerika dan bagi Kedutaan. Apa pendapat Malik?

10. Malik mengata⁸ n, bisa diduga bahwa Soebandrio akan melakukan tindakan-tindakan anti-Amerika Serikat. Akan tetapi, hal ini tidak akan mendapat dukungan dari unsur-unsur masyarakat di sini, dan tentara akan bertindak melindungi warga Amerika. Malik berpendapat bahwa kita tidak perlu mengevakuasi warga Amerika dari Jakarta, namun ia mengusulkan bahwa para warga Amerika menghindari tempat-te⁸ pat umum, khususnya minggu depan, ketika situasi tampaknya akan menjadi amat tegang.

11. Saya menekankan sekali lagi kepada Malik, saya mengharapkan terbangunnya hubungan yang baru antara pemerintah Indonesia dan Amerika, suatu hubungan yang produktif dan menguntungkan Indonesia. Sekaligus saya katakan, sangat pentinglah bahwa tidak akan ada hal-hal buruk yang akan terjadi, seperti misalnya aksi-aksi anti-Amerika. Aksi-aksi macam itu akan merusak hubungan Indonesia-Amerika secara serius atau bahkan permanen. Jika itu terjadi, hubungan kedua negara akan rusak dan kemungkinan untuk membina hubungan dan kerja sama yang saling menguntungkan akan sulit. Malik berkata bahwa dia sepenuhnya paham maksud saya, dan dia pun berharap demikian. Dia kemudian mengatakan, sekarang dia menjadi

75

lebih yakin bahwa semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan. Sikap yang ia tunjukkan mencerminkan jaminan itu.⁸

12. Saya meminta Malik untuk tidak sungkan menceritakan hal-hal yang kami bicarakan itu kepada Nasution dan Soeharto. Dia menyatakan setuju.

Green

5. Supersemar sebagai Kudeta Militer

4

Dokumen berikut ini merupakan dokumen yang sangat penting, karena ditulis langsung setelah peristiwa Supersemar. Dalam dokumen ini tergambar dengan jelas betapa entusiastiknya pihak Amerika. Perhatikan, pada baris pertama dokumen disebut dengan jelas dikatakan bahwa peristiwa Supersemar adalah sebuah kudeta militer (*military coup*), dengan catatan bahwa ini adalah kudeta militer yang “khas Indonesia”.

Ditulis tanggal 12 Maret 1966 sebagai laporan Dubes Green kepada Departemen Luar Negeri AS di Washington, dokumen ini mengatakan bahwa Supersemar adalah cara militer untuk memotong kekuasaan Bung Karno, sebagai reaksi atas tindakan Bung Karno memecat Menteri Pertahanan Nasution dan mau menggantikannya dengan seseorang yang pro-komunis⁹.

92
 Sebagaimana telah diketahui, begitu Soeharto menerima Supersemar dari Presiden Sukarno, pada pagi harinya (tanggal 12 Maret) ia langsung melarang PKI dan semua organisasi yang terkait dengannya. Menurut Green, sebenarnya pelarangan itu tidak perlu, karena toh PKI sudah hancur lebur. Namun demikian, secara simbolis hal itu sangat penting karena itu berarti militer sudah mulai berani untuk terang-terangan melawan kehendak Bung Karno. Selanjutnya, meskipun yang diterima oleh Soeharto itu adalah sebuah surat perintah, namun Green sudah menyebut-nyebut soal “pemerintahan yang baru”. Hal ini menegaskan pandangannya bahwa yang terjadi pada tanggal 11 Maret itu adalah benar-benar sebuah pergantian pemerintahan tanpa persetujuan rakyat. Dengan kata lain, kudeta.

6

**TELEGRAM DARI KEDUBES AMERIKA
(JAKARTA) UNTUK DEPARTEMEN LUAR NEGERI
(WASHINGTON)¹⁰**

6

1. Indonesia baru saja melancarkan sebuah kudeta militer [*military coup*] yang khas negeri tersebut. Setelah lama ditunggu-tunggu kini Sukarno telah mempertaruhkan nasibnya terlalu jauh. Rencana dia untuk menyingkirkan jajaran kepemimpinan militer dan memasukkan seseorang yang dikenal sebagai pro-komunis sebagai Menteri Pertahanan telah mendorong militer untuk memotong kekuasaannya. Cara bagaimana Kudeta 1 Oktober ditangani telah membuat Sukarno tetap dipandang sebagai kekuatan pemersatu dan memperkokoh kedudukan militer. Militer percaya bahwa keduanya amat penting. Pada saat yang sama Soeharto memegang perintah nomor satu [dari Supersemar] dan ia bebas menggunakan sesuai dengan kehendaknya.

2. Penduduk Jakarta jelas-jelas memihak militer. Sementara itu semua partai moderat dan organisasi-organisasi lain telah mengeluarkan pernyataan mendukung Soeharto. Mahasiswa, yang telah membantu melahirkan atmosfer yang memunculkan militer untuk bertindak, tampak sekali sedang bersukaria. Hari ini mereka berkeliling kota dengan berjalan kaki atau naik truk sambil meneriakkan slogan-slogan mengecam Soebandrio, Sumardjo, "Kabinet Gestapu" dan tingginya harga-harga.

3. Pertanyaan kunci sekarang ini adalah apakah militer akan bergerak cepat dan efektif untuk mengkonsolidasikan posisinya. Sejauh ini tampaknya militer akan menuju ke arah itu.

3

A. Parade militer pagi ini telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengungkapkan perasaan mereka setelah berminggu-minggu berada dalam ketegangan. Sekaligus hal itu menunjukkan luasnya dukungan untuk militer. Semuanya telah direkayasa secara hati-hati namun efektif.

B. Siang hari ini PKI dan semua organisasi yang terkait dengannya secara resmi dilarang oleh Soeharto. Sebenarnya tindakan itu sendiri kurang perlu mengingat bahwa PKI telah hancur sebagai sebuah organisasi partai yang efektif. Meskipun demikian, pelarangan itu sendiri merupakan sinyal yang jelas bahwa militer siap untuk secara langsung menolak permintaan-permintaan Sukarno. Sekarang ini sangat mungkin bahwa militer akan menyerbu elemen-elemen PKI di Jakarta yang selama beberapa bulan terakhir telah menjadi tempat perlindungan yang aman bagi mereka.

4. Sampai sekarang belum jelas akan sejauh mana militer mendominasi pemerintahan yang baru dan seberapa jauh militer akan rela untuk berbagi kekuasaan dengan kelompok-kelompok sipil dari partai-partai politik non-komunis. Meskipun demikian terdapat kemungkinan

bahwa militer akan mendukung koalisi antara militer sendiri dengan pemimpin-pemimpin politik moderat seperti Adam Malik, Sultan Yogyakarta, dan lain-lain. Kelompok yang sebelumnya dilarang oleh Sukarno dan para pemimpin tua, yang sebagian anggotanya dipenjara atau sekadar dinonaktifkan, sekarang diperbolehkan memainkan peran sebagai penasihat. Meskipun demikian, kita tidak yakin bahwa kelompok yang masih bertahan dan yang akan memainkan peran penting dalam pemerintahan akan rela untuk berbagi hasil kemenangan dan menyerahkan posisi-posisi penting kepada elemen-elemen tersebut.

5. Jika militer bergerak untuk mengkonsolidasikan posisinya, dan kita percaya bahwa hal itu memang akan terjadi, kita dapat berharap akan terjadinya sejumlah *move* berikut:

- A. Perubahan besar dalam kabinet. Soebandrio akan ditendang, sementara mereka yang pro-komunis dan tidak kompeten akan diganti. Mungkin jumlah anggota kabinet akan dikurangi dan dirampingkan. Meskipun demikian, mungkin juga bahwa Sukarno akan berhasil mempertahankan kroni-kroninya yang tidak terlalu menonjol.
 - B. Pemberantasan korupsi dan usaha militer untuk menyelidiki dana-dana ilegal yang telah ditimbun oleh para Menteri. Perhatian yang lebih serius kepada masalah-masalah ekonomi baru akan dilakukan kemudian.
 - C. Re-evaluasi dan re-orientasi bertahap atas pokok-pokok kebijakan luar negeri. Militer akan menghentikan “poros Jakarta-Peking” yang diprakarsai oleh Sukarno, dan mungkin bahkan memutuskan hubungan diplomatik dengan Cina Komunis. CONEFO [*Conference of the New Emerging Forces*] kemungkinan akan dibatalkan. Konfrontasi dengan Malaysia akan tetap berlangsung tetapi kemungkinan besar akan dikurangi atau bahkan berhenti sama sekali. Terutama yang berkaitan dengan operasi-operasi militer.
 - D. Pemecatan orang-orang yang tidak dikehendaki oleh militer.
6. Sukarno masih akan dibiarkan berada di atas panggung. Tetapi sejauh dia masih tetap di atas panggung, ada bahaya bahwa dia akan kembali berkuasa. Namun demikian tampaknya kemungkinan dia untuk kembali lagi sangat kecil. Langkah halus telah diambil militer untuk mengurangi kekuasaan Sukarno. Jika Sukarno tetap mau mempertaruhkan nasibnya terlalu jauh, mungkin saja militer akan mengambil langkah yang lebih langsung dalam melawan Sukarno.
7. Penunjukan posisi-posisi penting di dalam pemerintahan serta perlakuan terhadap para Menteri merupakan indikasi yang tepat untuk melihat arah yang mau dituju oleh pemerintahan yang baru ini. Pemerintah akan terus menggunakan slogan-slogan lama

sebagaimana Soeharto telah lakukan di dalam perintah hariannya. Meskipun demikian perbuatan itu lebih penting daripada kata-kata, dan perbuatanlah yang seharusnya menjadi dasar penilaian kita terhadap pemerintahan yang baru. Sejauh menyangkut kepentingan pemerintah Amerika, ada beberapa masalah yang lebih mendesak yang dapat menjadi alat indikasi terhadap sikap pemerintah Indonesia, seperti misalnya kasus Lovestand, kembalinya para wartawan Amerika, serta ganti-rugi atas kerusakan Kedubes AS pada tanggal 8 Maret yang lalu. Pada awal pekan depan ketika situasi sudah semakin tenang kami akan menyampaikan rekomendasi kami berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah Amerika.

Green

6. Supersemar sebagai Kudeta Sukses yang Harus Didukung

17 Deputi Asisten Khusus Bidang Keamanan Nasional Robert Komer melaporkan kepada Presiden Johnson bahwa apa yang baru saja terjadi di Indonesia, yakni Supersemar, adalah suatu “kudeta yang sukses”. Hal itu, kata Komer, mirip dengan apa yang pernah juga terjadi di Ghana, yang ditandai dengan jatuhnya Nkumrah. Dalam laporan yang tertanggal 12 Maret di bawah, Komer mendesak pemerintah Amerika untuk menggarisbawahi suksesnya kudeta itu dengan mengirim bantuan berupa beras atau gandum, meskipun hanya berjumlah beberapa ribu ton saja. Pengiriman bantuan pada masa transisi macam ini, dalam pandangan Komer, akan melapangkan jalan bagi hubungan Amerika di masa depan.

MEMORANDUM DARI ROBERT KOMER (DEPUTI ASISTEN KHUSUS BIDANG KEAMANAN NASIONAL) UNTUK PRESIDEN LYNDON B. JOHNSON¹¹

17 *Mendukung sukses.* Tidak sulit untuk menyadari betapa pentingnya kemenangan AD atas Sukarno (meskipun Sukarno tetap dihormati sebagai simbol negara). Indonesia memiliki jumlah penduduk—dan jumlah sumber alam—melebihi yang ada di seluruh Asia Tenggara. Selama ini Indonesia telah siap menjadi negara komunis yang ekspansionis, yang siap mengancam bagian belakang posisi Barat di Asia Tenggara. Sekarang, meskipun hal-hal yang tak terduga masih bisa terjadi setiap saat, kemungkinan itu telah dipangkas secara drastis.

Kudeta di Ghana adalah contoh lain dari keberuntungan yang tak terduga. Nkumrah adalah tokoh yang paling membahayakan kepentingan kita di antara para pemimpin Afrika Hitam yang ada. Sebagai reaksi atas kecenderungannya yang amat pro-komunis, rezim militer yang menggantikannya telah secara gila-gilaan pro-Barat.

Inti dari memorandum ini adalah mengingatkan agar kita tetap dengan cermat mengikuti dan mengkonsolidasikan sukses-sukses macam itu. Beberapa ribu ton surplus beras atau gandum, jika sekarang ini diperbantukan—ketika rezim-rezim baru itu masih belum tahu persis bagaimana bentuk hubungannya dengan kita—akan dapat memberikan keuntungan yang luar biasa bagi kita, jauh melebihi nilai dari apa yang kita perbantukan kepada mereka. Saya tidak bermaksud mendorong kita untuk memberikan hadiah yang berlebih-lebihan terhadap rezim-rezim ini—sebaliknya, saya malah percaya bahwa kalau yang kita berikan hanya sedikit, hal itu justru akan merangsang mereka untuk mendapatkan lebih banyak. Selanjutnya dengan menjanjikan bantuan lebih banyak nanti kita akan memiliki posisi yang menguntungkan.

Meskipun demikian, menurut pengalaman biasanya sistem birokrasi kita cenderung untuk bersikap terlalu hati-hati dan sulit berinisiatif. Oleh karena itu saya ingin mengusulkan, dalam mengungkapkan kegembiraan Anda kepada Menteri Luar Negeri [AS] dan yang lain tentang suksesnya kudeta di Indonesia dan Ghana, hendaknya Anda menegaskan bahwa kita perlu memanfaatkan keberhasilan macam itu sependai dan secepat mungkin. Kata-kata Tn. Presiden amat penting untuk menggerakkan birokrasi. Dan dalam hal ini saya menduga bahwa usul saya di atas sangat sejalan dengan insting politik Anda sendiri.

Kalau Tn. Presiden menghendaki, saya akan minta tolong Rusk dan Bell untuk urusan ini. Akan tetapi untuk sekarang ini kata-kata langsung dari Anda adalah faktor yang paling menentukan.

Komer

7. Supersemar sebagai Pembawa “Pemerintahan Baru”

44

Dalam memorandum yang ditulis oleh **Deputi Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Timur Jauh** Berger di bawah ini, Supersemar dilihat sebagai puncak dari ketegangan antara Bung Karno dengan kubu anti-komunis yang terdiri dari kalangan sipil maupun militer. Dalam salah satu langkah politiknya, demikian menurut memo ini, Bung Karno bermaksud menggantikan Soeharto dengan seorang Jenderal berhaluan kiri. Sebagai balasan, kubu militer menyampaikan “ultimatum” kepada Bung Karno, dan

hasilnya adalah Supersemar. Dikatakan, Supersemar adalah tindakan Bung Karno “menyerahkan tanggung jawab (*transferred responsibility*) untuk menjaga keamanan dan ketertiban kepada Angkatan Darat (*Army*).”

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan “penyerahan tanggung jawab” oleh Supersemar kiranya sulit dipastikan, antara lain mengingat bahwa naskah itu telah diubah-ubah bahkan hilang. Namun yang jelas, pihak AS mengacu pada pemerintahan pasca-11 Maret 1966 sebagai “pemerintahan yang baru”. Sejak dikeluarkannya Supersemar, menurut dokumen ini, Soeharto rajin mengeluarkan perintah “atas nama Sukarno”. Dalam kaitan dengan pemerintahan yang baru, mahasiswa pun dipandang sebagai “*the new emerging forces*”-nya Indonesia. Istilah itu tentu saja mengacu sambil mengejek istilah sama yang disingkat “NEFOS” dan sering digunakan oleh Bung Karno untuk negara-negara baru merdeka yang gigih melawan negara-negara kapitalis.

PERKEMBANGAN TERAKHIR DI INDONESIA¹²

1 Oktober dan Indonesia

1. Meskipun dalam beberapa bulan belakangan ini hanya ada sedikit ⁹⁰ kemajuan berkaitan dengan hubungan bilateral kita dengan Indonesia, apa yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini kiranya akan membawa perubahan yang besar dan memiliki dampak jangka panjang terhadap kebijakan dalam maupun luar negeri Indonesia. Ada sejumlah perubahan besar sebagai akibat dari Kudeta 1 Oktober yang gagal itu: (1) dihancurkannya PKI sebagai kekuatan politik yang terorganisir; (2) munculnya kekuatan-kekuatan baru yang tuntutan-tuntutannya berlawanan dengan prinsip-prinsip dasar Presiden Sukarno dan bagaimana ia memerintah.

Latar Belakang atas Perkembangan Terakhir

2. Selama lima bulan terakhir ⁸ sejak terjadinya Peristiwa 30 September [1965], Presiden Sukarno dan Menteri Luar Negeri Dr. Soebandrio melakukan berbagai manuver melawan kalangan m ⁸⁹ er guna memperjuangkan kepentingan politik masing-masing. Pada tanggal 21 Februari [1966] Sukarno mengumumkan keputusannya untuk melakukan *reshuffle* atas kabinetnya guna menyiasati kubu militer, mengingat bahwa kubu ini merupakan ancaman terbesar bagi kekuasaannya. Dalam *resuffle* itu sejumlah tokoh non-komunis disingkirkan, termasuk Menteri Pertahanan Nasution, sementara

para penasihat Sukarno yang berhaluan kiri dipertahankan. Hal itu menimbulkan reaksi besar-besaran. Selama periode 22 Februari-12 Maret [1966], ribuan mahasiswa secara terus-menerus melakukan demonstrasi di jalan-jalan di Jakarta. Tuntutan mereka: (1) Bubarkan PKI; (2) Pecat Soebandrio; (3) Turunkan harga. Selama seminggu ini mereka menduduki dan merusak kantor Kementerian Luar Negeri, memaksa Menteri Pendidikan untuk menutup kantornya, dan secara kasar menyerang gedung Kantor Berita Cina Baru, Konsulat Jendral Cina Komunis, dan kantor Misi Dagang Cina Komunis di Jakarta. Dalam penyerangan itu beberapa orang Cina terluka.

3. Sebagai balasan terhadap demonstrasi besar-besaran itu pada tanggal 23 Februari dan 8 Maret telah dilancarkan dua serangan terhadap Kedubes AS oleh kelompok-kelompok kiri yang kecil namun teroganisir. Tak ada yang terluka, dan gedung Kedutaan juga tidak sampai mereka masuki.

Peristiwa 12 Maret

4. Sebagai langkah besar untuk mengurangi dampak dari demonstrasi mahasiswa itu, Sukarno merencanakan tiga kali rapat selama akhir pekan 12 Maret [1966], dengan maksud untuk memecah dan kemudian menguasai lawan-lawan politiknya. Sementara itu kubu militer, setelah mendengar kabar bahwa Sukarno bermaksud menggantikan Soeharto dengan seorang Jenderal berhaluan kiri, membalas dengan mengajukan ultimatum terhadap Sukarno. Sebagai jawaban atas ultimatum itu Sukarno menyerahkan kekuasaan untuk menjaga keamanan dan ketertiban kepada AD. Sejak itu Soeharto telah mengeluarkan sejumlah perintah “atas nama” Sukarno. Sekarang ini reorganisasi Kabinet sedang berlangsung. Informasi awal mengatakan bahwa Soebandrio dan sejumlah orang kiri akan disingkirkan.

Masa Depan

5. Meskipun bagaimana nantinya hasil akhir dari perebutan kekuasaan yang sedang berlangsung ini masih belum jelas, tampaknya sekarang ini kubu militer sedang berada di atas angin. Berhasil atau gagalnya kubu militer ini bergantung pada kemampuan mereka untuk: (1) mempertahankan momentum yang telah mereka peroleh; (2) mempertahankan kesatuan internal di kalangan mereka sendiri. Tentu saja kita akan terus mengamati dari dekat perkembangan situasi yang ada sambil melihat bagaimana kita akan menyesuaikan diri dengan pemerintahan Indonesia yang baru, yang semoga saja lebih moderat. Selain itu kita juga akan melihat kemungkinan perlu tidaknya kita mengirim bantuan ke Indonesia, serta mencari saat yang paling tepat untuk itu.

6. Tanda tanya terakhir adalah berkaitan dengan kekuatan politik Indonesia yang terbaru, yakni mahasiswa. Meskipun untuk sementara

ini mereka akan memihak kubu militer, ada kemungkinan dalam jangka panjang mereka ini akan menjadi “*new emerging forces*”-nya Indonesia.

R.W. Berger

8. Sikap Hati-hati dalam Membantu “Pemerintahan Baru”

Jika dalam memorandum sebelumnya Berger optimis mengenai “pemerintahan yang baru” Indonesia, memo tertanggal 17 Maret 1966 yang ditulis oleh Menlu AS Dean Rusk justru agak meragukannya. Rusk melihat kemungkinan pemerintah yang baru ini merupakan hasil kompromi dengan unsur-unsur lama, yang sekaligus juga belum tentu mampu membangun kembali sistem ekonomi dan politik Indonesia.

Rusk mengusulkan supaya Washington hati-hati kalau mau memberikan bantuan kepada Indonesia. Menurut dia, bantuan hanya diberikan dengan beberapa syarat, seperti: (a) pemerintah yang baru sungguh-sungguh mau menata kembali kehidupan ekonomi dan politik Indonesia; (b) bantuan bisa disampaikan secara terbuka alias tidak lewat jalur rahasia; (c) bantuan dilakukan secara multilateral; (d) Indonesia tidak terus-terusan mengecam AS atau merampas instalasi-instalasi minyak AS.***

TELEGRAM DARI DEPARTEMEN LUAR NEGERI (WASHINGTON) KE KEDUBES AMERIKA (JAKARTA)¹³

1. Berikut adalah penilaian (*assessment*) kami tentang arah perkembangan situasi di Indonesia sekarang ini, serta ringkasan pemikiran kami mengenai bagaimana seharusnya A.S. menanggapi permohonan bantuan dari Indonesia, yang tampaknya cukup mendesak dan tak terhindarkan.

2. Menurut perhitungan kami, dalam waktu dekat ini tidak mungkin bagi Sukarno/Soebandrio untuk kembali ke tampuk pimpinan seperti semula. Namun demikian, tampaknya akan sulit mengharapkan bahwa dari situasi ini akan segera muncul sebuah rezim baru yang kuat dan berorientasi ekonomi. Bahkan seandainya muncul sebuah pemerintahan baru sebagaimana digambarkan dalam alinea kelima Telegram B,¹⁴ tampaknya pemerintahan itu akan merupakan sebetulnya kompromi antara berbagai kekuatan yang masih ada dalam struktur kekuasaan di Indonesia, yang secara kolektif hanya akan befokus

pada bagaimana menegakkan kekuasaan atas rakyat, serta tidak akan mau atau mampu untuk mengambil langkah-langkah dramatis dan taktis atas perekonomian Indonesia. Kami menduga bahwa Sukarno tetap akan mempertahankan kekuasaan simbolisnya. Pemerintahan yang baru itu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya akan terpaksa dibatasi oleh keinginan untuk menyenangkan Sukarno dengan jalan tetap menjunjung tinggi slogan-slogan Sukarno demi kesatuan nasional.

3. Pemerintahan macam ini tampaknya akan menyadari dan memiliki perhatian cukup terhadap masalah-masalah ekonomi Indonesia. Namun pada saat yang sama pemerintahan itu akan berusaha untuk tetap bertahan dengan jalan mencari bantuan luar negeri (yang sifatnya sementara), dan bukan dengan memecahkan masalah-masalah ekonomi yang ada secara sungguh-sungguh. Lihat saja, pemerintahan macam itu tak akan berani misalnya mengurangi jumlah pegawai negeri atau personel militer.

4. Pemerintah itu kemungkinan besar akan mengajukan rangkaian permohonan bilateral yang kompleks melalui tim kunjungan ke berbagai negara. Melalui Duta Besar negara-negara asing di Jakarta pemerintah akan memohon bantuan pangan dan bahan pakaian, serta meminta penjadwalan kembali pembayaran utang. Selanjutnya pemerintah itu akan mengajukan permohonan kredit secara terang-terangan kepada Jepang dan Eropa, dan (setidaknya secara pelan-pelan) akan mengajukan permintaan serupa namun secara sembunyi-sembunyi kepada kita.

5. Oleh karena itu kalau nanti orang-orang Indonesia mendekati kita, tanggapan kita kira-kira begini:

- A. Kepentingan AS dalam memberikan bantuan tergantung pada kemauan pemerintah Indonesia untuk menunjukkan diri sebagai pemerintahan yang sungguh-sungguh bermaksud mengentaskan Indonesia dari kehancuran ekonomi yang ada sekarang ini. Kita siap untuk membantu pemerintahan macam itu dengan beras dan kapas, namun dengan syarat bahwa Indonesia akan mengumumkan pengiriman beras dan kapas itu sebagai hasil dari transaksi komersial, meskipun dalam praktiknya sangat konsesional (segaris dengan apa yang dikatakan oleh Dubes Green di Washington, yakni dengan menggunakan mekanisme seperti PL 480 dan garansi CCC).
- B. Suatu operasi rahasia tidak mungkin dapat kita lakukan. Kita tidak ingin mempermalukan pemerintah Indonesia atau memberikan kesan yang keliru bahwa kita sedang bermaksud untuk kembali campur tangan di Indonesia. Sebagaimana telah sering terjadi, apa pun peran yang dapat kita mainkan dalam membantu Indonesia akan selalu diketahui umum.

C. Berkaitan dengan penjadwalan kembali utang atau bentuk-bentuk bantuan lain yang terpisah dari bantuan langsung berupa beras dan bahan pakaian sebagaimana disebut di atas, beberapa aspek perlu untuk dipertimbangkan:

(i) Kami merasa bahwa dukungan untuk Indonesia hanya akan mungkin dan secara politis akan efektif bila dilakukan secara multilateral. Kecuali dukungan dalam bentuk bantuan langsung dan mendesak.

(ii) Kami merasa bahwa satu atau dua negara yang bersahabat dengan Indonesia—misalnya Jepang—perlu diminta oleh pihak Indonesia untuk mengatur pertemuan para kreditor serta sejumlah negara lain yang berminat. Negara-negara itu perlu menganalisis situasi utang Indonesia dan kebutuhan Indonesia akan uang tunai maupun kredit untuk beberapa bulan mendatang. Sementara itu, pemerintah Indonesia diharapkan terus mencoba mengatasi krisis ekonomi yang ada sambil selalu memperbaiki kinerjanya. Negara-negara kreditor itu nantinya diharapkan akan dapat mengambil keputusan kolektif tentang bagaimana menolong Indonesia keluar dari berbagai kesulitan yang sedang dialami sekarang ini. Kita akan dengan senang hati berpartisipasi.

(iii) Masalah Indonesia adalah masalah internasional. Setiap tindakan yang diambil harus disertai dengan perlakuan yang sama terhadap para kreditor. Atas alasan itu kita merasa perlu adanya partisipasi Uni Soviet. Kita dan negara-negara kreditor lain tidak setuju, misalnya, jika upaya penjadwalan kembali kredit dan utang Indonesia hanya dimaksudkan supaya Indonesia dapat membayar utangnya kepada Uni Soviet. Kita berharap bahwa Uni Soviet turut diundang dalam pertemuan para kreditor itu (lihat no. ii) meskipun mungkin mereka akan menolak.

(iv) Kita bersedia membantu pemerintah Indonesia, namun kita tidak akan melakukan hal itu jika pemerintah Indonesia terus-terusan menyebut kita sebagai musuh terbesarnya, atau menggunakan kekuatan militer untuk merampas instalasi-instalasi minyak milik AS. Keduanya bukanlah persyaratan yang sulit dipenuhi oleh Indonesia, dan kita tidak akan menuntut perubahan radikal dalam kebijakan-kebijakan publik yang kiranya dapat membahayakan posisi pemerintah Indonesia.

6. Kami merasa bahwa sebaiknya yang pertama-tama dimintai bantuannya untuk Indonesia adalah Jepang, mengingat bahwa Jepang sudah sering mengirim misi ekonomi ke Indonesia. Ketika pihak Departemen Luar Negeri di Washington dan Kedubes di Jakarta setuju mengenai posisi yang perlu diambil oleh AS, kami akan mempertimbangkannya dengan pemerintah Jepang. Tujuannya adalah untuk memperbaiki pandangan sebagaimana dilaporkan

dalam paragraf 4B Telegram A, dan untuk membantu Jepang dalam menyiapkan diri menanggapi permintaan bantuan dari Jepang. Dimohon komentarnya secepat mungkin atas gagasan-gagasan di atas, berikut berbagai permasalahan lain yang mungkin perlu untuk dibicarakan.

Rusk

9. Menghindari Tuduhan “Udang di Balik Batu”

Sikap hati-hati Menlu AS Rusk itu kembali tercermin dalam memorandum berikut yang tertanggal 22 Maret 1966 ini. Pada satu sisi, Rusk ingin supaya Kedubes AS di Jakarta mendukung Indonesia agar bergabung kembali dengan lembaga-lembaga internasional. Pada sisi lain, ia juga menganjurkan supaya AS jangan memulai inisiatif untuk mendekati Indonesia. Ada dua alasan. *Pertama*, AS takut jangan-jangan nanti dikira ada “udang di balik batu” inisiatif itu. *Kedua*, kalau AS yang berinisiatif mendekati, jangan-jangan pemerintah baru Indonesia merasa memiliki posisi tawar yang tinggi di mata AS sehingga AS mau mendekatinya.

TELEGRAM DARI KEMENTERIAN LUAR NEGERI (WASHINGTON) UNTUK KEDUBES AMERIKA SERIKAT (JAKARTA)¹⁵

1. Saat ini pemerintah Indonesia yang baru sedang berusaha menggalang dukungan internasional guna memperbaiki ekonominya. Namun demikian upaya itu kemungkinan akan sulit, mengingat bahwa Indonesia telah menarik keanggotaannya di hampir semua organisasi internasional. Menurut dugaan kami, orang-orang yang memiliki rasa tanggung jawab seperti Sultan Hamengku Buwono IX dan Adam Malik akan merasa perlu bahwa Indonesia bergabung kembali dengan organisasi-organisasi itu. Namun pada saat yang sama mereka merasa perlu untuk bergerak pelan-pelan, supaya tidak terkesan sedang melawan keputusan-keputusan Sukarno.

2. Kami merasa bahwa Indonesia perlu didorong untuk mau bergabung kembali dengan organisasi-organisasi internasional itu, terutama organisasi-organisasi yang dapat membantu mereka entah secara langsung atau melalui suatu koordinasi multilateral. Kita berharap bahwa Indonesia akan menerima saran-saran dari negara-negara

lain mengenai hal ini. Kita juga berharap bahwa Indonesia aktif mencari bantuan, namun kiranya tidak bijaksana jika pemerintah AS mengambil inisiatif untuk mendekati Indonesia. Mengapa? Karena ada kemungkinan mereka akan mencurigai adanya udang di balik batu pendekatan kita itu, atau jangan-jangan inisiatif yang kita ajukan akan ditangkap oleh Indonesia bahwa Indonesia kini punya posisi tawar yang baru di mata kita.

3. Pada saat yang sama, mungkin saja Indonesia akan bertanya-tanya mengenai bagaimana reaksi kita jika Indonesia bergabung kembali dengan organisasi-organisasi yang telah mereka tinggalkan atau bergabung dengan organisasi-organisasi lain yang belum pernah mereka masuki seperti Asian Development Bank (ADB). Jika itu yang terjadi, Anda dimohon untuk menunjukkan sikap bahwa Amerika akan secara diam-diam mendukung upaya Indonesia itu dan bahwa kita tidak akan memanfaatkannya untuk menyatakan hal itu sebagai kemenangan Barat. Kalau pihak Indonesia meminta saran-saran dari Anda, tolong katakan bahwa kemauan Indonesia untuk bergabung dengan ADB (di mana Indonesia belum pernah menjadi anggotanya) akan merupakan langkah awal yang tepat.

4. Butir-butir gagasan yang disebutkan di atas tentu saja bertolak dari kesimpulan kami bahwa Indonesia perlu untuk ditarik kembali ke dunia nyata, bahwa kemungkinan besar Indonesia tidak akan merupakan *partner* yang baik bagi kepentingan AS dalam organisasi-organisasi internasional. Namun demikian tetap saja penting bahwa Indonesia kita bantu agar mau bergabung kembali dalam berbagai kegiatan di tingkat dunia.

5. Dimohon komentar dari Jakarta.

10. Lima Puluh Ribu Ton Beras untuk “Pemerintah Baru”

Betapa pun ragu dan hati-hatinya Menlu Rusk terhadap pemerintah Indonesia pasca-11 Maret 1966, tampaknya Presiden Johnson tetap berniat membantu Indonesia. Dokumen berikut menunjukkan adanya langkah yang mau diambil Washington untuk mengirim 50 ribu ton beras ke Indonesia atas perintah Presiden Johnson. Pengiriman mau dilakukan dengan perlindungan hukum “Public Law 480”. Namun demikian tidak berarti langkah itu tidak menimbulkan masalah. Ternyata pengiriman dengan PL 480, dan bukan melalui jalur “Garansi CCC”, akan menyebabkan kegelisahan di antara para pengusaha kapas di Amerika karena tidak memungkinkan mereka untuk berjualan kapas mentah ke Indonesia.

Apa pun komplikasi hukum dan ekonomisnya, dokumen ini tampaknya menunjukkan salah satu langkah Washington untuk mulai membantu “pemerintahan yang baru” di Indonesia. Aslinya dokumen ini ditulis oleh James C. Thompson Jr., dari National Security Council untuk Pembantu Khusus Presiden, Moyers, tanggal 31 Maret 1966.

BERAS UNTUK INDONESIA¹⁶

Saya baru saja mendengar bahwa Presiden [Johnson] telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri untuk memenuhi permintaan mengirimkan bantuan darurat kepada Indonesia berupa 50 ribu ton beras di bawah peraturan PL (Public Law) 480, Bagian IV.

Keputusan itu baik adanya. Meskipun demikian saya pikir ada baiknya Anda—dan mungkin Tn. Presiden—sadar akan beberapa faktor berkaitan dengan masalah itu:

1. Terdapat perbedaan pendapat antara mereka yang mendukung jalur PL 480 dan mereka yang mendukung jalur penjualan kredit ekspor langsung (dengan garansi CCC berupa surat pernyataan kredit dari Bank Indonesia). Dalam langkah yang mau diambil sekarang ini, gagasan para pendukung jalur PL 480-lah yang dipakai karena jalur tersebut dianggap lebih cepat dan dapat menghindari urusan garansi CCC dari bank yang tampaknya mau bangkrut itu. Meskipun begitu, ada pertanyaan apakah jalur ini akan memuaskan bagi pihak Indonesia. Kemungkinan pihak Indonesia lebih memilih jalur-jalur di mana keterlibatan pemerintah Amerika tidak kelihatan, sementara transaksi melalui CCC itu lebih menjamin kerahasiaan itu daripada kalau melalui jalur PL 480.
2. Ada kemungkinan jalur ketiga juga perlu dipertimbangkan: AS membeli beras dari Thailand, dan biar pihak Thailand yang mengirim beras itu ke Indonesia. Namun jalur ini akan menuntut keterlibatan dana Bantuan Pendukung (*Supporting Assistance*) dan, menurut para pengacara kita, akan menuntut pula adanya *Presidential Determination* (Ketentuan Presiden di bawah Amandemen Broomfield) bahwa bantuan untuk Indonesia itu sejalan dengan kepentingan nasional AS. Langkah macam itu akan sulit dirahasiakan dan akan dapat mempermalukan pihak Indonesia.
3. Jalur PL 480 dapat menimbulkan sejumlah kegelisahan di masa depan: sebagaimana Anda tahu, selama beberapa bulan terakhir ini para pengusaha kapas AS berusaha untuk mendapatkan garansi CCC bagi surat kredit Indonesia dengan maksud untuk bisa menjual kapas mentah ke Indonesia. Para pengusaha itu—berikut para

pendukung mereka di Gedung Capitol Washington—merasa gelisah jika Pemerintah AS lebih memilih jalur PL 480 untuk pengiriman kapas daripada dengan menggunakan jalur dagang biasa melalui garansi CCC. Tindakan kita untuk mengirim beras ke Indonesia melalui jalur PL 480 tentu saja akan meningkatkan kekhawatiran para pengusaha kapas dan pendukung mereka di Washington.

11. “Pemerintah Baru” Ingin Mempererat Hubungan

Bagaikan gayung bersambut, uluran niat Washington untuk membantu Indonesia disusul oleh Jakarta untuk membina hubungan lebih dekat dengan Washington. Sebagaimana terbaca dalam surat tertanggal 31 Maret di bawah, dalam hal ini pemerintah Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Dalam surat kepada Wakil Presiden AS Hubert Humphrey, Malik mengungkapkan keinginan untuk “mempererat hubungan” antara Indonesia dan Amerika, bahkan ingin secara pribadi ketemu dengan Humphrey.***

SURAT DARI MENTERI LUAR NEGERI INDONESIA ADAM MALIK KEPADA WAKIL PRESIDEN AS HUBERT HUMPHREY¹⁷

Tn. Hubert Humphrey

Wakil Presiden Amerika Serikat
Capitol Hill
Washington, D.C.

Tn. Humphrey yang terhormat,

Mengacu kepada surat yang Anda tujukan kepada Bpk. Widjatmika tertanggal 27 Januari 1964, yang isinya telah saya baca, kiranya telah tiba saat yang tepat bagi kita untuk mempererat hubungan kita dan untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi bersama sebagaimana Anda sebut dalam surat itu.

Untuk tujuan itulah saya merasa bersyukur dapat berkomunikasi kembali dengan Anda melalui Bpk. Widjatmika yang memiliki wewenang dan kuasa penuh dari saya untuk membicarakan apa pun yang perlu dalam kaitan dengan hal di atas, yakni semua hal yang akan berguna bagi upaya yang cepat dan efisien guna membangun kembali ekonomi negeri kami.

Saya berharap bisa bertemu dengan Anda secara pribadi. Semoga pembicaraan itu berjalan dengan baik dan lancar.

Hormat kami,
(tanda tangan)
ADAM MALIK

Catatan akhir:

- 1 Pambudi, 57.
- 2 Pambudi, 127.
- 3 Pambudi, 128.
- 4 Memorandum dari W.W. Rostow kepada Presiden Johnson, 3 Maret 1966. Status: Rahasia. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia, #87.
- 5 Lydman, Telegram dari Kedutaan Besar (Jakarta) untuk Departemen Luar Negeri (Washington), Jakarta, 4 Maret 1966. *Foreign Relations of the United States, 1964-1968, Vol. XXVI. Indonesia; Malaysia-Singapore; Philippines* (Washington: United States Government Printing Office, 2001), hlm. 411-414.
- 6 Telegram dari Kedutaan Besar AS (Jakarta) untuk Departemen Luar Negeri (Washington), 10 Maret 1966. Status: Rahasia/Segera. Sumber: *Foreign Relations of the United States, 1964-1968, Vol. XXVI. Indonesia; Malaysia-Singapore; Philippines* (Washington: United States Government Printing Office, 2001), hlm. 414-416.
- 7 Pada tanggal 23 Februari dan 8 Maret, kelompok-kelompok kiri yang terorganisir dengan rapi menyerang Kedutaan Besar Amerika Serikat. Tidak ada korban dalam kejadian ini dan para penyerang tidak berhasil masuk ke kompleks Kedutaan (Telegram 2509 dari Jakarta, 8 Maret; *ibid*).
- 8 Dalam telegram 2564 dari Jakarta, 12 Maret, 0150Z, Kedutaan Besar melaporkan, sebuah sumber yang terpercaya mengatakan bahwa sedang terjadi penangkapan terhadap 20 menteri kabinet oleh pasukan tentara.
- 9 Tanggal 21 Februari 1966 Bung Karno melakukan *reshuffle* Kabinet, dan sebagai salah satu hasilnya Menteri Pertahanan Nasution diberhentikan, digantikan oleh Jenderal Sarbini.
- 10 Telegram dari Kedubes Amerika (Jakarta) untuk Departemen Luar Negeri (Washington), 12 Maret 1966. Status: Rahasia. *Foreign Relations of the United States, 1964-1968, Vol. XXVI. Indonesia; Malaysia-Singapore; Philippines* (Washington: United States Government Printing Office, 2001), hlm. 417-418.

- 11 Memorandum dari Robert Komer (Deputi ¹⁶ 7. isten Khusus Bidang Keamanan Nasional) untuk Presiden Lyndon B. Johnson, 12 Maret 1966. *Foreign Relations of the United States, 1964–1968, Vol. XXVI. Indonesia; Malaysia-Singapore; Philippines* (Washington: United States Government Printing Office, 2001), hlm. 419.
- 12 Memorandum dari Berger (Deputi ²² 7. Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Timur Jauh) untuk ⁷ 7. Menteri Luar Negeri Rusk, “Perkembangan Terakhir di Indonesia”, 14 Maret 1966. Status: Rahasia. *Foreign Relations of the United States, 1964–1968, Vol. XXVI. Indonesia; Malaysia-Singapore; Philippines* (Washington: United States Government Printing Office, 2001), hlm. 422–423.
- 13 Telegram dari Departemen ⁷ 7. Luar Negeri (Washington) ke Kedubes AS (Jakarta), 17 Maret 1966. Status: Rahasia. Sumber: *Foreign Relations of the United States, 1964–1968, Vol. XXVI. Indonesia; Malaysia-Singapore; Philippines* (Washington: United States Government Printing Office, 2001), hlm. 422–424.
- 14 Dalam paragraph 5 telegram 2633 dari Jakarta tanggal 16 Maret 1966, Kedubes AS mengusulkan bahwa “hampir dapat dipastikan bahwa nantinya partai-partai lama yang pro-Barat seperti Masyumi dan PSI akan diakui kembali, namun dengan nama yang berbeda”. Kemungkinan besar tokoh-tokoh politik seperti Adam Malik, Soeharto, dan Nasution akan memainkan peran penting.
- 15 Telegram dari Kementerian ⁷ 7. Luar Negeri (Washington) untuk Kedubes AS (Jakarta), 22 Maret 1966. Status: Rahasia. Sumber: *Foreign Relations of the United States, 1964–1968, Vol. XXVI. Indonesia; Malaysia-Singapore; Philippines* (Washington: United States Government Printing Office, 2001), hlm. 424–425.
- 16 Memorandum dari James C. Thomson Jr (Dewan Keamanan Nasional) un ⁷ 7. Moyers (Pembantu Khusus Presiden), “Beras untuk Indonesia”, 31 Maret 1966. Status: Rahasia. *Foreign Relations of the United States, 1964–1968, Vol. XXVI. Indonesia; Malaysia-Singapore; Philippines* (Washington: United States Government Printing Office, 2001), hlm. 425–426.
- 17 Surat dari Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik kepada Wakil Presiden AS Hubert Humphrey, 31 Maret 1966. Status: Sangat konfidensial. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, Confidential File CO 110. #9c.

April 1966: Amerika Serikat dan Sikap Hati-hati

1. Pengantar

BERBEKAL SUPERSEMAR yang sudah ada di tangan (dengan versi tertentu tentunya), pada bulan April ini para pendukung Soeharto mulai mentargetkan para pendukung Bung Karno, baik itu di dalam tubuh PNI, Divisi Diponegoro, maupun di DPR/MPR.

²⁴ Bersamaan dengan itu, kubu Soeharto juga mulai mencari dukungan luar negeri, khususnya dalam rangka memulihkan kondisi ekonomi Indonesia. Pada bulan ini Menlu Adam Malik berkunjung ke New York guna mengumumkan bahwa Indonesia akan bergabung kembali dengan PBB. Adam Malik juga mengungkapkan keinginan pemerintahnya untuk bergabung dengan lembaga-lembaga internasional yang lain.

Dalam kaitan dengan politik luar negeri, Indonesia menormalisasi hubungan dengan Singapura, meskipun hal itu meresahkan Malaysia yang resminya masih terlibat dalam politik Konfrontasi melawan Indonesia. Singapura mencoba meyakinkan bahwa normalisasi hubungan Indonesia-Singapura itu tak akan mempengaruhi keamanan Malaysia, namun Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdul Rahman tidak terlalu yakin.

Sementara itu pada tanggal 12 April Sultan Hamengku Buwono IX secara terus terang dan terbuka mengakui betapa kacaunya kondisi ekonomi di Indonesia saat ini. Sultan mengundang keterlibatan swasta maupun pemerintah untuk membangun kembali pertanian Indonesia, sekaligus menghidupkan kembali industri tekstil, produksi alat-alat pertanian dan transportasi.

Sebulan setelah ditandatanganinya Supersemar, posisi Bung Karno makin terjepit. Bisa ditebak, Amerika merasa senang akan hal itu, namun tetap ingin bersikap hati-hati dalam kebijakannya terhadap Indonesia. Karena berharap bahwa ekonomi Indonesia akan segera bangkit, Amerika sengaja ingin menahan diri untuk tidak terlalu cepat memberikan bantuan ekonomi kepada pemerintahan yang *de facto* dipegang oleh Soeharto dan kawan-kawan.

Sikap hati-hati Amerika pada bulan April ini juga tercermin dengan cukup jelas ketika pemerintah Inggris bermaksud memberi bantuan kepada Indonesia sebesar satu juta poundsterling, tetapi dengan catatan bahwa Indonesia bersedia mengurangi konfrontasinya dengan Malaysia. Sebagaimana dapat dilihat dalam salah satu dokumen bulan April, Amerika tidak merekomendasi bantuan macam itu. Alasannya, bantuan bersyarat macam itu justru dapat bersifat kontra-produktif jika hal itu cepat atau lambat diketahui publik.

2. Senang Namun Hati-hati

Memorandum berikut menegaskan bahwa pengiriman 50 ribu ton beras itu menandai babak baru dalam hubungan Indonesia-Amerika. Di mata Amerika, “pemerintah yang baru” yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto ini memang layak dibantu karena mulai melakukan banyak perubahan dalam kebijakan dalam negeri maupun luar negeri. Dalam kebijakan luar negeri, misalnya, Indonesia mulai memperbaiki hubungan diplomatik dengan Singapura. Secara internal, pemerintah yang baru juga terus berupaya menyingkirkan orang-orang yang diduga pro-komunis. Semua itu membuat Amerika senang.

Pada saat yang sama, Staff National Security Council D.W. Ropa dalam memorandum tanggal 18 April di bawah ini menganjurkan agar Amerika tetap bersikap hati-hati sambil mengamati langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi.

SITUASI INDONESIA TERKINI¹

Persetujuan untuk menjual 50 ribu ton beras kepada Pemerintah Indonesia melalui jalur PL 480 Bagian IV telah ditandatangani kemarin dan hari ini telah diumumkan secara publik. Kiriman bantuan yang sifatnya terbatas ini merupakan tanda dimulainya kembali kerja sama antara kedua negara, setelah kini kekuasaan Sukarno amat dibatasi. Perubahan suasana di Jakarta dan pembalikan atas kebijakan-kebijakan Sukarno yang banyak dikecam kini dengan jelas tercermin dalam perencanaan ekonomi yang lebih realistis, penurunan intensitas Konfrontasi dengan Malaysia, dan upaya terus-menerus untuk membersihkan pengaruh komunis dari berbagai kementerian. Semua itu telah menandai pemerintahan baru Jenderal Soeharto.

Sultan Yogyakarta secara terus terang menggambarkan kacaunya suasana ekonomi Indonesia dan memetakan langkah-langkah untuk mendorong usaha-usaha swasta serta membangun kembali pertanian, produksi tekstil, produksi alat-alat pertanian dan transportasi. Dia mengatakan bahwa tidak ada jalan keluar yang mudah dan mengajak sektor swasta maupun pemerintah untuk hidup sederhana. Ada pula indikasi bahwa pemerintah sedang menyiapkan diri untuk mengembalikan perkebunan karet milik Amerika yang selama ini telah dirampas.

Indonesia telah mulai memperbaiki hubungan diplomatik dengan Singapura, dan ini bisa jadi merupakan bagian dari upaya untuk meredakan ketegangan dengan Malaysia, meskipun secara publik Konfrontasi tetap dilanjutkan. Pemerintah Singapura menyambut hangat keputusan pemerintah Indonesia untuk memperbaiki hubungan dan telah meyakinkan pemerintah Malaysia bahwa pemerintah Singapura akan selalu berkonsultasi dengan Malaysia jika ada hal-hal yang menyangkut kepentingan pertahanan Malaysia. Pada awalnya, reaksi dari Tunku Abdulrahman cukup tenang. Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya dia mengecam normalisasi hubungan itu sebagai langkah untuk meningkatkan politik Konfrontasi Indonesia. Lee Quan Yew melakukan pendekatan pribadi kepada Tunku dan menyatakan bahwa normalisasi itu tidak akan digunakan untuk melawan kepentingan Malaysia. Tunku tetap saja curiga atas pengaruh Sukarno dalam politik Konfrontasi. Sikap curiga Tunku ini telah memperlemah posisinya yang semula sebenarnya dapat

membantu mengurangi ketegangan Indonesia-Malaysia. Sementara itu Menteri Luar Negeri Adam Malik tetap melanjutkan rencananya agar Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB, serta mendorong Indonesia bergabung kembali dengan lembaga-lembaga internasional lain, meskipun secara publik Sukarno menyangkal gagasan itu.

Di dalam negeri, upaya terus-menerus untuk menyingkirkan orang-orang pro-komunis dari institusi-institusi pemerintah telah disertai dengan upaya yang terorganisir untuk menyerang orang-orang keturunan Cina di Indonesia. Perusakan dan pembakaran atas Kedutaan Besar Cina Komunis berikutan tekanan kepada penduduk keturunan Cina tanpa diikuti tindakan tegas oleh pemerintah Indonesia memberi kesan bahwa para pemimpin Indonesia sedang berusaha memaksa Peking (Beijing) untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Peristiwa-peristiwa itu merupakan petunjuk yang kuat akan adanya gerakan yang sekarang sedang berlangsung secara luas dalam rangka membalik kebijakan-kebijakan Sukarno. Sukarno terus diisolasi dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan-keputusan pemerintahan Soeharto. Hal ini menunjukkan bahwa rangkaian usaha militer untuk melucuti kekuasaan Sukarno akhirnya berhasil.

Atas ini semua kita tetap mengambil sikap hati-hati untuk tidak cepat-cepat merencanakan pemberian bantuan yang besar, sementara kita tetap memonitor langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia untuk merasionalisasi kebijakan-kebijakan ekonominya. Kita tetap berpandangan bahwa normalisasi bantuan yang terlalu cepat justru dapat menghambat reformasi ekonomi yang sekarang sedang dibutuhkan oleh Indonesia.

D.W. Ropa

3. Inggris Dianjurkan Tidak Membantu Dulu

Bak gayung lain yang juga turut bersambut, pengiriman bantuan Amerika untuk Indonesia rupa-rupanya mendorong perintah Inggris untuk juga berencana mengirim bantuan ke Indonesia, berupa hibah langsung senilai satu juta poundsterling. Sayangnya bantuan itu mau dikaitkan dengan desakan untuk diturunkannya intensitas serangan Indonesia atas Malaysia dalam rangka Konfrontasi. Ketika dimintai pertimbangan atas rencana tersebut, Washington menyatakan tidak setuju. Alasannya, pengiriman bantuan yang dikaitkan dengan tuntutan tertentu justru akan mempersulit semua pihak, terutama jika hal itu nantinya menjadi pengetahuan publik.***

**TELEGRAM DARI DEPARTEMEN LUAR NEGERI
(WASHINGTON) KE KEDUBES AMERIKA SERIKAT
(JAKARTA) ²**

Menteri Inggris (Stewart) mengatakan kepada Bundy hari ini bahwa pemerintah Inggris sedang mempertimbangkan untuk menawarkan kepada pemerintah Indonesia satu juta poundsterling dalam bentuk bantuan hibah langsung. Menurut rencana Kedubes Inggris akan menyampaikan tawaran itu kepada Adam Malik, dan akan mengatakan bahwa uang tersebut akan disampaikan secara bertahap, sekaligus bahwa uang itu tidak terikat dengan maksud tertentu. Pada saat yang sama, pemerintah Inggris berharap atas membaiknya hubungan Inggris-Indonesia. Secara lebih khusus, Kedubes Inggris akan menunjukkan bahwa pemerintah Inggris mengharapkan menurunnya Konfrontasi militer dengan Malaysia khususnya di perbatasan Kalimantan Utara. Maksud sebenarnya dari pemerintah Inggris (meskipun Adam Malik tidak akan diberi tahu) adalah bahwa jika penurunan Konfrontasi itu tidak dilakukan, pemberian bantuan tidak akan diteruskan. Stewart mengatakan bahwa pemerintah Inggris telah mengadakan konsultasi dengan negara-negara New Commonwealth dan Amerika Serikat. New Zealand tidak keberatan, tetapi Australia belum memberikan jawaban. Dalam konsultasi itu pertanyaan-pertanyaan dipertimbangkan secara matang. Stewart setuju bahwa jika transaksi dengan Indonesia itu terjadi, hal itu tidak akan dapat dirahasiakan dan akan menjadi pengetahuan umum setidaknya di Inggris. Dia meminta komentar dari kita.

Kita katakan kepada Stewart, reaksi awal kita adalah bahwa rencana itu cukup berwawasan ke depan, tetapi kita melihat akan adanya kesulitan dalam melaksanakannya. Khususnya kalau nanti berita mengenai hibah itu menjadi publik akan muncul pertanyaan kepada pemerintah Inggris dari Parlemen mengenai imbalan yang didapat pemerintah Inggris dari pemberian hibah tersebut. Pertanyaan macam itu akan sulit dijawab tanpa secara publik menyatakan bahwa Indonesia akan memberikan konsesi berkaitan dengan masalah perbatasan Kalimantan Utara.

Pengungkapan berita mengenai hibah dapat dipastikan akan menimbulkan kemarahan di kalangan media massa Malaysia dan akan membuat Tunku Abdulrahman dalam posisi yang sulit. Bahkan kalau Tunku sudah dibujuk untuk menerima alasan pemberian hibah (tapi hal ini meragukan), Tunku akan terpaksa membela diri melawan tuduhan bahwa Inggris telah menjual kepentingan Malaysia. Apa yang dia bisa lakukan hanyalah mengatakan kepada pers bahwa bantuan Inggris itu diberikan atas jaminan bahwa Indonesia mengurangi serangan militernya. Kita memang berharap bahwa Tunku akan berkata demikian.

Mengungkapkan semuanya secara blak-blakan sangat mungkin akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan di Jakarta. Reaksi Indonesia yang emosional akan muncul dengan tuduhan bahwa Inggris telah mencoba membeli kebijakan luar negeri Indonesia, dan jika Adam Malik telah menerima tawaran Inggris itu dia akan menanggung dampak negatif yang luar biasa. Jika semuanya itu benar, hasil transaksi antara Inggris dan Indonesia itu akan merupakan langkah mundur dan bukan langkah maju dalam upaya membangun hubungan Inggris-Indonesia secara rasional.

87

Kita mengusulkan bahwa cara terbaik untuk menangani masalah ini adalah dengan cara Kedubes Inggris menawarkan kepada Adam Malik satu juta poundsterling sebagai bantuan terkait dengan langkanya beras (atau masalah kerusakan akibat banjir di Solo baru-baru ini), dan terserah kepada pihak Indonesia untuk ambil keputusan sendiri berkaitan dengan masalah Konfrontasi Malaysia. Kita percaya bahwa Indonesia akan menarik kesimpulan secara tepat. Meskipun demikian kita mesti hati-hati terhadap Indonesia karena dalam transaksi timbal balik sering kali pihak Indonesia tidak menepati janji. Kita menekankan bahwa apa yang disebut di depan itu merupakan reaksi awal. Perlu pembicaraan lebih lanjut dengan Stewart tentang masalah ini.

Setelah melakukan evaluasi lebih jauh kita cenderung untuk *tidak* menyetujui rencana transaksi itu. Jika Adam Malik menerima, akibatnya akan muncul protes dari pers Malaysia dan mungkin pers Inggris juga, dan akan timbul kesan publik bahwa pemerintah Inggris sedang menyuap pemerintah Indonesia berkaitan dengan masalah Konfrontasi. Jika itu terjadi, akan berakibat timbulnya dampak negatif di Jakarta dan dapat mendorong pemerintah Indonesia untuk menyimpulkan bahwa pemerintah harus meningkatkan operasi militer guna membuktikan bahwa tuduhan itu tidak benar. Di lain pihak, jika Adam Malik menolak tawaran itu, ia akan merasa bahwa pemerintah Inggris sedang berusaha menjebak dia dan rekan-rekannya. Jika itu yang terjadi, ia akan merasa tersinggung (dan bukan bersyukur) atas tawaran Inggris itu.

Mohon komentarnya, sementara saya bermaksud mengulangi tanggapan kita di atas kepada Stewart pada hari Kamis, waktu Washington.

Ball

Catatan akhir:

- 1 Memorandum dari Donald W. Ropa (Staf Dewan Keamanan Nasional) untuk **54** tow (Pembantu Khusus Presiden), "Situasi Indonesia Terkini" 18 April 1966. Status: Rahasia. *Foreign Relations of the United States, 1964-1968*, Volume XXVI (Washington: Government Printing Office, 2001), hlm. 427-428.
- 2 Telegram dari Departemen Luar Negeri (Washington) ke Kedu**5**s Amerika (Jakarta), 20 April 1966. Status: Rahasia/Segera. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, *National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia*. #80.



Dua kekuasaan, dua orientasi. Presiden Sukarno dan Jenderal Soeharto pada suatu rapat resmi di Istana Bogor, 21 November 1965. (Sumber: Deppen RI)

Mei 1966: Soeharto Tak Mau Sebut Nama Bung Karno

1. Pengantar

DALAM KAITAN dengan Konfrontasi melawan Malaysia, bulan Mei 1966 merupakan bulan khusus, karena pada bulan ini Menlu Indonesia Adam Malik bertemu dengan Menlu Malaysia Tun Abdul Razak di Bangkok guna secara resmi mengumumkan berakhirnya Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Pada bulan ini pula, pemerintah Jepang mengirimkan bantuan darurat untuk Indonesia.

Di dalam negeri, tampaknya kedudukan Jenderal Soeharto dua bulan setelah Supersemar makin mantap. Hal itu dibaca dengan jelas oleh Dubes A.S. Marshall Green ketika bertemu dengan Soeharto pada tanggal 26 Mei 1966. Dilaporkan oleh Green, Soeharto bertemu dengannya diwarnai oleh rasa percaya diri dan antusiasme yang tinggi sehingga Soeharto mampu mendominasi percakapan yang berlangsung selama satu jam 20 menit itu.

Dikatakan oleh Green, Soeharto cukup khawatir dengan situasi konflik di Vietnam dan berharap konflik itu dapat segera diakhiri. Soeharto membuat Amerika senang ketika ia mengungkapkan pandangannya mengenai Cina Komunis sebagai “musuh” bersama dan bukan lagi sebagai kawan seperti

ketika Bung Karno masih berkuasa penuh. Pada saat yang sama Soeharto juga meminta bantuan dari Amerika, khususnya bantuan militer, seperti misalnya kapal pengangkut tank atau LST.

Bagi Green, naiknya kekuasaan dan rasa percaya diri Soeharto⁶ itu tercermin dengan gamblang ketika dalam seluruh pembicaraan itu Soeharto menekankan bahwa yang mempersatukan Indonesia itu Pancasila—artinya, bukan Sukarno. Lebih mencolok lagi ketika dalam pembicaraan yang lebih dari satu jam itu, Soeharto menolak untuk menyebut nama Bung Karno. “Dalam seluruh pembicaraan tidak sekalipun ia [Soeharto] menyebutkan nama Sukarno, baik secara langsung maupun tak langsung,” begitu tutur Green. Tentu bisa ditebak, tindakan macam itu didasari oleh pertimbangan tertentu dari pihak penerima Supersemar itu. Yang jelas sepanjang bulan Mei berlangsung makin naiknya kuasa dan pengaruh Soeharto, dan bersamaan dengan itu makin merosotnya pengaruh dan kekuasaan Bung Karno sebagai Presiden.

2. Membengkaknya Utang Indonesia

Dalam dokumen yang dikeluarkan oleh CIA berikut ini, kelihatan bahwa Indonesia sedang dililit utang, tanpa ada kepastian bagaimana jalan keluarnya. Satu-satunya cara pokok yang mau ditempuh adalah mencoba melobi negara-negara kreditor agar mau membicarakan “penjadwalan kembali” (artinya menunda) pembayaran utang Indonesia. Dikatakan dalam laporan CIA yang terbit bulan Mei 1966 ini antara lain, sampai dengan tahun 1962 sebenarnya Indonesia rajin membayar utang. Namun setelah itu pembayaran utang hampir selalu macet. Sampai dengan tanggal 1 Desember 1965 Indonesia gagal membayar utang kepada 12 negara Barat. Belum terhitung utang pada negara-negara Timur seperti Uni Soviet, Jerman Timur, Rumania, dan yang lain. Dikatakan, sampai akhir 1965 jumlah total utang Indonesia mencapai US\$2,5 miliar.

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

Washington, D.C. 20505

Mei 1966

MEMORANDUM UNTUK: Mr Bromley Smith
Staf Gedung Putih
Gedung Putih
Washington, D.C.

Perihal: Krisis Utang Luar Negeri Indonesia¹

1. Laporan terlampir dibuat untuk memenuhi permintaan dari Agency for International Development [AID], namun saya kira laporan ini juga akan menarik dan berguna bagi Anda. Saya juga mengirimkan kopiannya langsung kepada Francis Bator.
2. Berdasarkan laporan yang ada, utang Indonesia yang belum terselesaikan kurang lebih mencapai total US\$2-1/2 miliar pada akhir tahun 1965. Jatuh tempo pembayaran sejumlah US\$550 juta adalah tahun 1966 dan lebih dari US\$160 juta macet dan gagal dibayar pada Maret 1966. Indonesia mencoba untuk melakukan penjadwalan ulang atas utang-utangnya dan untuk mendapatkan kredit baru secara bilateral dan mungkin juga akan mendapatkan beberapa dana bantuan.

WILLIAM N. MORELL, JR.

Direktur Dinas Penelitian dan Pelaporan
(Office of Research and Reports)

Lampiran:
CIA/RR EM 66-18 (Hal Laporan)

KRISIS UTANG LUAR NEGERI INDONESIA²

1. Ringkasan

Salah satu masalah ekonomi yang paling kritis bagi Indonesia adalah beban utang luar negeri. Total utang yang belum terselesaikan mencapai US\$2,5 miliar, dan kewajiban yang masih berlaku menuntut pembayaran sejumlah US\$550 juta selama tahun 1966. Terlebih lagi, lebih dari US\$160 juta saat ini macet. Untuk bisa mendapatkan solusi agar dapat keluar dari situasi ini, sebuah misi ekonomi sedang bersiap-siap untuk berangkat dan mengadakan perundingan dengan

pemerintah Jepang dan negara-negara Eropa Barat mengenai perlunya penjadwalan ulang pembayaran utang dan kemungkinan perpanjangan kredit baru. Sebuah misi lain akan berangkat ke Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur. Sementara sejumlah negara Barat lebih memilih untuk melakukan negosiasi-negosiasi multilateral, Pemerintah Indonesia enggan untuk menempuh jalan multilateral dan lebih memilih untuk bernegosiasi secara bilateral. Pemerintah tampaknya berharap untuk mendapatkan penundaan selama tiga tahun untuk obligasi ekonomi jangka menengah dan jangka panjang, dan penundaan selama lima sampai delapan tahun untuk obligasi militer. Hal tersebut tampaknya merupakan perhitungan yang terlalu optimis, namun beberapa penjadwalan kembali mungkin bisa didapatkan dan bahkan beberapa kredit baru mungkin akan diperpanjang guna meringankan beban tekanan ekonomi.

2. Kegagalan Utang Luar Negeri

Sampai dengan awal tahun 1962 Indonesia selalu menyelesaikan kewajiban finansial pada waktunya. Sejak saat itu, kesulitan-kesulitan membayar utang terus memburuk, dan meskipun sudah ada penjadwalan utang tetap saja terjadi kegagalan pembayaran utang baik terhadap para kreditor Negara-negara Komunis maupun Negara Barat. Jumlah total redivit macet dari negara Komunis mencapai kurang lebih US\$110 juta dan ini merupakan porsi terbesar dalam total kredit macet. Sepanjang tahun 1964 dan 1965, Indonesia telah mampu membujuk beberapa negara, khususnya Jepang, Jerman Barat, dan Belanda, untuk menerima penjadwalan ulang beberapa jenis utang dan dengan cara ini dapat menjaga reputasi mereka untuk “tidak pernah mengingkari pembayaran utang” pada negara-negara Barat (*Free World*). Akan tetapi sejak tanggal 1 Desember 1965, Indonesia telah gagal membayar utang pada sedikitnya dua belas Negara Barat. Sampai dengan bulan Maret 1966, pembayaran yang macet baik kepada Negara Barat maupun Negara-negara Komunis mencapai US\$160 juta dan menjadi semakin bertambah setiap harinya. Itu pun belum semuanya. Masih ada pembayaran jangka pendek berkala terhadap obligasi asing seiring dengan tersedianya valuta asing. Jepang, Jerman, dan Belanda adalah negara non-Komunis yang paling banyak mengalami obligasi macet tersebut.

3. Utang Jangka Panjang dan Jangka Menengah

Sampai dengan akhir 1965 utang jangka panjang dan jangka menengah Indonesia mencapai US\$2,2 miliar. Negara kreditor terbesar adalah Uni Soviet dengan total kredit sebesar US\$992 juta dan sebagian besar dalam bentuk pengadaan alat-alat dan pelatihan militer. Utang jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan negara kreditor sampai dengan November 1965 ditunjukkan dalam Tabel 1. Jatuh tempo pembayaran tahun 1965 pada utang jangka menengah dan

jangka panjang Indonesia seluruhnya kurang lebih US\$210 juta. Sekitar bulan Januari sampai November, hanya sekitar US\$104 juta dari utang tersebut yang telah dibayarkan sehingga timbul kredit macet sejumlah US\$106 juta selama 1965. Lebih dari itu, kredit macet dari tahun 1964 yang berjumlah kira-kira US\$45 juta telah dimasukkan ke dalam total kredit macet bulan Desember 1965 yang berjumlah kira-kira US\$150 juta.

4.Utang Jangka Pendek

Utang jangka pendek Indonesia sampai bulan November 1965 dilaporkan kira-kira berjumlah US\$325 juta yang kiranya harus dibayarkan dalam waktu satu tahun. Informasi tentang obligasi yang dikeluarkan oleh negara kreditor hanya berlaku sampai September 1965, dan itu dapat dilihat dalam Tabel 2. Beberapa pembayaran utang kembali mungkin telah dilakukan sejak itu, namun utang baru telah terjadi lagi setidaknya selama bulan November, dan total utang jangka pendek mungkin tidak kurang dari US\$325 juta. Walaupun jumlah tersebut di atas diperoleh dari data Bank Indonesia, pemerintah Indonesia telah mengumumkan secara publik jumlah yang lebih rendah dan karena tampaknya pemerintah tidak menyadari betapa seriusnya situasi utang yang sebenarnya. Pada bulan Februari dan Maret, Rachmat Saleh, Deputy Direktur Bank Indonesia dan Umarjadi, yang waktu itu Deputy IV Menteri Luar Negeri, mengumumkan bahwa utang jangka pendek Indonesia adalah antara US\$120 juta dan US\$130 juta.

Tabel 1
Utang Jangka Menengah dan Jangka Panjang Indonesia
sampai Bulan November 1965

US\$ Juta			
Dana Moneter Internasional 102.3U a/			
Negara Barat		Negara-negara Komunis	
Jepang	187.1	Uni Soviet	992.4
Amerika Serikat	170.9	Yugoslavia	95.0
Jerman Barat	138.9	Polandia	94.6
Prancis	107.1	Jerman Timur	60.2
Italia	98.5	Cekoslowakia	58.2
Inggris	36.9	Hungaria	17.4
Belanda	20.6	Romania	15.0
India	8.5	Cina	13.9
Austria	6.9	Bulgaria	1.0
Swedia	3.1		
Republik Uni Arab	3.0		
Swiss	0.5		
Total 2.232.0			

a. Gambaran netto. Kontribusi emas murni Indonesia telah mengimbangi sebagian dari jumlah tersebut dengan membayar obligasi sejumlah US\$63,5 juta.

Tabel 2
Utang Jangka Pendek Indonesia sampai dengan September 1965

US\$ Juta			
Negara Non-Komunis		Negara Komunis	
Jepang	110.2	Cekoslowakia	15.2
Amerika Serikat	48.2	Uni Soviet	15.0
Belanda	24.4	Yugoslowakia	9.5
Pakistan	21.6	Polandia	5.0
Jerman Barat	11.5	Jerman Timur	2.8
Italia	11.2	Hungaria	2.3
Swiss	3.6	Bulgaria	1.6
Prancis	3.4	Romania	0.8
Hongkong	2.0	Lain-lain	Negl.
India	2.0		
Zanzibar	1.5		
Filipina	1.4		
Belgia	1.2		
Norwegia	1.2		
Austria	0.7		
Finlandia	0.3		
Denmark	0.2		
Irak	0.2		
Swedia	0.2		
Republik Uni Arab	0.2		
Australia	0.1		
Kanada	Negl.		
Meksiko	Negl.		
Total	297.5		

3. Soeharto Tak Lagi Sebut Nama Bung Karno

Pada tanggal 26 Mei Jenderal Soeharto bertemu dengan Dubes Green. Dalam pertemuan itu dilaporkan Soeharto tampak gembira karena telah berhasil menumpas orang-orang Komunis. Pada saat itu, ia juga mengungkapkan masih banyaknya masalah lain, termasuk masalah kemiskinan. Dan dalam upaya mengatasi kemiskinan ini Soeharto membutuhkan bantuan Amerika Serikat. Dalam laporan Green tanggal 27 Mei 1966 ini juga dikatakan bahwa meskipun bicara tentang situasi Indonesia selama satu jam 20 menit, tidak

satu kali pun Soeharto menyebut nama Bung Karno. Ini mencerminkan pandangan Soeharto bahwa Bung Karno tidak lagi penting bagi kehidupan politik Indonesia.

Atas sikap Soeharto ini tentu Amerika merasa senang. Apalagi Soeharto juga mengatakan bahwa Indonesia akan mengakhiri Konfrontasi dan memandang Cina Komunis sebagai “musuh”.

16
**TELEGRAM DARI KEDUTAAN BESAR AMERIKA
 SERIKAT (JAKARTA) UNTUK DEPARTEMEN LUAR
 NEGERI (WASHINGTON)³**

1. Pertemuan saya dengan Jenderal Soeharto pada tanggal 26 Mei yang sedianya hanya berlangsung satu jam ternyata *molor* hingga satu jam 20 menit. Selama pembicaraan itu, Soeharto mendominasi hampir setiap topik yang dibahas. Sebenarnya Soeharto paham bahasa Inggris kalau kita ngomongnya pelan dan jelas (sebagaimana yang saya usahakan). Meskipun demikian dia *ngotot* untuk menggunakan penerjemah. Padahal kalau tanpa penerjemah, sebenarnya akan ada lebih banyak masalah yang bisa kita bahas.

2. Hubungan AS-Indonesia. Soeharto, yang tampak gembira dan penuh percaya diri, berbicara tentang keberhasilannya dalam menumpas orang-orang Komunis beserta elemen-elemen Gestapu lainnya, namun menurutnya masih banyak hal yang harus dikerjakan. Masih banyak kader-kader Komunis belum tertangkap. Pemerintahannya telah menetapkan untuk menghapuskan komunisme, mengupayakan ketertiban dan keamanan, dan menegakkan Pancasila. Oleh Soeharto, Pancasila disebut berkali-kali sebagai falsafah dasar dan faktor pemersatu rakyat Indonesia. Bahaya terbesar yang kini dihadapi Indonesia adalah masalah ekonomi. Orang hanya perlu melakukan perjalanan sepanjang Jawa Tengah dan Jawa Timur, lanjutnya, untuk bisa melihat sendiri betapa miskinnya kedua wilayah tersebut (di beberapa tempat orang-orang menanam padi di wadah-wadah yang terbuat dari tanah liat hanya untuk bisa mendapatkan tambahan beras tiap tahunnya). Jika pemerintah tidak melakukan sesuatu untuk mengurangi penderitaan orang-orang tersebut, ada kemungkinan komunisme akan bangkit kembali. Pada poin ini, Soeharto lantas menguraikan langkah-langkah yang mau ia tempuh guna mengurangi kepadatan penduduk di Jawa dan meningkatkan kemampuan ekspor Indonesia. Caranya adalah dengan memindahkan penduduk dari Jawa ke Kalimantan, agar di sana mereka dapat bertani dan mengembangkan industri kehutanan. Proyek ini pernah dilontarkan oleh Jenderal Tasmin sebelumnya [DefAtt], dan sudah pernah kami laporkan. Sebagaimana

halnya Tasmin, Soeharto juga berusaha untuk mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat untuk mendukung proyek tersebut, dan lebih jauh lagi ia bahkan menyampaikan harapannya bahwa kita dapat menyediakan beberapa LST (*Tank Landing Ship*) karena membangun sebuah fasilitas pelabuhan akan sangat membutuhkan waktu dan biaya.

3. Saya menjawab bahwa ada banyak hal yang perlu untuk dipertimbangkan oleh kedua belah pihak untuk menanggapi usulan tersebut. *Pertama-tama*, adanya permasalahan jika mau memulai kembali program bantuan Amerika Serikat untuk Indonesia: selama ini pemerintahan Indonesia belum pernah mengajukan permohonan bantuan kepada AS, dan jika hal itu terjadi, pemerintah AS harus meminta persetujuan Kongres untuk program bantuan ke Indonesia. Tentu saja akan penting bagi kedua belah pihak jika bantuan untuk Indonesia ada kaitannya dengan upaya meningkatkan hubungan antara kedua negara serta upaya untuk memecahkan masalah-masalah perekonomian di Indonesia. *Kedua*, kedua belah pihak harus mempertimbangkan bentuk-bentuk bantuan apa yang kiranya paling dibutuhkan oleh Indonesia. Saya sendiri amat prihatin dengan masalah kemiskinan di Jawa. Kita pernah menyalurkan bantuan dengan baik, berupa bantuan bahan makanan dengan imbalan proyek-proyek tertentu. Tapi lalu Sukarno mengatakan “Persetan dengan bantuanmu!” (*Go to hell with your aid!*). Maka proyek bantuan itu pun terhenti. Menurut perkiraan saya, proyek-proyek semacam ini kemungkinan akan sangat membantu dalam penyelesaian masalah-masalah yang ia sebutkan. Berkaitan dengan masalah Kalimantan, saya usulkan supaya dia melihat kemungkinan untuk mencari bantuan swasta asing dalam rangka pembukaan hutan dan industri-industri lainnya. Mungkin bantuan luar negeri yang lebih besar bisa diperoleh dari kalangan swasta daripada dari lingkungan pemerintah.

4. Soeharto mengatakan bahwa peluang untuk memperluas industri pertanian di Jawa Tengah dan Jawa Timur sangat terbatas. Saya sempat mempertanyakan hal itu, tetapi juga sempat menyampaikan pentingnya pembangunan di Kalimantan dan pulau-pulau luar lainnya. Kami sepakat bahwa hal-hal tersebut perlu kami bicarakan lebih lanjut.

5. Membendung pengaruh Cina melalui Kerja Sama Asia Tenggara. Pembicaraan tentang topik ini hampir seluruhnya berkisar pada masalah Konfrontasi, di mana Soeharto berusaha keras mempertahankan kebijakan Indonesia sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Pemerintah Indonesia sejak dulu, namun berakhir dengan pernyataan tegas bahwa Indonesia akan mengakhiri Konfrontasi. Dia berharap bahwa perundingan Bangkok akan membuahkan hasil yang memuaskan sesuai dengan Persetujuan Manila, tetapi juga mengingatkan bahwa hal ini membutuhkan kesadaran dari kedua belah pihak yang bersengketa untuk saling berkorban. Satu-satunya alasan yang diberikan oleh Soeharto mengenai alasan pemerintah Indonesia mau mengakhiri Konfrontasi adalah

43

supaya bisa membina hubungan lebih baik dengan negara-negara tetangga, dan dengan demikian akan mampu turut membendung pengaruh Cina Komunis. Ia menyampaikan pendapatnya itu secara meyakinkan.

6. Saya mengatakan, kami menyambut baik upaya untuk mengakhiri Konfrontasi sesuai dengan alasan-alasan yang ia kemukakan maupun alasan-alasan lain. Tentang Beijing (Peking), bahkan sejak akhir musim panas 1963 sebenarnya Beijing mendukung kebijakan Konfrontasi yang dilancarkan oleh Indonesia, karena Konfrontasi dapat memecah-belah dan melemahkan wilayah yang sebenarnya Beijing ingin kuasai. Saya menyinggung laporan intel tentang Chen Yi, yang dalam kunjungannya ke Indonesia pada bulan Agustus 1965 telah mendesak Indonesia untuk melanjutkan Konfrontasi dan untuk tidak mau mengakui pembentukan Singapura dan Malaysia. Tampaknya waktu itu Beijing takut bahwa Indonesia merasa lelah dengan kebijakan Konfrontasi, padahal Beijing ingin mengisolasi Singapura dari Malaysia dan Indonesia dalam rangka melemahkan perekonomiannya sambil mendorong kebangkitan kembali Barisan Sosialis. Saya katakan Soeharto dihormati di seluruh dunia berkat usaha-usahanya untuk membangun hubungan baik dengan seluruh negara-negara tetangga. Hal ini akan berdampak positif pada kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, dan strategis Indonesia. Menurut saya, jangan ada satu pun hambatan yang akan dibiarkan mengganggu pencapaian kestabilan yang sesuai dengan kepentingan Indonesia dan yang sangat bertentangan dengan maksud-maksud Beijing.

7. Upaya untuk Mengakhiri Perang Vietnam. Soeharto hanya berbicara secara singkat mengenai masalah ini, dengan menekankan pada keinginan Pemerintah Indonesia supaya segera diakhirinya perang di Vietnam. Ia mengatakan bahwa misi Indonesia ke Hanoi tahun lalu telah melaporkan bahwa sekarang ini Hanoi terbagi dua antara membangun komunisme yang berorientasi ke Beijing dan menggalang nasionalisme Vietnam. Soeharto menanyakan pendapat saya tentang kemungkinan adanya penyelesaian masalah Vietnam secara damai.

8. Saya menunjukkan bagaimana Beijing berusaha supaya perang itu terus berlanjut dengan maksud supaya perekonomian Vietnam lemah dan dengan begitu makin besarlah kemungkinan bagi Cina untuk menguasai wilayah tersebut. Beijing juga berusaha supaya Amerika kalah secara memalukan dan berusaha mengusir Amerika Serikat di Asia Tenggara supaya nantinya Cina bisa gantian berkuasa. Saya katakan, Uni Soviet tidak akan bisa membantu dalam mengupayakan perdamaian. Meskipun mereka mungkin menginginkan berakhirnya perang di Vietnam, tetapi mereka takut akan dicap lemah dan revisionis oleh Cina Komunis. Uni Soviet takut bahwa kalau sampai tuduhan itu muncul, hal itu akan melemahkan posisinya di mata partai-partai Komunis dunia. Kunci perdamaian ada di tangan Hanoi, dan telah menjadi kebijakan kita untuk membuat Hanoi tertarik akan

perdamaian, sekaligus menyadarkan Hanoi bahwa sikap agresif akan mahal harganya. Selama ini kita hanya mengerahkan kekuatan secara terbatas dalam rangka mengakhiri masalah Vietnam. Akan tetapi kita juga tak akan segan-segan menggunakan kekuatan yang lebih besar untuk menjunjung tinggi komitmen kita dalam melindungi Vietnam Selatan dan negara-negara lainnya dari agresi Vietnam Utara yang komunis. Saya juga menjelaskan secara singkat peristiwa-peristiwa yang berlangsung di Vietnam Selatan akhir-akhir ini berdasarkan laporan yang kami terima serta informasi-informasi lainnya.

9. Soeharto mengulangi harapan pemerintahannya mengenai pentingnya perdamaian di Vietnam dan di seluruh Asia Tenggara. Saya mengatakan, saya berharap pemerintahannya dapat pula menyampaikan hal itu kepada Hanoi karena semuanya terserah kepada Hanoi untuk menanggapi sejumlah inisiatif yang telah disampaikan oleh Amerika Serikat, yang juga didukung oleh negara-negara di seluruh dunia.

10. Soeharto sekali lagi mengatakan harapannya bahwa negosiasi-negosiasi dalam rangka mengakhiri Konfrontasi akan berha⁴³supaya dengan begitu terbukalah jalan bagi Indonesia untuk membina hubungan yang lebih baik dengan negara-negara tetangganya termasuk Thailand dan Laos. Saya menyampaikan harapan bahwa dia dan saya dapat terus bekerja sama dalam hal ini. Setiap saat saya diperlukan, saya akan bersedia untuk memberikan informasi atau bahan-bahan penjelasan tertentu. Sebaliknya saya katakan saya tertarik untuk mendengarkan pandangan-pandangannya, kapan pun ia bersedia.

11. *Komentar:* Penting dicatat, Soeharto menekankan bahwa pemersatu Indonesia itu adalah Pancasila. Artinya, bukan Sukarno-lah yang seharusnya menjadi kekuatan pemersatu Indonesia. Dalam seluruh pembicaraan tidak sekalipun ia menyebutkan nama Sukarno, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya cukup kecewa bahwa dia begitu banyak bicara sambil menekankan betapa penting proyeknya di Kalimantan. Padahal seharusnya ia tahu pandangan saya tentang hal ini, karena saya telah membicarakannya dengan Malik sebelumnya. Namun bagaimanapun juga proyek ini adalah proyek yang paling dekat di hati Soeharto, dan mengingat Soeharto adalah seorang tokoh kunci di Indonesia, kita harus dapat mengantisipasi kemungkinan adanya desakan dari pihak Soeharto agar kita memberinya bantuan untuk proyek ini di masa depan.

12. Secara umum pembicaraan dengan Soeharto itu amat berguna. Yang paling menyentuh adalah kesadaran Soeharto mengenai ancaman Beijing bagi Asia Tenggara. Sepanjang pembicaraan ia memandang Cina sebagai “musuh”. Hal ini tidak berarti bahwa Indonesia berkeinginan untuk meninggalkan politik non-bl⁴⁷ya. Tapi setidaknya hal itu mencerminkan keinginan Indonesia untuk menjalin hubungan yang lebih luas dengan negara-negara yang kiranya akan dapat membantunya secara strategis maupun ekonomis.

Catatan akhir:

- 1 Memorandum untuk Broomley Smith, “Krisis 5 ng Luar Negeri Indonesia”, 25 Mei 1966. Status: Rahasia. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, *National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia*. # 1588, #121.
- 2 Memorandum ini dibuat oleh Dinas Riset dan Laporan (Office of Research and Reports); estimasi dan kesimpulan yang disampaikan di sini adalah apa yang dapat diperkirakan oleh Direktorat Intelijen hingga 15 Mei 1966. Status: Rahasia/Tidak untuk disebar ke negara lain. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, *National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia*. #1588.
- 3 Telegram dari Kedutaan Besar Amerika Serikat (7 Jakarta) untuk Departemen Luar Negeri (Washington), 27 Mei 1966. Status: Rahasia Negara. *Foreign Relations of the United States, 1964–1968, Vol. XXVI. Indonesia; Malaysia-Singapore; Philippines* (Washington: United States Government Printing Office, 2001), h. 4231–433. National Archives and Records Administration (Badan Arsip dan Dokumen Nasional), RG 59, Central Files 1964–1966, POLINDON-US. Diulang untuk Bangkok, Canberra, CINCPAC untuk POLAD, Kuala Lumpur, London, Manila, Saigon, Singapura, dan DOD.



Adam Malik, salah satu tokoh kunci dalam reorientasi politik Indonesia. (Sumber: Deppen RI)

Bab 6

Juni 1966: Adam Malik Minta Bantuan AS

1. Pengantar

BULAN JUNI ini terasa khusus karena pada tanggal 20 bulan ini digelar Sidang Umum MPRS IV di Istora Senayan. Sidang itu sendiri baru berakhir pada tanggal 6 Juli. Untuk Sidang Umum kali ini Soeharto mendesakkan sebuah agenda, yakni agar MPRS mau mengukuhkan Supersemar menjadi Ketetapan MPR, dan dengan demikian tak akan dapat dicabut atau diubah oleh Bung Karno.

Dalam Sidang Umum MPRS ini Bung Karno juga diminta berpidato guna mempertanggungjawabkan apa yang terjadi di seputar 1965/66. Bung Karno menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan tanggung jawab, sekaligus menghimpun dukungan politik melalui pidatonya. Pidato itu ia beri judul *Nawaksara*. Sudah setengah bisa ditebak, MPRS menolak pidato pertanggungjawaban itu dan mendesak supaya diperbaiki. Namun demikian, ketika Bung Karno menyampaikan pidato perbaikan tersebut, MPRS juga menolak.

Di luar dugaan Bung Karno, ternyata SU MPRS juga mencabut gelar “Presiden Seumur Hidup” dari tangan Bung Karno. Pada saat yang sama, SU MPRS justru setuju untuk menetapkan naskah Supersemar sebagai TAP MPRS. Lahirlah TAP MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Supersemar. Dengan ditetapkannya Supersemar sebagai Ketetapan MPRS, makin menipislah kekuasaan Bung Karno untuk bisa mencegah berbagai tindakan politis yang dilakukan atas nama surat tersebut. Ia pun tak akan dapat lagi mencabut surat perintah itu.

Pada bulan Juni ini Adam Malik mengirim surat kepada Presiden AS Lyndon Johnson guna meminta bantuan kepada Amerika Serikat. Sementara itu Sultan Hamengku Buwono IX mengirim surat serupa kepada Wakil Presiden AS Hubert Humphrey. Melalui surat itu ia mengungkapkan keinginannya untuk memperbaiki hubungan antara Indonesia dan Amerika.

Sampai bulan ini, tampaknya Amerika masih belum yakin betul berkaitan dengan soal pengiriman bantuan kepada Indonesia. Amerika merasa masih harus mempelajari situasi. Dalam rangka mempelajari situasi itu pulalah CIA memberikan gambaran mengenai kelompok-kelompok pemuda yang nantinya diharapkan akan menjadi kekuatan baru dalam dunia perpolitikan Indonesia.

2. Adam Malik Meminta Bantuan AS

Dokumen berikut adalah surat dari Adam Malik kepada Presiden AS, Lyndon B. Johnson. Ia berterima kasih atas perhatian Johnson pada situasi di Indonesia, memohon bantuan kepada Amerika, sekaligus berharap supaya segera bisa bertemu secara pribadi dengan Sang Presiden.

Jakarta, 6 Juni 1966¹

Tn. Presiden yang terhormat:

Melalui surat ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas pengertian Anda terhadap perjuangan kami.

Saya telah menyampaikan harapan-harapan kami melalui Tn. Dean Rusk.

Saya sungguh-sungguh berharap bahwa bantuan Anda terhadap pembangunan negeri kami akan memperkuat posisi kami di Asia demi kepentingan kita bersama.

Saya berharap untuk dapat bertemu secara pribadi dengan Anda dalam waktu dekat guna membicarakan kerja sama yang erat antara kedua negara kita.

Hormat kami,

(Tanda tangan)

Adam Malik

3. Sultan Hamengku Buwono IX Mengharapkan Hubungan Baik dengan AS

Pada hari yang sama, 6 Juni 1966, Sultan Hamengku Buwono IX juga berkirim surat ke Wakil Presiden AS, Hubert Humphrey. Sebagaimana bisa kita lihat, dalam surat yang berkop “Perdana Menteri Republik Indonesia” itu antara lain Sultan mengungkapkan terima kasihnya atas pemahaman Humphrey terhadap perjuangan rakyat Indonesia, sekaligus mengharapkan hubungan yang semakin membaik antara Indonesia dan Amerika Serikat.***

Yang Mulia Hubert H. Humphrey²

Wakil Presiden Amerika Serikat
Capitol Hill
U.S.A.

Jakarta, 6 Juni 1966

Tn. Wakil Presiden yang terhormat,

Berkaitan dengan surat Tn. Adam Malik, saya juga ingin berterima kasih sedalam-dalamnya atas pemahaman Anda dan teman-teman Anda terhadap tujuan utama perjuangan rakyat saya.

Saya sungguh-sungguh berharap bahwa hubungan baik antara kedua negara kita akan terus berkembang demi kepentingan kita bersama.

Hormat kami,

(tanda tangan)

Hamengku Buwono IX

4. Rencana AS Membantu Indonesia Pasca-Bung Karno

Dari banyak dokumen yang telah kita simak, baru dalam dokumen ini pihak Amerika menyebut angka jumlah korban Pembantaian Massal 1965. Itu pun dikatakan sejumlah 300 ribu, yang berarti 200 ribu lebih rendah daripada jumlah korban yang biasanya disepakati di Indonesia, yakni setengah juta orang. Penyebutannya pun dilakukan secara dingin-dingin saja tanpa emosi, seakan mereka yang tewas itu merupakan tumbal yang tak terhindarkan bagi sebuah transisi kekuasaan dari Presiden Sukarno kepada kelompok-kelompok lain, khususnya militer. Sekali lagi di sini dikatakan pandangan bahwa Supersemar merupakan titik tolak bagi suatu “pemerintahan baru” (lihat paragraf no. 2) yang dinilai oleh AS telah bekerja “secara efektif meskipun belum sempurna”.

Tergambar pula dalam dokumen bertanggal 8 Juni 1966 ini apa kepentingan AS di Indonesia (paragraf no. 9) serta berbagai kemungkinan yang dapat dilakukan Amerika untuk mendukung dan membantu pemerintahan baru tersebut. Diakui dalam dokumen ini (paragraf no. 8) bahwa dalam transisi dari pemerintahan Sukarno ke pemerintahan baru yang terjadi pada bulan Maret 1966 itu Amerika tidak punya andil langsung selain dukungan tak langsung berupa komitmen AS untuk memerangi komunisme di Vietnam.

15

MEMORANDUM DARI ASISTEN KHUSUS PRESIDEN (W.W. ROSTOW) KEPADA PRESIDEN JOHNSON³

Tn. Presiden:

Deplu menghendaki Anda membaca dokumen terlampir tentang Indonesia.

8 poran tersebut adalah rangkuman yang bagus mengenai perkembangan Indonesia dan kebijakan kita sejak tanggal 1 Oktober tahun lalu.

Pokok operasionalnya adalah hal ini (lihat hal. 4–6): apabila mereka menyingkirkan Sukarno dalam waktu dekat, kita mungkin menghadapi masalah bantuan sebagai berikut:

- Bantuan darurat lebih lanjut (P.L. 480).

- Penjadwalan utang multilateral.
- Bantuan jangka panjang utama (sebagian besar berasal dari negara-negara Eropa, Jepang, multilateral, namun mungkin juga beberapa negara yang memiliki hubungan bilateral dengan Amerika).
- Kemungkinan, sejumlah kecil bantuan militer untuk pelatihan dan operasi karya.

Perencanaan ke depan mengenai hal ini telah berjalan dengan sangat baik, bahkan untuk tetap memberikan informasi kepada tokoh-tokoh kunci Kongres. Sejauh ini, mereka sangat mendukung.

Dewan ingin Anda diberi tahu.

Tidak ada keputusan yang perlu diambil, kecuali Tn. Presiden ingin memberikan petunjuk.

Hormat kami,

W.W. Rostow

INDONESIA

Latar Belakang

1. Pada tanggal 1 Oktober, Partai Komunis Indonesia menggabungkan dirinya dengan unsur-unsur Angkatan Bersenjata untuk mengambil alih kekuasaan Pemerintah Indonesia yang kemudian dengan segera dihancurkan oleh Angkatan Darat (AD). Antara tanggal 1 Oktober sampai dengan pertengahan Maret tahun ini [1966] Partai Komunis Indonesia dihabisi sebagai sebuah organisasi politik. Mungkin sebanyak lebih dari 300.000 orang Indonesia telah dibantai—dan menurut kami kebanyakan mereka memiliki kaitan dengan aparat Komunis. Secara bertahap kekuasaan politik kemudian berpindah dari Presiden Sukarno dan klik Istana kepada AD, partai-partai politik [agama tertentu], dan mahasiswa anti-komunis.

2. Pada bulan Februari dan Maret Sukarno mencoba untuk meraih kembali kekuasaannya, tetapi dia tidak berhasil dan dipaksa untuk menerima Kabinet yang baru yang berada di bawah kendali militer dan politisi moderat. Pada akhir bulan Maret sebuah pemerintahan baru terbentuk, pemerintahan yang memfokuskan diri pada reformasi ekonomi dan sosial, ketika sebagian besar kebijakan luar negeri Sukarno telah ditolak atau diabaikan secara terang-terangan. Sementara itu Triumvirat yang terdiri dari Jenderal Soeharto, Sultan Yogyakarta dan Adam Malik mulai berkuasa secara efektif meskipun belum sempurna.

Situasi Terbaru–Dalam Negeri

3. Dalam dua bulan terakhir ini para pemimpin yang baru telah bergerak dengan sangat cepat untuk menyatukan kekuasaan mereka dan untuk memulai proses panjang membangun kembali sendi-sendi perekonomian Indonesia yang hampir seluruhnya lumpuh. Komunis tampaknya sudah habis kekuasaannya, tetapi Sukarno masih menjabat sebagai Presiden dan masih memiliki kemampuan untuk membatasi ruang gerak dan ikut campur tangan dalam aktivitas pemerintah yang baru. Walaupun berada dalam situasi demikian pemerintah telah memulai program-program pendorong ekspor yang baru, diawali dengan menyalurkan pendapatan dari ekspor melalui Bank Pusat dan paling tidak telah berhasil memperlambat kenaikan harga beras dan komoditas-komoditas dasar tertentu yang lainnya. Keadaan perekonomian masih dalam keadaan yang kacau dan para pemimpin merasa bahwa jika mereka tidak berhasil menyediakan sandang pangan yang layak kepada masyarakat, usaha mereka untuk membangun sebuah sistem politik yang rasional akan gagal.

Situasi Terbaru–Luar Negeri

4. Walaupun masih belum bisa leluasa bergerak karena keberadaan Sukarno, pemerintah yang baru telah membuat perubahan yang sangat mendasar dalam hal kebijakan luar negeri. Pemerintah telah mengumumkan kepada rakyat bahwa Indonesia bermaksud menggabungkan diri kembali dengan PBB dan organisasi-organisasi internasional lain dalam waktu dekat. Pemerintah juga telah menajagi kemungkinan untuk mengakhiri politik konfrontasi melawan ²⁵ Malaysia dan Singapura. Selain itu Pemerintah yang baru juga telah berusaha untuk memulihkan hubungan kerja sama dengan negara-negara Barat dan Jepang, mau mengakhiri perilaku “nakal”-nya di Afrika, dan praktis sudah memutuskan hubungan dengan Cina Komunis. Minggu lalu di Bangkok, para wakil Indonesia mengungkapkan ketertarikannya untuk bergabung dalam kelompok terbuka negara-negara Asia Tenggara yang nantinya akan melibatkan Malaysia, Filipina, Thailand, dan Indonesia.

5. Rezim yang baru telah berhasil mengakhiri sentimen anti-Amerika di Indonesia. Meskipun rezim tersebut secara publik tetap kritis terhadap kebijakan Amerika di Vietnam, Malik telah secara pribadi mengungkapkan pemahamannya atas posisi kita, dan telah terjadi aksi-aksi propaganda yang saling berlawanan antara Vietnam Utara dan Indonesia. Dalam aspek lain yang penting bagi AS, rezim yang baru ini telah memutuskan untuk tidak lagi mengambil alih fasilitas perusahaan-perusahaan minyak Amerika yang menghasilkan dan mengeksport minyak mentah. Lebih jauh tampaknya pemerintah yang baru itu malah mau bernegosiasi untuk membeli kilang minyak Amerika yang masih ada (STANVAC).

Kemungkinan Perkembangan Selanjutnya

15 6. Tujuan para pemimpin Pemerintahan yang baru adalah untuk terus mengurangi pengaruh Sukarno secara bertahap. Langkah berikut yang mau ditempuh adalah menggunakan mekanisme MPRS yang akan bersidang tiga minggu lagi, yakni pertengahan Juni mendatang. Para pemimpin bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk menghapus jabatan seumur hidup kepresidenan Sukarno, untuk menyingkirkan kekuasaan politis Sukarno hingga nantinya dia hanya akan menjadi pemimpin simbolis, untuk secara resmi mengakhiri Konfrontasi dengan Malaysia, dan secara umum ingin memposisikan badan legislatif yang ada agar mendukung pemerintahan yang baru. Dengan tercapainya hal-hal tersebut pemerintah yang baru berharap bahwa pada pertengahan Juli nanti dapat melantik kabinet kerja yang baru, yang bebas dari pengikut-pengikut Sukarno. Setelah itu, pemerintah akan bergerak sepenuhnya untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Keputusan-keputusan mendasar lain seperti tanggal untuk bergabung dengan organisasi-organisasi internasional mungkin baru akan dilakukan setelah semua itu terlaksana.

7. Meskipun tampak adanya keinginan untuk menghentikan politik agresif di Asia Tenggara—rezim baru ini sadar bahwa faktor ini serta beberapa faktor lain merupakan faktor penting untuk menarik bantuan asing—kita tak boleh berharap terlalu banyak atas pemerintah yang baru ini, sebab dalam politik luar negeri mereka tetap akan berorientasi nasionalistik, non-blok, dan pro-Asia/Afrika. Meskipun demikian, perbedaan antara politik pemerintahan yang baru dengan politik rezim Sukarno—atau rezim Komunis yang sebelum ini pernah menjadi salah satu kemungkinan—amatlah dramatis. Secara keseluruhan, perubahan politik yang berlangsung di Indonesia sekarang ini telah menjadi semacam “titik balik” yang sangat penting di Asia Tenggara saat ini. Sekaligus telah menjadi contoh bagi banyak negara lain bagaimana kekuatan nasionalis telah berhasil menyingkirkan ancaman komunis.

Kepentingan dan Tujuan AS

8. Minat dan kepentingan kita terhadap Indonesia sejak dulu adalah menjauhkan negara tersebut dari tangan Komunis dan menjauhkannya dari kekuasaan Cina Komunis. Sebagaimana sebelum Oktober 1965 rezim Sukarno terus bergerak ke arah Komunis dan semakin berada di bawah pengaruh Cina, Amerika tentu saja menjadi negara nomor satu yang dipandang sebagai musuh utama rezim Sukarno. Amerika dipandang sebagai satu-satunya ancaman bagi keamanan nasional Indonesia karena adanya kehadiran militer Amerika di Filipina, Laut China Selatan, Vietnam, dan Thailand. Pergeseran Indonesia ke posisi pro-Komunis—yang meningkat pesat pada tahun 1963—bisa dipastikan bertolak dari keyakinan bahwa Amerika Serikat sedang kehilangan pamornya di Asia Tenggara.

Sebaliknya, meskipun Amerika tidak memiliki peran langsung sedikit pun dalam pengambilalihan kekuasaan oleh kelompok anti-Komunis yang dimulai bulan Oktober lalu, kenyataan bahwa kita kokoh berdiri di Vietnam turut memberi semangat bagi kubu anti-Komunis. Dengan kata lain, tanpa sikap tegas kita [dalam menghadapi komunisme di Vietnam], akan kecil kemungkinan mereka untuk bergerak.

9. Kepentingan dasar kita pada Indonesia masih saja berkisar pada luas wilayahnya, penduduknya yang lebih dari 100.000.000, letak geografisnya yang strategis antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan berada di antara Australia dan Asia. Selain itu juga pada potensinya sebagai negara yang produktif dan berpengaruh sehingga dapat menjadi kekuatan konstruktif dan pemersatu di kawasan Asia Tenggara. Tujuan kita adalah membantu berkembangnya sebuah rezim yang bertanggung jawab, moderat dan berorientasi ekonomi. Hanya rezim yang begitu yang akan mampu mencegah munculnya ekstremisme dan nantinya dapat memiliki peran penting di kawasan ini.

Tindakan yang ingin dicapai AS

10. Sampai pada akhir bulan Maret, kebijakan utama kita terhadap apa yang terjadi di Indonesia adalah: diam saja. Para pemimpin anti-komunis tidak menginginkan dukungan dari kita. Kebijakan ini ternyata tepat, khususnya mengingat terjadinya pembantaian massal yang menyertai transisi kekuasaan itu (meskipun tampak sangat jelas bahwa pengambilalihan kekuasaan oleh Komunis juga akan sama berdarahnya). Meskipun demikian, pelan-pelan sekarang kita menunjukkan dukungan kita pada rezim yang baru tersebut. Kita juga percaya bahwa kemungkinan naiknya rezim ini akan lebih kecil tanpa adanya sikap tegas kita di Vietnam dan kawasan Asia Tenggara. Hanya sebatas itu saja kita bisa mengklaim jasa kita bagi pergantian kekuasaan di Indonesia sekarang ini.

11. Sementara melanjutkan sikap umum ini, kita telah secara keseluruhan menjelaskan secara pribadi bahwa kita siap untuk mulai memberikan bantuan pokok yang terbatas pada saat yang tepat untuk membantu memperkuat kedudukan para pemegang kekuasaan baru ini. Program AID kita di Indonesia telah diakhiri seluruhnya, namun (pada pertengahan bulan April) kita telah setuju untuk menjual 50.000 ton beras kepada mereka sesuai dengan PL 480 Bagian IV (dibayar kembali dalam dolar) dengan syarat bunga sebesar 4-7/8 persen yang diangsur selama lima tahun. Sekarang kita telah mulai melaksanakan Bagian IV yang berupa penjualan 75.000 bal kapas dengan syarat yang lebih ringan, bunga sebesar 3-1/2 persen yang diangsur selama 15 tahun. Kita telah secara diam-diam memberitahukan bahwa kita akan mendukung usaha-usaha mereka untuk kembali bergabung dengan organisasi-organisasi internasional, dan bahwa kita akan berperan serta dalam usaha-usaha multilateral untuk menjadwalkan kembali

utang mereka pada waktu yang sesuai. Kita telah mendorong negara-negara non-komunis lain untuk membantu rezim baru Indonesia memperkuat diri sebelum masalah penjadwalan utang, stabilisasi, dan pembangunan dapat ditangani.

Tindakan-tindakan AS di Masa Mendatang

12. Apabila bulan depan pemegang kekuasaan baru berhasil menghilangkan kekuasaan Sukarno secara efektif, mereka akan mengalihkan usaha-usaha mereka ke arah perekonomian. Bantuan Amerika akan diperlukan dalam beberapa hal.

- a. *Bantuan Darurat Lebih Lanjut.* Kemungkinan akan ada kebutuhan akan bantuan yang lebih lanjut untuk menjaga jalannya perekonomian sebelum pengambilan keputusan-keputusan multilateral mengenai permasalahan-permasalahan jangka panjang. Peran kita di sini dapat dijalankan melalui transaksi-transaksi lanjutan yang sesuai dengan PL (*Public Law*) 480. Sementara kita telah menyalurkan bantuan yang sesuai dengan Bagian IV dengan persyaratan yang lebih longgar, kita juga harus menyusun rencana untuk beralih ke Bagian I (dibayar kembali dengan mata uang lokal) apabila situasi politik menjadi stabil, agar tidak lagi menambah utang devisa Indonesia yang sudah sangat besar itu.
- b. *Penjadwalan Utang Multilateral.* Indonesia memiliki utang luar negeri yang besarnya lebih dari 2,5 miliar dolar. Kira-kira 170 juta dolar dari jumlah tersebut adalah utangnya kepada kita, dan sekitar 1 miliar dolar adalah utangnya kepada Uni Soviet, sebagian besar untuk keperluan militer. Persyaratan pemberian utang tahun ini mungkin berjumlah sekitar 450 juta dolar, yang lebih dari pendapatan kotor devisa yang mungkin dalam jangka waktu yang sama. Karena Indonesia sudah tidak sanggup membayar pinjaman-pinjaman milik swasta maupun milik pemerintah, penjadwalan kembali jelas sangat diperlukan. Kita telah mengadakan kontak dengan negara-negara non-komunis (*Free World*) yang merupakan kreditor Indonesia, dan telah menjelaskan bahwa kita menganggap sangatlah penting untuk melakukan penjadwalan kembali secara multilateral. Kita berkeinginan untuk melihat kemungkinan beberapa negara lain seperti Jepang, atau suatu organisasi internasional, untuk memainkan peran penting dalam mengorganisir pelaksanaan penjadwalan. Sultan Yogyakarta dan sejumlah utusannya dan utusan Adam Malik baru-baru ini telah mengunjungi Jepang dan memperoleh janji pemberian pinjaman sebesar 30 juta dolar sebagai bentuk bantuan darurat. Sultan berencana untuk mengunjungi negara-negara Eropa Barat pada bulan Juli. Utusan-utusan lain berencana untuk mengunjungi Uni Soviet dan negara-negara anggota EE (Ekonomi Eropa). Tampaknya

Indonesia baru akan siap untuk secara formal bicara soal penjadwalan kembali pembayaran utang ini pada akhir Juli atau Agustus. Kemungkinan Indonesia akan mengusulkan lima tahun penundaan—yang berarti menunda masalah, karena tampaknya mereka lebih mementingkan masalah militer daripada masalah-masalah ekonomi. Kita harus siap untuk berperan serta, dan untuk menyetujui persyaratan yang agak lebih longgar asal kita melakukannya dengan tetap memperhatikan kepentingan semua kreditor.

- c. *Bantuan jangka panjang utama.* Di luar bantuan darurat dan penjadwalan utang, Indonesia akan membutuhkan baik bantuan teknis maupun pemberian pinjaman lebih lanjut jika negara itu ingin kembali mampu untuk berdiri sendiri. Sebagus apa pun pencapaian mereka dalam mengembalikan integritas Bank Pusat, memotong defisit anggaran pemerintah dan meningkatkan produksi dan ekspor, sangatlah mungkin bahwa pada musim gugur tahun ini kemampuan pemerintahan yang baru untuk menjaga kewibawaannya akan bergantung pada penggunaan pinjaman-pinjaman penting luar negeri guna merehabilitasi baik industri maupun pertanian, serta untuk memulihkan sistem komunikasi dan transportasi yang kini rusak berat. Banyak dari pinjaman yang dibutuhkan ini diperoleh dari Jepang, dari negara-negara Eropa Barat, dan kemungkinan besar dari organisasi-organisasi internasional seperti IMF, IBRD, dan (belakangan) Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB). Kita telah menjelaskan bahwa kita mengharapkan bantuan jangka panjang yang memiliki dasar multilateral, dan kesediaan donatur-donatur lain untuk membantu pada dasarnya akan dipengaruhi oleh bantuan dari Amerika. Oleh karena itu, kita yakin bahwa kita harus siap untuk menjanjikan jumlah yang berarti, dan kebutuhan akan janji seperti ini mungkin akan muncul pada musim gugur apabila tanda-tanda konstruktif di Indonesia tetap berjalan seperti sekarang. Karenanya, kemungkinan kita akan memerlukan dana yang besar dari AID 1967, baik untuk bantuan langsung maupun untuk penyaluran lewat ADB. Situasi utang-piutang akan menyebabkan disitanya Bank Ekspor-Impor yang berfungsi sebagai sumber bantuan tambahan, dan satu-satunya saluran lain kita akan tampak seperti tambahan komoditi PL 480 dengan persyaratan longgar yang berjumlah sama dengan bantuan.
- d. *Berkenaan dengan bantuan militer,* perlu diketahui bahwa jumlah personil Angkatan Bersenjata Indonesia sangat besar dan telah cukup dipersenjatai untuk keamanan dalam negeri. Kita tidak perlu memikirkan rencana untuk memulai program bantuan militer apa pun kecuali untuk kemungkinan usaha pelatihan dalam skala kecil yang sebagian besar untuk kepentingan hubungan pribadi dengan tokoh-tokoh kunci militer di masa

depan. Ada kemungkinan kita memberi bantuan tambahan untuk proyek-proyek operasi karya di mana Indonesia telah melakukan pendekatan terhadap kita, guna meminta bantuan teknis untuk pengembangan sumber-sumber daya dari pulau-pulau yang tidak padat penduduk. Secara umum proyek semacam ini bisa didanai secara terbatas dari dana MAP dan AID.

Organisasi Resmi Pemerintah Amerika Berkenaan Dengan Indonesia

13. Sampai pada tingkat ini, permasalahan Indonesia telah secara efektif ditangani dengan berdasar pada hubungan antar-instansi seperti biasanya. Selain itu, kita tetap berhubungan dengan tokoh-tokoh kunci Kongres, yang tampaknya memahami situasi berikut kemungkinan dampaknya. Gagasan bahwa setiap bantuan besar harus dikelola secara multilateral kiranya akan memiliki daya tarik tersendiri dalam banyak pembahasan Kongres.

14. Meskipun demikian, mengingat besarnya permasalahan Indonesia dalam enam bulan ke depan, sepertinya bijaksana untuk memulai konsultasi yang lebih luas dengan Kongres, dan mungkin bijaksana juga untuk menunjuk kelompok khusus dalam Badan Eksekutif—mungkin sebagai sebuah panitia kecil dari Kelompok Antar-Departemen Senior (*Senior Interdepartmental Group*)—untuk menjaga permasalahan tersebut tetap berada dalam peninjauan yang sangat cermat.

5. CIA tentang Kelompok-kelompok Pemuda di Indonesia

Dokumen berisi laporan CIA tertanggal 29 Juni 1966 tentang kelompok-kelompok pemuda di Indonesia ini menarik. Di sini antara lain digambarkan bagaimana kelompok-kelompok pemuda dan mahasiswa “muncul sebagai kekuatan politik yang sangat penting” yang bersama militer berusaha mengurangi kekuasaan Presiden Sukarno demi terbentuknya pemerintahan yang baru. Ditambahkan bahwa ketika menghadapi musuh bersama kelompok-kelompok pemuda itu biasanya bersatu, namun ketika musuh bersama itu sirna mereka cenderung sibuk dengan konflik internal.

CIA menggolongkan kelompok-kelompok pemuda itu dalam tiga kategori: (a) organisasi-organisasi nasional; (b) organisasi-organisasi keagamaan; dan (c) organisasi-organisasi sosialis/Marxis. Tentang kelompok yang terakhir, dikatakan bahwa dua organisasi anggotanya, yakni CGMI dan Pemuda Rakyat, telah dilarang oleh pemerintah sebagai kelanjutan apa yang terjadi tanggal 1 Oktober 1965.

KELOMPOK-KELOMPOK PEMUDA DI INDONESIA⁴

Pendahuluan

Kelompok-kelompok mahasiswa non-komunis telah memainkan peranan penting dalam pembersihan terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) setelah kudeta yang berorientasi Komunis 1 Oktober 1965 itu gagal. Mereka juga membantu menciptakan iklim yang memungkinkan untuk dikurangnya kekuasaan Presiden Sukarno. Dalam menjalankan fungsi ini, kelompok-kelompok mahasiswa itu telah menunjukkan tingkat persatuan yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun sekarang ini mulai kelihatan adanya perpecahan internal. Biasanya elemen-elemen mahasiswa dan pemuda itu mencerminkan organisasi politik dan keagamaan yang menjadi induk masing-masing. Berhubung induk politik dan keagamaan itu biasanya amat beragam dan kompleks, kelompok-kelompok mahasiswa itu sulit untuk bersatu. Akan tetapi, ketika terjadi suatu krisis nasional mereka biasanya bisa bersatu untuk bersama-sama memperjuangkan suatu tujuan tertentu.

Maksud laporan ini adalah untuk memberikan gambaran latar belakang singkat tentang peranan kelompok-kelompok mahasiswa dan pemuda dalam pergerakan nasional Indonesia serta untuk menilai posisi dan aliansi dari kelompok-kelompok utama yang ada sekarang ini.

Latar Belakang

1. Kelompok-kelompok mahasiswa dan pemuda sudah mulai aktif sejak pergerakan nasional pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Peranan penting mereka semakin terlihat pada masa pendudukan Jepang dan setelah pertempuran empat tahun melawan Belanda. Setelah kemerdekaan, mereka masih bertahan dan bahkan berkembang pesat.
2. Kebanyakan dari kelompok-kelompok itu berafiliasi dengan partai-partai politik, dan dengan begitu mereka mencerminkan tiga orientasi utama kehidupan politik Indonesia—agama, nasionalisme, dan sosialisme atau Marxisme.
3. Sebelum Oktober 1925 tiga partai utama di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama (NU), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Presiden Sukarno yang condong ke kiri memfasilitasi pertumbuhan dan pengaruh Komunis dan kelompok-kelompok nasionalis kiri, sedangkan kelompok nasional moderat dan agamis berada dalam posisi yang tidak mudah. Pada tahun 1963, gerak kaum kiri semakin intensif, dan pada pertengahan 1965 hanya militer yang mampu menunjukkan perlawanan—yang tidak begitu besar—atas kecenderungan nasional menuju komunisme ala Sukarno.

4. Unsur-unsur komunis terlibat jauh dalam kudeta 1 Oktober 1965 yang gagal itu, dan militer menggunakan keterlibatan PKI ini untuk membenarkan operasi penghancuran PKI. Dukungan terbesar kepada militer datang dari kelompok pemuda dan mahasiswa yang berorientasi keagamaan—terutama [dari agama tertentu]. Kadang-kadang secara spontan dan kadang-kadang dengan dukungan militer, pemuda dan mahasiswa berdemonstrasi atau mengambil tindakan fisik melawan komunis, fasilitas milik Cina Komunis, dan warga keturunan Cina.

5. Pada bulan Desember 1965 PKI dan garda depannya, termasuk Front Pemuda Komunis, Pemuda Rakyat, benar-benar telah dimusnahkan. Para pimpinan militer dan para pendukungnya yakin bahwa mereka harus mengalihkan perhatiannya pada perombakan pemerintahan dan pengatasan masalah-masalah ekonomi. Lagi-lagi kelompok-kelompok pemuda berada di barisan depan dalam mendesak perlunya reformasi. Pada bulan Maret 1966, mahasiswa tiba-tiba muncul sebagai kekuatan politik yang sangat penting dan menjadi faktor utama dalam mempersiapkan jalan bagi militer untuk mendesak Sukarno, yang pada akhirnya membuahkan sebuah perombakan pemerintahan.

6. Akan tetapi, persatuan yang menjadi ciri pergerakan mahasiswa anti-komunis sejak Oktober sampai Maret itu tampaknya justru memberi peluang untuk timbulnya perselisihan dan perpecahan internal. Karena PKI hilang dan pemerintahan mulai terombak, unsur-unsur anti-komunis mulai berpikir untuk memperkuat peranannya dalam pergerakan politik secara umum. Perselisihan tampaknya bermula dari dalam tubuh pergerakan pemuda dan menyebar ke dalam partai-partai politik yang mendukung mereka.

7. Pertikaian yang terjadi di dalam dan antara kelompok-kelompok pemuda dan partai-partai politik itu selanjutnya memecah belah dukungan terhadap militer dan para pemimin pemerintahan dari sipil serta memperumit tugas mereka untuk memperbaiki kebijakan dalam negeri dan luar negerinya. Kekacauan dalam negeri saat ini tampaknya akan mewarnai suasana di Indonesia untuk masa-masa mendatang.

Kelompok-kelompok Mahasiswa dan Pemuda yang Besar

8. Berikut ini adalah sebuah gambaran singkat organisasi-organisasi pemuda dan mahasiswa yang besar pada saat ini, digolongkan menurut orientasi keagamaan, nasionalis atau sosialis-nya. Gambaran ini mencoba menunjukkan kelompok-kelompok yang penting setelah percobaan Kudeta 1 Oktober itu, serta aktivitas utama mereka. Gambaran ini juga mau menunjukkan faktor-faktor yang menjadi sumber pertentangan yang menyebabkan pertentangan di antara mereka termasuk afiliasi mereka, serta munculnya kembali permusuhan lama berikut perselisihan intra-partai. Faktor-faktor itu biasanya adalah faktor-faktor sama yang selalu menjadi bagian utama dari kehidupan politik Indonesia. Statistik mengenai jumlah

keanggotaan sengaja tidak disertakan di sini, mengingat terbatasnya data mengenai hal itu. Kalaupun tersedia data yang ada biasanya meragukan.

ORGANISASI-ORGANISASI NASIONAL

(KAMI dan KAPPI, meskipun mendapatkan kekuatannya dari organisasi-organisasi keagamaan, tampaknya menganggap dirinya lebih berciri nasionalis daripada religius. Tampaknya dua kelompok ini mendapat pengarahan dan dukungan dari militer dan dari Wakil Perdana Menteri Adam Malik, salah seorang anggota Triumvirat Indonesia [bersama Soeharto dan Sultan Hamengku Buwono IX]).

KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). KAMI adalah sebuah kumpulan kelompok-kelompok mahasiswa Universitas Indonesia yang tumbuh karena gerakan anti-komunis setelah insiden 1 Oktober dan tampaknya didirikan pada bulan Desember 1965. KAMI memiliki sistem kepemimpinan bergilir. Sekretaris Jenderal yang sekarang adalah Cosmas Batubara, yang juga adalah ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Keanggotaan KAMI yang besar ini berasal dari elemen Islam dan Katolik.

KAMI terbukti sangat efektif di daerah Jakarta, tapi tidak begitu di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Alasannya karena adanya simpatisan pro-kiri di dalam polisi dan militer di kedua provinsi itu. KAMI secara umum mudah diterima di daerah Jakarta karena terlebih dahulu mendapat dukungan dan dorongan dari militer yang melindungi demonstrasi-demonstrasi KAMI dan membekali mereka dengan senjata api.

Meskipun taksiran dari pemerintah menyebutkan bahwa anggota inti KAMI pada bulan Februari 1966 hanya 7.500, kelompok ini sangat efektif dalam mengumpulkan ribuan mahasiswa dan menggalang dukungan dari buruh dan kelompok-kelompok pengusaha.

Pada tanggal 26 Februari [1966], Presiden Sukarno melarang organisasi ini tapi KAMI dengan tegas menolak, dan larangan itu hanya berdampak kecil pada aktivitasnya. Banyak anggotanya bergabung dengan KAPPI yang anggotanya kebanyakan pelajar Sekolah Menengah Atas dan mengambil peran penting dalam KAPPI selama periode ini. Setelah adanya larangan itu, di daerah Surabaya elemen KAMI membentuk Kelompok Kerja Sama Siswa Progresif Revolusioner (*Progressive Revolutionary Students Cooperation Group/PRSCG*) yang sebenarnya adalah bentuk lain dari KAMI. Satu-satunya anggota KAMI yang tidak berpartisipasi adalah PMKRI cabang daerah. Secara umum, PRSCG terbukti tidak bisa jalan, mengingat kuatnya tekanan dari Gerakan Mahasiswa Nasional dan kalangan militer.

Setelah perombakan kabinet dan penurunan peran Sukarno pada bulan Maret, KAMI mulai lagi menjalankan aktivitas dengan menggunakan nama aslinya.

KAPPI (Kesatuan Aksi Perhimpunan Pelajar Indonesia). KAPPI adalah bentuk lain dari KAMI untuk tingkat Sekolah Menengah. Organisasi ini menjadi lebih aktif ketika KAMI dilarang, dan sering bekerja sama dengan gerakan mahasiswa moderat. Seperti KAMI, kebanyakan anggota KAPPI berasal dari kekuatan Islam dan Katolik. Meskipun cukup efektif dalam melakukan kegiatannya di daerah Jakarta, KAPPI juga mengalami kesulitan yang sama dengan KAMI di Jawa tengah dan Jawa Timur karena adanya perlawanan dari militer, sentimen pro-Sukarno dan perseteruan dengan kelompok Islam lain.

Dalam KAPPI juga terjadi perselisihan internal yang kemudian meyebar ke seluruh gerakan mahasiswa, dan mempengaruhi KAMI serta juga organisasi-organisasi lain.

Perpecahan terjadi pada bulan Mei ketika usulan tentang sistem kepemimpinan permanen dan bukan bergilir dari Persatuan Pelajar Islam (PII) ditolak. Kelompok-kelompok lain melihat usulan ini sebagai ancaman dari sebuah kelompok Muslim untuk mengambil alih organisasi.

Pada tanggal 25 Mei PII dikeluarkan dari KAPPI karena telah mengancam dan mencoba mendominasi KAPPI. Keadaan ini semakin diperburuk dengan penahanan terhadap mantan Ketua KAPPI Husni Thamrin—seorang anggota PII dan seorang anti-Sukarno yang gigih—pada tanggal 28 Mei. Selama periode ini, PII didukung oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan gerakan mahasiswa yang berafiliasi ke Partai Nasional. ANSOR dan Faksi Katolik menjadi oposisi, sedangkan Mahasiswa Kristen Protestan mengambil posisi netral.

Laporan terbaru mengindikasikan adanya sebuah penyelesaian atas konflik itu, karena adanya itikad baik PII. Sebuah Piagam Persatuan kembali yang ditandatangani oleh para anggota pada tanggal 13 Juni dan mengangkat kembali Husni Thamrin sebagai ketua KAPPI.

64

GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia). GMNI adalah sebuah organisasi yang berafiliasi dengan Partai Nasional Indonesia (PNI). Pada masa-masa setelah percobaan kudeta 1 Oktober GMNI bergabung dengan golongan kiri, Faksi PNI Ali Surachman yang pro-Sukarno, yang mengantar pada konfrontasi langsung dengan kekuatan Islam.

Perpecahan dalam tubuh PNI membawa kemenangan bagi kelompok moderat Osa-Usep, yang dipimpin oleh Osa Maliki dan Usep Ranuwijaya, serta perombakan kembali elemen-elemen GMNI. Sebuah persekutuan GMNI yang baru di Jawa Timur memisahkan diri dari PNI faksi kiri dan memberikan dukungan pada KAMI. Pada tanggal 24 Mei GMNI secara resmi menarik keanggotaan dari PNI kiri, dan

pada tanggal 25 Mei Ketua Umum GMNI cabang Surabaya, Imam Santoso, menyatakan bahwa “Sekarang semua anggota GMNI adalah anggota KAMI dan mendukung semua program dan aksi KAMI bagi kepentingan rakyat”.

Akan tetapi, keanggotaan GMNI dalam KAMI itu tidak didukung oleh semua pihak. Elemen kiri garis keras yang telah terpengaruh oleh PKI dengan keras menentang golongan moderat di daerah Yogyakarta, di mana permasalahan masih sering berada di sekitar supremasi Sukarno, dan bukan masalah manuver partai untuk kepentingan politik.

Perkembangan baru ini memunculkan sedikit keraguan mengenai seberapa jauh kepemimpinan baru GMNI akan mampu bergerak. GMNI tidak sepenuhnya loyal kepada KAMI, dan kerja samanya mungkin selalu dibatasi, terutama karena KAMI di Jawa Timur didominasi oleh mahasiswa Islam.

BANRA. Ini adalah sebuah organisasi para-militer di bawah GMNI, dan tampaknya dibentuk dari elemen pemuda militan dalam GMNI sendiri. Mereka kabarnya bersenjata dan telah dilatih oleh unit militer berhaluan kiri di kalangan kepolisian dan marinir.

21 Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila adalah organisasi yang berafiliasi dengan IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), sebuah partai politik kecil yang terkait erat dengan AD. Pemuda Pancasila sangat aktif dalam usaha pemusnahan PKI dan demonstrasi anti-PKI dan anti-Cina di Sumatra Utara setelah 1 Oktober [1965].

Saat ini Pemuda Pancasila menghadapi ancaman akan dikalahkan oleh kelompok-kelompok lain yang lebih berpengaruh dalam dunia politik.

GERMINDO (Gerakan Mahasiswa Indonesia). Germindo adalah organisasi yang berafiliasi dengan Partai Indonesia (Partindo), sebuah partai yang telah dirasuki komunis bahkan sejak berdirinya pada tahun 1950-an. GERMINDO pasti telah dirasuki komunis juga. Organisasi ini aktif hingga pertengahan Maret 1966, ketika Sukarno sempat sejenak naik daun. Setidaknya sampai bulan Mei lalu markas besarnya di Jawa Timur telah dijadikan pusat kegiatan rahasia PKI di daerah itu. Pada pertengahan Mei Partindo dan GERMINDO Jawa Timur dilarang. Anggota-anggotanya kemungkinan bekerja sama dengan pemuda komunis untuk membentuk organisasi bawah tanah.

ORGANISASI-ORGANISASI KEAGAMAAN

ANSOR (organisasi kepemudaan di bawah Nahdlatul Ulama, Partai Cendekiawan Muslim). Meskipun aktif di Jawa dan Sumatra Utara, ANSOR paling kuat di Jawa Timur, dan telah banyak melakukan operasi anti-komunis dan anti-Cina. Sebelum 1 Oktober 1965, ANSOR telah terlebih dahulu secara terang-terangan mengambil posisi anti-komunis

daripada organisasi induknya NU, yang memiliki catatan panjang sebagai kelompok yang gesit menggunakan kesempatan.

Elemen pemuda ANSOR berpartisipasi dan kadang-kadang memimpin pemusnahan berdarah terhadap PKI di Jawa Timur. Mereka juga mengambil keuntungan dari keadaan ini untuk melawan elemen-elemen oposisinya, termasuk anggota faksi kiri Partai Nasional Indonesia (PNI).

Peristiwa berdarah itu telah menimbulkan pertentangan antara elemen marinir (KKO) dan polisi (Mobrig) di daerah ini, mengingat banyak anggota dari unit-unit ini yang pro-Sukarno dan juga keluarga mereka yang bergabung dengan PKI hilang dalam pemusnahan terhadap PKI itu. Dukungan militer terhadap kelompok nasionalis kiri telah menambah rumitnya masalah di Jawa Timur.

Minggu-minggu belakangan ini ANSOR bertikai dengan kelompok-kelompok keagamaan lain dari agama yang sama. Jika mengikuti kecenderungan NU, ada kemungkinan bahwa ANSOR—khususnya di Jawa Timur, daerah dengan sentimen pro-Sukarno yang kuat—akan memanfaatkan sentimen itu sebagai sarana untuk meningkatkan pengaruhnya terhadap organisasi-organisasi Islam lain.

BANSER (organisasi para-militer NU). Kelompok ini berasal dari elemen militan ANSOR. Organisasi ini, seperti telah disebutkan, juga aktif di Jawa Timur dan Sumatra Utara.

HMI (Himpunan Mahasiswa Indonesia). HMI merupakan organisasi yang amat berpengaruh dalam KAMI. Sebagai cabang dari Partai Masyumi yang dilarang, HMI tetap mempertahankan legalitasnya dan bertahan sebagai sebuah organisasi yang berpengaruh. Posisi anti-PKI-nya tidak pernah se-ekstrem ANSOR.

Elemen-elemen HMI sangat efektif dalam mengatur aktivitas gerakan mahasiswa terutama di daerah Jakarta. Sedangkan di daerah Surabaya, Jawa Timur, mereka sangat aktif tapi cenderung tidak efektif. Berlawanan dengan ANSOR dan simpatisan golongan kiri di unit marinir dan kepolisian di daerah itu, mereka terpaksa berkutat pada taktik dan tidak bisa berkonsentrasi pada tujuan politik dan reformasi ekonomi.

Pada bulan Mei dan Juni lalu HMI terlibat masalah perebutan kepemimpinan KAPPI dan lebih memihak PII.

PII (Pelajar Islam Indonesia). PII adalah organisasi cabang tingkat sekolah menengah yang masih boleh beroperasi meskipun menginduk pada Partai Masyumi yang dilarang itu. Organisasi ini adalah salah satu kelompok tingkat sekolah menengah yang paling besar dan militan dalam tubuh KAPPI—setidaknya sampai dikeluarkannya dari KAPPI pada akhir Mei lalu.

Setelah dikeluarkan dari KAPPI, perselisihan—termasuk penculikan dan pemukulan—antara anggota PII dengan pemuda ANSOR mengancam seluruh gerakan mahasiswa moderat dengan bahaya perpecahan. Para pendukung Masyumi, yang didukung oleh IPKI (sebuah partai politik yang didukung oleh militer), mendukung PII, sementara elemen-elemen NU dan Katolik menentangnya. Faksi moderat PNI di bawah Osa-Usep yang bersimpati pada elemen Masyumi memilih untuk bersikap netral. Bagaimana hasil dari penyelesaian masalah ini masih harus kita tunggu.

PKRI (Pelajar Katolik Republik Indonesia). Sebagai organisasi cabang dari Partai Katolik (PK), anggotanya adalah para pelajar sekolah menengah. PKRI adalah salah satu kelompok terbesar dan paling berpengaruh dalam KAPPI, dan bersama dengan elemen Islam adalah komponen penting dalam memimpin aktivitas-aktivitas protes di Jakarta.

Sukarno menuding PKRI dan HMI telah diperalat oleh CIA (Central Intelligence Agency) milik Amerika dan mengancam akan membubarkan mereka. Meskipun Partai Katolik adalah sebuah partai kecil, namun PKRI (bersama dengan PMKRI) memiliki peran dan pengaruh yang cukup luas di kalangan gerakan mahasiswa, suatu pengaruh yang melebihi pengaruh partai induknya.

PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia). PMKRI adalah organisasi cabang Partai Katolik tingkat Universitas dan salah satu elemen yang paling kuat dalam KAMI. PMKRI sangat kuat di daerah Jawa Barat karena, seperti gerakan mahasiswa moderat dan golongan kanan, secara diam-diam mendapatkan dukungan dan simpati dari militer. Ketuanya, Cosmas Batubara, juga adalah Sekretaris Jenderal KAMI.

GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia). GMKI adalah organisasi cabang Partai Kristen Indonesia (Parkindo), sebuah partai politik kecil di Indonesia yang juga merupakan partai dari kelompok minoritas Kristen Protestan. Sebagai anggota KAMI, GMKI gagal mengambil peran yang efektif dalam organisasi itu. GMKI berpartisipasi dalam demonstrasi-demonstrasi anti-komunis selama awal-awal masa pasca-Oktober, tapi kemudian tidak begitu aktif sesudah itu. Di daerah-daerah lain di Indonesia, GMKI lebih tidak berperan dibanding di Jakarta.

ORGANISASI-ORGANISASI SOSIALIS/MARXIS

CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia). CGMI (yang sudah dilarang) adalah organisasi yang dikendalikan oleh PKI. Kebanyakan anggotanya adalah non-komunis, tapi organisasi ini dituduh sebagai tempat persemaian bagi komunis-komunis muda

dan dicurigai aktif dalam perekrutan anggota baru. CGMI dilarang pada awal tahun 1966. Banyak dari aktivitasnya kemudian diambil alih oleh GERMINDO.

Sejak tanggal 1 Oktober CGMI terbukti sangat berpengaruh di daerah Jawa Timur, di mana marinir dan polisi cukup bersimpati pada golongan kiri.

Pemuda Rakjat. Pemuda Rakyat adalah organisasi terlarang yang berafiliasi dengan PKI. Sebelum 1 Oktober, Pemuda Rakjat aktif dalam memimpin demonstrasi dan menyusupi organisasi-organisasi mahasiswa lain. Setelah kudeta itu, Pemuda Rakjat kehilangan banyak anggota dalam pembantaian yang dilakukan oleh AD dan golongan Islam terhadap PKI beserta organisasi-organisasi front-nya. Pemuda Rakjat secara resmi dilarang bulan Maret silam bersama dengan PKI dan organisasi-organisasi cabang PKI yang lain. Dilaporkan bahwa banyak dari anggotanya yang kemudian masuk ke CGMI dan GERMINDO. Pada masa puncaknya, Pemuda Rakjat mengklaim memiliki tiga juta anggota. Kabarnya organisasi ini sekarang membentuk sebuah gerakan bawah tanah.

Catatan akhir:

- 1 Surat dari Adam Malik kepada Presiden Lyndon B. Johnson, 6 Juni 1966. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, Gen CO 121 India 6/26/65.
- 2 Surat dari Sultan Hamengku Buwono IX untuk Wakil Presiden AS Hubert H. Humphrey, 6 Juni 1966. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, Gen CO 121 India 6/26/65. #12960.
- 3 Memorandum I-7: Asisten Khusus Presiden (W.W. Rostow) Kepada Presiden Johnson, 8 Juni 1966. Status: Rahasia. *Foreign Relations of the United States, 1964–1968, Vol. XXVI. Indonesia; Malaysia-Singapore; Philippines* (Washington: United States Government Printing Office, 2001), hlm. 434–440. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #119a. Ada indikasi bahwa Presiden telah membaca memorandum ini.
- 4 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, Direktorat Intelejen, “Kelompok-Kelompok Pemuda di Indonesia”, No. 1586/66, 29 Juni 1966. Status: Rahasia. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #118.



Soeharto dan Kumbokarno. Simbol kuatnya mistisisme Jawa dalam dunia politik Indonesia. (Sumber: Deppen RI)

Juli 1966: Supersemar dan Upaya De-Sukarnoisasi

1. Pengantar

DALAM SIDANG Umum MPRS yang sama, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1966, dikeluarkanlah Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 yang berisi antara lain: a) Penetapan tidak perlunya jabatan Wakil Presiden; b) Apabila Presiden berhalangan, pemegang SP 11 Maret 1966 memegang jabatan Presiden.¹ Sebagaimana pernah ditunjukkan oleh Dr. Asvi Warman Adam, Ketetapan MPRS itu dengan jelas melanggar UUD 1945. Mengapa? Karena di dalam UUD 1945 ditetapkan adanya jabatan Wakil Presiden, dan waktu itu UUD 1945 belum diamandemen. Dengan demikian sebenarnya TAP tersebut adalah inkonstitusional. Namun tampaknya hal itu dibutuhkan, supaya kalau Presiden Sukarno berhalangan (atau mungkin “dibuat berhalangan”), bukan seorang Wakil Presiden yang menggantikannya, melainkan Pemegang Supersemar, yang tak lain adalah Soeharto sendiri. Tap MPRS macam itu tentu tidak akan sulit didapat, mengingat bahwa komposisi keanggotaan MPRS sudah diatur sedemikian rupa sehingga akan menguntungkan Si Pemegang Supersemar.

Berkaitan dengan perkembangan situasi yang ada di Indonesia, pada bulan Juli 1966 ini majalah *Time* menyebutkan apa yang terjadi di Indonesia pada

periode ini sebagai “*The West’s best news for years in Asia*”.² Dengan kata lain apa yang terjadi di Indonesia sejak Peristiwa 1 Oktober 1965, penindasan kaum kiri, serta naiknya Soeharto melalui Supersemar merupakan berita terbagus bagi blok Barat sejak sekian tahun terakhir. Hal itu bisa dimengerti sebab semakin lama semakin kelihatan bahwa berkat adanya Supersemar berlangsunglah di Indonesia suatu proses de-Sukarnoisasi yang cukup cepat. Dari minggu ke minggu pengaruh Bung Karno tampak makin merosot. Sementara itu dengan adanya de-Sukarnoisasi berarti: rakyat yang berhaluan kiri tak lagi punya pendukung yang andal, pemerintahan baru yang dipimpin Soeharto makin kuat, dan sejalan dengan itu tata kehidupan sosial-politik-ekonomi Indonesia akan semakin mengarah ke negara-negara Barat—bukan lagi ke blok Timur sebagaimana yang selama ini terjadi di bawah pimpinan Bung Karno. Susunan Kabinet baru yang diumumkan pada tanggal 25 Juli mencerminkan semakin “sempurna”-nya upaya de-Sukarnoisasi itu.

Sebagai imbalan atas upaya untuk melakukan de-Sukarnoisasi dan orientasi ke Barat, Indonesia telah dibantu untuk mendapatkan penjadwalan kembali pembayaran utang-utangnya. Pada saat yang sama IMF mulai diperbolehkan masuk untuk beroperasi kembali di Indonesia.

Di antara kumpulan dokumen bulan Juli ini yang tidak kalah menarik adalah bagian dari dokumen CIA tertanggal 23 Juli 1966 yang mencoba menerangkan konteks kelahiran TAP MPRS yang tidak mengizinkan “penyebaran ideologi atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam bentuk apa pun”. Keterangan ini kiranya perlu disimak guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai latar belakang dari TAP MPRS No. XXV/1966 yang masih sering diperdebatkan sampai sekarang.

2. Perjuangan Panjang De-Sukarnoisasi

Dengan menjadikan de-Sukarnoisasi sebagai tema pokok perjuangan politiknya di Indonesia pada periode ini, Amerika Serikat memandang hasil sidang MPRS dengan sikap mendua. Pada satu sisi sidang itu dipandang sebagai sidang yang tak banyak menghasilkan terobosan baru, pada sisi lain dilihat sebagai langkah positif dalam upaya de-Sukarnoisasi. Amerika

sangat berharap bahwa arus perubahan dapat bergerak secepat mungkin sehingga pengaruh Bung Karno semakin terkikis dan orang-orang “baru” seperti Soeharto, Adam Malik, dan Sultan semakin kuat pengaruhnya. Dalam memorandum tertanggal 9 Juli 1966 yang ditulis oleh Donald W. Ropa dari National Security Council untuk W. W. Rostow (Asisten Khusus Presiden Johnson) tercermin rasa gembira bahwa sidang MPRS telah semakin memperkuat kedudukan Jenderal Soeharto.

POSISI KITA DI INDONESIA³

Hasil dari sidang MPRS yang dipuja-puja itu kebanyakan seperti yang sudah diperkirakan, walaupun Sukarno sekali lagi masih bisa menghindari perangkap dari sekelompok orang-orang yang ingin menyingkirkan dia dari kekuasaan. Kedutaan Besar kita memandang *keputusan-keputusan yang diambil oleh MPRS sebagai langkah penting* dalam perjuangan panjang untuk melakukan de-Sukarnoisasi, namun sudah menjadi rahasia umum bahwa meskipun sudah tidak ada kesempatan untuk melakukan manuver politik lagi, Sukarno masih akan tetap berusaha menggunakan sisa-sisa kekuatan politiknya.

Pada titik ini Marshall Green menjanjikan pada kita tiga kemungkinan: (a) evaluasi terhadap kemungkinan jangka pendek selama tiga bulan; (b) implikasinya terhadap kebijakan Amerika Serikat; dan (c) Rekomendasi Kedutaan Besar terhadap langkah-langkah pemberian bantuan berikutnya. Poin pertama disertakan di sini, dan dilampirkan apabila Anda ingin melihatnya.

Dari sisi ekonomi, Green yakin bahwa Indonesia akan mampu berjalan selama tiga bulan dengan baik tanpa adanya masalah ekonomi yang serius. Pandangan ini ia dasarkan pada pengamatan sementara dan adanya dana sebesar \$60 juta dalam bentuk kredit valuta asing (*foreign exchange credit*) yang diterima dari Jepang, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat. Hal penting menurut dia adalah bahwa sekarang ini seharusnya *Indonesia mulai berpikir dengan jernih*, memperbaiki sistem perencanaan ekonominya, dan melangkah ke arah penuntasan problem-problem ekonomi yang paling mendasar.

Baik Adam Malik maupun Sri Sultan telah mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Rusk melalui Widjarmika untuk meminta berlakunya kembali program AID kita (konsekuensinya pengabulan permintaan ini akan menuntut Surat Keputusan Presiden tentang bantuan ke Indonesia), menyampaikan daftar kebutuhan yang harus dibeli seharga US\$495 juta, serta menanyakan kemungkinan Adam Malik

dan mungkin juga Sri Sultan untuk bertemu secara pribadi dengan Presiden [Johnson], wakil Presiden [Humphrey] dan [Menlu] Rusk pada bulan September menyusul kunjungan Adam Malik ke Moskow.

Pihak kita sudah memberi tahu Widjatkarna bahwa *kedatangan Adam Malik akan diterima dengan senang hati* (belum diputuskan tanggalnya atau apakah akan ada pertemuan dengan Presiden). Kita akan dengan senang hati menyediakan bantuan, khususnya pada penjadwalan ulang pembayaran utang secara multilateral, tetapi tentu saja hal itu masih bergantung kepada bagaimana pemerintah Indonesia bisa membentuk suatu pemerintahan yang kuat dan efektif, yang mampu memanfaatkan bantuan dari luar dengan baik.

Sementara itu, tim IMF telah menyelesaikan survei awal, dan Indonesia telah secara resmi mengajukan permintaan untuk diterima kembali dalam IMF dan IBRD, dan agenda diskusi antara para kreditor Indonesia telah ditentukan secara tentatif di Tokyo tanggal 12 Juli [1966].

Untuk pihak kita, seperti saran Green terdahulu, sekarang kita telah melangkah untuk memulai kembali program pelatihan untuk peserta skala kecil. Program ini dipisahkan kemungkinan lebih luas mengenai dimulainya kembali program-program bantuan yang lain. Akan tetapi perlu diingat bahwa hal ini baru bisa dilakukan dengan sebuah Keputusan Presiden berdasar pada UU tentang Bantuan Asing no. 620 (j) tahun 1961 dan pasal 118 UU Apropriasi tahun 1966. Secara politis hal ini perlu guna membantu menciptakan suasana yang kondusif di Kongres jika nanti ada pembahasan soal pemberian bantuan lebih besar. (Memo tentang hal ini sedang dalam persiapan.)

Sisi politik. Kuncinya adalah pada susunan Kabinet baru [Indonesia] yang kini sedang digodok. Green yakin bahwa ada harapan besar nantinya Soeharto akan memegang tampuk kekuasaan dibantu oleh sebuah kelompok ciptaannya yang terdiri dari para teknokrat yang andal. Kita akan tahu dalam dua atau tiga minggu mendatang ini. Green sudah mengantisipasi bahwa Soeharto akan semakin kuat kedudukannya, mengingat bahwa kekuasaannya telah disahkan oleh MPRS. Meskipun demikian ketegangan berkaitan dengan Sukarno dan partai-partai politik masih mungkin terjadi.

Anda menanyakan tentang perkembangan politik di Indonesia. Saya sedang mempersiapkan beberapa pengamatan awal dan telah meminta baik CIA maupun INR untuk memberikan masukan tentang berbagai kekuatan politik yang sekarang sedang bermain.

Masalah Luar Negeri. Green melihat berakhirnya Konfrontasi secara *de facto*, kembalinya Indonesia ke PBB, dan dibangunnya kembali hubungan-hubungan Indonesia dengan negara-negara non-komunis merupakan perkembangan yang positif. Namun demikian MPRS tidak secara khusus menyebutkan dukungan pada Perjanjian Bangkok yang

secara resmi mengakhiri Konfrontasi. Indonesia masih melakukan manuver politik terhadap perjanjian tersebut, dan apa langkah berikut yang mau diambil oleh Indonesia belum jelas.

REKOMENDASI

Jika saran-saran Green sudah masuk dan diolah, ada baiknya untuk memasukkan masalah Indonesia dalam agenda diskusi NSC. Sebelumnya masalah ini masih terlalu dini untuk dibicarakan. Sekarang ini kita merasa bahwa diskusi NSC mengenai Indonesia sudah tiba saatnya dan akan memberi manfaat yang besar.

D.W. Ropa

4

3. Supersemar, Tekanan Militer, dan TAP MPRS No. XXV/1966

Ditekankan kembali dalam dokumen CIA tertanggal 23 Juli 1966 ini bahwa sejak terjadinya peristiwa 1 Oktober 1965 militer bermaksud untuk “secara bertahap membatasi kekuasaan dan pengaruh Sukarno”. Di mata Amerika apa yang terjadi pada tanggal 11 Maret 1966, yakni ditandatanganinya Surat Perintah 11 Maret, merupakan “puncak” dari upaya itu. Dikatakan pula bahwa pada waktu itu “Sukarno, dengan setengah hati dan di bawah tekanan militer, memberikan suatu kekuasaan serupa kekuasaan eksekutif kepada Soeharto.” Kekuasaan itulah kemudian yang dipakai oleh Jenderal Soeharto untuk mengambil banyak keputusan dan tindakan atas nama Presiden dan atas nama kepentingan nasional. Selanjutnya melalui sidang MPRS tanggal 21 Juni 1966 ia berhasil mengusahakan supaya Supersemar disahkan oleh lembaga tertinggi negara itu sehingga tidak dapat diubah lagi—bahkan oleh pemberinya, yakni Presiden Sukarno. Ironisnya, Amerika juga melihat bahwa kelompok militer yang kelak menggantikan Bung Karno ini tampaknya juga akan mempraktikkan sistem “demokrasi terpimpin”, mirip Bung Karno dulu, meskipun mungkin orientasinya berbeda.

74

Maksud utama dari dokumen ini adalah memberi gambaran singkat mengenai berbagai kelompok atau kekuatan politik yang ada di Indonesia pada waktu itu. Menarik bahwa dalam penjelasan mengenai terbentuknya kelompok “sosialis Pancasila”, dokumen ini menekankan adanya kaitan antara kelompok tersebut dengan TAP MPRS No. XXV/1966.

Dikatakan, menanggapi munculnya kelompok Sosialis Pancasila, MPRS “mengeluarkan peraturan yang melarang ‘penyebaran ideologi atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam bentuk apa pun’”. (paragraf no. 33). Menurut CIA, Ketetapan MPRS itu lebih dimaksudkan untuk menghalangi niat Adam Malik untuk membentuk kelompok “Sosialis Pancasila” sebagai bagian dari terwujudnya gerakan “sosialis demokratik” (paragraf no. 32–33) sekaligus menghadang kemungkinan kembalinya kekuasaan Bung Karno.⁴

KEKUATAN-KEKUATAN POLITIK DI INDONESIA⁵

(MEMORANDUM INTELIJEN CIA)⁶

Rangkuman

Militer memegang kekuasaan di Indonesia dan tampaknya akan terus demikian sampai beberapa waktu mendatang. Walaupun panglima militer Letnan Jenderal Soeharto dan para pemimpin militer lain megizinkan elemen politik massa non-komunis untuk menyampaikan aspirasi, namun mereka berharap untuk membatasi aktivitas organisasi massa tersebut sampai pada titik yang tidak akan membahayakan garis kebijakan umum yang dikembangkan sejak percobaan kudeta yang gagal oleh sayap kiri bulan Oktober lalu. Akan tetapi, kelompok itu diharapkan akan dapat mempengaruhi militer dan bersikap independen.

Kelompok atau kekuatan-kekuatan politik massa di Indonesia sekarang ini antara lain: (a) partai-partai Muslim, terutama Nahdlatul Ulama; (b) beberapa partai Kristen kecil; (c) apa yang disebut sebagai “kesatuan aksi” serta kelompok pemuda yang banyak di antaranya tumpang-tindih; (d) partai-partai nasionalis, dari tengah dan kiri, termasuk elemen-elemen Sukarno; (e) berbagai kelompok buruh, petani, dan kelompok lain²⁵ yang diorganisasi secara fungsional dan kebanyakan untuk yang bergabung dengan partai-partai politik; dan (f) partai komunis (PKI) yang sekarang dilarang, berikut berbagai organisasi front-nya.

Kendali pemerintahan saat ini berada di tangan⁸⁵ Triumvirat yang terdiri dari Soeharto, Menteri Luar Negeri Adam Malik, dan Sultan Yogyakarta. Komposisi Kabinet baru yang dijadwalkan akan terbentuk sebelum pertengahan Agustus 1966 nantinya harus memberikan pertimbangan lebih jauh mengenai bagaimana Soeharto, pemimpin utama Triumvirat itu, seharusnya menyusun rencana untuk menangani berbagai kelompok atau kekuatan politik yang ada di Indonesia. Pemilihan umum akan diadakan dua tahun mendatang.

Masalah paling penting di Indonesia saat ini adalah masalah ekonomi dan bukan masalah politik. Situasi ekonomi yang memang lemah belum juga membaik sejak naiknya kelompok militer Oktober lalu, dan dalam beberapa hal bahkan semakin memburuk. Jika situasi ini tidak segera diatasi, ada kemungkinan kekacauan politik akan menyusul.

Latar Belakang

1. Selama 20 tahun Presiden Sukarno mendominasi Indonesia dan di dalam maupun di luar negeri. Ia menjadi semacam personifikasi dari bangsanya. Kecenderungannya yang terus-menerus terhadap ideologi kiri berikut sifat otoriternya telah ikut memperkuat Partai Komunis Indonesia (PKI) dan perlahan-lahan menekan kekuatan-kekuatan anti-komunis dan moderat. Pada bulan September 1965, Sukarno sudah siap untuk membawa negerinya ke arah komunisme yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

2. Militer Indonesia, walaupun anti-komunis, tetap setia pada Sukarno dan dengan setengah hati mengikutinya ke arah kiri. Para pemimpin militer hanya mempunyai dua pilihan untuk mencegah Indonesia jatuh ke dalam komunisme. Pilihan pertama adalah mengharap Sukarno wafat sehingga militer dapat menentang PKI. Pilihan kedua adalah bahwa PKI akan menggunakan cara-cara kekerasan terhadap Sukarno atau pemerintah, sehingga dengan demikian akan sah bagi kubu militer untuk melakukan serangan balasan.

3. Pada tanggal 1 Oktober 1965, sebuah kelompok yang menamakan diri "Gerakan 30 September" menculik dan membunuh enam orang Jenderal, termasuk Panglima AD, mengumumkan berdirinya Dewan Revolusi, dan membubarkan Kabinet. Tetapi percobaan kudeta ini segera dapat diatasi oleh AD, di bawah kepemimpinan Soeharto, yang kemudian mengangkat dirinya sebagai Panglima AD. Militer mengambil keuntungan dari keterlibatan PKI dalam Gerakan 30 September itu untuk kemudian menuduh bahwa pihak Komunis bertanggung jawab penuh terhadap percobaan kudeta tersebut. Kemudian militer bergerak untuk menghancurkan PKI dan selanjutnya membubarkan partai tersebut.

4. Pada awalnya para pemimpin militer percaya bahwa mereka dapat membujuk Presiden Sukarno untuk bergabung dengan gerakan anti-komunis. Ketika Sukarno ternyata malah mencoba membalikkan arah situasi pasca-kudeta, pihak militer memutuskan untuk secara bertahap membatasi kekuasaan dan pengaruh Sukarno. Tujuannya ini mencapai puncaknya pada tanggal 11 Maret 1966 ketika Sukarno, dengan setengah hati dan di bawah tekanan militer, memberikan suatu kekuasaan serupa dengan kekuasaan eksekutif kepada Soeharto. "Kekuasaan 11 Maret" yang dimiliki Soeharto itu kemudian pada tanggal 21 Juni disahkan oleh badan tertinggi negara, yakni MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara).

5. Dalam gerakan anti-komunis yang sekaligus anti-Sukarno, militer mendapatkan dukungan aktif dari organisasi-organisasi massa. Walaupun kebanyakan dari organisasi-organisasi tersebut termotivasi oleh alasan anti-komunis, sebenarnya mereka juga ingin menggunakan kesempatan itu untuk mencari posisi politis masing-masing. Mereka memandang militer sebagai alat untuk mengembalikan mereka kepada posisi politis masing-masing, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Kehidupan Politik di Indonesia

6. Dalam kehidupan politik di Indonesia terdapat tiga faktor dominan yaitu agama, nasionalisme, dan sosialisme (Marxisme). Setiap partai politik cenderung bertumpu pada salah satu dari ketiganya, tetapi juga dipengaruhi oleh kedua faktor yang lain. Sukarno mencoba menggabungkan ketiganya menjadi satu, ke dalam suatu gagasan yang ia sebut sebagai NASAKOM (singkatan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme). Dengan alasan kesatuan bangsa, beberapa elemen, terutama militer, sekarang ini menyebutnya NASASOS (Nasionalisme, Agama, dan Sosialisme).

7. Dasar politik yang secara luas dipakai adalah “Pancasila” atau “Lima Dasar”. Pancasila dicetuskan oleh Sukarno pada tahun 1945 dan dig⁶²kan sebagai falsafah dasar bagi Indonesia merdeka. Kelima dasar itu terdiri dari nasionalisme, internasionalisme, demokrasi, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Esa.

8. Secara geografis, kehidupan politik Indonesia berpusat di Jawa, di mana 65 persen penduduk Indonesia tinggal. Meskipun demikian, para pemimpin politik dengan cermat juga mengamati reaksi dari pulau-pulau besar lain (Sumatra, dengan 16 persen penduduk; Celebes, dengan 7 persen; Borneo, dengan 4 persen) terhadap apa yang terjadi Jawa.

9. Kecuali kalau sedang ada tujuan yang jelas dan kepemimpinan yang kuat, partai-partai non-komunis Indonesia biasanya tidak disiplin dan tidak memiliki arah nasional yang jelas. Selama periode pemerintahan parlementer 1949–1958, para pemimpin partai lebih mementingkan manuver-manuver politik daripada memperjuangkan kepentingan nasional. Situasi ini digunakan Sukarno untuk memberlakukan secara bertahap mulai 1958 apa yang ia sebut sebagai “demokrasi terpimpin”. Ia mengatakan bahwa di bawah sistem “demokrasi liberal” partai-partai yang ada cenderung untuk tidak hanya menghambat kemajuan bangsa tetapi juga mendorong terjadinya perpecahan.

10. Sukarno membatasi jumlah partai dan kembali ke UUD ‘45, yang membenarkan Kabinet presidensial dan mengurangi peran DPR. Ada indikasi bahwa kecenderungan untuk membatasi ini nantinya akan diteruskan oleh para penguasa militer sekarang ini.

11. Sekarang ada delapan partai politik yang resmi diakui. Kehidupan politik di Indonesia juga ditandai oleh kait-mengkait antara berbagai kekuatan politik, adanya sejumlah “kesatuan aksi” dan kelompok-kelompok fungsional. Orang Indonesia, di bawah undang-undang atau pemerintahan macam apa pun, cenderung mengabaikan hukum dan lembaga-lembaga pemerintah dan lebih suka pada penyelesaian masalah secara praktis dan seadanya. Tampaknya Soeharto ingin mencoba menggunakan Konstitusi dan institusi-institusi politik yang ada menurut kepentingannya.

Militer

12. Para pemimpin militer saat ini percaya bahwa militer memiliki misi politik yaitu memimpin dan membentuk negara Indonesia selama masa transisi ini. Para perwira militer ini berpartisipasi dalam pembentukan Indonesia merdeka 20 tahun lalu dan menganggap diri mereka lebih berdedikasi dan mempunyai bekal yang sama dengan—kalau bukan lebih baik daripada—rekan-rekan sipil mereka untuk memimpin bangsa ini. Pada masa lalu, militer—sama seperti Sukarno—merasa tidak sabar terhadap partai-partai non-komunis yang selama periode demokrasi parlementer lebih suka sibuk dengan perebutan kekuasaan. Sekarang ini indikasinya adalah bahwa militer Indonesia, walaupun berbeda orientasi, tampaknya akan memaksakan suatu bentuk “demokrasi terpimpin” yang mirip dengan gagasan Presiden Sukarno.

13. Panglima AD Soeharto berada dalam urutan kelima di antara enam Wakil Perdana Menteri yang membentuk presidium Kabinet dari pemerintahan sementara yang ada sekarang ini. Tetapi praktis dia adalah pemimpin terpenting Indonesia dan telah menjadi kekuatan utama dalam kehidupan politik domestik dan pengambil keputusan sejak 1 Oktober. Walaupun bukan merupakan seorang “jenderal politik” sebelum terjadinya kudeta yang gagal itu, dia memiliki kemampuan intuitif dalam hal pendekatan politis sebagai seorang pemimpin Jawa yang sukses. Orientasi politiknya, sebagaimana orientasi politik kelompok militer pada umumnya, adalah nasionalisme sekuler.

14. Meskipun demikian, dalam tubuh militer terdapat elemen-elemen Muslim, kiri, dan pro-Sukarno yang sama kuatnya. Soeharto harus mampu mengatasi dan mengakomodasi kelompok-kelompok itu dalam organisasinya guna memastikan kesetiaan dalam tugas yang lebih penting yaitu mempertahankan kesatuan negara.

Nahdlatul Ulama

15. Nahdlatul Ulama (NU) adalah partai terbesar di Indonesia. Pendukung utama partai Muslim ini berada di Jawa Timur, tapi NU kuat di seluruh Jawa dan Sumatra Utara, dan beberapa bagian Kalimantan. Posisi pentingnya sekarang adalah hasil dari dilarangnya PKI, tak

menentunya PNI yang pro-Sukarno, dan dibubarkannya Masyumi, yang sebelumnya juga merupakan partai Muslim besar, oleh Sukarno pada tahun 1960.

16. NU memiliki pandangan kedaerahan dan mempunyai riwayat [...]. Partai ini sering diwarnai oleh intrik tetapi tidak pernah memaksakan kehendak untuk membentuk negara teokratis. Sejak 1 Oktober NU ragu-ragu dalam mengambil sikap mengenai Sukarno. Rapat MPRS terakhir diatur dengan baik oleh militer, dan NU sering ikut dengan kebijakan-kebijakan militer.

17. Seperti kebanyakan partai, NU membawahi kelompok-kelompok pemuda, buruh, wanita, budaya, dan beberapa kelompok lain. Di antara kelompok-kelompok itu yang paling aktif adalah ANSOR, sebuah organisasi pemuda yang pada periode sebelum Kudeta telah mengambil sikap anti-komunis secara lebih terang-terangan daripada organisasi induknya. Pada periode pasca-kudeta, ANSOR membantu militer membasmi komunis dan dalam beberapa kasus melakukan sendiri operasi-operasi berdarah anti-komunis.

18. Partai ini dipimpin oleh Chalid, pemegang posisi yang relatif tidak penting sebagai Wakil Perdana Menteri Kedua dalam Kabinet Nasional. Chalid tidak begitu disukai oleh militer dan dalam Kabinet mendatang mungkin akan diganti oleh Wakil Ketua NU, Muhammad Dachlan.

Front Pancasila

19. Pada awal periode pasca-kudeta, Wakil Ketua NU, Subchan, memelopori usaha pembentukan partai dan organisasi-organisasi anti-komunis. Hasilnya adalah Front Pancasila, suatu penggabungan sepuluh organisasi yang dipimpin oleh Subchan (tujuh partai politik, sebuah organisasi sosial, dan dua federasi buruh). Tujuan awalnya adalah untuk membantu militer dalam operasi anti-komunis dan untuk membujuk Sukarno agar menerima kebijakan politik baru. Tindakan awalnya adalah mengkoordinasi aktivitas pemuda dalam demonstrasi dan penyerangan fisik terhadap orang-orang komunis. Tetapi ketika pada bulan Desember diadakan pengorganisasian “kesatuan-kesatuan aksi” banyak kader Subchan tersedot ke sana.

20. Setelah alasan keberadaannya banyak yang terrealisir, Front Pancasila mulai kehilangan kepaduannya. NU, terutama Subchan, kemungkinan akan berusaha mempertahankan Front Pancasila sebagai alat untuk membantu NU secara politis dan mempopulerkan Subchan. Walaupun demikian, tampaknya Front Pancasila tidak akan memiliki peran penting.

Partai-partai Muslim Lain

21. Dua partai Muslim kecil lain adalah Persatuan Sarikat **Islam Indonesia (PSII)** dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI). PSII lebih besar dan lebih tua dan banyak aktif di Jawa. Kekuatan utama PERTI

berada di Sumatra. Kedua partai ini secara konsisten menunjukkan kecenderungan untuk mengikuti tren politik agar bisa bertahan. Keduanya pernah berdamai dengan Marxisme dan memiliki anggota-anggota yang bersedia bekerja sama dengan PKI. Setelah 1 Oktober, mereka dengan cepat mengutuk PKI. PSII berusaha untuk mengambil banyak tindakan politik yang dapat diterima oleh militer.

22. Yang menjadi kekhawatiran pokok NU adalah kemungkinan bangkitnya kembali Masyumi. Walaupun masih dilarang, Masyumi bergerak aktif melalui beberapa kelompok afiliasinya—yang tidak pernah dilarang—dan melalui Muhammadiyah, organisasi sosial yang aktif dalam politik. Masyumi dan Muhammadiyah mewakili Islam modern dan mempunyai pendekatan politik ala Barat. Para pemimpin mereka berharap untuk dapat mendirikan kembali Masyumi atau membentuk partai baru dengan dukungan mantan anggota Masyumi. Tetapi, keputusan jadi atau tidak jadi bergantung pada pemerintah—khususnya militer.

Partai-partai Kristen

23. Partai Katolik and Kristen (Protestan) adalah partai kecil tetapi mempunyai pengaruh yang cukup dalam pemerintahan. Berhubung selama bertahun-tahun banyak dari anggota mereka mempunyai pendidikan rata-rata lebih baik daripada para anggota partai Muslim atau Nasionalis, mereka mampu berpartisipasi pada tingkat yang tinggi walaupun hanya partai kecil. Meskipun cukup khawatir dengan kemungkinan Indonesia menjadi negara teokratis, kedua partai ini mempunyai lebih banyak kesamaan dengan partai religius (Muslim) daripada Nasionalis sekuler atau partai-partai kiri. Akhir-akhir ini Partai Katolik lebih berperan aktif dan tampak lebih getol dalam perlawanan anti-komunis daripada Partai Kristen.

24. Salah satu pemimpin Partai Kristen, Johannes Leimena, adalah Wakil Perdana Menteri Satu dalam Kabinet interim saat ini. Tetapi, posisinya lebih banyak bersifat simbolis dan diyakini tidak akan mendapat tempat pada Kabinet berikut. Walaupun dianggap tidak berbahaya dan tidak terlalu efektif, dia sering disebut sebagai orang yang selama bertahun-tahun dipercaya oleh Sukarno, meskipun secara pasif.

Partai Nasional

25. Partai Nasional Indonesia (PNI) menganggap Sukarno sebagai pendirinya dan telah mempopulerkan serta mengembangkan diri dengan menunjukkan sebagai partai yang paling setia pada Sukarno. Dalam Pemilu 1955—satu-satunya pemilihan umum di Indonesia—PNI memperoleh suara terbanyak, namun setelah itu mereka kehilangan simpatisan karena banyak yang menyeberang ke partai komunis atau NU. Apakah sekarang PNI akan mampu mendapatkan kembali simpatisannya setelah PKI dilarang masih tanda tanya.

26. Sayap moderat PNI, yang anggota-anggotanya diturunkan dari kepemimpinan partai hanya setahun yang lalu, sekarang memimpin partai. Sayap kiri, yang secara membabi-butakan telah menjadi pengikut Sukarno dan telah diinfiltrasi oleh kelompok komunis, masih mempunyai kekuatan di Jawa Timur dan Jawa Tengah, daerah yang selama ini telah menjadi kekuatan PNI. Di Jawa Tengah, basis utama PNI, diperkirakan PNI terbagi separuh-separuh antara kedua sayap.

27. Tiga bulan terakhir ini sentimen pro-Sukarno dan PNI-kiri mengemuka di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Para komandan militer pro-Soeharto yang bertugas di dua wilayah tersebut pada akhir Juni lalu sekarang sedang bergerak untuk menekan elemen-elemen pro-Sukarno. Tindakan-tindakan yang sangat represif ini, digabung dengan kecenderungan orang Jawa untuk berkompromi, tampaknya akan menenggelamkan sayap kiri. Meskipun demikian, sentimen nasionalis kiri ini tetap potensial bagi pemimpin yang mampu mengeksploitasinya.

28. Roeslan Abdulgani, anggota dan mantan pemimpin PNI, adalah Wakil Perdana Menteri Kedua, suatu posisi yang sebenarnya hanya simbolis dalam Kabinet interim saat ini. Walaupun tidak terlalu dekat dengan PNI sayap kanan, Abdulgani masih lebih dekat dengan sayap kanan daripada dengan sayap kiri. Walaupun tampaknya Abdulgani tidak akan menjabat pada Kabinet mendatang, PNI sayap kanan akan tetap terwakili.

29. PNI telah melekat pada falsafah yang pernah dikemukakan Sukarno yaitu "Marhaenisme", sebuah doktrin kabur Marxisme yang disesuaikan dengan situasi di Indonesia. Pengertian Marxis dalam Marhaenisme telah jatuh pamornya, dan sekarang para pemimpin PNI menyatakan bahwa Marhaenisme itu sama dengan Pancasila.

Partai-partai Nasionalis Lain

30. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) adalah sebuah partai kecil yang berorientasi militer, didirikan pada tahun 1954 oleh Jenderal Nasution, mantan panglima militer dan sekarang ketua MPRS. Kekuatan utamanya berada di Sumatra Utara dan Jawa Barat.

31. Partai Indonesia (Partindo) adalah partai nasionalis kiri kecil yang disusupi komunis sejak didirikannya pada tahun 1958. Militer membubarkan Partindo dan kelompok mudanya di Jawa Timur di mana kebanyakan pendukung partai ini berada. Di daerah-daerah lain Partindo berada dalam pengawasan dan umumnya tidak aktif.

Kekuatan Non-Komunis Kiri

32. Tidak ada partai yang diakui yang bisa menjadi wadah bagi kalangan kiri non-komunis. Pernah ada dua partai yang kecil dan menganut elemen ini, tapi sudah dilarang. Kedua partai tersebut adalah Partai

Murba (Proletarian) yang dilarang pada tahun 1965 dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang dibubarkan pada tahun 1960. Gagasan untuk menghidupkan kembali kedua partai itu akhir-akhir ini telah dibahas di sejumlah lingkaran dalam pemerintahan. Tampaknya sebagai alternatif atas langkah tersebut, suatu gerakan sedang dilakukan untuk membentuk sebuah partai kiri baru. Dalam sidang MPRS baru-baru ini, kelompok kecil yang terdiri dari kira-kira 20 orang telah menyatakan diri sebagai kelompok “Sosialis Pancasila”. Kelompok ini dianggap sebagai bagian dari langkah aw²¹ menuju terbentuknya gerakan “sosialis demokratik”. Adam Malik, Wakil Perdana Menteri I yang sekaligus Menteri Luar Negeri dan pemimpin Partai Murba adalah sosok di belakang gerakan ini.

33. Menanggapi munculnya kelompok Sosialis Pancasila, MPRS mengeluarkan peraturan yang melarang “penyebaran ideologi atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam bentuk apa pun”. Apakah hal ini akan membatasi perkembangan “sosialisme demokratik” masih harus dilihat lebih lanjut. Dekrit MPRS itu tampaknya untuk sebagian didasari oleh keinginan partai-partai Muslim untuk menghalangi maksud Adam Malik serta keinginan untuk menghadang kemungkinan kembalinya Sukarno.

34. Secara umum dapat dikatakan bahwa kalangan non-komunis kiri sulit mendapatkan pengikut di Indonesia walaupun mengedepankan “keadilan sosial” dan amat dipengaruhi Marxisme. Tampaknya partai-partai keagamaan dan nasionalis telah cukup memasukkan gagasan-gagasan sosialisme dalam kebijakan mereka, sehingga masyarakat merasa bahwa partai khusus sosialis tidak dirasa perlu lagi. Oleh karena itu hanya para idealis militan dan kaum Marxis non-komunislah yang memerlukan organisasi khusus guna mewadahi aspirasi mereka.

35. Adam Malik, di luar ketertarikan pribadinya pada partai kiri, menyatakan bahwa suatu organisasi diperlukan untuk menampung jutaan mantan pengikut PKI dan organisasi front-nya yang sebenarnya tak tahu banyak mengenai Komunisme.

Sukarno dan Sukarnoisme

36. Satu hal yang masih tetap mewarnai kehidupan politik Indonesia adalah wibawa dan kharisma Presiden Sukarno. Sukarno, yang membuktikan dirinya sebagai pemimpin massa dengan kecakapan yang luar biasa, tetap menjadi simbol populer dari Revolusi Indonesia dan merupakan personifikasi dari kebanggaan nasional. Sukarno tetap mendapat tempat khusus di hati rakyat kebanyakan—terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Semua itu melampaui daya tarik politik tertentu dari Sukarno, dan telah menjadi salah satu daya tarik orang terhadap PNI, sekaligus berguna bagi kelompok Komunis.

37. Para pemimpin militer, sadar akan sulitnya menghancurkan citra politik Sukarno, merasa kurang tepat untuk menempuh suatu

tindakan langsung melawan sang Presiden. Dalam pandangan mereka, pentinglah bahwa demi kebanggaan nasional, kesatuan bangsa, dan sejarah bangsa, Indonesia tetap menjaga nama baik pemimpin revolusi yang sekaligus presiden pertamanya.

Selain itu, kebanyakan pemimpin militer yakin bahwa Sukarno memang mempunyai kontribusi yang besar kepada negara. Walaupun mereka tidak suka, mereka merasa bangga dan bersimpati terhadap Sukarno.

38. MPRS telah mencabut dekrit 1963 yang menyatakan Sukarno sebagai presiden seumur hidup. Masa jabatannya akan berlangsung sampai anggota MPR terpilih sepakat untuk memilih presiden yang baru, dan tampaknya hal itu baru akan terjadi dua tahun mendatang. Sementara itu, tampaknya Sukarno tidak akan bisa kembali sepenuhnya ke panggung kekuasaan, meskipun ia akan terus berusaha menghalangi kebijakan-kebijakan kubu militer.

Kesatuan Aksi dan Kelompok Pemuda

39. Desember lalu, ketika operasi-operasi anti-komunis mulai mengendor karena makin habisnya target yang menjadi sasaran dan ketika Sukarno terus berusaha meraih kekuasaannya kembali, mulailah pembentukan berbagai kelompok “kesatuan aksi”. Ini adalah kelompok-kelompok penekan (*pressure groups*) yang dibentuk dari berbagai macam organisasi dan elemen masyarakat guna mendukung kebijakan-kebijakan militer pasca-kudeta. Dalam pembentukannya, kelompok-kelompok ini⁵³ setidaknya sebagian—diprakarsai oleh militer dan Adam Malik. KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dan KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia) adalah kelompok yang paling aktif. Walaupun terdiri dari gabungan kelompok-kelompok pelajar yang berafiliasi pada partai-partai politik berbasis agama, cita-cita mereka lebih bersifat nasionalis ketimbang politis sektarian. Berbagai demonstrasi yang mereka lakukan merupakan faktor penting, mungkin yang terpenting, yang pada bulan Maret lalu memaksa Sukarno untuk memberikan kekuasaan kepada Soeharto dan untuk membentuk sebuah Kabinet baru pada bulan yang sama.

40. Sebuah kelompok aksi yang kecil tapi cukup efektif adalah KASI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia. KASI sangat dipengaruhi oleh Partai Sosialis (PSI) yang dilarang itu dan sering bekerja sama dengan KAMI dan KAPPI. Beberapa aksi dan front lain juga bermunculan. Misalnya KABI (buruh), KAWI (wanita), KAGI (guru), KATI (petani), bahkan KAPNI (pengusaha). Bulan April lalu sebuah badan kerja sama untuk kelompok-kelompok itu dibentuk. Namanya KOSTRAM. KOSTRAM hanya sempat berdiri sejenak, dan bubar karena adanya masalah internal dan adanya perlawanan dari Front Pancasila. Sekarang sedang dibentuk usaha koordinasi yang lain, Badan Musyawarah Kesatuan Aksi (BMKA). Salah satu tujuannya adalah untuk mengembangkan organisasi yang mampu bersaing dalam pemilihan umum. Sejauh ini,

KAMI menolak untuk berpartisipasi. Kesatuan-kesatuan aksi yang besar biasa disebut sebagai “Angkatan ’66.”

41. Di luar kesatuan-kesatuan aksi tersebut terdapat pula beberapa kelompok pemuda yang bertindak secara independen. ANSOR, gerakan pemuda NU, mengambil tindakan anti-komunis sebelum maupun sesudah kudeta. Di Jawa Timur, ANSOR menentang PNI dan Masyumi. Pemuda Pancasila, yang berafiliasi dengan IPKI, aktif dalam penumpasan komunis di Sumatra Utara. HMI (Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia) berafiliasi dengan Masyumi dan merupakan organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia. HMI sangat aktif dalam politik selama era Sukarno dan terus berlanjut hingga periode pasca-kudeta. HMI juga bergerak melalui KAMI.

42. Anggota PNI dari mahasiswa adalah GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia). Perpecahan yang ada dalam PNI dapat dilihat dari perpecahan serupa di GMNI. Di beberapa daerah, elemen GMNI sayap kanan bekerja sama dengan KAMI. Tetapi, di beberapa bagian di Jawa Timur dan Jawa Tengah, mahasiswa sayap kiri sering melakukan perlawanan, kadang-kadang dengan kekerasan, terhadap kelompok-kelompok sipil moderat. Kelompok mahasiswa yang berafiliasi dengan Partindo, yakni GERMINDO (Gerakan Mahasiswa Indonesia) bergerak aktif hingga pertengahan Maret untuk mendukung Sukarno. Setidaknya hingga bulan Mei, markasnya di Jawa Timur menjadi pusat aktivitas rahasia PKI di daerah tersebut. GERMINDO sekarang dilarang di Jawa Timur, tetapi anggotanya diduga akan bekerja dengan pemuda komunis untuk mengembangkan gerakan bawah tanah.

Kelompok-kelompok Fungsional

43. Dalam kehidupan politik Indonesia peran dan posisi politis dari kelompok-kelompok ini tidak menentu. Sementara ini mereka terkait dengan kesatuan-kesatuan aksi. Kelompok ini sebenarnya merupakan suatu kategori dalam masyarakat, seperti buruh dan petani, dan sejak awal buruh dan petani inilah yang dimasukkan dalam kelompok fungsional ini. Tetapi tidak bisa dihindari bahwa mereka menjadi terkait dengan partai-partai politik dan didukung oleh militer.

44. Sukarno mulai menggunakan mereka pada era awal kemerdekaan sebagai cara meningkatkan perwakilan dari kelompok-kelompok yang memiliki orientasi politik yang khusus. Mereka juga dapat digunakan sebagai elemen penyeimbang dalam keanggotaan partai. Kelompok fungsional sebagai kelompok fungsional jarang aktif dalam berpolitik. Mereka dieksploitasi oleh aktivis politik di dalam lingkaran politik umum mereka.

Partai Komunis

45. Partai Komunis Indonesia telah dihabisi dan menjadi organisasi bawah tanah dengan jumlah yang tidak diketahui. Tetapi, terdapat

indikasi bahwa jumlah pemimpin komunis pada tingkat nasional maupun lokal yang terbunuh atau ditahan tidak sebanyak yang diberitakan. Dalam beberapa minggu terakhir dilaporkan bahwa ada sejumlah pamflet pro-PKI beredar di Jawa Timur. Walaupun begitu, ketatnya pengawasan militer telah membuat efektivitas partai ini sebagai sebuah kekuatan politik nasional hampir tidak ada—setidaknya untuk beberapa tahun ke depan.

46. Sebelum 1 Oktober, PKI mengklaim diri memiliki anggota sebanyak 3.5 juta orang. Kelompok front PKI membuat perkiraan yang tumpang tindih dan berlebihan, dan mengklaim memiliki anggota 15 juta. Sebagai akibat dari pembunuhan dan larangan, kebanyakan anggota menghilang. Pemerintah Indonesia menyatakan sisa anggota partai hanya 100,000. Bagaimana arah politik dari jutaan mantan anggota PKI di masa depan masih menjadi pertanyaan.

Kabinet

47. Jenderal Soeharto mengadakan rangkaian diskusi dengan beberapa partai dan kelompok tentang pembentukan Kabinet baru sebelum 17 Agustus 1966, hari kemerdekaan Indonesia. Rumor yang beredar menyatakan bahwa Kabinet akan terdiri dari satu Perdana Menteri dan lima Wakil Perdana Menteri yang akan membawahi lima departemen umum dan kira-kira 15 sampai 20 portofolio. Terdapat indikasi bahwa Soeharto akan menjadi Perdana Menteri, bahwa dia akan mempertahankan Adam Malik dan Sultan Yogyakarta, dan bahwa sekurang-kurangnya akan memberikan masing-masing satu posisi Wakil Perdana Menteri kepada NU dan PNI. Soeharto menginginkan Kabinet yang terutama terdiri dari para teknokrat, tapi sejumlah kompromi dengan Sukarno dan partai-partai politik tampaknya tidak bisa dihindari. Ada kemungkinan kesatuan-kesatuan aksi akan terwakili.

Pemilihan Umum

48. Oleh ketetapan MPRS pemilihan umum akan diadakan dalam waktu dua tahun ke depan, yaitu sebelum Juli 1968. Undang-undang yang mengatur pemilihan umum itu belum ditulis, tetapi MPRS telah menetapkan bahwa undang-undang itu akan diselesaikan dalam enam bulan mendatang. Persiapan pemilihan umum dipimpin oleh Jenderal Nasution, seorang pendukung kuat partisipasi militer dalam pemerintahan.

49. Dua badan akan dipilih—MPR yang akan menentukan kebijakan, dan DPR yang merupakan badan legislatif. Kemungkinan militer menginginkan separuh anggota dari kedua lembaga itu dipilih sedang separuhnya lagi ditunjuk. Akan tetapi militer merasa harus berkompromi dengan partai-partai yakni bahwa semua anggota akan dipilih, namun setelah itu mereka akan mencari cara untuk mengontrol

kedua lembaga itu. Begitu terpilih, sebagaimana ditentukan dalam UUD '45, MPR akan memilih Presiden dan Wakil Presiden.

50. Di antara berbagai partai politik di Indonesia, hanya Nahdlatul Ulama yang mendesak untuk mengadakan pemilihan umum lebih cepat. NU merasa bahwa situasi sekarang ini amat menguntungkan baginya dan lebih suka diadakan pemilihan umum secepatnya, sebelum PNI dapat menata diri kembali dan sebelum ada sebuah partai Islam baru yang dapat menyedot pengikut. Pengurus NU merasa bahwa 18 bulan ke depan adalah waktu yang menguntungkan.

51. Ada indikasi bahwa pemilihan umum baru bisa diadakan paling cepat sebelum akhir 1967.

Perhitungan Ke Depan

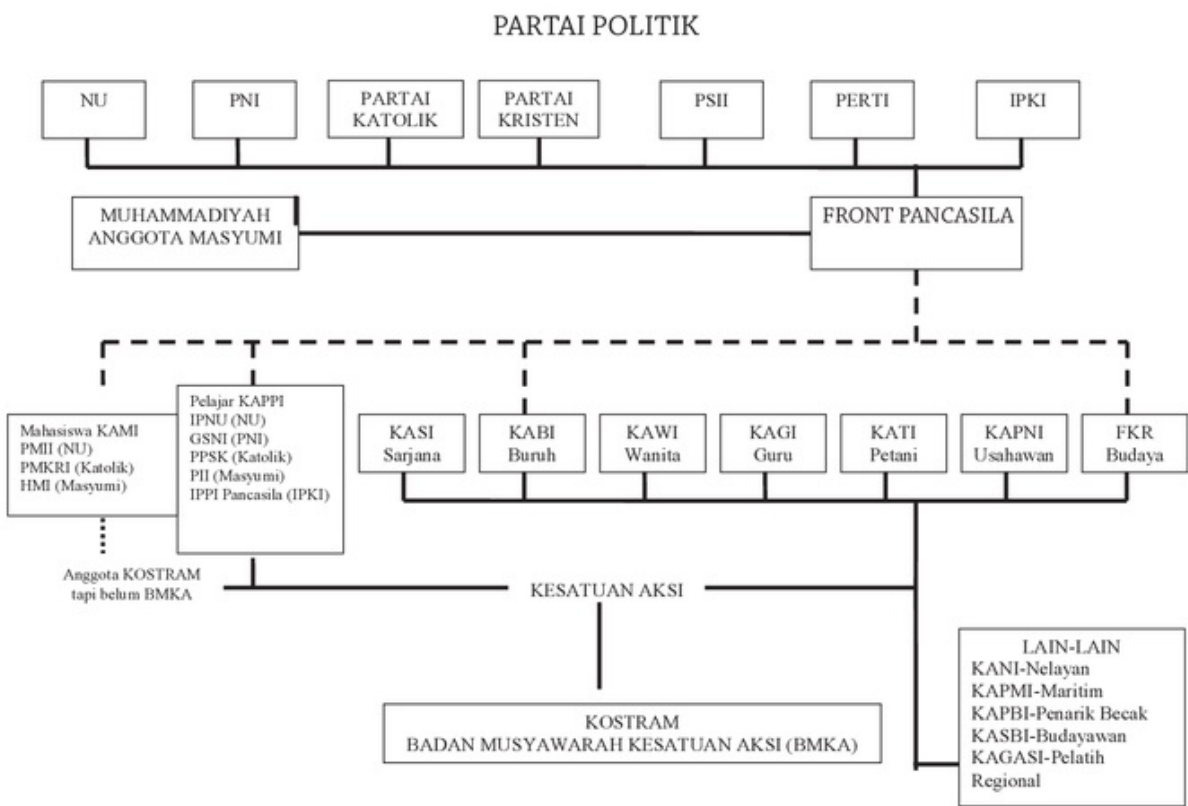
52. Sulit diragukan bahwa nantinya militer dapat secara umum mengendalikan kekuatan-kekuatan politik di Indonesia. Meskipun demikian, masalah politik yang utama nantinya tidak akan terletak pada masalah hubungan militer-sipil, melainkan pada masalah ekonomi nasional secara keseluruhan.

53. Situasi ekonomi tidak berubah sejak Oktober lalu; bahkan dalam hal tertentu semakin memburuk. Sukarno dan para penasihatnya pada periode pra-Oktober masih dipandang sebagai penyebab inflasi yang semakin tinggi dengan berbagai sebab dan akibatnya. Kecuali ada pemecahan masalah yang efektif, sangat mungkin bahwa akan timbul sejumlah masalah politik. Masalah itu dapat berupa perkembangan situasi anti-rezim yang dapat dieksploitasi oleh partai-partai politik, perwira militer yang ingin melakukan kudeta, atau elemen-elemen nasionalis ekstrem dan Komunis. Situasi demikian akan dapat memicu kekisruhan politik atau pengambilalihan kekuasaan oleh militer dan kembalinya otoritarianisme.

54. Para pemimpin militer sadar akan adanya berbagai kemungkinan tersebut. Soeharto, khususnya, mencoba untuk membuat kemajuan bertahap ke berbagai arah. Di dalam negeri, dia mencoba mengembalikan sebagian sistem dari pemerintahan konstitusional (*partial return to constitutional government*), mempertahankan kendali politik, melakukan kompromi—di dalam kerangka kebijakan-kebijakan militer—terhadap permintaan berbagai kelompok non-komunis, mengurangi pengaruh Sukarno secara bertahap, dan terus menekan komunis. Dalam kebijakan luar negeri ia mencoba membina persahabatan dengan negara-negara Barat dan mengambil jarak dengan kebijakan pro-Pekingnya Sukarno. Hanya ada kemajuan sedikit dalam bidang ekonomi, tetapi dalam hal ini Soeharto dan rekan-rekannya telah memangkas pengeluaran-pengeluaran yang tak perlu dan telah bernegosiasi dengan beberapa negara Barat untuk mendapatkan utang. Soeharto dan orang-orang di sekitarnya, baik militer maupun sipil, mendasarkan harapan mereka atas perbaikan ekonomi pada masuknya

bantuan luar Negeri sebagai pemicu bagi stabilitas jangka panjang dan perbaikan dasar ekonomi Indonesia. (Lihat tabel).

KEKUATAN PARTAI POLITIK SIPIL BESAR DI INDONESIA



4. Kabinet Baru Makin Meninggalkan Bung Karno

Dokumen berikut tertanggal 25 Juli 1966 dan berisi laporan Dubes Green tentang pembentukan Kabinet baru di Indonesia, yang baru saja diumumkan hari itu juga. Tampak di sini pihak AS senang karena dalam susunan Kabinet yang baru itu unsur Bung Karno makin hilang (ditandai dengan disingkirkannya Roeslan Abdulgani dan Johannes Leimena), sementara posisi Soeharto makin naik. Dalam Kabinet ini kekuasaan Soeharto meningkat tajam karena dia memiliki kekuasaan langsung pada Kabinet. Dokumen ini juga mencatat kedekatan Soeharto dengan Adam Malik.

Dikatakan, dukungan Soeharto kepada Malik ternyata lebih kuat daripada yang diduga sebelumnya, dan hal itu membuat Amerika merasa senang.

KOMENTAR TENTANG KABINET YANG BARU⁷

1. Kabinet baru merupakan perbaikan total atas kabinet sebelumnya, bahkan mungkin yang terbaik dalam sejarah Indonesia, meskipun masih mengandung unsur-unsur kompromi dengan Sukarno dan jelas-jelas merupakan hasil kompromi antara kekuatan-kekuatan politik yang ada. Kabinet yang baru itu menunjukkan tekanan yang kuat pada aspek politik daripada aspek ekonomi. Hal itu terjadi karena telah disingkirkannya para pendukung Sukarno sekaligus karena ditambahkannya orang-orang yang kompeten, yang sekaligus sangat anti-Sukarno, seperti B.M. Diah dan Sutjipto SH. Meskipun demikian dari sisi ekonomi beberapa orang yang tidak kompeten dan korup masih saja dipertahankan. Demikian pula dua atau tiga orang yang mungkin masih terkait dengan Sukarno.
2. Ciri yang paling jelas dan penting dari kabinet yang baru ini adalah dipertahankannya Soeharto, Adam Malik dan Sultan Yoga di tiga posisi kunci. Meskipun Soeharto disebut sebagai Ketua Presidium Kabinet dan bukan sebagai Perdana Menteri, namun posisinya dalam pemerintahan mengalami peningkatan secara mencolok. Hal itu terjadi mengingat bahwa dalam posisinya yang sekarang ini dia memiliki kekuasaan langsung atas kabinet. Alasan dipertahankannya Adam Malik adalah karena adanya perlawanan yang keras dari Sukarno, serta oposisi yang kuat dari partai-partai politik besar, bahkan dari sejumlah elemen di kalangan kubu AD itu sendiri. Adam Malik tidak hanya dipertahankan di dalam kabinet, tapi posisi politiknya juga mengalami peningkatan mencolok. Penunjukkan atas temannya, yakni B.M. Diah, sebagai Menteri Penerangan (posisi yang sangat penting untuk mengantar transisi ke era baru) menunjukkan bahwa dukungan Soeharto untuk Adam Malik ternyata lebih kuat daripada yang pernah diperhitungkan sebelumnya. Ini merupakan suatu perkembangan yang sangat positif.
3. Sukarno merasa sangat terpukul karena disingkirkannya Leimena dan Roeslan Abdulgani dari Presidium. Antek Sukarno yang lain yang juga disingkirkan adalah Muljadi Djojomartono dan dr. Satrio (untuk tidak menyebut Wirjono Prodjodikoro dan Rumambi yang sudah disingkirkan pelan-pelan selama dua bulan terakhir ini). Kepergian Muljadi si kroni Sukarno itu tidak hanya merupakan langkah mundur bagi Sukarno dalam kaitannya dengan kabinet, tetapi juga merupakan pemotongan atas kemampuannya untuk melakukan manuver di kalangan organisasi Muhammadiyah yang secara historis merupakan inti dari partai Masyumi yang dilarang itu. Dampak dari kekalahan ini menjadi lebih besar oleh adanya dua tokoh pro-Muhammadiyah, yakni

Moh. Sanusi dan Brigjend Sutjipto S.H., di dalam kabinet yang baru.

4. Secara umum partai-partai politik diberi peran dalam kabinet lebih besar daripada sebelumnya, meskipun pengaruh mereka akan tetap sekunder. NU memiliki dua posisi di kabinet. Hal itu dipandang tidak mencukupi, khususnya dalam kaitan dengan naiknya posisi Muhamadiyah. Walaupun NU memegang salah satu posisi di dalam Kabinet Presidium, Idham Chalid adalah orang yang terlalu lemah untuk bisa bekerja secara efektif di situ. Lebih dari itu dia lebih merupakan boneka Sukarno daripada wakil NU.

5. Kabarnya AD lebih menghendaki Dachlan dalam Presidium daripada Chalid. Alasannya, karena Dachlan itu loyal kepada AD dan anti-Sukarno, dan kebetulan bisa bekerja sama dengan Masyumi. Penyingkiran dia dari Presidium atas permintaan Sukarno mungkin merupakan kekalahan kecil bagi AD, namun di lain pihak penampilan NU yang mengecewakan mungkin akan memperdalam ketidakpuasan di tubuh NU atas kebijakan NU akhir-akhir ini untuk bersedia bekerja sama dengan Sukarno. Orang yang paling bisa disalahkan dalam kaitan dengan kerja sama dengan Sukarno adalah Subchan. Bagi AD, lebih baik bahwa orang yang tak jelas posisinya seperti Chalid itu berada dalam Presidium daripada orang yang potensial menjadi sumber masalah seperti Subchan.

5. Kabinet Baru Sebagai Kekalahan Bung Karno

Serupa dengan dokumen sebelumnya, dokumen yang juga tertanggal 25 Juli (waktu Washington) berikut ini sama-sama berisi reaksi AS terhadap diumumkannya Kabinet yang baru di Indonesia. Ditulis oleh Thomas L. Hughes dari Dinas Intelligence and Research untuk Menlu Rusk, laporan ini hanya ingin menggarisbawahi bahwa terbentuknya Kabinet baru berarti makin tergesernya peran Presiden Sukarno, atau bahkan merupakan “kekalahan” baginya.

KABINET INDONESIA YANG BARU SEBAGAI KEKALAHAN BAGI SUKARNO⁸

Kabinet yang baru, yang susunannya diumumkan oleh Jenderal Suharto pada tanggal 25 Juli [1966] merupakan suatu langkah pokok dalam upaya untuk menggeser Presiden Sukarno dari kekuasaan nyata ke posisi simbolis. Meskipun Sukarno berjuang keras untuk membujuk MPRS supaya ia diberi hak untuk ikut bersuara dalam penyusunan Kabinet, melakukan lobi terus-menerus agar para pendukungnya

mendapat posisi, serta berjuang melawan jajaran kepemimpinan yang baru, Jenderal Suharto mampu menguasai situasi dan berhasil menanamkan orang-orangnya di posisi-posisi kunci dalam Kabinet.

Hanya Konsesi Kecil untuk Sukarno. Triumvirat dari Kabinet sebelumnya tetap utuh. Suharto sendiri akan duduk sebagai Ketua Presidium dan Menteri Pertahanan dan Keamanan; Adam Malik sebagai Menteri Pertama untuk Bidang Politik dan akan tetap menjabat sebagai Menteri Luar Negeri; Sultan Hamengku Buwono IX akan mempertahankan tugas-tugas sebelumnya namun dengan nama jabatan baru yakni Menteri Pertama Bidang Ekonomi dan Keuangan. Dua orang lain yang juga menjadi Menteri Pertama dan anggota Presidium adalah Idham Chalid, pemimpin Partai NU (Nahdlatul Ulama) untuk urusan Kesejahteraan Rakyat, dan Sanusi Hardjadinata, seorang tokoh PNI yang akan membawahi portofolio industri dan pembangunan. Keberadaan dua orang politisi ini terutama merupakan hasil konsesi Sukarno dan sejumlah partai politik. Tanpa keduanya Kabinet ini akan sepenuhnya diisi oleh teknokrat. Dua orang pendukung Sukarno dari Kabinet yang lalu, yakni Roeslan Abdulgani dan Johannes Leimena telah disingkirkan, meskipun Sukarno mati-matian membela mereka. Dubes Indonesia untuk Thailand yang sekaligus pro-Barat, yakni Burhanuddin Mohamad Diah, ditunjuk sebagai Menteri Penerangan menggantikan Roeslan Abdulgani. Salah satu perubahan terpenting adalah bahwa kedua puluh empat menteri bertanggung jawab langsung kepada Presidium, yang diketuai oleh Suharto, dan bukan kepada Presiden, yang kini tidak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri melainkan melulu sebagai kepala negara.

Sang Pemimpin Besar Tampaknya Menyerah. Kalau dilihat secara keseluruhan, perkembangan di atas mencerminkan pukulan berat bagi posisi dan pengaruh Sukarno. Namun tampaknya ia menerima pukulan itu tanpa perlawanan. Sejumlah berita telegram menyatakan bahwa Presiden Sukarno mendukung Kabinet hasil susunan Suharto itu dan memberi sinyal bahwa ia akan bersedia memberikan pidato pada saat pelantikan para menteri.

Hughes

6. Wayang dan Realitas Politik di Indonesia

Cerita wayang adalah cerita fiktif, sementara dinamika politik adalah sebuah realitas. Meskipun demikian, menarik bahwa di Indonesia keduanya bisa saling bercampur dan saling memengaruhi. Setidaknya begitu pengamatan sejumlah diplomat Amerika yang agak terheran-heran namun berusaha untuk memahami. Dokumen berikut berasal dari memo D.W. Ropa (Staff

National Security Council) yang ditulis tanggal 29 Juli 1966 ditujukan kepada W.W. Rostow (Asisten Khusus Presiden Johnson) berisi soal bagaimana mistisisme Jawa meresapi dinamika politik Indonesia. Dalam memo itu dilampirkan memo dari Dubes Green tanggal 20 Juli 1966 tentang bagaimana sebuah lakon wayang tiba-tiba diganti “hanya” karena takut akan menimbulkan persepsi tertentu mengenai suatu misi diplomatik yang sedang ditempuh. Tercatat pula dalam lampiran itu pandangan Menteri Koordinator Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Prijono, seorang simpatisan komunis, tentang dinamika politik waktu itu.^{***}

PENTINGNYA MISTISISME JAWA DALAM POLITIK INDONESIA SEKARANG⁹

Kalau Anda punya waktu luang, silakan baca catatan dari Dubes Marshall Green (terlampir) tentang kecenderungan orang Jawa untuk mengaitkan situasi politik yang ada sekarang dengan *lakon-lakon* yang ada dalam Kisah Ramayana sebagaimana diceritakan dalam pertunjukan Wayang Kulit (Lihat dokumen tanggal 20 Juli 1966-**Pen.**). Mistisisme Jawa sangat meresapi politik Indonesia dan sangat mempengaruhi berbagai dinamika politik negeri tersebut.

Salah satu hal terpenting yang perlu kita sadari ⁶ adalah bahwa Suharto itu orang Jawa. Oleh karena itu ia bisa memahami Sukarno, sedangkan Nasution tidak. Waktu saya berada di Indonesia dan sedang berurusan dengan Nasution melalui seseorang, suatu hari orang itu di rumah saya mengungkapkan kekesalannya. Sambil mengangkat kedua tangannya ke atas dia mengatakan bahwa Nasution sama sekali tidak mampu memahami psikologi Jawa. Kemudian orang itu memohon bahwa *kita* bersedia membantu Nasution supaya ia bisa memahami pikairan Jawa! Saya harus mengaku bahwa *kita* juga mempunyai kesulitan yang sama.

Ropa

Lampiran:

**SATU MALAM SAAT PERTUNJUKAN WAYANG
BERSAMA SIMPATISAN KOMUNIS
PROFESOR DR. PRIJONO¹⁰**

Agen yang menyampaikan laporan telah berkesempatan untuk bertemu dan berbincang-bincang selama beberapa jam dengan Profesor Dr. Prijono, saat diadakan pertunjukan Wayang tanggal 16 Juli [1966]. Prijono adalah seorang tokoh pendukung partai PKI-Murba yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dan kemudian menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Prijono menyampaikan informasi-informasi di bawah ini. Beberapa sudah dikonfirmasi kepada sumber-sumber informasi yang lain.

1. Chairul Saleh telah dikeluarkan dari penjara dan sekarang hidup dengan tenang di rumahnya sebagai tahanan kota. Tidak ada satu pun bukti yang mengaitkan dia dengan Gerakan 30 September, dan sepertinya tidak ada tanda bahwa ia pernah akan mencoba korupsi. Begitu menurut Prijono.
2. Usaha-usaha untuk menghidupkan kembali Partai Murba kemungkinan besar tidak akan berhasil. Prijono mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Adam Malik kurang berminat untuk merehabilitasi Murba. Dia lebih berminat untuk membentuk partai baru yang menggabungkan elemen-elemen dari PSI dan Murba. Sebaliknya Partai Murba sayap Prijono menolak rencana ini... Kemungkinan besar karena takut bahwa partai Murba nantinya akan tenggelam dalam partai baru tersebut, meskipun Prijono tidak mengatakan hal ini. Prijono mengatakan kelompoknya belum dapat mencapai kesepakatan dengan Sukarno tentang rehabilitasi Murba, tetapi menduga keras bahwa "tentara telah menyetujui rencana tersebut". Ketika ditanyai tentang apa dan siapa yang dimaksud dengan "rencana" dan "tentara", Prijono bergumam tentang mendapatkan persetujuan dari Jenderal Soeharto tetapi tidak dijelaskan lebih jauh. Prijono mengatakan bahwa Wasid Suwanto, seorang pengusaha berumur 33 tahun sebagai Ketua Jenderal Murba, sekarang menghabiskan semua waktunya bekerja dalam hal-hal yang menyangkut kepartaian.
3. Seperti kebanyakan bekas simpatisan Komunis yang ditemui akhir-akhir ini, Prijono berusaha keras untuk menekankan bahwa sekarang ini ia adalah juga sebagai pendukung Amerika, sebuah posisi yang sebenarnya anti-komunis. Ia mengklaim telah mengambil bagian dan turut bertanggung jawab dalam gerakan anti-PKI BPS (lihat di bawah) dan berbicara seolah-olah ia sangat dekat dengan Malik. Dengan wajah meyakinkan, ia mengatakan ia telah secara pribadi bertanggung jawab terhadap "pelarangan" PKI ketika ia masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan Dasar. Selama masa jabatannya ia hanya mengizinkan 40 pelajar/mahasiswa untuk belajar ke negeri Cina Komunis (ia tidak

menyebutkan ribuan lainnya yang telah ia izinkan untuk pergi ke Moskow).

Prijono mengatakan bahwa anak laki-laki tertuanya baru-baru ini telah menyelesaikan sekolahnya selama 4 tahun di bidang pembuatan film di Uni Soviet. Ia mengatakan bahwa Duta Besar Jones pernah menyampaikan padanya bahwa juga disediakan beasiswa untuk pelatihan yang sama dan ia bertanya apakah mungkin anaknya bisa belajar tentang pembuatan film di Hollywood selama empat tahun atas pembiayaan Pemerintah Amerika Serikat untuk memastikan bahwa ia tidak mendapatkan “pandangan yang salah tentang segala sesuatu” dari tahun-tahun yang telah dilaluinya di Moskow. Ketika agen yang melaporkan bertanya kapan anaknya akan menyelesaikan pelatihannya dan mulai membuat film, Prijono menjawab bahwa mungkin sekali ia akan mendapatkan pekerjaan di pemerintahan dan tidak akan pernah memproduksi satu pun film yang “terlalu mahal untuk dibuat di Indonesia”.

Komentar: Prijono adalah seorang tokoh pemimpin sebagian kecil Murba sayap PKI yang tidak setuju dengan sayap Saleh-Malik-Sukarni beberapa tahun lalu. Ia tidak pernah turut ambil bagian dalam kegagalan gerakan BPS yang dimulai oleh Saleh, Malik, Sukarni, dan pengkhianat PKI-PNI Sajuti Melik pada akhir 1964. Setelah BPS dilarang, Prijono diserang oleh kalangan pers PNI karena keterkaitannya dengan Murba. Pada suatu saat ia merasa harus menulis dan menerbitkan surat pribadi ditujukan kepada Sukarno yang menyatakan penolakannya terhadap keikutsertaannya dalam “Gerakan Membunuh Sukarnoisme dan Sukarno”, dengan menawarkan untuk membunuh dirinya sendiri jika Presiden menghendaki. Sayangnya Presiden tidak menghendaki, dan Prijono turut ambil bagian dalam usaha setengah hati yang gagal untuk menghidupkan kembali Murba di bawah sayap kepemimpinannya pada awal dan pertengahan tahun 1965.

Prijono kemudian diserang oleh pers PKI bulan Agustus 1965 karena telah melakukan diskriminasi melawan Pemuda Rakjat dalam rombongan kebudayaan yang dipimpinnya ke Korea Utara dan Cina pada waktu itu. Pendiskriminasian ini benar, tetapi sebenarnya merupakan bagian dari rencana Saleh beberapa bulan sebelumnya. Rombongan tersebut sebenarnya telah dijadwalkan untuk mengadakan pertunjukan di *New York World's Fair* dan telah dipilih oleh Saleh (yang menggantikan Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Ketua Komite Indonesian World's Fair). Ketika Sukarno membatalkan keikutsertaan Indonesia dalam *New York World's Fair*, rombongan dikirim bersama Prijono.

Prijono ditunjuk sebagai Menteri Koordinator bidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam kabinet “pancingan” yang diumumkan oleh Sukarno pada tanggal 21 Februari 1966. Bersama dengan menteri-menteri lainnya ia diterbangkan dengan helikopter untuk dilantik pada

tanggal 24 Februari. Pada awal masa-masa keberhasilan Surat Perintah 11 Maret, ia “ditahan” oleh pelajar dan mahasiswa KAMI/KAPPI, tetapi dibebaskan oleh tentara. Minggu-minggu terakhir ini ia sekali lagi berusaha untuk merehabilitasi Murba sayap kiri, saat ini dengan berkolusi dengan Presiden Sukarno, yang (sebagaimana diketahui) akhir-akhir ini sedang mengais-ngais sana-sini untuk mencari dukungan. Telegram A-745 melaporkan usaha-usaha tersebut.

Ini ada sesuatu yang lain⁶ tetapi penting untuk disebut, karena menunjukkan sekali lagi betapa peka dan erat terkaitnya politisi dan politik di Indonesia dengan pertunjukan wayang. Lima menit sebelum pertunjukan diumumkan bahwa lakon yang sebenarnya mau dimainkan terpaksa dibatalkan karena “izin polisi telah ditarik atas pertimbangan situasi akhir-akhir ini”. Lakon⁶ yang sebenarnya dipilih dalam pertunjukan wayang tersebut adalah “Kresna Duta” yang sangat terkenal, yang menceritakan tentang usaha diplomatik terakhir Pandawa dalam rangka mencapai penyelesaian secara damai dalam pembagian Kerajaan Ngastina dengan Raja Sujudana dari pihak Kurawa. Sujudana siap menerima Kresna dengan penuh⁶ kepercayaan, tetapi pada saat-saat terakhir berhasil dipengaruhi oleh Perdana Menteri Sengkuni dan Menteri Luar Negeri Durna untuk menyerang secara tiba-tiba dan membunuh Kresna setelah putaran pertama pembicaraan tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi Kresna yang pintar dan cerdik melarikan diri dan dengan sangat marah kembali ke lingkungan Pandawa untuk membantu mereka meren⁶akan kampanye Baratayudha Jayabinangun, perang besar-besaran di mana semua Kurawa terbunuh.

Menurut Prijono, lakon ini tidak dipertunjukkan karena dapat mengundang berbagai macam kritikan terhadap perjalanan Adam Malik ke Bangkok untuk menyelesaikan perselisihan dengan Malaysia. Tetapi hal ini hanya pendapat Prijono pribadi, mungkin berdasarkan tidak adanya lagi informasi tambahan dari agen yang melaporkan. Sebagai ganti dari “Kresna Duta”, penonton menghabiskan malam itu (pertunjukan wayang berlangsung sampai pukul 05:30⁶) menonton “Lahirnya Wisanggeni” (anak pertama Arjuna), yang secara politis identik dengan “kelahiran” gerakan pelajar dan mahasiswa KAMI dan KAPPI dan dengan “Generasi ‘66” umumnya. Lakon ini kemudian secara politis menjadi “tren” dan sering dimainkan.

Green

7. Kabinet Baru, Kemenangan Bagi Soeharto

Sekali lagi, diumumkankannya Kabinet baru pada tanggal 25 Juli dan pelantikannya pada tanggal 28 Juli merupakan berita baik yang disambut

dengan senang hati oleh AS. Sebagaimana tercermin dalam dokumen sebelumnya, disingkirkannya para pendukung Bung Karno dan naiknya orang-orang yang pro-Soeharto dipandang sebagai kemenangan bagi Jenderal Soeharto dengan segala kepentingannya. Apalagi ketika diketahui bahwa keinginan Bung Karno untuk ikut menyusun daftar para menteri (bahkan untuk turut menentukan pejabat-pejabat di bawah level menteri) sama sekali ditolak.

Amerika sangat berharap bahwa Kabinet yang baru ini akan membalik kebijakan-kebijakan Presiden Sukarno, baik dalam bidang politik maupun bidang ekonomi. Dalam kaitan dengan bidang ekonomi Amerika menduga bahwa kemungkinan besar pemerintahan yang baru akan memperbanyak perjalanan ke luar negeri guna mendapatkan pinjaman asing. Dalam dokumen CIA tertanggal 30 Juli 1966 di bawah ini semua itu terlihat jelas.

KABINET BARU INDONESIA¹¹

(Memorandum Intelijen, Direktorat Intelijen CIA¹²)

Rangkuman

Kabinet baru Indonesia yang dilantik pada tanggal 28 Juli adalah sebuah kemenangan lagi untuk panglima militer Jenderal Soeharto atas Presiden Sukarno. Walaupun Sukarno sangat berkeberatan, Soeharto menjadi ketua Kabinet tersebut, dan dua anggota Triumvirat yang lain yang memimpin pemerintahan yang lalu—Adam Malik dan Sultan Yogyakarta—juga dipertahankan. Kabinet menunjukkan kompromi antara militer dan partai politik, dan—pada tingkat tertentu—dengan Sukarno. Kabinet ini mungkin lemah dari sisi ekonomi, tetapi lebih baik daripada pemerintahan Indonesia beberapa tahun terakhir.

Triumvirat yang ada sekarang mungkin akan melanjutkan tujuan-tujuan yang mau dicapai oleh Kabinet sebelumnya. Misalnya perang melawan komunisme, stabilisasi ekonomi, dan—melalui kebijakan luar negeri “bebas-aktif”—membangun kembali hubungan dengan negara-negara Barat dan mencari bantuan ekonomi dari negara Barat maupun negara-negara blok Komunis.

Dengan dikendalikannya situasi politik dalam negeri sekarang ini oleh militer, kalangan sipil non-komunis berharap bahwa Kabinet ini akan mampu mengambil langkah-langkah yang efisien guna mengatasi krisis ekonomi Indonesia yang parah. Tampaknya, itu pula yang menjadi

harapan pemerintah. Walaupun tampaknya keadaan ekonomi akan memburuk sebelum bisa sungguh-sungguh membaik, Indonesia mungkin masih akan bisa bertahan, setidaknya untuk beberapa bulan mendatang, dengan menggunakan kredit luar negeri terbatas dan dengan memanipulasi dana-dana yang ada, khususnya dalam instansi-instansi pemerintah. Harapan mereka adalah bahwa negara-negara kreditor dapat meringankan jadwal pembayaran terhadap utang luar negeri Indonesia yang begitu besar dan akan segera diadakan pembicaraan tentang bantuan ekonomi luar negeri yang berskala besar.

1. Kabinet baru Indonesia yang beranggotakan 27 orang Menteri dan dilantik pada 28 Juli, seperti yang sudah diduga, adalah kemenangan bagi Jenderal Soeharto dalam usahanya mengurangi kekuasaan dan wibawa presiden Sukarno. Tidak hanya menjadi pemimpin Kabinet, Soeharto juga mempertahankan dua anggota Triumvirat dari pemerintahan sebelumnya, yakni Adam Malik dan Sultan ⁸³Yogyakarta. Walaupun ditentang oleh Sukarno, Triumvirat ini adalah sebuah tim yang dapat bekerja sama dengan baik dan merupakan kombinasi unik yang dapat diterima oleh militer maupun kalangan sipil Indonesia.

Presidium

2. Soeharto adalah ketua merangkap anggota Kabinet “presidium” dari lima “menteri pertama”. Setiap menteri pertama membawahi sebuah kelompok portofolio. Soeharto membawahi sektor pertahanan dan keamanan Kabinet, dan, sebagai seorang panglima militer, ia memegang portofolio militer. Adam Malik—selain Soeharto mungkin dia adalah orang yang paling cakap dalam Kabinet ini—membawahi sektor politik dan juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Sultan Yogyakarta tidak membawahi portofolio, tetapi sebagai menteri pertama urusan ekonomi dan keuangan, dia akan membawahi enam kementerian. Dua menteri pertama yang lain tidak memegang portofolio dan mewakili dua partai politik terbesar di Indonesia: Chalid mewakili Nahdlatul Ulama (NU) dan Sanusi mewakili Partai Nasional (PNI). Chalid membawahi kementerian yang berurusan dengan masalah kesejahteraan rakyat. Sanusi akan membawahi kementerian yang berkaitan dengan industri dan pembangunan.

Triumvirat

3. Triumvirat tetap merupakan inti dari Kabinet. Keberadaan Soeharto dan Sultan, keduanya orang Jawa, memberi kekuatan tersendiri pada pemerintahan yang baru: Soeharto memberi dimensi kekuatan militer, sedang Sultan menyumbangkan sisi seorang aristokrat yang berpendidikan tinggi dan terbuka. Keduanya juga membantu memahami dengan baik kompleksitas kehidupan orang Jawa. Adam Malik, orang Sumatra, mewakili wilayah luar Jawa dan membawa ke dalam Kabinet semangat keberanian dan negarawan yang cerdas.

4. Masing-masing anggota Triumvirat memiliki akar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Malik, yang aktif berpolitik sejak sebelum Perang Dunia II, memiliki catatan panjang perjuangan yang tak kunjung henti. Soeharto mempunyai catatan yang bagus dalam perjuangan militer melawan Belanda, dan ia juga berperan dalam menumpas pemberontakan komunis tahun 1948 di Madiun, Jawa Timur. Sultan mendukung revolusi kemerdekaan. Dialah yang, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Luar Negeri, pada tahun 1949 menerima penyerahan kedaulatan dari Belanda di Jakarta.

5. Soeharto dan Sultan tidak pernah bergabung dengan partai politik, tetapi keduanya condong ke nasionalisme sekuler. Malik hampir tidak mempunyai pengikut yang terorganisir—fakta yang membuat dia disukai oleh Soeharto dan dalam waktu yang sama membebaskannya dari urusan golongan yang setia padanya. Malik berorientasi pada sosialis pragmatis dan, dalam kapasitasnya sebagai pemimpin urusan politik, saat ini mengusulkan gerakan yang dinamakan “Sosialisme Pancasila”. Partai-partai muslim tidak menyukai Malik, karena takut bahwa keberadaannya dalam Kabinet presidium akan membahayakan masa depan politik mereka. Ketiga Triumvirat adalah muslim, dan kemungkinan Malik adalah yang paling taat.

Komposisi Kabinet

6. Komposisi Kabinet merupakan hasil kompromi antara militer, partai-partai politik, dan Sukarno. Tetapi, satu-satunya akomodasi yang diberikan oleh pihak militer kepada Sukarno adalah penunjukan Chalid, ketua NU yang ... [*gambaran negatif—Pen*]. Kabinet tersebut cukup mengecewakan bagi sejumlah orang Indonesia, termasuk Adam Malik, yang mengharapkan bahwa Kabinet itu terdiri dari teknokrat yang andal. Para pengkritik menyatakan bahwa tiadanya keahlian dalam sejumlah posisi Kabinet merupakan akibat dari pemberian konsesi kepada Sukarno.

7. Dalam Kabinet ini partai-partai politik memainkan peran sekunder setelah militer, namun mereka memiliki posisi yang lebih kuat dalam pemerintahan daripada yang mereka miliki selama beberapa tahun yang terakhir ini. Lima partai memegang delapan portofolio. NU, PNI, Partai Katolik yang kecil masing-masing memegang dua; Partai Kristen (Protestan) dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) yang pro-militer masing-masing memiliki satu portofolio.

8. Soeharto mengklaim bahwa partisipasi politik dalam pemerintahan didasarkan pada unsur-unsur utama yang ada dalam masyarakat Indonesia. Soeharto menggolongkan unsur-unsur itu menjadi tiga, yakni unsur nasionalis, unsur religius, dan unsur “Sosial Pancasila”. Dengan begitu ia mempertahankan gagasan NASAKOM-nya Sukarno dengan mengubahnya sedikit menjadi NASASOS. (NASAKOM adalah akronim dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme; NASASOS

adalah akronim yang sama dengan mengganti Komunisme menjadi Sosialisme).

73

9. Perwira militer—termasuk wakil dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian—memiliki 12 portofolio. Enam dari itu—urusan militer, urusan veteran, urusan dalam negeri, perdagangan, pertanian, dan industri dasar—dipegang oleh perwira militer.

10. Sektor ekonomi dan keuangan di bawah kepemimpinan Sultan Yogyakarta tampaknya menjadi titik terlemah dalam Kabinet dan menjadi target utama keluhan Malik. Malik khawatir bahwa orang-orang yang diberi jabatan dalam portofolio ekonomi—beberapa dari militer dan beberapa dari mereka yang disebut teknokrat—tidak kompeten untuk tugas-tugas mereka. Sumber-sumber lain juga menyangsikan kompetensi teknis dari beberapa menteri dan menyatakan bahwa beberapa dari mereka itu dikenal oportunistis dan korup. Sultan sendiri memberi warna integritas dan wibawa ke dalam Kabinet tetapi ia tidak memiliki latar belakang bidang ekonomi. Meskipun demikian, terdapat kemungkinan bahwa banyak ahli ekonomi yang terlatih akan mengisi posisi-posisi terkemuka di bawah level menteri. Soeharto menyampaikan laporan yang bisa dipercaya bahwa ia telah menolak permintaan Sukarno untuk ikut terlibat dalam pemilihan para pejabat di bawah level menteri itu.

11. Dengan demikian ekonomi Indonesia mau tak mau akan menjadi masalah politik, mengingat bahwa lambatnya rehabilitasi ekonomi akan mengecewakan banyak elemen di Indonesia. Dalam situasi demikian mungkin wibawa Sultan akan memiliki nilai politik yang penting dalam rangka mencari kepercayaan masyarakat. Walaupun pengikutsertaan menteri-menteri yang tidak kompeten di bidangnya mungkin dilakukan sebagai akibat konsesi dengan Sukarno, namun dapat saja hal itu menunjukkan adanya keputusan dari Soeharto untuk mencari cara-cara yang tidak biasa untuk sekadar membantu supaya pemerintahan masih bisa berlangsung. Beberapa menteri dilaporkan telah membuktikan diri mampu mengoperasikan dana untuk pemerintah selama periode yang kacau balau setelah percobaan kudeta Oktober lalu, dan Soeharto berharap mereka dapat mengulangi prestasi tersebut di masa depan.

Kebijakan Kabinet

12. Badan pembuat kebijakan tertinggi negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), pada bulan Juni merumuskan empat program besar bagi pemerintah yang akan datang. Program tersebut, yang kebijakannya mengikuti kebijakan yang sudah dibuat Kabinet sebelumnya, mendesak untuk segera diatasinya masalah ekonomi, untuk tetap dipertahankannya politik bebas aktif, dan untuk segera diadakan pemilihan umum. Program tersebut juga mengulangi

kata-kata klise untuk memerangi “kolonialisme, imperialisme, dan neokolonialisme”.

13. Para anggota Triumvirat tampaknya akan mempertahankan kebijakan mereka. Di dalam negeri, Soeharto telah mulai bergerak untuk mengembalikan pemerintahan konstitusional (meskipun tidak sepenuhnya), mempertahankan kontrol politik, mengakomodasi—tapi tetap di dalam koridor kebijakan militer—permintaan kelompok-kelompok non-komunis, mengurangi pengaruh dan wibawa Sukarno secara bertahap, serta melanjutkan upaya untuk menghabisi kelompok komunis. Pemilihan umum akan diadakan sebelum Juli 1968. Terdapat indikasi bahwa Pemilu baru bisa diadakan paling cepat akhir 1967.

14. Dalam bidang kebijakan luar negeri, Indonesia akan membina kembali hubungan dekat dengan negara-negara Barat dan meninggalkan kebijakan Sukarno yang pro-Peking. Menlu Malik berharap Indonesia bisa kembali menjadi anggota PBB September mendatang. Indonesia mengurangi kehadiran diplomatiknya di Afrika, dan setidaknya untuk saat ini menunjukkan berkurangnya minat untuk mempertahankan ambisi Sukarno menjadi pemimpin negara-negara Asia-Afrika.

15. Kabinet baru mungkin akan meneruskan langkah-langkah yang telah ditempuh untuk mengakhiri Konfrontasi melawan Malaysia dan Singapura yang telah berlangsung selama tiga tahun. Perundingan dengan Malaysia akhir Mei lalu telah menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri pertikaian, meskipun sejauh ini Jakarta masih menolak untuk menandatangani kesepakatan itu, dengan alasan situasi politik dalam negeri Indonesia belum memungkinkan. Jakarta mengakui pemerintah Singapura awal Juni dan telah mengirim misi untuk membicarakan dimulainya kembali hubungan perdagangan. Terdapat indikasi bahwa Indonesia menginginkan keuntungan ekonomi dan diplomatik yang akan terjadi dengan berakhirnya Konfrontasi, tetapi akan terus mendukung upaya penggulingan kekuasaan internal di wilayah Sabah dan Sarawak dengan harapan pada suatu saat dapat memisahkan Kalimantan Utara dari Malaysia.

16. Di bidang ekonomi Soeharto dan rekan-rekannya telah mengurangi pengeluaran domestik yang tidak perlu dan telah mengupayakan pinjaman terbatas dari beberapa negara Barat. Indonesia telah mendaftar kembali ke Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia. Indonesia sudah setuju bahwa setiap upaya penjadwalan kembali pembayaran utang Indonesia akan diputuskan dengan dasar multilateral. Pertemuan untuk membicarakan masalah utang tersebut dijadwalkan akan diadakan di Tokyo pada pertengahan September, dan sembilan negara atau lebih akan turut ambil bagian—Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Belanda, Jerman, Italia, Prancis, Australia, dan Selandia Baru, dan mungkin Kanada dan Pakistan.

17. Soeharto dan orang-orang di sekitarnya, baik militer maupun sipil, mendasarkan harapan akan adanya kemajuan ekonomi pada suntikan bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri itu diharapkan akan menjadi pemacu stabilisasi dan perkembangan ekonomi untuk jangka panjang. Sultan Yogyakarta berencana untuk mengunjungi beberapa negara Eropa Barat pada akhir Agustus guna membicarakan prospek bantuan. Pada pertengahan September mungkin ia akan ikut dalam pertemuan para kreditor untuk Indonesia di Tokyo. Pada bulan September itu pula ia berencana mengunjungi Amerika Serikat. Menlu Adam Malik telah merencanakan kunjungan ke Uni Soviet untuk membicarakan penjadwalan kembali pembayaran utang (Uni Soviet adalah kreditor tunggal terbesar Indonesia) dan menjajaki kemungkinan bantuan ekonomi dari Soviet. Belum ada tanggal yang jelas.

Tambahan

[Satu alinea dirahasiakan.]

Catatan akhir:

- 1 Asvi Warman Adam, *Sinar Harapan*, Sabtu 11 Maret 2006.
- 2 Majalah *Time*, edisi 15 Juli 1966.
- 3 Memorandum dari Donald W. Ropa (Staff National Security Council) kepada Rostow (Asisten Khusus Presiden) "Memo untuk Mr. Rostow", "Posisi Kita di Indonesia", 9 Juli 1966. Status: Rahasia dan Pribadi. Foreign Relations, 1964–1968, Volume XXVI (Washington: Government Printing Office, 2001), 443–445.
- 4 Pada tahun 2000 desakan untuk mencabut TAP MPRS no. XXV/1966 ini sempat mengemuka sebagai kelanjutan atas usulan Presiden Abdurrachman Wahid waktu itu agar TAP tersebut dicabut karena terkait dengan masalah Hak-hak Asasi Manusia. Lihat *Kompas*, 25 April 2000.
- 5 CIA, Memorandum Intelijen **5** *Political Forces in Indonesia*, 23 Juli 1966. Status: Rahasia. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, *National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia*. #115.
- 6 Memorandum ini disiapkan oleh Office of Current Intelligence dan Office of Central Reference/Biographic Register, dan telah dikoordinasi dengan Office of National Estimates, Office of Research **6** *and Reports*, serta Deputy Director of Plans.
- 7 Telegram dari Kedubes Amerika Serikat (Jakarta) ke Kementerian Luar Negeri (Washington), "Komentar tenta **5** Kabinet yang Baru", 25 Juli 1966. Status: Konfidensial. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, *National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia*. #113a.
- 8 Laporan dari Thomas L. Hughes (INR/Intelligence and Research) untuk Menteri Luar Negeri AS, "Kabinet Indonesia yang Baru sebagai kekalahan bagi Sukarno", 25 Juli 1966 **5** Status: Rahasia/Tidak Untuk Disebarkan ke Negara Lain. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, *National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia*. #1.

- 9 ⁶ Memorandum dari D.W. Ropa untuk W.W. Rostow, "Pentingnya Mistisisme Jawa dalam Politik Indonesia Sekara ⁵", 29 Juli 1966. Status: Untuk Penggunaan Resmi Terbatas. Sumber: Lyndon B. ⁶ Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #112.
- 10 Telegram dari Kedubes Amerika (Jakarta) untuk Departem ⁵ Luar Negeri (Washington), 20 Juli 1966. Status: Rahasia. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #112a. ⁵
- 11 Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #111a. Secret.
- 12 Memorandum ini disiapkan oleh Office of Current Intelligence dan Office of Central Reference/ Biographic Register, dan telah dikoordinasi dengan Office of National Estimates, Office of Research and Reports, serta Deputy Director of Plans.

Agustus 1966: Supersemar dan Berakhirnya Konfrontasi

1. Pengantar

ADA DUA hal yang mendominasi perhatian Washington berkaitan dengan Indonesia pada awal bulan Agustus 1966. Yang pertama adalah masalah bagaimana membantu pemulihan ekonomi Indonesia, dan yang kedua menyangkut masalah sejauh mana keberhasilan upaya de-Sukarnoisasi sebagaimana telah kita singgung di bab terdahulu. Terhadap yang pertama jawaban Amerika adalah bahwa pemulihan ekonomi itu akan bisa terjadi kalau terjalin kerja sama multilateral negara-negara blok Barat (termasuk Amerika) untuk membantu Indonesia. Dalam hal ini tampaknya Amerika masih ingin mengambil posisi yang tidak terlalu mencolok. Terhadap masalah kedua dikatakan bahwa kemungkinan bangkitnya kembali Sukarnoisme memang masih ada, namun itu kemungkinan yang amat kecil. Menurut Menlu AS Dean Rusk, kalau sampai Sukarnoisme bangkit kembali akan ada banyak kalangan militer yang terkena imbasnya atau bahkan terancam hidupnya. Oleh karena itu menurutnya militer akan memastikan bahwa Sukarnoisme tidak akan pernah bangkit lagi.

Pada paruh kedua bulan Agustus itu perhatian Amerika terhadap Indonesia bergeser ke masalah hubungan Indonesia-Malaysia, menyusul

diakhirinya Konfrontasi antara kedua negara secara resmi pada tanggal 11 Agustus 1966. Semboyan “Ganyang Malaysia” yang dulu amat populer pada masa Konfrontasi (sebagai salah satu bentuk perlawanan terhadap neo-kolonialisme dan neo-imperialisme) kini akan segera berlalu. Pada satu sisi Amerika senang bahwa Konfrontasi berakhir. Bagi Amerika berakhirnya Konfrontasi (yang diketahui umum sebagai salah satu “proyek favorit” Bung Karno) berarti tanda yang jelas bagi suksesnya Supersemar dan makin minimnya pengaruh Bung Karno beserta para pendukung kiri-nya. Namun demikian pada sisi lain Amerika juga sadar bahwa dengan berakhirnya Konfrontasi akan ada masalah-masalah lain yang mungkin timbul, dari masalah merosotnya pengaruh militer Inggris di bekas wilayah jajahannya di Asia Tenggara hingga masalah akan terus tingginya ambisi Indonesia untuk mendominasi wilayah-wilayah di sekitarnya. Amerika membutuhkan sikap tertentu guna mengantisipasi kemungkinan munculnya masalah-masalah baru tersebut.

2. Mencegah Bangkitnya Kembali Sukarnoisme

Pada tanggal 4 Agustus 1966 di Washington berlangsung rapat National Security Council (NSC) guna membahas perkembangan terakhir di Indonesia. Rapat tersebut dihadiri oleh Presiden Johnson, Menteri Luar Negeri (Menlu) Dean Rusk, serta sejumlah pejabat lain dari lingkungan Gedung Putih, Departemen Luar Negeri dan NSC. Sebagaimana dapat dilihat dari catatan rapat tersebut oleh W.J. Jordan di bawah ini, pembicaraan berkisar pada masalah pentingnya memberikan bantuan ekonomi kepada Indonesia untuk bisa bangkit kembali, dan pada bagaimana bantuan itu harus disampaikan. Para peserta rapat menekankan perlunya kerja sama multilateral, artinya bekerja sama dengan banyak negara lain, dalam upaya mengumpulkan dan menyalurkan dana untuk Indonesia.

Dalam rapat itu Presiden Johnson sempat bertanya mengenai seberapa besar kemungkinan Bung Karno dan kawan-kawan bangkit dan berkuasa kembali. Menlu Rusk mengatakan bahwa kalau sampai Bung Karno bangkit kembali banyak orang dari kalangan militer akan terancam hidupnya. Oleh

karena itu menurutnya militer akan berusaha mati-matian untuk mencegah bangkitnya kembali Sukarnoisme.

NATIONAL SECURITY COUNCIL (NSC) TENTANG INDONESIA¹

Presiden [Johnson] membuka rapat dengan permintaan agar para peserta rapat memberi perhatian khusus pada perkembangan terakhir politik di Indonesia yang sedang mengalami perubahan dramatis serta pada orientasi politik negara tersebut. Dia sejenak mengenang bagaimana baru setahun yang lalu NSC (National Security Council) mengadakan rapat dan memutuskan untuk memotong hampir semua program bantuan AS untuk Indonesia, karena waktu Indonesia itu sedang bergerak dengan cepat untuk menjadi negara komunis.

Dia meminta Menteri Luar Negeri Dean Rusk dan Tn. Helms untuk melaporkan perkembangan terakhir di Indonesia.

Menlu Rusk mengatakan bahwa dalam perjalanannya baru-baru ini ke Asia, ia menyaksikan banyak sekali tanda akan adanya suasana baru dan rasa percaya diri yang baru pula di Asia. Menurut dia perubahan suasana di Asia disebabkan oleh dua faktor:

- (1) Komitmen kita untuk kokoh berdiri di Vietnam dan untuk membantu mempertahankan keamanan fisik wilayah itu.
- (2) Pembalikan total politik Indonesia.

Sebuah pertanyaan penting adalah apakah perubahan yang terjadi di Indonesia itu akan langgeng. Menurutnya, dengan melihat berbagai faktor yang ada, tampaknya perubahan itu akan langgeng. Memang ada kemungkinan kembalinya Sukarnoisme. Ada pula kemungkinan pertentangan internal di kalangan Angkatan Bersenjata yang mengarah pada konflik terbuka. Namun menurut Menlu kemungkinan-kemungkinan itu hanya kecil.

Berkaitan dengan masalah Konfrontasi dengan Malaysia, kemungkinan untuk segera berakhir sangat besar.

Masalah utama Indonesia sekarang ini menurutnya adalah masalah ekonomi. Ia menggarisbawahi masalah utang luar negeri dan perlunya penjadwalan kembali pembayaran pinjaman asing. Ia menekankan besarnya utang Indonesia pada Uni Soviet dan kita perlu hati-hati supaya jangan sampai kita membantu Indonesia, namun bantuan itu digunakan untuk membayar utang ke Uni Soviet.

Menurut perkiraannya, jumlah bantuan yang dibutuhkan Indonesia dari kita adalah US\$50 juta untuk tahun pertama.

Ia menekankan perlunya kerja sama multilateral dalam menyediakan bantuan untuk Indonesia. Menurut dia dalam hal ini peran Jepang akan sangat penting.

Mengenai kebijakan AS, Menlu Rusk mengatakan bahwa selama ini kita dengan sengaja bersikap hati-hati terhadap Indonesia. Hal ini dilakukan sesuai dengan permintaan Indonesia agar kita tidak memainkan peran yang terlalu besar atau mencolok. Mereka dan kita sepakat, reaksi AS yang terlalu berlebihan terhadap apa yang berlangsung secara internal di Indonesia sekarang ini dapat menjadi “ciuman maut” yang justru akan mematikan pemerintahan yang baru.

Dalam jangka pendek, bantuan kita akan disampaikan terutama melalui program PL 480. Melalui program itu kita telah menjual beras dan kapas kepada Indonesia.

Ia mengatakan, kita sedang mencoba memecahkan masalah Amandemen Hickenlooper, yang menuntut bahwa bantuan kepada Indonesia itu harus sesuai dengan kepentingan nasional kita. Kita akan mengusahakan Ketetapan Presiden (*Presidential Determination*) untuk itu. Untuk itu pula kita akan menunggu langkah-langkah yang ditempuh oleh pihak Indonesia.

Ia mengatakan pentingnya mengupayakan agar Indonesia dan IMF bekerja sama guna menyusun rencana pembangunan yang komprehensif bagi Indonesia.

Mau tidak mau nantinya kita harus mengambil keputusan untuk membedakan apa yang dimaui oleh Indonesia dan bantuan ekonomi macam apa yang menurut kita akan bisa mereka gunakan secara efektif.

Menlu Rusk meringkas laporannya dengan mengatakan:

- Masalah Indonesia itu adalah masalah yang vital;
- Kita harus siap untuk bergerak secara cepat dan efektif;
- Kita harus mencoba mempercepat pendekatan multilateral atas masalah penjadwalan kembali pembayaran utang dan masalah bantuan kepada Indonesia.

Menlu mengatakan, ia merasa bahwa secara umum Kongres akan mendukung langkah-langkah yang akan kita tempuh.

Tn. Helms memulai pembicaraannya dengan berkata bahwa ia setuju dengan uraian permasalahan yang baru saja disampaikan oleh Menlu Rusk.

Berkaitan dengan masalah Konfrontasi, [*kurang dari satu baris dirahasiakan*] Menteri Luar Negeri Malaysia Razak akan berkunjung ke Jakarta pada akhir bulan Agustus. Ia akan mengadakan persetujuan dengan Indonesia bahwa:

(1) Konfrontasi harus diakhiri.

(2) Hubungan diplomatik penuh harus dijalin kembali segera setelah ada kepastian bahwa Sabah dan Sarawak memang ingin bergabung dengan Malaysia sebagai keluarga.

Sehubungan dengan pemerintahan yang ada di Indonesia sekarang ini, Tn. Helms mengatakan bahwa Kabinet yang ada ini adalah Kabinet yang terbaik selama beberapa tahun terakhir ini. Ia mengakui Kabinet ini agak lemah dari sisi ekonomi. Namun, ia tegaskan, Kabinet ini amat mendukung Triumvirat dan sangat memperkuat posisi Triumvirat itu. Ia mengatakan bahwa ketiga anggota Triumvirat (Soeharto, Adam Malik, dan Sultan Yogyakarta) semuanya adalah orang-orang baik dan berkat mereka pemerintah sekarang ini memiliki kewibawaan dan stabilitas.

Ia menggarisbawahi adanya banyak masalah ekonomi, misalnya bahwa 55% dari sistem transportasi Indonesia tidak jalan.

Presiden Johnson mengatakan bahwa kita sebaiknya mengikuti garis kebijakan yang telah diutarakan oleh Menlu Rusk. Ia menekankan pentingnya kita terus mengusahakan agar Kongres bisa mengikuti perkembangan yang terjadi di Indonesia berikut tanggapan dan pemikiran kita mengenai perkembangan itu. Ia lalu bertanya kepada Wakil Presiden Humphrey, menanyakan bagaimana pendapatnya.

Wapres Humphrey setuju bahwa kita harus mengusahakan supaya Kongres bisa selalu mengikuti perkembangan yang terjadi di Indonesia. Ia mengatakan bahwa di Capitol Hill sekarang ini suasananya amat kondusif. Menurutnya banyak anggota Kongres merasa bahwa apa yang terjadi di Indonesia itu merupakan buah dari komitmen kita di Vietnam.

Ia menekankan betapa pentingnya usaha kita dalam mendukung negara-negara lain guna membantu Indonesia dalam membangun kembali ekonominya. Ia katakan bahwa ia telah bicara dengan Menteri Miki dari Jepang mengenai hal ini dan baru-baru ini Jepang telah memberikan pinjaman kepada Indonesia sebesar US\$30 juta.

Peran IMF [International Monetary Fund] juga dibicarakan. Dibahas pula masalah utang Indonesia kepada IMF sebesar US\$47 juta, suatu masalah yang harus segera dicari jalan keluarnya.

Presiden Johnson bertanya kepada Tn. Rostow, apa pendapatnya.

Tn. Rostow mengatakan ada dua hal yang patut dicatat:

- (1) Indonesia dapat menjadi titik tolak bagi terbangunnya suatu pola kerja sama multilateral yang baru di Asia;
- (2) Apa yang terjadi sekarang ini membuka kesempatan untuk mengaitkan bantuan mulilateral dengan Asian Development Bank (ADB) yang baru saja didirikan.

Kasus bantuan untuk Indonesia dapat dijadikan proyek perintis bagi pembentukan kerja sama semacam CIAP di Amerika Latin, tapi untuk Asia. Negara-negara Asia yang membutuhkan bantuan seharusnya pergi ke Manila, dan bukan ke Paris. Jika demikian, sebuah pola yang baru dan menarik akan lahir dan nanti harus didorong.

Presiden bertanya, apakah itu tidak mirip dengan rekomendasi untuk Afrika sebagaimana yang disampaikan dalam laporan Korry.²

Menlu Rusk mengatakan bahwa [Bank] Pembangunan Afrika agak lemah, tapi Bank Pembangunan Asia akan sungguh-sungguh kuat.

Presiden bertanya berapa kira-kira besarnya bantuan yang mau diberikan untuk Indonesia.

Tn. McNaughton mengatakan bahwa jumlah bantuan militer tidaklah besar—hanya kurang dari US\$10 juta.

Menlu Rusk memperkirakan bahwa jumlah keseluruhan bantuan—termasuk PL 480 dan kerja sama bantuan multilateral—yang dibutuhkan akan kurang dari US\$100 juta.

Sempat dibahas pula secara singkat tentang besarnya bantuan untuk Vietnam.

Tn. Gaud mengatakan bahwa berkaitan dengan soal Vietnam masalah utamanya bukan masalah uang, melainkan masalah prioritas serta kemampuan rakyat Vietnam untuk melaksanakannya.

Tentang Indonesia, Tn. Gaud menegaskan bahwa tekanan pada kerja sama multilateral memang sangat penting. Ia katakan bahwa kasus Indonesia dapat menjadi sumber jawaban yang tepat bagi pertanyaan Senator Fulbright.

Dia juga mengingatkan bahwa persyaratan bagi bantuan tambahan mungkin lebih sederhana daripada yang kita bayangkan. Ia katakan, bantuan untuk utang Indonesia yang besar itu akan menuntut alokasi dana dalam jumlah besar menggantikan dana untuk bantuan asing. Ia juga mengatakan bahwa dengan bantuan PL 480 dari kita, pinjaman dari Jepang dan sumber-sumber lain, ada sekitar US\$80 juta yang telah disalurkan ke Indonesia dalam beberapa bulan terakhir ini sebagai bantuan jangka pendek.

Presiden Johnson bertanya, seberapa besar *sih* kemungkinan bangkitnya kembali Sukarno.

Tn. Helms menjawab, pemerintahan yang baru sekarang ini akan mampu mengontrol Sukarno.

Menlu Rusk menambahkan, Angkatan Darat dan yang lain-lain sadar bahwa hidup mereka akan terancam jika Sukarno, Soebandrio dan kawan-kawan sampai kembali berkuasa. Oleh karena itu mereka

punya kepentingan pribadi untuk mencegah agar Sukarnoisme tidak bisa bangkit lagi.

Rapat diakhiri dengan komentar dari Menlu Rusk bahwa Laporan Korry tentang Afrika secara prinsip merupakan salah satu laporan yang terbaik yang pernah dia terima.

H.W. Jorden

3. Pemerintahan Baru dan Berakhirnya Konfrontasi

Menurut pengamatan CIA, berakhirnya Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia tidak berarti berakhirnya semua masalah yang terkait dengan kedua negara. Ada masalah-masalah baru yang mungkin timbul. Misalnya menguatnya rasa kekeluargaan sebagai sesama rumpun Melayu antara penduduk kedua negara, menguatnya sentimen anti-Cina, meningkatnya semangat pemberontakan minoritas Cina di Kalimantan Utara, serta merosotnya pengaruh militer Inggris di Malaysia. Akhirnya dokumen CIA tertanggal 16 Agustus 1966 ini memprediksi bahwa meskipun Konfrontasi telah berakhir, dan Presiden Sukarno telah makin tersingkir, namun ambisi Indonesia untuk menjadi kekuatan yang berpengaruh di Asia Tenggara tak akan pernah redup.

BERAKHIRNYA KONFRONTASI DAN DAMPAKNYA³

Office of National Estimates, Central Intelligence Agency

BEBERAPA KESIMPULAN

A. Berakhirnya Konfrontasi akan menghapuskan ancaman perang terbuka antara Indonesia dengan negara-negara Persemakmuran, dan akan memungkinkan Indonesia memfokuskan perhatian yang sangat dibutuhkan pada berbagai urusan dalam negeri, khususnya bidang ekonomi.

Akan tetapi, berakhirnya Konfrontasi juga akan membawa kepada meningkatnya pengaruh politik Indonesia atas Malaysia serta menyusutnya peranan militer dan politik Inggris secara bertahap. Perkembangan tersebut akan cenderung mengubah orientasi pro-Barat Kuala Lumpur, akan membuat penduduk keturunan Melayu bersikap lebih keras terhadap warga keturunan Cina, dan akan membuat warga

keturunan Cina menjadi tidak akomodatif lagi terhadap dominasi politik Malaysia.

B. Meskipun Indonesia akan bersumpah untuk menghentikan usaha untuk menggulingkan Malaysia, rezim di Jakarta tampaknya enggan untuk meninggalkan ambisi jangka panjangnya guna menjadi kekuatan dominan di antara orang-orang berdarah Melayu.

DISKUSI

1. Indonesia telah secara resmi mengakhiri tiga tahun kampanye politik, ekonomi, dan operasi-operasi paramiliter melawan Malaysia. Pemulihan kembali hubungan diplomatik secara penuh bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun jika Sukarno terus-menerus berusaha menghalangi penyelesaian yang menyeluruh. Di luar masalah Sukarno, berakhirnya Konfrontasi akan menimbulkan dampak yang mendalam tidak hanya pada hubungan Indonesia-Malaysia saja. Dampak serupa juga akan terjadi pada masalah-masalah luar negeri maupun domestik yang lebih luas di kedua negara. Selain itu akan ada pula dampak terhadap posisi militer dan politik negara-negara persemakmuran di Asia Tenggara.

2. **Hubungan Indonesia-Malaysia.** Etnis Melayu yang secara politis mendominasi Malaysia dan orang Indonesia yang sangat besar jumlahnya, yang sekaligus memiliki kesamaan latar belakang ras, agama, dan budaya yang sama. Mereka tidaklah “asing” satu sama lain kecuali dalam pengertian politik yang sempit. Dengan mengingat kenyataan seperti itu, berakhirnya Konfrontasi akan memiliki makna lebih daripada sekadar pemulihan kembali hubungan persahabatan antara dua negara yang saling bertetangga. Berakhirnya Konfrontasi juga akan mirip sebuah reuni keluarga, dengan munculnya harapan di kedua belah pihak, terutama pihak Malaysia, untuk membaharui dan memperluas hubungan dekat yang pernah terjalin sebelumnya—meskipun mungkin akan tetap disertai tetap adanya unsur kecurigaan di tengah hangatnya hubungan satu sama lain.

3. Berkat wilayahnya yang lebih luas, jumlah penduduknya yang lebih banyak, sumber daya alamnya yang lebih berlimpah, berikut kekuatan militer serta dinamika politik dan budaya yang superior, Indonesia akan lebih mampu menanamkan pengaruhnya terhadap Malaysia daripada Malaysia terhadap Indonesia. Hal ini tampak pada masa selama maupun setelah Perang Dunia II, ketika modernisasi bahasa Melayu dan suksesnya kesusastraan Indonesia mempengaruhi kaum muda dan intelektual Malaysia. Banyak dari kaum muda dan intelektual Malaysia juga terinspirasi oleh para pahlawan revolusi Indonesia serta sangat terkesan oleh posisi menonjol Indonesia di kancah dunia di bawah Sukarno. Dalam kehidupan politik Melayu pengaruh Indonesia kuat di kalangan fundamentalis religius yang memperjuangkan berdirinya negara Islam serta tekanan terhadap penduduk keturunan Cina yang

sebenarnya cukup besar jumlahnya. Pengaruh Indonesia juga kuat di antara para ultra-nasionalis yang ingin mendominasi penduduk keturunan Cina di Malaysia dan Singapura melalui penyatuan Malaya dengan Indonesia. Orang-orang Indonesia yang pro-komunis, kadang-kadang bahkan pemerintah Jakarta sendiri, memberikan bantuan yang tidak kecil terhadap berbagai kelompok politik sayap kiri Malaysia.

4. Daya tarik Indonesia dan ideologinya bagi kaum intelektual Malaysia, pemuda aktivis politik, ekstremis religius, dan ultra-nasionalis, ternyata tak terpengaruh oleh adanya Konfrontasi. Bahkan di puncak Konfrontasi, rasa permusuhan dari pihak Malaysia tidak terlalu besar dan walaupun ada rasa marah, hal itu lebih ditujukan kepada Sukarno, Soebandrio, dan Partai Komunis Indonesia. Begitu kontak formal di antara kedua negara disahkan, daya tarik Indonesia akan kembali lagi seperti sediakala. Proses tersebut akan dipercepat oleh adanya lebih dari satu juta orang kelahiran Indonesia atau orang yang lahir dari pasangan Indonesia di Semenanjung Malaysia. Akan terdapat setidaknya dua elemen baru di dalam arus politik yang mengalir dari Indonesia ke Malaysia dalam periode pasca-Konfrontasi: kecil kemungkinan bahwa Indonesia di bawah Soeharto akan mendukung doktrin-doktrin kiri; sementara itu gerakan-gerakan anti-Cina akan mendapatkan dukungan lebih kuat dari Indonesia.

5. Secara konkret, apa artinya kebangkitan kembali pengaruh Indonesia bagi Malaysia? Dalam jangka pendek hal itu mungkin akan berarti menguatnya semangat rumpun Melayu dan sentimen anti-Cina, serta meningkatkan daya tarik partai-partai dan kelompok-kelompok yang menekankan ke-Melayu-an serta merosotnya daya tarik pemerintahan yang menekankan "multirasialisme" seperti yang ada sekarang ini. Demikian pula akan terjadi peningkatan semangat untuk melawan sikap akomodatif Malaysia terhadap Singapura yang didominasi oleh etnis Cina. Pengaruh Indonesia juga berarti meningkatkan perlawanan Malaysia terhadap kehadiran politik dan militer Inggris serta terhadap kepentingan ekonomi Inggris; dalam jangka waktu yang panjang, hal ini akan cenderung melemahkan ikatan Malaysia dengan negara-negara Persemakmuran.

6. Peranan Inggris. Bahkan tanpa adanya desakan Indonesia pun, sudah barang tentu kecenderungan-kecenderungan di atas akan terjadi pada tahun-tahun pasca-Konfrontasi. Sampai sekarang ini Malaysia masih tergantung pada mantan negara induknya, namun situasi demikian akan segera digugat oleh generasi baru politisi Malaysia. Ada sebuah paradoks: hebatnya Inggris dalam mempertahankan Malaysia terhadap serangan Indonesia selama tiga tahun terakhir ini justru telah mendorong lahirnya desakan untuk mengurangi kehadiran militer Inggris di Malaysia. Kuala Lumpur dipermalukan oleh tersibaknya ketergantungan yang hampir total terhadap pasukan Inggris guna melindungi diri baik dari ancaman internal maupun eksternal. Secara cepat-cepat Malaysia mengembangkan angkatan bersenjataanya dan

berharap bisa mengambil alih garis pertahanan darat Sarawak dan Sabah dalam waktu tiga hingga enam bulan setelah Konfrontasi berakhir. Inggris berencana untuk menarik seluruh pasukan infanterinya kecuali beberapa unit di protektorat Brunei dan di sekitar Pulau Labuan. Baik London maupun Kuala Lumpur menginginkan agar pasukan Inggris yang berada di Borneo segera ditarik dari Malaysia seluruhnya.

7. Unsur lain yang ada di balik keinginan Malaysia untuk membatasi peran militer Inggris di wilayah tersebut adalah keyakinan mereka bahwa Inggris akan terus menggunakan pengaruhnya untuk mendukung Singapura setiap kali Singapura dan Kuala Lumpur terlibat perselisihan. Rakyat Malaysia melihat adanya kebebasan yang lebih besar dalam berurusan dengan Lee Kuan Yew jika nanti pengaruh politik dan militer Inggris dikurangi secara drastis.

8. Pihak Inggris sendiri jelas-jelas khawatir dengan keadaan finansialnya sendiri, sehingga berniat mengurangi jumlah tentaranya di wilayah Malaysia secepat mungkin ke dalam jumlah yang sama pada periode pra-Konfrontasi—misalnya dari 50.000–60.000 personel menjadi 15.000–20.000 personel. Akan tetapi bagi Malaysia pemeliharaan tentara dengan jumlah seperti itu pun kalau harus berlangsung hingga tahun 1970 atau 1971 masih tetap akan menimbulkan keberatan. Demikian pula Malaysia juga menyadari bahwa mereka tidak bisa mengharapkan bantuan finansial Inggris yang cukup untuk membeayai pasukannya sendiri jika nanti harus diperbesar jumlah dan kemampuannya. Bisa dipastikan bahwa mereka akan menekan Amerika Serikat (dan juga Australia dan New Zealand) untuk mendapatkan bantuan militer.

9. **Cina Perantauan, Singapura, dan Borneo.** Semakin memburuknya “masalah Cina” mungkin menjadi konsekuensi yang paling mengganggu dari berakhirnya Konfrontasi. Di Semenanjung Malaysia, di Singapura, dan di Sarawak serta Sabah, terdapat lebih dari 4 juta warga keturunan Cina yang menjadi khawatir ketika Malaysia bersiap merangkul pemerintah Indonesia yang sejak dulu diliputi oleh kebencian dan kecurigaan terhadap semua yang berbau Cina. Tampaknya ada kemungkinan bahwa sebagian dari kekhawatiran orang-orang Cina itu akan menjadi kenyataan. Singapura akan mengalami kesulitan dalam hubungan komersial dengan Indonesia dan Malaysia. Bisa jadi akan ada kemunduran dalam gerakan menuju pemerintahan multirasial di Kuala Lumpur. Di Sarawak dan Sabah, harapan warga keturunan Cina untuk dapat ikut berperan dalam administrasi pemerintahan bisa hilang. Singkatnya, akan sulit bagi Malaysia untuk masih bisa mengharapkan kesetiaan dari penduduknya yang beretnis Cina.

10. Dalam jangka pendek, baik itu Semenanjung Malaysia maupun Singapura tak akan terjadi konflik terbuka hanya karena menurunnya

kesetiaan warga keturunan Cina. Di Semenanjung, para pemimpin konservatif komunitas Cina mungkin akan mempertahankan sikap *“low profile”* untuk menghindarkan provokasi terhadap para pemimpin Melayu. Etnis Cina di Singapura mungkin akan terus mendukung kebijakan untuk sabar dan pendekatan yang lebih bersahabat sebagaimana ditempuh oleh Lee Kuan Yew. Ini penting demi *survival* di tengah lingkungan yang tidak bersahabat. Sementara itu kaum muda keturunan Cina yang frustrasi mungkin saja akan berpaling ke arah solusi yang lebih radikal.

11. Sarawak menyodorkan masalah yang lebih kritis. Organisasi teroris bawah tanah pro-Komunis cukup besar jumlah anggotanya dan didukung oleh puluhan ribu warga Cina yang tinggal di desa maupun kota. Jika Kuala Lumpur berusaha menolak peran politik yang sah bagi keturunan Cina dalam urusan lokal maupun nasional, gerakan pemberontak tersebut akan menjadi mudah untuk mendapatkan anggota baru. Organisasi komunis gelap ini telah menerima pelatihan dan persenjataan dari Indonesia, tetapi juga mendapat doktrin dan mungkin panduan dari Cina Komunis. Apa pun yang terjadi, berakhirnya Konfrontasi tampaknya tidak otomatis berarti ditinggalkannya rencana untuk memberontak. Bahkan sebaliknya, bisa jadi penarikan pasukan negara-negara Persemakmuran dari Borneo menjadi sinyal bagi dimulainya “perang kemerdekaan nasional” di Asia Tenggara.

12. Indonesia dan Kalimantan. Meskipun Indonesia secara publik bersumpah akan menghentikan Konfrontasi dan akan meninggalkan sebagian besar kegiatan paramiliternya, hampir dipastikan negara itu akan tetap meneruskan usahanya untuk menggerogoti Sabah, Sarawak dan Brunei. Masih terdapat keinginan di dalam lingkaran politik dan militer Indonesia untuk mendapatkan konsesi dengan Kuala Lumpur mengenai Kalimantan Utara, atau kalau perlu mengusir pemerintah Malaysia sepenuhnya dari wilayah tersebut. Untuk menjaga agar kemungkinan tersebut tetap terbuka, Indonesia berusaha untuk melanjutkan dukungan, meskipun secara sembunyi-sembunyi, terhadap berbagai kelompok dan pemimpin pembebasan Kalimantan Utara. Beberapa pendahulu mereka bahkan bersekutu dengan Cina Sarawak. Mereka bisa menggunakan kekacauan yang telah mereka timbulkan sendiri sebagai alasan untuk ikut campur tangan di Kalimantan Utara.

13. Sebagai akibat langsung dari Konfrontasi, pemerintahan Soeharto akan memfokuskan diri kepada permasalahan dalam negeri berkaitan dengan penataan kembali struktur politik yang ada serta perbaikan ekonomi. Namun demikian, para pemimpin Indonesia sungguh-sungguh memandang diri mereka berhak menjadi pemimpin dunia Melayu, dari Thailand Utara hingga Filipina, sekaligus memandang diri sebagai penerus Inggris dan AS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi

di kawasan tersebut. Untuk saat ini, Filipina berada di luar jangkauan mereka. Akan tetapi, sudah hampir pasti bahwa ambisi Indonesia di Malaysia tidak akan dilupakan meskipun Konfrontasi versi Sukarno telah berakhir.

[Beberapa baris keterangan dirahasiakan]

Pejabat Ketua

Catatan akhir:

- 1 Notes of the 563rd Meeting of the National Security Council, Washington, August 4, 1966. *Foreign Relations of the United States, Vol. XXVI, Indonesia; Malaysia-Singapore; Philippines* (Washington: United States Government Printing Office, 2001), hlm. 459–462. Status: Rahasia. Sumber: Johnson Library, National Security files, NCS Meetings, 4, Tab 4, 8/14/66, Indonesia.
- 2 Laporan Korry tertanggal 22 Juli 1966. Lihat *Foreign Relations of the United States, 1964–1968, Volume XXIV*, Dokumen no. 215.
- 3 Memorandum Untuk Direktur, Office of National Estimates, Central Intelligence Agency, “The End of ‘Confederation’: the Debit Side”, 16 Agustus 1966. Status: Rahasia. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #109a.

September 1966: Menghangatnya Hubungan Indonesia-Amerika Serikat

1. Pengantar

DALAM RANGKA “membantu” pemulihan ekonomi Indonesia pada bulan September 1966 (tepatnya tanggal 19) di Tokyo diadakan pertemuan negara-negara kreditor Barat untuk Indonesia termasuk IMF. Sementara itu Uni Soviet tidak diundang. Dalam pertemuan itu Indonesia diwakili oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Pada akhir pertemuan disepakati antara lain bahwa Indonesia mendapatkan penundaan pembayaran utang selama 18 bulan.

Di dalam negeri tampak bahwa Soeharto dan tentara makin kokoh kedudukannya dan oleh karena itu makin berani menekan Bung Karno. Dalam salah satu dokumen yang akan kita lihat, hal itu menjadi tampak jelas ketika dilaporkan bahwa pada tanggal 5 September para petinggi militer AD mengadakan rapat sampai dinihari dan mengakhiri rapat itu dengan kesepakatan untuk mendukung Soeharto menyampaikan ancaman terselubung kepada Bung Karno jika Bung Karno tetap ingin menghalangi gerak langkah pemerintahan baru pasca-Supersemar yang dikendalikan

oleh tentara itu. Surat Perintah 11 Maret yang ditandatangani oleh Bung Karno telah benar-benar menelikung banyak pihak, termasuk Sang Penanda Tangan sendiri.

Setelah yakin bahwa pengaruh Bung Karno sungguh-sungguh semakin menghilang, dan Soeharto dan kawan-kawan makin kokoh kekuasaannya, Amerika Serikat menjadi semakin serius untuk membina kembali hubungan bilateral dengan Indonesia. Hal ini antara lain ditandai dengan pertemuan antara Menlu Adam Malik dengan Presiden Jonhson pada tanggal 27 September 1966, serta pertemuan antara Adam Malik dengan Wakil Presiden AS Hubert Humphrey pada hari berikutnya. Sementara itu, sebagaimana akan kita lihat dalam salah satu dokumen bulan September ini, Kongres juga semakin mudah menyetujui rencana Gedung Putih untuk mengirim bantuan kepada Indonesia.

2. Kongres AS dan Rencana Pemberian Bantuan untuk Indonesia

Sebagai kelanjutan dari rapat NSC tanggal 4 Agustus, Departemen Luar Negeri AS berusaha mendekati sejumlah Senator dan Anggota Kongres agar mendukung rencana Gedung Putih untuk mengirim bantuan ke Indonesia. Dalam memo yang aslinya ditulis oleh Menlu Rusk untuk Presiden Johnson tanggal 1 September 1966 ini tampak bagaimana masing-masing Senator atau Anggota Kongres didekati, serta bagaimana tanggapan mereka.^{***}

SIKAP KONGRES TERHADAP PEMBERIAN BANTUAN KE INDONESIA¹

Tadi malam saya telah mengirim ke Tn. Presiden rangkuman singkat mengenai hasil pertemuan Departemen Luar Negeri dengan orang-orang kunci di Kongres berkaitan dengan rencana [bantuan untuk Indonesia] itu. Melalui memorandum ini saya ingin memberikan informasi yang lebih lengkap tentang tanggapan mereka, sejauh yang bisa saya tangkap.

Ketua-Ketua Komisi

Senator Fulbright ditemui secara pribadi oleh Tn. Bundy. Dia membaca secara teliti rencana kita, berikut catatan bahwa Tn. Eugene Black telah membaca dan menyetujui rencana tersebut. Setelah membacanya Senator Fulbright mengatakan bahwa kita perlu segera melaksanakan apa yang telah kita rencanakan itu, meskipun ia tetap menekankan pentingnya pendekatan multilateral sebagai dasar bagi program-program bantuan selanjutnya.

Senator Pastore menyampaikan pendapatnya pada Tn. Bundy lewat telepon. Dia menyatakan dukungan sepenuhnya. Ia hanya meminta Deplu menyediakan tulisan singkat agar bisa dia gunakan nantinya sebagai dasar kalau dimintai pendapat. Permintaan itu sedang kami laksanakan. Satu-satunya kekhawatiran Senator Pastore adalah apakah Sukarno masih mempunyai kekuatan yang *real*. Kami meyakinkan dia bahwa Sukarno sudah tidak berdaya, namun kemungkinan baginya untuk berkuasa kembali akan semakin besar apabila Indonesia tidak bisa mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.

Kongresmen Morgan tidak bisa dihubungi secara langsung oleh Tn. MacArthur, karena waktu itu dia sedang menjadi pembicara. Namun demikian, masalah ini sudah pernah didiskusikan dengannya secara pribadi, dan gambaran penuh mengenai rencana ini telah disampaikan melalui kepala stafnya. Kepala stafnya kemudian melaporkan kepada MacArthur bahwa Dr. Morgan sepenuhnya setuju.

Kongresmen Mahon melakukan pembicaraan dengan Tn. Bundy melalui telepon. Dia sepenuhnya mendukung, dan mengusulkan bahwa penjualan kapas melalui program PL 480 akan menjadi bagian dari program yang sedang kita susun ini.

Senator-senator Kunci Lainnya

Senator Mansfield dihubungi melalui Tn. Valeo, yang mengatakan bahwa dia akan menelepon jika ada masalah. Dia tidak menelepon.

Senator Dirksen dan **Senator Kuchel** ditemui secara pribadi oleh Tn. MacArthur pagi tadi, dan menyatakan tak ada masalah dengan rencana kita.

Senator Sparkman mengatakan kepada Mr. MacArthur bahwa dia mendukung program ini, namun menyarankan diwujudkan kerangka multilateral secepat mungkin.

Senator Hickenlooper hanya bisa dihubungi lewat asistennya. Namun demikian, Tn. Bundy sudah pernah mendiskusikan masalah ini dengan dia bulan Juli lalu, dan Senator Hickenlooper menyatakan dukungannya. Tak lama kemudian kantornya mengkonfirmasi pada Tn. MacArthur bahwa Senator Hickenlooper tidak keberatan.

Senator ditemui oleh Tn. MacArthur dan dia menyatakan setuju sepenuhnya dengan program yang kita ajukan.

Senator Lausche juga telah menyatakan kepada Tn. MacArthur bahwa dia mendukung sepenuhnya. (Sudah ada pendekatan terhadapnya selama beberapa waktu pada musim panas lalu.)

Walaupun Senator Clark dan Bayh tidak berhasil ditemui secara pribadi sampai saat ini, Tn. Bundy telah mendiskusikan perihal rencana kita ini secara menyeluruh dengan keduanya pada bulan Juli. Mereka setuju sekali.

Anggota Kongres lainnya

Ketua Senat telah membicarakan masalah ini secara panjang lebar dalam sidang bulan Juli lalu, dan tidak keberatan jika untuk sementara program bantuan itu dilaksanakan secara bilateral dulu, tanpa harus menunggu kerja sama multilateral. Walaupun kemarin kami tidak berhasil menemuinya secara pribadi, namun kami telah berhasil menyampaikan pesan tak langsung bahwa langkah yang kami ambil sekarang ini sesuai dengan apa yang telah digariskan sebelumnya pada saat membahasnya dengan dia.

Carl Albert sudah kami beri tahu secara lengkap mengenai rencana ini Juli lalu melalui utusan Tn. MacArthur. Dia mengatakan bahwa rencana yang kita susun itu memang tepat.

Gerald Ford memberitahukan kepada utusan Mr. MacArthur bahwa dia menyetujui sepenuhnya rencana kita itu, dan menyarankan supaya kita melaksanakannya sesegera mungkin. Dia mengatakan bahwa satu-satunya masalah adalah jika dalam waktu dekat ini Sukarno kembali berkuasa.

Tn. Bolton menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap rencana kita.

Sub Komisi Zablocki untuk Komisi Urusan Luar Negeri tidak ditemui secara khusus, namun Tn. Bundy sendiri yang memberi pengarahan pada Sub Komite tersebut akhir Juli yang lalu dan mereka semua sangat mendukung.

Singkat kata, kita telah berhasil menghubungi dan merangkul banyak pihak di Kongres, dengan hasil yang sangat memuaskan. Jika ada kritik atau masukan terhadap keputusan ini, kami dan rekan-rekan kerja kami akan siap menanggapi. Kami tentu saja akan terus kontak-kontak dengan mereka.

3. Soeharto dan Ancaman Terselubung terhadap Bung Karno

Dalam memorandum untuk Direktur CIA tertanggal 6 September 1966 di bawah ini dilaporkan bahwa pada tanggal 5 September para panglima

militer Indonesia mengadakan rapat. Meskipun dijadwalkan untuk selesai siang, rapat itu molor hingga pukul 02:00 dinihari. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya rapat tersebut. Dalam rapat itu dibicarakan perlu atau tidaknya Jenderal Soeharto menyampaikan ancaman terselubung terhadap Bung Karno, jika Bung Karno “terus-menerus bertindak untuk bertentangan dengan kehendak rakyat”. Sebagaimana bisa Anda lihat, begitu sensitifnya dokumen ini sehingga banyak bagian masih belum di-deklasifikasi alias masih dirahasiakan.

3
**DUKUNGAN ANGKATAN DARAT INDONESIA BAGI
JENDERAL SOEHARTO UNTUK MENGELUARKAN
ANCAMAN TERSELUBUNG TERHADAP SUKARNO²**

3
CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY
Intelligence Information Special Report

Negara : 3 donesia
Tanggal : 6 September 1966
Tanggal Info. : [Beberapa kata dirahasiakan]

Perihal: Dukungan Angkatan Darat Indonesia bagi Jenderal Soeharto untuk
Mengeluarkan Ancaman Terselubung Terhadap Sukarno

Sumber: [Dua baris dirahasiakan]

1. Dalam rapat tanggal 5 September [1966] yang berlangsung sampai jam 02:00 dinihari, para Panglima Angkatan Darat setuju untuk mendukung Jenderal Soeharto guna menyampaikan ancaman terselubung terhadap Presiden Sukarno. Pada tanggal 3 dan 4 September para Gubernur Militer, Komandan Regional, dan para Perwira Senior AD yang lain bertemu guna membicarakan hasil dari Seminar Bandung dan mencapai kesepakatan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik AD. Rapat ini sebenarnya direncanakan untuk berakhir pada tengah hari tanggal 4 September, namun ternyata berlangsung terus sampai tanggal 4 September malam karena harus bicara mengenai bagaimana sebaiknya menangani Presiden Sukarno. Keputusan yang dicapai pada dinihari 5 September adalah: Soeharto akan menyampaikan kepada Sukarno bahwa jika ia terus-menerus bertindak untuk bertentangan dengan kehendak rakyat, AD tidak akan dapat menjamin keselamatan pribadinya. Kesepakatan

ini dicapai setelah melalui perdebatan yang amat panjang. Sejumlah perwira sempat menyatakan bahwa ancaman macam itu tidak pantas, mengingat bahwa Sukarno adalah George Washington-nya Indonesia. Sejumlah perwira lain mengatakan bahwa banyak pemimpin besar tewas dengan cara kekerasan, sambil menyebut beberapa contoh, seperti Presiden Amerika Lincoln dan Kennedy, serta Gandhi dari India. Cara yang disepakati adalah bahwa Soeharto akan menyampaikan suatu ancaman terselubung kepada Sukarno, mendesak supaya Sukarno ikut dengan program dan kebijakan-kebijakan AD.

2. Komentar [satu kata dirahasiakan]: Pada tanggal 5 September [dua baris dirahasiakan]. Jenderal Soeharto sangat kecewa terhadap sikap pasif Jenderal Nasution sebagai Ketua MPRS, suatu lembaga yang berhak menegur atau memperkarakan (*impeach*) Sukarno yang tidak tunduk pada keputusan-keputusan MPRS. [Satu setengah baris dirahasiakan] membenarkan pada tanggal 4 September bahwa pertemuan tanggal 4 September—yang maksud utamanya adalah membahas cara-cara mengatasi masalah-masalah politik yang menghambat perbaikan ekonomi—direncanakan selesai tengah hari namun ternyata harus dilanjutkan lagi sampai malam.

3. (Komentar [satu kata dirahasiakan]: Mungkin saja Soeharto akan berjalan di luar hukum dalam menangani masalah Sukarno dengan maksud untuk menekan Sukarno, namun kecil kemungkinan bahwa Soeharto akan menyerang Sukarno secara fisik jika tekanan itu tidak berhasil. [Satu setengah baris dirahasiakan] tidak dapat menyatakan apa yang akan terjadi jika Sukarno mengabaikan ancaman Soeharto.)

4. Distribusi [satu kata dirahasiakan]: Kementerian Luar Negeri (hanya Dubes).

[Beberapa kata dirahasiakan]

Distribusi : Direktur CIA

Asisten Khusus Presiden

Direktur Intelligence and Research (Kementerian LN)

Deputi Direktur untuk Intelijen

Direktur, Office of National Estimate

Direktur, Office of Current Intelligence

4. Persiapan Pertemuan Presiden Johnson-Adam Malik

Berikut adalah catatan dari W.W. Rostow (Asisten Khusus Presiden) untuk Presiden Johnson sekadar sebagai “bekal” bagi Presiden yang hari itu (27 September 1966) rencananya akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik. Rostow mengusulkan supaya Presiden Johnson

menunjukkan niat AS untuk membantu Ekonomi Indonesia. Menarik bahwa oleh Rostow, Adam Malik disebut sebagai “satu-satunya orang yang paling berani membalik kebijakan-kebijakan Presiden Sukarno”.

Tn. Presiden:³

Saya dengar dari Menlu Rusk, Anda telah setuju untuk menemui Adam Malik pagi ini.

Berikut adalah beberapa hal yang bisa dijadikan titik tolak pembicaraan:

1. Sambut secara positif bergabungnya kembali Indonesia ke dalam PBB dan organisasi-organisasi internasional lain.
2. Tunjukkan minat kita untuk turut membangun kembali perekonomian Indonesia secara multilateral. Tunjukkan rasa puas kita terhadap persetujuan penjadwalan kembali pembayaran utang secara tentatif yang disepakati di Tokyo pekan lalu. (Penjadwalan itu berarti memberi kesempatan penundaan bagi Indonesia untuk membayar utang sebesar US\$750 juta.)
3. Ungkapkan minat atas pendekatan konstruktif Indonesia terhadap kerja sama regional Asia Tenggara (Filipina-Thailand-Malaysia).
4. Tanyakan pandangannya mengenai masa depan organisasi regional Asia.

Sebagaimana Menlu Rusk mungkin telah mengatakannya kepada Anda, Adam Malik adalah seorang nasionalis Asia yang pemberani. Dia adalah satu-satunya orang yang paling berani membalik kebijakan-kebijakan Sukarno.

W.W. Rostow

5. Pertemuan Presiden Johnson dan Adam Malik

Memenuhi permintaan Adam Malik untuk bertemu langsung—sebagaimana tertuang dalam surat tanggal 6 Juni 1966—pada tanggal 27 September 1966 Presiden Johnson menyediakan waktu untuk menemui Menteri Luar Negeri Indonesia tersebut. Pertemuan itu sendiri berlangsung dari jam 10:45 hingga jam 11:05 waktu setempat. Dalam pertemuan itu selain Menteri Luar Negeri Adam Malik dan Presiden Johnson hadir pula: Kol. Sudjono, Ajudan Jend. Soeharto; Tn. Sani dari Kementerian Luar Negeri Indonesia; Walt W. Rostow,

Asisten Khusus Presiden; Duta Besar Marshall Green; dan William J. Jorden.

Sebagaimana dicatat oleh Jorden, dalam pertemuan itu dibahas soal kemungkinan bangkitnya kembali komunisme di Indonesia serta masalah-masalah ekonomi yang sekarang sedang melanda Indonesia. Ketika Presiden Johnson bertanya kepada Dubes Green apakah Amerika telah cukup membantu Indonesia, jawabnya adalah bahwa Amerika telah membantu dan cenderung untuk menggunakan pendekatan multilateral dalam menyampaikan bantuan.

PEMBICARAAN ANTARA PRESIDEN JOHNSON DAN MENTERI LUAR NEGERI INDONESIA ADAM MALIK⁴

Presiden Johnson menyampaikan selamat datang kepada Menlu Adam Malik. Adam Malik mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden karena telah berkenan menerima kehadirannya. Dia juga menyampaikan salam pribadi dari Jenderal Suharto.

Adam Malik berkata, tentunya Presiden Johnson mengikuti perkembangan yang kini sedang berlangsung di negerinya. Dia mengatakan bahwa dirinya dan Pemerintah Indonesia yang baru sedang mencari cara-cara untuk memulihkan hubungan baik dengan negara-negara lain.

Dia menyinggung soal berakhirnya Konfrontasi dengan Malaysia. Dia mengatakan pula bahwa Indonesia telah membina kembali hubungan dengan IMF dan Bank Dunia, dan telah bergabung dengan Bank Pembangunan Asia yang baru. Dia berkata pula, Indonesia tertarik untuk membantu mengusahakan agar ada kerja sama regional yang semakin luas. Dia berkata negaranya berkeinginan untuk ikut serta dalam upaya menemukan jalan keluar bagi masalah Vietnam.

Presiden bertanya kepada Adam Malik, berkaitan dengan masalah Vietnam, apa yang menurut dia Amerika perlu lakukan, namun belum dilakukan.

(Tampaknya terjadi salah paham). Menlu Adam Malik mengatakan bahwa Indonesia telah mengadakan pembicaraan dengan Filipina, Thailand, dan Malaysia. Selanjutnya dia menyatakan bahwa Indonesia ingin menghindari pemberitaan mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan ini. Dia berkata, Indonesia juga telah bertukar pendapat dengan pemerintah India, Yugoslavia, dan Algeria.

Dia mengakui bahwa dalam waktu dekat negaranya tidak akan dapat melakukan sesuatu yang jelas dan pasti, karena menurutnya diperlukan

persiapan yang hati-hati dan menyeluruh kalau mau melakukan tindakan yang bermanfaat di masa depan.

Dia menekankan bahwa Pemerintahnya tidak ingin bahwa Amerika menarik diri dari Vietnam sebelum rakyat Vietnam Selatan mampu untuk berdiri sendiri.

Presiden bertanya: Adakah hal-hal yang menurut Anda sedang kami lakukan di Vietnam yang seharusnya tidak kami lakukan? Adakah hal-hal yang menurut Anda tidak kami lakukan namun seharusnya kami lakukan?

Adam Malik menyebut soal pengeboman atas Vietnam Utara, tetapi dia menambahkan bahwa pemboman itu seharusnya jangan berhenti sebelum ada langkah timbal balik dari pihak Vietnam Utara.

Presiden berkata: Kami telah menyatakan kepada mereka bahwa kami akan menghentikan pemboman jika mereka menghentikan agresinya; bahwa kami akan menarik diri jika mereka mulai menarik diri.

Adam Malik mengatakan bahwa dia menghargai kebijakan Amerika dan menambahkan bahwa Indonesia ingin membantu semampu mungkin.

Presiden bertanya tentang kekuatan komunis di Indonesia sekarang ini.

Adam Malik mengatakan bahwa Partai Komunis telah tercerai-berai. Meskipun demikian, dia menambahkan, Partai Komunis bisa bangkit kembali apabila keadaan ekonomi tidak membaik dan apabila rakyat menjadi makin kecewa dengan keadaan yang ada.

Dia katakan Indonesia memiliki tiga masalah yang mendesak, yakni: (1) memperbaiki standar hidup rakyat; (2) memperbaiki infrastruktur ekonomi dan meningkatkan produksi; (3) menghentikan inflasi.

Rostow angkat bicara soal masalah-masalah ekonomi yang pokok. Dia mengatakan bahwa Indonesia tengah bekerja keras mengatasi masalah-masalahnya. Dia menyebut soal hubungan dekat Indonesia dengan IMF, menyinggung langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengontrol penyelundupan, dan berkata bahwa Indonesia telah bekerja sama dengan Bank Dunia untuk sebuah rencana pembangunan jangka panjang.

Presiden menanyakan apakah Amerika telah membantu Indonesia semampu mungkin.

Duta Besar Green mengatakan iya, lantas memberi contoh mengenai paket AID [Agency for Internasional Development] yang belum lama ini dikirim, dan secara spesifik ia menyebut soal pengiriman gandum dan kapas melalui program PL 480. Dia menggarisbawahi digunakannya pendekatan multilateral dalam hal ini, dan menyatakan bahwa Amerika sedang bekerja sama dengan Indonesia dan dengan negara-negara lain.

Presiden berkata bahwa dia lebih memikirkan perlunya menyusun rencana jangka panjang daripada soal bantuan jangka pendek seperti program PL 480 itu.

Duta Besar Green menyatakan bahwa Amerika berharap untuk mengembangkan suatu pendekatan yang berada dalam koordinasi dengan negara-negara lain. Dia merangkum situasi Indonesia sekarang ini dengan mengatakan: "Sejauh ini semua berjalan baik." (*So far, so good.*)

Dia sampaikan bahwa tahun depan negara-negara lain akan memberikan bantuan, dan secara khusus ia menyebut Jepang dan Jerman Barat.

Presiden bertanya tentang Jerman Barat, sambil mengingatkan bahwa Perdana Menteri Jerman Erhard sekarang ini sedang berada di Washington. Dia berpendapat bahwa soal bantuan kepada Indonesia perlu disampaikan kepada Erhard sebelum Erhard meninggalkan Washington.

Pertemuan ini berakhir sekitar pukul 11.05 pagi, saat media massa dipanggil masuk.

W.J. Jorden

6. Pertemuan Wapres Hubert Humphrey dengan Menlu Adam Malik

Sehari setelah bertemu dengan Presiden Johnson di Washington, tampaknya Menlu Adam Malik langsung terbang ke kota Minneapolis di negara bagian Minnesota untuk bertemu dengan Wakil Presiden Hubert Humphrey. Pertemuan ini tentu saja dimaksudkan untuk memenuhi permintaan Adam Malik agar dapat bertemu Humphrey sebagaimana ditulis oleh Malik dalam surat tanggal 31 Maret 1966. Dalam laporan berikut, yang ditulis oleh Marianne Means dan dimaksudkan untuk publikasi di media massa tanggal 29 September 1966, digambarkan betapa hangatnya pertemuan itu. Konon sudah lama Humphrey berteman dengan Adam Malik dan dengan sembunyi-sembunyi mendukung kekuatan-kekuatan demokrasi di Indonesia, bahkan sebelum Humphrey menjadi Wapres AS. Disebut dalam reportase ini, Adam Malik sempat mengatakan kepada Humphrey bahwa perjuangan Amerika Serikat melawan komunisme di Vietnam menjadi sumber inspirasi bagi para pemimpin Indonesia dalam berjuang melawan komunisme.

“MARIANNE MEANS’ WASHINGTON”⁵
(Draft untuk edisi Kamis, 29 September [1966])

Minneapolis, Minnesota, 28 September—Sebuah pesawat pribadi yang berpenumpang Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik beserta dua orang asistennya mendarat dengan mulus di Bandara Wold-Chamberlain pada hari Minggu lalu pukul 10:00 waktu setempat. Menlu Adam Malik dan asistennya sedang melakukan sebuah misi internasional.

Adam Malik, orang sipil tertinggi dalam jajaran pemerintahan Jenderal Soeharto—yang merebut kekuasaan Oktober lalu [1965] dari tangan Presiden Sukarno yang pro-komunis—cepat-cepat menuju [*satu kata dirahasiakan*] untuk bertemu dengan Wakil Presiden [AS] Humphrey di ruang khusus yang mewah di Hotel Sheraton-Ritz.

Tatacara protokoler diabaikan, karena Adam Malik membawa misi khusus, dan Wapres Humphrey terpaksa menghadiri pertemuan ini meskipun sebenarnya sedang sibuk berkampanye.

Adam Malik, yang datang ke Amerika untuk mempersiapkan masuknya kembali Indonesia ke dalam PBB, dalam wawancara pribadi mengatakan bahwa ada alasan lain mengapa ia berkunjung ke sini: selama ini Wapres Humphrey telah memainkan peran rahasia namun penting dalam mendukung kekuatan-kekuatan demokrasi di Indonesia.

Humphrey, yang waktu itu adalah pemimpin partai Demokrat di Senat (*Senate Whip*) dan anggota Komisi Hubungan Luar Negeri, bertemu dengan Adam Malik pada tahun 1963 saat berlangsung upacara penandatanganan perjanjian mengenai Larangan Percobaan Nuklir Terbatas di Moskow. Kedua orang itu mulai saling berkorespondensi, baik secara langsung maupun melalui perantara.

Adam Malik dan teman-temannya, yang notabene amat bersimpati dengan Barat, pernah mengatakan kepada Humphrey bahwa mereka merasa tertekan karena Presiden Sukarno semakin condong ke Beijing, menyerbu dan membakar perpustakaan-perpustakaan milik Amerika, dan memberikan kekuasaan yang makin besar kepada warga keturunan Cina yang berhaluan komunis (yang jumlahnya kira-kira setengah juta orang). Mereka juga curiga bahwa Presiden Sukarno mendorong orang-orang komunis untuk membunuh beberapa Jenderal anti-komunis. Mereka menyatakan lebih lanjut bahwa beberapa Jenderal pro-Barat takut untuk bertahan karena diam-diam ikut percaya bahwa pada akhirnya nanti Cina akan menjadi pemimpinnya Asia.

Humphrey melaporkan hubungannya dengan Adam Malik kepada Presiden Kennedy, yang kemudian memberinya kuasa untuk membina hubungan personal dengan orang-orang Indonesia sambil memperteguh mereka agar tidak patah semangat.

Setelah Presiden Kennedy terbunuh, Humphrey merasa bahwa ia perlu meyakinkan tokoh-tokoh demokrasi Indonesia bahwa perubahan dalam pemerintahan Amerika tidak berarti perubahan dalam hubungan dengan mereka. Ia kemudian bercerita mengenai bagaimana ia melaporkan kepada Presiden Johnson [pengganti Kennedy] kontak-kontak yang selama ini dibinanya dengan orang-orang Indonesia.

Selanjutnya, pada bulan Januari 1964 Humphrey menulis surat untuk Adam Malik. Ia meyakinkan Malik bahwa orang-orang Indonesia yang dikenal “cinta kebebasan” mempunyai banyak teman di Amerika Serikat. Namun demikian, Humphrey menambahkan, Adam Malik perlu memahami bahwa AS akan tetap membela Malaysia terhadap serangan dari Indonesia. (Waktu itu Presiden Sukarno sedang mengancam untuk menghancurkan Malaysia).

Sebenarnya hingga awal tahun ini Wapres Humphrey tidak yakin mengenai hasil dari usahanya dalam membina kontak dengan Indonesia itu. Akan tetapi tiba-tiba datang sepucuk surat dari Adam Malik. “Saya mohon maaf bahwa lama sekali saya tak menjawab surat yang Anda kirim pada bulan Januari 1964...,” begitu Adam Malik memulai suratnya.

Dengan demikian kini untuk pertama kalinya terbukalah panggung bagi keduanya untuk bertatap muka secara langsung, setelah tidak bertemu selama tiga tahun. Dalam tatap muka itu Adam Malik meyakinkan Wapres Humphrey bahwa Indonesia akan berusaha mati-matian, pelan tapi pasti, untuk mengurangi pengaruh Cina Komunis di Asia Tenggara. Adam Malik mengatakan salah satu langkah awal yang direncanakan adalah mengembangkan kerja sama regional dengan negara-negara non-komunis lain, seperti Thailand, Filipina, dan Malaysia. Adam Malik juga menekankan pada Wapres Humphrey bahwa perjuangan Amerika melawan komunis di Vietnam Selatan telah menjadi sumber semangat bagi perjuangan para pemimpin di Indonesia.

Ketika meninggalkan ruangan hotel yang mewah itu, Adam Malik sempat berhenti di pintu dan sejenak menengok ke belakang. “Selamat tinggal kawan lama dan kawan tercintaku,” katanya lembut.

Catatan akhir:

- 1 Memorandum Dari Menlu Dean Rusk untuk Presiden Johnson, "Sikap Kongres terhadap Pemberian Bantuan ke Indonesia", 1 September 1966. Status: Konfidensial. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #3136.
- 2 Memorandum untuk Direktur CIA, "Dukungan Angkatan Darat Indonesia bagi Jenderal Soeharto untuk Mengeluarkan Ancaman Terselubung terhadap Sukarno", 6 September 1966. Status: Rahasia. Dilarang Menyebarkannya ke Negara Lain. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #107.
- 3 Memorandum dari W.W. Rostow kepada Presiden Johnson, Selasa, 27 September 1966. Status: Konfidensial. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia.
- 4 Notulen Pertemuan, "Pembicaraan antara Presiden Johnson dan Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik", 27 September 1966. Status: Rahasia. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia.
- 5 Laporan tentang Pertemuan antara Menlu Indonesia Adam Malik dengan Wapres AS Hubert Humphrey, 28 September 1966. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, Gen CO 121 India 6/26/65. #2.



Di gedung Istora Senayan Jakarta (1967) disaksikan oleh Ketua MPRS Jenderal AH Nasution, Jenderal Soeharto mengucapkan sumpah presiden mengawali puncak kekuasaannya. (Dok. Kompas)

Bab 10

Penutup

SETELAH BERUSAHA untuk sedapat mungkin “membongkar” dan menyimak kembali Supersemar dengan melihat konteks dan dampaknya, kini sampailah kita pada bagian penutup dari buku ini. Pertama-tama perlu disampaikan di sini bahwa karena alasan keterbatasan ruang dan waktu buku kita terpaksa berakhir pada bulan September 1966. Namun demikian, hal itu tidak berarti bahwa tidak ada hal-hal yang signifikan dan menarik untuk dibahas setelah bulan itu. Misalnya saja apa yang terjadi pada bulan Oktober 1966. Pada bulan itu Mantan Menlu Dr. Soebandrio dijatuhi hukuman mati (meskipun nantinya hukuman itu diubah menjadi hukuman seumur hidup). Pada bulan itu juga Soeharto mengumumkan program-program pemulihan ekonomi yang bersifat menyeluruh dan liberal. Sementara itu pada bulan November terdapat upaya-upaya untuk mengembalikan kekuasaan Bung Karno, namun gagal. Bung Karno sendiri tidak lagi berminat akan hal itu. Pada bulan Desember 1966 Omar Dhani dijatuhi hukuman mati, meskipun juga tidak dieksekusi. Bulog (Badan Usaha Logistik) didirikan, dengan maksud untuk menampung persediaan beras nasional. Pada bulan Desember pula menjadi semakin tampak ciri kekerasan dan otoritarian dari Pemerintahan Soeharto. Pada bulan ini, misalnya, pemerintah memutuskan untuk mengeksekusi tokoh Republik Maluku Selatan Soumokil, sehingga membuat warga Maluku di Belanda marah dan membakar Kedubes

Indonesia di sana. Sementara itu semua sekolah berbahasa Cina dilarang dan undang-undang baru disusun dengan maksud untuk mengontrol media massa. Itulah beberapa hal yang terjadi setelah September 1966 namun belum bisa kita bahas secara mendalam pada kesempatan ini.

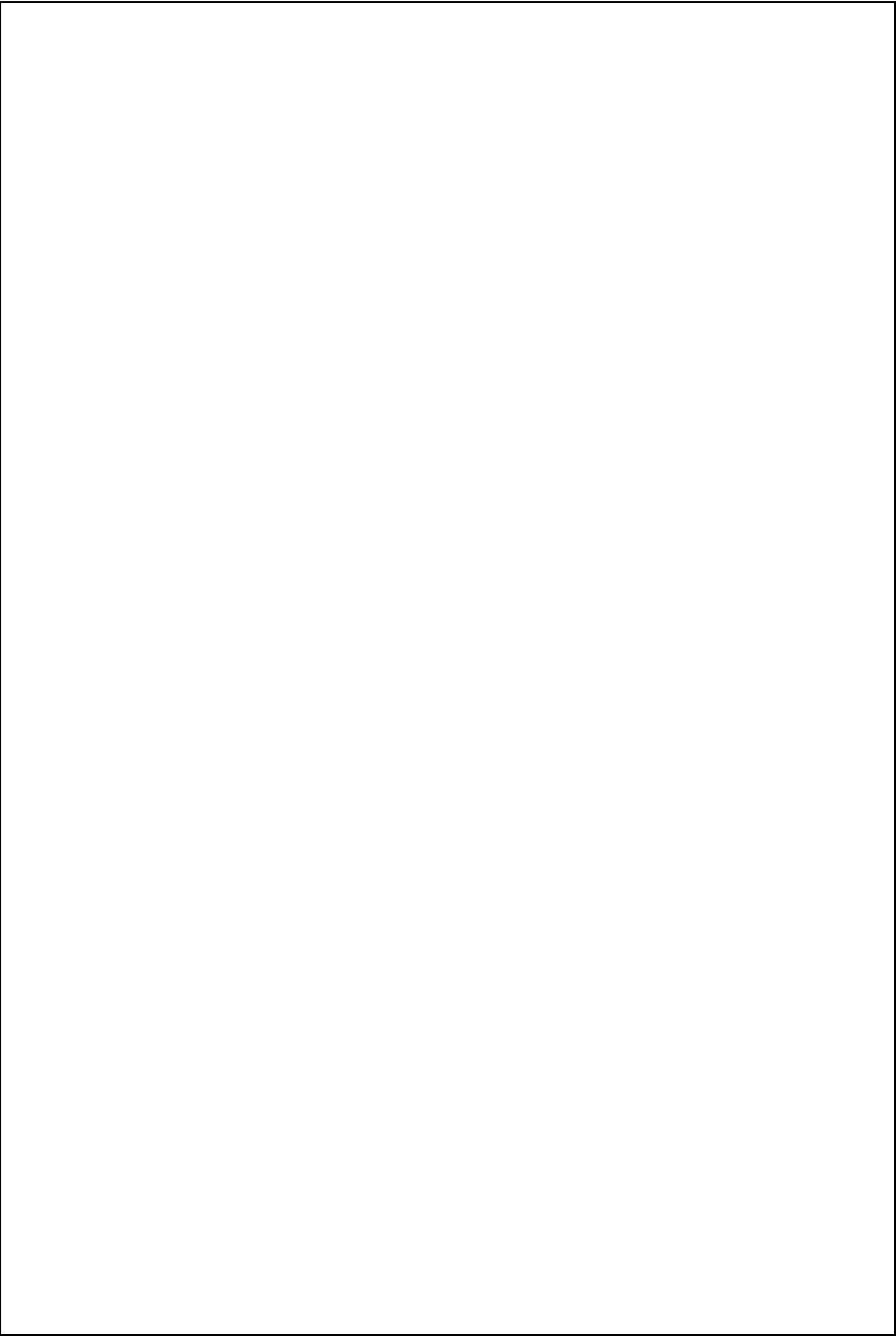
Selanjutnya, mengingat bahwa hampir semua dokumen yang kita bahas itu adalah dokumen-dokumen dari Amerika, pada bagian akhir ini marilah kita sejenak bertanya, apakah sebenarnya Amerika berada di balik Supersemar? Atau mungkin agar lebih spesifik dan menggelitik, kita bertanya: CIA-kah sebenarnya dalang dari Supersemar? Jawabnya: mungkin iya, mungkin juga tidak. Tetapi seandainya iya, tampaknya CIA tidak sendirian. Sebagaimana layaknya dalam banyak peristiwa yang memiliki implikasi politik yang besar di negara mana pun, biasanya dalang peristiwa-peristiwa itu tidak tunggal. Ada sejumlah pihak lain yang biasanya saling memainkan peran sebagai tokoh atau pelaku di balik layar. Seperti yang telah kita lihat melalui dokumen-dokumen di depan, pihak-pihak yang rajin mengevaluasi dan coba mempengaruhi situasi politik di Indonesia tidak hanya CIA, melainkan juga Kedubes AS di Jakarta, Departemen Luar Negeri AS di Washington, National Security Agency (NSC), Gedung Putih, bahkan juga Kongres AS. Mereka semua turut berperan dalam kebijakan AS terhadap Indonesia baik menjelang maupun setelah ditandatanganinya Supersemar.

Sementara itu di dalam negeri dapat disimak adanya sejumlah pihak yang bisa dikatakan merupakan bagian dari per-dalang-an yang mengarah kepada lahirnya Supersemar. Telah kita lihat, Supersemar tidak lahir dari inisiatif pribadi Bung Karno, melainkan merupakan ujung dari suatu pembicaraan (yang berlangsung alot) antara dia dengan tiga Jenderal Angkatan Darat yang menemukannya di Istana Bogor pada tanggal 11 Maret 1966. Sementara itu kita tahu, ketiga Jenderal itu datang ke Bogor bukan karena inisiatif sendiri, melainkan karena ditugaskan oleh Letjen Soeharto yang nantinya menjadi pelaksana dari surat perintah tersebut. Pada saat yang sama kita juga telah melihat dalam dokumen-dokumen kita, betapa banyaknya faktor yang ikut bermain dalam menciptakan suasana panas penuh demonstrasi yang meresahkan Bung Karno dan para pembantunya.

Ada mahasiswa, ada “pasukan tak dikenal”, ada kubu militer, ada pula tokoh-tokoh kunci tertentu yang ikut serta.

Dengan kata lain, yang lebih mudah ditemukan bukanlah dalang tunggal dari Supersemar, melainkan adanya banyak pelaku yang ikut memainkan suasana dan memanfaatkan situasi. Atau secara lebih lugas, sebenarnya yang ada adalah konvergensi (alias bertemunya) berbagai kepentingan dari pihak-pihak yang berbeda, yang semuanya mengarah pada apa yang nantinya menjadi “hasil” dari adanya Supersemar. Hasil itu antara lain adalah: dilarangnya PKI dan komunisme secara resmi, tersingkirnya kekuatan-kekuatan kiri (baca: kekuatan berorientasi kerakyatan) di Indonesia, tergusurnya Bung Karno dari kursi kepresidenan, dan munculnya sebuah pemerintahan baru yang pro-modal asing serta anti-kiri. Jika hasil-hasil itu yang menjadi sasaran ⁵⁸kepentingan-kepentingan yang bertemu di seputar lahirnya Supersemar tidak hanya datang dari luar negeri melainkan juga dari dalam negeri sendiri.

Siapa tahu di dunia ini yang abadi bukanlah kawan atau lawan, bukan dalang atau non-dalang, melainkan konvergensi kepentingan. Tampaknya itulah yang terjadi menjelang dan setelah ditandatanganinya Supersemar. ***



Daftar Pustaka

1. Sumber-sumber Primer:

Adams, Cindy. Surat kepada Mr. Jack Valenti, 3 Februari 1966. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, Gen CO 122 Indonesia. #3.

Central Intelligence Agency. Dokumen OCI No. 0481/66, Kantor Urusan Intelijen, 3 Januari 1966, Memorandum Intelijen 5 “Perubahan Politik di Indonesia”. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #116.

_____. Office of Current Intelligence, “Kelumpuhan Total Indonesia”, Memorandum Intelijen 5, 4 Februari 1966. Status: Rahasia. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #113.

_____. Direktorat Intelijen, “Kelompok-kelompok Pemuda di Indonesia”, No. 1586/66, 5 9 Juni 1966. Status: Rahasia. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #118.

_____. Memorandum Intelijen, “Political 5 rces in Indonesia”, 23 Juli 1966. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File Asia and the Pacific, Indonesia. #115.

Laporan tentang Pertemuan antara Menlu Indonesia Adam Malik dengan Wapres AS Hubert Humphrey, 28 September 1966. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, Gen CO 121 India 6/26/65. #2.

Laporan dari Thomas L. Hughes (INR/Intelligence and Research) untuk Menteri Luar Negeri AS, “Kabinet Indonesia yang Baru sebagai kekuatan 5 n bagi Sukarno”, 25 Juli 1966. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #1.

- Memorandum untuk Broomley Smith, “Krisis Utang Luar Negeri Indonesia”, 25 Mei 1966. Status: Rahasia. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. # 1588, #121.
- Memorandum dari W.W. Rostow kepada Presiden Johnson, 3 Maret 1966. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #87.
- Memorandum dari D.W. Ropa untuk W.W. Rostow, “Pentingnya Mistisisme Jawa dalam Politik Indonesia Sekarang”, 29 Juli 1966. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #112.
- Memorandum untuk Direktur, Office of National Estimates, Central Intelligence Agency. “The End of ‘Confrontation’: the Debit Side”, 16 Agustus 1966. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #109a.
- Memorandum dari Menlu Dean Rusk untuk Presiden Johnson, “Sikap Kongres terhadap Pemberian Bantuan ke Indonesia”, 1 September 1966. Status: Konfidensial. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #3136.
- Memorandum untuk Direktur CIA, “Dukungan Angkatan Darat Indonesia bagi Jenderal Soeharto untuk Mengeluarkan Ancaman Terselubung Terhadap Sukarno”, 6 September 1966. Status: Rahasia. Dilarang menyebarkannya ke Negara Lain. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #107.
- Memorandum dari W.W. Rostow kepada Presiden Johnson, Selasa, 27 September 1966. Status: Konfidensial. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia.
- Notulen Pertemuan, “Pembicaraan antara Presiden Johnson dan Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik”, 27 September 1966. Status: Rahasia. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia.
- Memorandum dari Donald W. Ropa (Staff National Security Council) kepada Rostow (Asisten Khusus Presiden) “Memo untuk Mr. Rostow”, “Posisi Kita di Indonesia”, 9 Juli 1966. *Foreign Relations, 1964–1968, Volume XXVI* (Washington: Government Printing Office, 2001), hlm. 443–445.
- Sukarno. 1965. *An Autobiography As Told to Cindy Adams*. New York: The Bobbs-Merill Company, Inc.
- Surat dari Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik kepada Wakil Presiden AS Hubert Humphrey, 31 Maret 1966. Status: Sangat konfidensial. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, Confidential File CO 110. #9c.

Surat dari Adam Malik kepada Presiden Lyndon B. Johnson, 6 Juni 1966. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, Gen CO 121 India 6/26/65.

Surat dari Sultan Hamengku Buwono IX untuk Wakil Presiden AS Hubert H. Humphrey, 6 Juni 1966. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, Gen CO 121 India 6/26/65. #12960.

⁶ Telegram dari Kedubes Amerika (Jakarta) untuk Departemen Luar Negeri (Washington), 5 Januari 1966. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #37.

Telegram dari Departemen Luar Negeri (Washington) untuk Kedubes Amerika (Jakarta), 13 Januari 1966. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #114a.

Telegram dari Kedubes Amerika (Jakarta) untuk Departemen Luar Negeri (Washington), 17 Januari 1966. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #31.

Telegram dari Kedubes Amerika (Jakarta) untuk Departemen Luar Negeri (Washington), 17 Januari 1966. "Rencana Demonstrasi Mahasiswa dan Sikap Militer". Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #30.

Telegram dari Departemen Luar Negeri (Washington) untuk Kedubes Amerika (Jakarta), 21 Januari 1966. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #86.

Telegram dari Menlu Dean Rusk untuk Bangkok dan Jakarta, 15 Februari 1966. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #110d.

Telegram dari Departemen Luar Negeri (Washington) ke Kedubes Amerika (Jakarta), 17 Februari 1966. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #82.

Telegram dari Departemen Luar Negeri (Washington) ke Kedubes Amerika (Jakarta), 20 April 1966. Status: Rahasia/Segera. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #80.

Telegram dari Kedubes Amerika Serikat (Jakarta) ke Kementerian Luar Negeri (Washington), "Komentar tentang Kabinet yang Baru", 25 Juli 1966. Sumber: Lyndon B. Johnson Library, National Security File, Country File, Asia and the Pacific, Indonesia. #113a.

Time, 15 Juli 1966.

2 Sumber-sumber Sekunder

- 57 Adam, Asvi Warman. 2004. *Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- 33 Anderson Benedict and Ruth T. McVey. 1971. *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Modern Indonesia Project.
- 71 Anwar, Rosihan, H. Ramadhan K.H, dkk. 1996. *Kemal Idris: Bertarung dalam Revolusi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- 2 Blum, William. 1995. *Killing Hope: U.S. Military and CIA Interventions Since World War II*. Monroe, Maine: Common Courage Press. (First edition: 1986).
- 23 Budiawan. 2006. "Seeing Communist Past through the Lens of a CIA Consultant: Guy J. Pauker on the Indonesian Communist Party Before and After the '1965 Affair'", dalam Jurnal *Inter-Asia Cultural Studies*, Volume 7, Nomor 4, Desember 2006.
- Challis, Roland. 2001. *Shadow of a Revolution*. Stroud, United Kingdom: Sutton Publishing.
- 14 Dake, Antonie C.A. 2005. *Sukarno File: Berkas-berkas Sukarno 1965-1967, Kronologi Suatu Keruntuhan*. Jakarta: Aksara Karunia.
- 32 Daniel S. Lev and Ruth McVey, eds. 1996. *Making Indonesia: Essays on Modern Indonesia in Honor of George McT. Kahin*. Ithaca: Cornell Southeast Asia Program.
- 50 Green, Marshall. 1990. *Indonesia: Crisis and Transformation, 1965-1968*. Washington, D.C.: The Compass Press.
- 56 Hasta Mitra, Redaksi. 2001. *Dokumen CIA: Melacak Penggulingan Sukarno dan Konspirasi G30S 1965*. Jakarta: Hasta Mitra.
- 27 Hughes, John. 1967. *The End of Sukarno: A Coup that Misfirede, A Purge that Ran Wild*. Singapore: Stamford Press Ltd.
- 31 ———. 2002. *The End of Sukarno: A Coup that Misfirede, A Purge that Ran Wild*. Singapore: Stamford Press Ltd.
- 2 Jones, Howard P. 1973. *Indonesia: The Possible Dream*. Singapore: Mas Aju PTE, Ltd.
- Kadane, Kathy. 1990. "US Officials Lists Aided Indonesian Bloodbath in '60s", *The Washington Post*, 21 Mei 1990.
- 30 Kahin, Audrey and George McT. Kahin. 1995. *Subversion as Foreign Policy: The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia*. New York: The New Press.
- 7 Keefer, Edward C., (ed.), 1994. *Foreign Relations of the United States, 1961-1963, Volume XXVI, Indonesia; Malaysia-Singapore; Philippines*. Washington: United States Government Printing Office.
- 61 Latief, Kolonel Abdul. 2000. *Pledoi Kol. A. Latief: Suharto Terlibat G30S*. Jakarta: ISAI.

- 27 Lembaga Analisis Informasi (LAI). 1998. *Kontroversi Supersemar dalam Transisi Kekuasaan Soekarno-Soeharto*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- 36 Lev, Daniel. 2001. "Kegagalan Menciptakan Sistem Politik", dalam Baskara T. Wardaya (Ed.), *Menuju Demokrasi: Politik Indonesia dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: Gramedia.
- _____ . 1999. "Lembaga, Elit dan Kontrol", dalam Baskara T. Wardaya, Ed., *Mencari Demokrasi*. Jakarta: ISAI.
- 41 Malik, Adam. 1968. "Promise in Indonesia", *Foreign Affairs*, Vol. 46, No. 2, Januari 1968, hlm. 393.
- 29 McGehee, Ralph. 1990. "The Indonesia File", *The Nation*, 24 September 1990.
- McMahon, Robert J. 1981. *Colonialism and Cold War: The United States and the Struggle for Indonesian Independence, 1945-49*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- 45 McMahon, Robert J. (Ed.). 1994. *Foreign Relations of The United States, 1958-1960, Volume XVII Indonesia*. Washington: United States Government Printing Office.
- 22 Mc Vey, Ruth T. 1970. "Nationalism, Islam, and Marxism: The Management of Ideological Conflict in Indonesia", an Introduction to Soekarno. *Nationalism, Islam and Marxism*. Ithaca: New York, Modern Indonesia Project Southeast Asia Program, Department of Asian Studies, Cornell University.
- 28 Nasution, Adnan Buyung. 1992. *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio-legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- 41 Pambudi, A. 2003. *Supersemar Palsu: Kesaksian Tiga Jenderal*. Jakarta: Penerbit Media Pressindo.
- 2 Peacock, Chris. 1991. "Indonesia: Years of Living Dangerously", *Utne Reader*, Januari-Februari 1991.
- Ranelagh, John. 1987. *The Agency: The Rise and Decline of the CIA*. New York: Simon & Schuster.
- Reksosamodra, Raden Pranoto. 2002. *Memoar Raden Pranoto Reksosamodra*. Yogyakarta: Syarikat Indonesia.
- 52 Roeder, O.G. 1970. *The Smiling General: President Soeharto of Indonesia*. 2nd edition. Jakarta: Gunung Agung Ltd.
- 2 Schraeder, Peter J. (Ed). 1992. *Intervention into the 1990s: U.S. Foreign Policy in the Third World*. Boulder and London: Lynne Rienner Publishers.
- Scott, Peter Dale. 2001. "Peran Amerika Serikat dalam Penggulingan Soekarno, 1965-1967", dalam Joesoef Isak (ed.). *100 Tahun Bung Karno*. Jakarta: Hasta Mitra.

. 2001. “Sukarno dan Pancasila Masih Tetap Memimpin Indonesia Masa Kini”, dalam Joesoef Isak, (ed.). *100 Tahun Bung Karno*, Jakarta: Hasta Mitra, hlm. 21–28.

Smith, Joseph B. 1976. *Portrait of a Cold Warrior*. New York: G.P. Putnam’s Sons.

Subandrio, Dr. H. 2001. *Kesaksianku Tentang G-30-S*. Jakarta: Forum Pendukung Reformasi Total.

Sukarno. 1970. *Nationalism, Islam and Marxism*. Ithaca: New York, Modern Indonesia Project Southeast Asia Program, Department of Asian Studies, Cornell University.



Indeks

Abdulrahman, Tunku	81, 83
ABRI	xv, xvii, 51
Achmad	46, 47, 49
Adam Malik	ix, xxiv, xxv, xxxii, xxxiii, 13–16, 20, 59, 60, 65, 73, 76–79, 82–84, 87, 98–101, 103, 107, 112, 117, 121, 122, 124, 131, 132, 134, 136, 137, 139, 141, 143–146, 149, 155, 164, 168, 169, 170–175, 181–183, 205
Adams, Cindy	xxx, xxxi, 29–31, 50, 181, 182
ADB	45, 74, 108, 155
Audit, D. N.	5, 10
Aiken	166
Amerika Serikat	ix, xix, xxiv, xxvi, xxvii, xxxi–xxxiv, 9, 25, 28, 29, 43–47, 49, 54, 62, 73, 76, 77, 79, 83, 91–97, 100, 101, 105, 120, 121, 142, 148, 149, 160, 163, 164, 172, 174, 183, 185
Amir Machmud	xvi, xvii, 18, 52
ANSOR	113–116, 128, 133
Ball	49, 84
Bank Dunia	148, 170, 171
BANRA	114
BANSER	115
Basuki Rachmat	xvii, 52
Bolton	166 60
Bung Karno	iii, iv, vii, ix, xiv, xvi–xviii, xx–xxiv, xxvii, xxx, xxxii, xxxiii, 1, 9, 13, 15–18, 23–25, 30, 31, 38, 41, 51–56, 63, 67, 68, 77, 79, 80, 87, 88, 92, 93, 99, 100, 102, 120–124, 136, 138, 144, 152, 163, 164, 166, 167, 177–179, 185, 186, 190
Cakrabirawa	xvi, 11, 13, 14, 24, 51, 61
Carl Albert	166
CGMI	109, 116, 117
Chaerul Saleh	7
CIA	iii, iv, viii, xxiv, xxv, xxxi, xxxii, 2, 20, 23, 31, 88, 89, 100, 109, 116, 120, 122–124, 144, 149, 157, 166, 168, 175, 178, 182, 184, 185
Cina	xx, xxi, 17, 31, 34, 41–44, 65, 69, 82, 87, 91, 93, 94, 95, 96, 104, 105, 111, 114, 141, 142, 157–161, 173, 174, 178
CONEFO	27, 29, 47, 65
Departemen Luar Negeri	viii, xxv, 9, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 40, 48, 50, 56, 60, 63, 64, 70, 72, 77, 78, 83, 85, 93, 97, 150, 152, 164, 183

- De-Sukarnoisasi xxxii, 119, 120
 Dirksen 165
 Dwikora xvi, 2, 11, 23, 53
- Eisenhower 184
- Fulbright xxviii, 156, 165, 189
- Gedung Putih viii, xxv, 30, 43, 50, 89, 152, 164, 178
 Gerald Ford 166
 Germino 18, 114
 Gerwani 15
 Gestapu 10, 13, 15, 24, 25, 64, 93
 Gestok 15
 GMKI 116
 GMNI 15, 113, 114, 133
- Helms 153–156
 HMI 113, 115, 116, 133
 Hubert Humphrey xxxiii, 76, 78, 100, 101, 164, 172, 175, 181, 182
- IMF 108, 120, 122, 154, 155, 163, 170, 171
- Jan Walandouw 48
 Jepang 11–13, 21, 29, 45, 71–73, 87, 90–92, 103, 104, 107, 108, 110, 121, 148, 154–156, 172
- KABI 24, 132
 KAMI 19, 30, 31, 47, 58, 59, 61, 63, 66, 70, 72–74, 76, 77, 93–96, 100, 101, 103, 165, 166, 171
 KAPPI 24, 112, 113, 115, 116, 132, 143
 KASI 24, 132
 KAWI 24, 132
 Kennedy 168, 173, 174
 Kogam 24
 Komer 38, 39, 43, 50, 66, 67, 78
 komunisme 6, 11, 93, 95, 102, 106, 110, 125, 144, 170, 172, 179
- Konfrontasi xx, xxii, xxxiii, 10, 43, 58, 65, 79, 81–84, 87, 93–96, 105, 122, 123, 148, 151–155, 157–162, 170
 Kongres xxv, xxvii, xxviii, xxxiii, 54, 55, 94, 103, 109, 154, 155, 164, 166, 175, 178, 182
 Kostrad 10
 KOTI 5, 7, 8, 25, 26, 34, 36
 KOTOE 25
 kudeta ix, xxiii, 2, 4, 31–34, 36–38, 41, 44, 49, 54, 56, 63, 64, 66, 67, 110, 111, 113, 117, 124, 125, 127, 128, 132, 133, 135, 147
- Lee Quan Yew 81
 Leimena xvii, 10, 52, 53, 129, 136, 137, 139
 Lydman 59, 77
 Lyndon B. Johnson xxiv, xxvii, xxviii, 21, 38, 43, 50, 77, 78, 85, 97, 100, 117, 149, 150, 162, 175, 181–183
- mahasiswa ix, xxiv, 1, 2, 13–20, 23–28, 35, 41, 42, 48, 49, 51, 55–59, 61, 62, 68, 69, 103, 109–116, 133, 141, 143, 179
- Mahon 165
 Malaysia xx, xxii, 10, 13, 24, 43, 47–50, 58, 65, 77–84, 87, 95, 97, 104, 105, 117, 143, 148, 151–155, 157–162, 169, 170, 174, 184
 Marshall Green 9, 38, 40, 41, 43, 50, 87, 121, 140, 170
 Martadinata 14, 18
 Marxisme 110, 120, 124, 126, 129–131
 McNamara 54, 55
 militer ix, xiv–xviii, xix–xxiv, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 16–20, 25–29, 31–39, 41–49, 54–58, 60, 63–72, 82, 83, 84, 88, 90, 102, 103, 105, 107–116, 123–135, 144–149, 151–153, 156–161, 163, 167, 179, 201
 M. Jusuf xvii, xviii, 52

- Moertopo 47–49, 203
Mogot 48, 49
Morgan 165
MPRS xiv, xxii, xxiii, xxxii, 53, 99, 100, 105, 119–125, 128, 130–132, 134, 138, 147, 149, 168, 176
M. Sabur xvi, 51
Muhammadiyah 58, 129, 137
- NASAKOM xxi, 6, 27, 28, 29, 126, 146
Nasionalisme xxi, 6, 126, 146
Nasution 3, 5, 7, 8, 10, 16, 18, 19, 21, 23, 26, 28, 33, 34, 38, 46, 59, 60, 62, 63, 68, 77, 78, 130, 134, 140, 168, 176, 185
neo-kolonialisme xiv, xx, 152
NSC 123, 152, 153, 164, 178
NU 58, 110, 115, 116, 127–129, 133, 134, 135, 138, 139, 145, 146
- Omar Dhani 23, 34, 177
Operasi Karya 54, 55
- Pancasila 88, 93, 96, 114, 123, 124, 126, 128, 130–133, 146, 186
Pastore 165
PBB xxii, 79, 82, 104, 122, 148, 169, 173
Pemuda Pancasila 114, 133
Pemuda Rakyat 11, 109, 111, 117
PII 113, 115, 116
PKI xvi, xix, xx–xxii, 1–12, 15, 17, 19, 23, 26–28, 31–35, 37, 38, 41, 42, 47, 53, 63, 64, 68, 69, 110, 111, 114–117, 124, 125, 127, 129, 131, 133, 134, 141, 142, 179, 198
PKRI 116
PL 480 71, 74–76, 81, 106, 108, 154, 156, 165, 171, 172
PRRI xix
- Razak, Tun Abdul 87
Ropa, D. W. vi, 81, 82, 85, 121, 123, 139, 140, 149, 150, 182
- Rostow 55, 77, 85, 102, 103, 117, 121, 140, 149, 150, 155, 168, 169, 171, 175, 182
RPKAD xxxi, 1, 9–11
Rusk 20, 21, 41, 43, 46, 47, 50, 67, 70, 73, 74, 78, 100, 121, 122, 138, 151–157, 164, 169, 175, 182, 183
- Saleh 7, 53, 91, 141, 142
Sarbini 23, 77
Sarwo Edhi 52
Senat 166, 173
Singapura 79–81, 95, 97, 104, 148, 159, 160, 161
Soebandrio xvii, xxv, 4, 7, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23–26, 35, 36, 42, 44, 45, 49, 52, 53, 56–62, 64, 65, 68, 69, 70, 156, 159, 177
Soekarno xxvii, xxx, 185
Sparkman 165
Subchan 19, 128, 138
Suharto 38, 138–140, 170, 184
Sukarno vi, vii, ix, xiv, xxii, xxiii, xxv, xxvii, xxx, 2–8, 10, 11, 13–21, 24–39, 41–45, 47, 50, 55–66, 68–71, 73, 81, 82, 86, 88, 94, 96, 102–105, 107, 109, 110–116, 119, 121–123, 125–135, 137–149, 156–159, 162, 165–169, 173–175, 178, 181, 182, 184, 186, 194
Sukarnoisme xxxiii, 44, 131, 142, 151–153, 157
Sultan, Hamengku Buwono IX xxxii, 73, 80, 100, 101, 112, 117, 139, 142, 163, 183
Supersemar iv–xiii, xiv, xvi–xxiv, xxvii, xxx–xxxiii, 50–54, 59, 60, 63, 64–68, 80, 87, 88, 99, 100, 102, 119, 120, 123, 151, 152, 163, 177–179, 185
- Tentara xxxi, 1, 23, 55, 56, 61
Thompson 75

Uni Soviet ix, xix, xx, 12, 41–43, 72, 88,
90–92, 95, 107, 142, 149, 153, 163

Vietnam xix, 87, 95, 96, 102, 104–106,
153, 155, 156, 170–172, 174

W.J. Jorden 152, 172

Tentang Penulis



Dok. Pribadi

2

Baskara T. Wardaya SJ (kedua dari kiri) lulus dari Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara tahun 1986 dan belajar di Marquette University, Milwaukee, Wisconsin, AS dari tahun 1993 hingga 2001. Dari universitas tersebut ia menerima gelar Master (1995) dan Doktor (2001), keduanya di bidang Sejarah. Tahun 2004–2005 ia menerima beasiswa *Fulbright* untuk program *post-doctoral* guna melakukan penelitian Sejarah di AS. Tahun 2011–2012 ia mengajar Sejarah di University of California-Riverside sebagai *Fulbright Scholar in Residence*. Tahun 2014 ia mendapat beasiswa dari AIFIS (American Institute for Indonesian Studies) untuk melakukan penelitian di AS. Kini ia bertugas sebagai pengajar Sejarah dan Kajian Budaya di Universitas Sanata Dharma (USD), Yogyakarta. Ia juga bekerja sebagai Kepala PUSDEMA (Pusat Kajian Demokrasi dan Hak-hak Asasi Manusia) USD.

Karya-karya tulisnya antara lain *Bung Karno Menggugat* (Yogyakarta: 2006); *Cold War Shadow: United States Policy toward Indonesia 1953–1963* (Yogyakarta: 2007); *Berkah Kehidupan: 32 Kisah Inspiratif tentang Orangtua* (2011); *Truth Will Out: Indonesian Accounts of the 1965 Mass Violence of 1965* (2013); *Luka Bangsa, Luka Kita: Pelanggaran HAM Masa Lalu dan Tawaran Rekonsiliasi* (2014, editor); dan *Bertemu Matahari* (2014); *Keeping Hope: Seeing Indonesia's Past from the Edges* (2017); *Beyond Borders: Notes on the Colonial and Post-Colonial Dynamics in The Americas, Europe, and Indonesia* (2017). Selain itu ia juga menulis di sejumlah jurnal akademik dan media massa. Ia dapat dihubungi melalui email baskaramu@yahoo.com.

Lampiran-lampiran



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
SURAT PERINTAH

I. Mengingat :

1. 1. Tingkatan Revolusi sekarang ini, serta keadaan politik baik Nasional maupun Internasional.
1. 2. Perintah Harian Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/Presiden/Panglima Besar Revolusi pada tanggal 8 Maret 1966.

II. Menimbang :

2. 1. Perlu adanya ketenangan dan kestabilan Pemerintahan dan djalannja Revolusi.
2. 2. Perlu adanya djaminan keutuhan Pemimpin Besar Revolusi ABRI dan Rakjat untuk memelihara kepemimpinan dan kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi serta segala adjaran-adjarannja.

III. Menetapkan/Memerintahkan :

Kepada : LETNAN DJENDRAL SOEHARTO, MENTERI PANGLIMA ANGKATAN DARAT

Untuk : Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi :

1. Mengambil segala tindakan jang dianggap perlu, untuk terdjaminnja keamanan dan ketenangan serta kestabilan djalannja Pemerintahan dan djalannja Revolusi, serta mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala adjaran Pemimpin Besar Revolusi.
2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima Angkatan² lain dengan sebaik-baiknya.
3. Supaja melaporkan segala sesuatu jang bersangkutan-paut dalam tugas dan tanggungjawabnja seperti tersebut diatas.

IV. Selesai

Djakarta, 11 Maret 1966

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI/PEMIMPIN BESAR
REVOLUSI/MANDATARIS M.P.R.S.

SOEKARNO

Puspou A D. ✓

PERINTAH - HARIAN

Para Tamtama, Bintara dan Perwira TNI/Angkatan Darat khususnya serta Angkatan Bersendjata pada umumnya ;

Rakjat Indonesia yang sangat saya tjintai,

1. Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS Bung Karno yang kita tjintai telah memerintahkan kepada saya, untuk atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terdjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan djalannya Pemerintahan dan djalannya Revolusi, serta mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi ;
2. Sungguh suatu tugas dan tanggung djawab yang sangat berat tetapi penuh kehormatan yang pada hakekatnya bukan sekadar bagi saya pribadi, melainkan bagi Angkatan Bersendjata dan seluruh Rakjat Indonesia ;
3. Bagi Rakjat, hal ini berarti bahwa suara hati nurani Rakjat yang selama ini dituangkan dalam perdoangan yang penuh keichlasan, kedjudjuran, heroisme dan selalu penuh tawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, benar-benar dilihat, didengar dan diperhatikan oleh Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno yang sangat kita tjintai dan yang djuga merupakan bukti ketjintaan Pemimpin Besar Revolusi kepada kita semua ;
4. Setiap bantuan, dukungan dan ikut-sertanya Rakjat dalam membantu saya hendaknya dilakukan dengan tertip dan tidak bertindak sendiri-sendiri; setiap gerakan dan tindakan dalam rangka bantuan terhadap tugas-tugas berat ABRI hendaknya tetap dipimpin dan terkendali, setiap keinginan dan hasrat hendaknya disalurkan dalam rangka Demokrasi Terpimpin ;
5. Pertjajakan tugas-tugas tersebut kepada ABRI anak kandungmu; Insja Allah ABRI akan melaksanakan Amanatmu, Amanat Penderitaan Rakjat, jaitu melaksanakan Revolusi kiri kerakjatan Indonesia, dengan tjiri-tjiri anti feodalisme, anti kapitalisme, anti Nekolim dan mewudjutkan masjarakat adil-makmur berdasarkan Pantja-Sila, masjarakat Sosialis Indonesia, yang diridloi oleh Tuhan yang Maha Esa dalam taman sarija satu Dunia Baru tanpa segala bentuk penindasan dan penghisapan ;
6. ABRI tidak hendak mengkanankan Revolusi Indonesia seperti yang dituduhkan oleh benalu-benalu dan tjetjungk-tjetjungk Revolusi; ABRI djuga tidak akan membiarkan Revolusinya dibawa kekiri-kirian, sebab Revolusi kita memang sudah kiri. Siapa sadja, golongan mana sadja, yang akan menjele-wengkan garis Revolusi, mereka akan berhadapan dengan ABRI, dan akan ditindak olen ABRI.
7. Para Tamtama, Bintara dan Perwira, Marilah kita melaksanakan bersama tugas yang dipertjajakan kepada saya, yang berarti djuga tugas yang dipertjajakan kepadamu, dengan penuh rasa tanggung-djawab demi Revolusinya Rakjat, dari mana kita dilahirkan, oleh siapa kita dibesarkan, untuk siapa kita mengabdikan untuk siapa pula kita rela untuk mati ;
8. Perdjalanannya kita masih djauh, perdoangan kita belum selesai. Badjakan semangatmu, per-tebal imanmu dan pertinggi pengabdianmu kepada Rakjat. Sungguh tugas ini udjian berat bagimu, dan Rakjat akan menilai pengabdianmu !
9. Dengan segala kerendahan hati, kita pandjatkan permohonan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa semoga meridloi pengabdian kita bersama kepada Tanah Air, Bangsa dan Revolusi ;
10. Sekian.

Djakarta, 12 Maret 1966.

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI/PEMIMPIN
BESAR REVOLUSI/MANDATARIS MPRS,
atas nama beliau,

atas nama beliau

S. Soeharto

SOEHARTO

LETNAN DJENDERAL - TNI

Puspren A.D.

DECLASSIFIED
Authority 964000
By NARA Date 7-1-02

Reproduced at the National Archives

EA/IND: H. Kent Goodspeed
(Drafting Office and Officer)

SECRET

DEPARTMENT OF STATE

Memorandum of Conversation

DATE: February 13, 1967

SUBJECT: INDONESIA - Reported Plan to Eliminate Sukarno

PARTICIPANTS: L. B. De Long, Col. Marine Corp. (Ret.), L. B. De Long Corporation
William P. Bundy, Assistant Secretary of State for East Asian and
Pacific Affairs
H. Kent Goodspeed, Country Officer, Indonesian Affairs

COPIES TO: EA - 2 INR - 8
EA/IND - 2 Amembassy DJAKARTA - 2

During a call on Mr. Bundy, Col. De Long said that in a recent conversation in Djakarta, Col. Ali Murtopo had told him that when Sukarno leaves Indonesia he will "be taken care of" and never return alive. Col. Murtopo impressed Col. De Long as being confident that this would soon be accomplished.

EA/IND:HKGoodspeed:zbr

FORM DS-1254
2-61

SECRET

GROUP-3

Downgraded at 12-year intervals;
not automatically declassified.

Lampiran 3. Laporan tentang adanya rencana pembunuhan terhadap
Presiden Sukarno.

COPYFLO-PBR

3
POL 15 INDON
INCOMING TELEGRAM Department of State XR E 1 INDON

10-3
Anjlon
CONFIDENTIAL

EA
Inf
SS
GPZ
SP
SC
SAH
L
H
SAS
P
USIA
NSC
ENR
CIA
NSA
AND
E
COM
RSR

NNNNVZCZCJED22JBA962
RR RUEHC
DE RUMJBT 3147 0100530
ZNY CCCCC
R 100335Z JAN 67
FM AMEMBASSY DJAKARTA
TO RUEHC/SECSTATE WASHDC
INFO RUHLHQ/CINCPAC
ZEN/AMCONSUL MEDAN
ZEN/AMCONSUL SURABAYA
STATE GRNC
BT
CONFIDENTIAL DJAKARTA 3147

006245
1967 JAN 10 AM 1 00

CINCPAC FOR POLAD

SUBJECT: ECONOMISTS ASSUME SUPERVISION OF GOVT DEPTS

1. ALI WARDHANA, ONE OF ACADEMIC ECONOMISTS IN GROUP COORDINATED BY PROF. WIDJOJO, INFORMED ME LAST NIGHT THAT ON INSTRUCTIONS FROM GENERAL SUHARTO, EACH MEMBER OF ECONOMIST GROUP HAS BEEN ASSIGNED SUPERVISORY ROLE OVER NUMBER OF DEPARTMENTS IN ECONOMIC AREA. WARDHANA'S RESPONSIBILITIES INCLUDE MOST IMPORTANTLY MINISTRY FINANCE, CENTRAL BANK, AND MINISTRY BASIC INDUSTRY. HEADS OF THESE DEPARTMENTS ARE UNDER INSTRUCTIONS FROM SUHARTO TO INFORM THE SUPERVISORY ECONOMIST ON CONTINUING BASIS OF ALL MAJOR DECISIONS AND CONTEMPLATED POLICY ACTIONS. WARDHANA SAID DEPARTMENTS HAVE RESPONDED WITH SATISFACTORY DEGREE COMPLIANCE ALTHOUGH BURDEN PLACED ON ECONOMISTS IS VERY HEAVY. PROCEDURE HAS EFFECT OF KEEPING DEPARTMENTS ON THEIR TOES, ASSURING COMPLIANCE WITH OVERALL STABILIZATION MEASURES, AND PROVIDING CHANNEL FOR INFORMING SUHARTO, THROUGH WIDJOJO, OF OVERALL PERFORMANCE OF GOVT DEPARTMENTS IN ECONOMIC AREA.
2. WIDJOJO, AS COORDINATING MEMBER, HAS MOST DIFFICULT SUPERVISORY ROLE, NAMELY TO OVERSEE ACTIVITIES OF SULTAN. WHILE HIGHLY RESPECTED, SULTAN IS GENERALLY CONCEDED TO BE WEAK LINK IN TOP ECONOMIC ORGANIZATION.
3. DURING SAME EVENING GATHERING, WIDJOJO COMMENTED THAT SUHARTO HAS BECOME DEEPLY INTERESTED IN ECONOMIC AFFAIRS AND IS APT AND WILLING STUDENT OF PRINCIPLES

CONFIDENTIAL

DJAKARTA 3147
1-10-67

ORIGIN/ACTION			DEPARTMENT OF STATE			REPRODUCED AT THE NATIONAL ARCHIVES		
EA-6			AIRGRAM			POL 15-1 INDOIN		
RM/R	AF		A-428			CONFIDENTIAL		
ARA	EUR	FE	NO.			HANDLING INDICATOR		
NEA	CU	INR	TO : Department of State			RECEIVED		
E	P	IO	INFO : MEDAN, SURABAYA, CINCPAC FOR POL			MAR 22 1967		
L	FBO	AID	FROM : Amembassy DJAKARTA			DATE: March 17, 1967		
AGR	COM	FRB	SUBJECT: General Suharto's Political Technical			ANALYSIS BRANCH		
INT	LAB	TAR	REF :			Name of Officer		
TR	XMB	AIR	SUMMARY					
ARMY	CIA	NAVY						
OSD	USIA	NSA						
33	10	3						
		NSC						
		6						
1967 MAR 21 PM 3 21			COPYFLO-PBR					
			The anti-Sukarno campaign when viewed in retrospect displays the work of a master tactician. Like Sukarno of the previous decade, General Suharto juggled political forces to attain his own objectives. Again like the early Sukarno, he preserved throughout a detachment from the other participants which allowed him to conceal his cards while peeking at those of his potential partners and opponents. The parallel methods of these two Javanese have led some Indonesians to fear the advent of a second dictatorship. Suharto and the early Sukarno, however, have provided glimpses of their ultimate goals to the discerning observer, and there is a difference.					
			* * * * *					
			Introduction. Eighteen months ago General Suharto was a political novice in command of a well armed and enthusiastic force. He faced one of the world's most capable politicians backed by a large but demoralized following. Suharto's obvious course of action was an immediate frontal attack to make the most of his preponderant power and momentum and					
			Group 3 - Downgrade each 12 years; not automatically declassified.					
			FORM 4-62 DS-323			CONFIDENTIAL		
			FOR DEPT. USE ONLY					
			Drafted by: POL: PFGardner:ds 3/15/67			Contents and Classification Approved by: POL: EEMasters		
			Clearances:					

Lampiran 5. Taktik Politik Jenderal Soeharto.

ORIGIN/ACTION			DECLASSIFIED		Reproduced at the National Archives	
EA-6			Authority 969000			
1			By NARA Date 7-1-01			
ARA			DEPAR OF STATE		POL 15 INDON	
EUR			AIRGRAM		DEF 6 INDON	
FE			A-523		FOR RM USE ONLY	
NEA			CONFIDENTIAL			
CU			TO : Department of State			
INR			INFO : CINCPAC, KUALA LUMPUR, MEDAN, SINGAPORE, SURABAYA			
5			FROM : Amembassy DJAKARTA			
E			SUBJECT : "Creeping Militarism" In Indonesia			
P			REF : Embassy's A-210 dated October 29, 1966			
IO						
4						
2						
L						
FBO						
AID						
12						
5/5						
6/11						
3/1						
15						
1						
AGR						
COM						
FRB						
INT						
LAB						
TAR						
TR						
XMB						
AIR						
5						
ARMY						
CIA						
NAVY						
3						
20						
5						
OSD						
USIA						
NSA						
33						
10						
3						
6						

15 PM 4 37

COPYFLO-PBR

RECEIVED
MAY 15 1967
DATE of Action May 10, 1967
Name of Officer

SUMMARY

Indonesia's military leadership has effectively demonstrated that it does not wish to impose a military junta. The rapid influx of military officers into civilian positions, however, has raised the threat of a "creeping militarism" which could eventually establish a military hegemony from below. Fifty-five percent of Indonesia's ambassadors, 60 percent of its governors, and 48 percent of its district administrators are now drawn from the Armed Forces, a marked increase over the Sukarno era. Military participation in Parliament and the economic sector, on the other hand, does not greatly exceed that of the past.

There are several valid reasons for the military assuming civilian functions and the effects have often been salutary. Furthermore, the process of militarization has been partially offset by a "civilianization" of military officers separated from their chain of command. If the process is allowed to continue, however, the effects will be increasingly harmful and civilian discontent is certain to grow. The fact that this discontent has now found an effective voice in the newly liberated press and Parliament will perhaps prove a healthy deterrent to military hegemony. With these spotlights focussed on them, the Armed Forces may also be further encouraged to make good their boast that they form a unique social, economic and political force serving the country as a whole.

GROUP 3.

FORM 4-62 DS-323

CONFIDENTIAL

FOR DEPT. USE ONLY

Drafted by: POL: PFGardner:ds 5/8/67

Contents and Classification Approved by: POL: E.E. Masters

Clearances: Coordinated: ARMA/Col. Gallagher
ECON: GDonald

Lampiran 6. Tentang "militerisme merangkak" di Indonesia.

ORIGIN/ACTION			DEPARTMENT OF STATE		POL 12 INDOIN NR PPB 9 USSR	
EA-6			AIRGRAM		FOR RM USE ONLY	
RAA	REP	AP	A-1756		LIMITED OFFICIAL USE	
ARA	EUR	FE	TO : DEPARTMENT OF STATE		RECEIVED DEPARTMENT OF STATE	
NEA	CU	INR	INFO : Djakarta, Kuala Lumpur, Singapore, Manila, Hong Kong		JUN 4 1 18 PM 1967	
E	P	IO	FROM : Amembassy MOSCOW		RS/AN ANALYSIS BRANCH	
L	FBO	AID	SUBJECT : The Lessons of the PKI Disaster - Two Versions.		DATE: June 2, 1967	
SPM	SY	SP	REF :		Action Assigned to Action Taken Date of Action Action Officer	
AGR	COM	FRB	SUMMARY: A recent Pravda article adds another nail to the political coffin of those PKI leaders who departed from the line laid down by the 1954 PKI Congress and who involved themselves in the abortive "putsch" of September 30, 1965. While castigating the Indonesian reactionaries for their subsequent onslaught against the "innocent" PKI rank and file, the author takes the opportunity to place the blame for PKI involvement in the disastrous Oestapu affair entirely on a handful of unnamed PKI leaders, presumably including Moscow's one-time favorite, Aidit. At the same time, we note a diametrically opposed, vehemently anti-Soviet analysis appearing in the December 1966 issue of the PKI organ Indonesian Tribune, which calls for armed struggle against the present government along Maoist lines.			
INT	LAB	TAR	*****			
TR	XMB	AIR	A lengthy Pravda article of May 28 by I. Antonov, commemorating the 49th anniversary of the PKI, constitutes an important document in Soviet historiography of the Party. Briefly recounting the trials of the PKI during the Dutch rule (with passing mention of the 1926 debacle), Japanese occupation, and the early years of the republic, Antonov falls back on the standard Soviet distorted version of the 1948 Madiun "provocation", asserting that it was used by Indonesian reactionary forces to institute a "white terror" against the PKI. He then goes on to note that in the early nineteen-fifties both "right-opportunist" and "leftist" errors within the party were exposed and condemned; moreover, the opportunist tendencies of the dogmatic trend headed by Tan Ling Djie, which were pulling the Party back towards sectarianism, were unmasked. (For the average Soviet reader, the very mention of a Chinese name, plus the use of these color words is probably sufficient			
ARMY	CIA	NAVY	Decontrol 6/1/68			
OSD	USIA	NSA	FORM 4-62 D5-323		LIMITED OFFICIAL USE	
33	10	3	Drafted by: POL:WAB/pown/ba		FOR DEPT. USE ONLY	
NIC	1	6	Contents and Classification Approved by: POL:AAK/...		<input checked="" type="checkbox"/> In <input type="checkbox"/> Out	
			Clearance: POL:DEBoster		MIN:JCGuthrie	

Lampiran 7. Pelajaran dari kegagalan PKI—dua versi.



DEPARTMENT OF STATE
WASHINGTON

IN REPLY REFER TO:

CONFIDENTIAL - PERSONAL

MEMORANDUM FOR: EA - Mr. Berger

FROM: G/PM - Seymour Weiss

Sam:

Last week I had occasion to talk to Guy Pauker at RAND. Guy raised the subject of Indonesia, making a pitch along the following lines:

He was at that time entertaining the Deputy Leader of the Indonesian Parliament. (You will know his name, it escapes me for the moment.) Pauker claimed that this fellow reflected a view which he has been consistently receiving from his many excellent contacts in Indonesia. The general content of this view is that the present Indonesian leadership badly feels the need for increased evidence of US support. I gathered that this was partly a psychological problem, partly a political problem and partly one of sheer economics, although on the latter score Pauker seemed to be referring to very modest programs of US military software. Pauker argued that the present government, though admittedly militarily dominated, is one which has a basic affinity for the US and for US interests. He argues further that no matter what our personal preferences might be with regard to the desirability of a civilian dominated government in Indonesia, none of the present civilian governmental leaders have any substantial political base within the Electorate. It is Pauker's view, therefore, that there is no alternative to the support of the present Indonesian Government and moreover, he thinks it is clearly in the US interest to evidence this support. He said he has been fully in accord

CONFIDENTIAL - PERSONAL

G/PM - Seymour Weiss

Lampiran 8. Desakan supaya Washington segera membantu pemerintah Orde Baru.

Authority 964000
By [signature] NARA Date 7-1-01

37

U.S. DEPARTMENT OF STATE
DIRECTOR OF INTELLIGENCE AND RESEARCH

SECRET

Intelligence Note - 741

September 19, 1967

To : The Secretary
Through: S/S
From : INR - George C. Donney, Jr. hcd
Subject: Suharto Tightens Grip on Armed Forces

On September 6 General Suharto abolished separate ministries for the Indonesian Armed Forces, divested the President of the title of Supreme Commander, and created the single cabinet post of Minister of Defense-Armed Forces Commander. A military spokesman later told the press that this move was intended to ensure a unified military effort, permit economies in the defense budget, and end harmful competition among the individual services. The chain of command now extends from the President, the "nation's highest authority", through the Minister of Defense, who must be a military officer, to the commanders of the Army, Navy, Air Force, and National Police.

The political reasoning behind the decree is clear. Suharto has strengthened his hold over the military establishment and the role of the Army within the establishment; by depriving the individual services of a voice in the cabinet, he diminishes the power of the Navy, Air Force, and Police, which harbor elements still strongly partial toward Sukarno. Although the President will no longer be Supreme Commander ex officio, this shift is not of immediate consequence since Suharto will almost certainly retain the Defense Ministry as well as the Acting Presidency, at least until the eventual general elections. For the longer term, however, the decree appears to be intended to strengthen the independence and power position of the military vis-a-vis a civilian president.

POL 15
INDON
XR
DEF & INTRON

(2)

This report was prepared by the Bureau of Intelligence and Research. Aside from normal collaborative exchange with other agencies at the working level, it has not been coordinated elsewhere.

SECRET

GROUP 3
Excluded from automatic downgrading and declassification

Authority 764000 By NARA Date 7-1-01		
DEPARTMENT OF STATE		
AIRGRAM		
DEF 6-1 INDCON FOR RM USE ONLY		
A-497 NO. CONFIDENTIAL		
TO : Department of State		
INFO : MEDAN, SURABAYA		
FROM : Amembassy DJAKARTA		
SUBJECT : Army Factionalism on Issue of Corruption		
REF :		
Nasution's confidant Husein Aminuddin gave the reporting officer the following account of a factional split in the Army's Legal Directorate on April 20:		
"There is a bad split in the Army's Direktorat Kehakiman on the issue of corruption among senior Army officers. On one side are Colonels Kabul and Kanter, who are supported by Army Deputy Minister Panggabean and Alamsjah, head of Suharto's Private Staff. On the other side are a number of young officers headed by Lt. Colonels Subono, Ali Said and Darmawel. This group is violently anti-corruption and is protected in the Army by followers of the late General Sutojo, the former Inspector-General who was murdered by the PKI on October 1, 1965. Alamsjah was very upset when he read the phrase: 'Do you want to steal enough money for seven generations?' in Darmawel's articles on corruption in the newspaper Nusantara. This phrase has some special meaning. The Kabul/Kanter group is trying to get the young Lt. Colonels detached from the Directorate and assigned to the Supreme Court, where they would be under the thumb of the PNI-connected Chief Justice Surjadi S.H. Everyone is watching this struggle to see what Suharto will do about it."		
COMMENT: One of General Suharto's civilian advisors told the reporting officer months ago that the phrase about "seven generations" had been included in a recommendation		
Group 3 - Downgrade each 12 years; not automatically declassified.		
CONFIDENTIAL		
FOR DEPT. USE ONLY		
Drafted by: POL: RCHowland:ds 4/24/67		
Contents and Classification Approved by: POL: E.E. Masters		
Clearances:		

EA-6
RM/R REP AF
1
ARA EUR FE
NEA CU INR
E P IO
L FBO AID
5/P
AGR COM FRB
INT LAB TAR
TR XMB AIR
ARMY CIA NAVY
3 20 5
OSD USA NSA
33 10 3
NSC 6

1967 MAY 3 PM 12 01
COPYFLO-FBR

RECEIVED
Action assigned to
May 3 9 39 AM 1967
Date of Issue: April 26, 1967
Office Symbol
Name of Officer

DEPARTMENT OF STATE
MAY 4 1967

Lampiran 10. Perpecahan di kalangan militer tentang masalah korupsi.

By 1040 NARA Date 7-1-02

ORIGIN

EA

RM/R

1

ARA

E

NEA

T

E

P

IO

L

FBO

AID

AGR

COM

FRB

INT

LAB

TAR

TR

XMB

AIR

ARMY

CIA

NAVY

3

20

5

OSD

USIA

NSA

33

10

3

DEPARTMENT OF STATE

AIRGRAM

A-522

CONFIDENTIAL

NO.

TO : Department of State

INFO : BANGKOK, CANBERRA, CINCPAC, HONG KONG, KUALA LUMPUR, LONDON, ~~MANILA~~, MEDAN, RANGOON, SAIGON, SINGAPORE, SURABAYA, TOKYO, WELLINGTON

FROM : Amembassy DJAKARTA

SUBJECT: New Order Foreign Policy in Indonesia

REF :

DATE OF ACTION

NAME OF OFFICER

RECEIVED

DEPARTMENT OF STATE

MAY 17 1967

1967

SUMMARY

After the failure of the communist coup attempt in 1965 the New Order moved to end Indonesia's international isolation and unilateral orientation toward Red China. In large part Indonesia has dropped the ideological trappings which adorned Sukarno's foreign policies and in its place has adopted a pragmatically conceived non-aligned policy designed to win as many friends and as much material support as possible. What is good for Indonesia economically has become the guiding principle of Indonesian foreign policy. This should make Indonesia easier to live with than in the past but Indonesia's legitimate aspiration to lead in Southeast Asia may well cause its neighbors uneasiness and apprehension in the future, particularly if the New Order fails in achieving political stability and an acceptable rate of economic rehabilitation.

* * * *

Introduction

Since the failure of the attempted communist coup on September 30-October 1, 1965 (commonly referred to by the acronym Gestapu) the foreign policy of Indonesia under the leadership

Group 3 - Downgrade each 12 years;
not automatically declassified.

FORM 4-62 DS-323

CONFIDENTIAL

FOR DEPT. USE ONLY

☒ In ☐ Out

Drafted by: POL: DTChristensen:ds 5/10/67

Contents and Classification Approved by: POL: EEMasters

Clearances:

Lampiran 11. Politik Luar Negeri pemerintah Orde Baru.

REPRODUCED AT THE NATIONAL ARCHIVES

DECLASSIFIED
Authority 964000
By NARA Date 7-1-00

White House Action 46

RS/R FILES

DEPARTMENT OF STATE

Attention *Mr. Miller* 20520

Keep this study together.

July 17, 1967

12492

MEMORANDUM FOR MR. JOHN E. RIELLY
OFFICE OF THE VICE PRESIDENT

Subject: Request for Appointment for Indonesian
Brigadier General Sudjono Humardani

COPIES TO:
S/S:RF
EA
EA/IND

ROUTING
1. W. H. Pending
2. CMS/Henderson
3. Line
4. RS/R Files

Brigadier General Sudjono Humardani, Member for Economic Affairs of the Private Staff of Acting President Suharto of Indonesia, is in Washington as a Leader Grantee and has expressed a desire to renew his acquaintance with the Vice President. General Sudjono met the Vice President in Washington last fall when he accompanied Foreign Minister Adam Malik to Washington.

We recommend that the Vice President receive General Sudjono if at all possible. General Sudjono is perhaps General Suharto's closest personal advisor, and he is considered by those Indonesian officials and intellectuals who are seeking to modernize that country as a valuable channel through which to influence Suharto to undertake necessary reform measures. We are attempting during his visit here to give him a thorough grounding in the operations of the United States Government, particularly in its foreign economic relations, in order that the likelihood of serious misunderstandings on this subject at the center of the Indonesian Government may be reduced.

Biographic information on General Sudjono is enclosed. He will be in Washington through Thursday.

Benjamin H. Read
Benjamin H. Read
Executive Secretary

Enclosure:
Biographic Information

CONFIDENTIAL
GROUP-3
Downgraded at 12-year intervals;
not automatically declassified.

MICROFILMED
BY S/S: CMS

EA/IND:DPSullivan:zbr 7/17/67

Clearances: EA/IND: Mr. Underhill
EA: Mr. Welch
S/S:

POL 7 INDOON

VP saw
sent 13023

Lampiran 12. Ali Moertopo dan Sudjono Humardani ingin bertemu Wapres AS.

Authority 464000
By [signature] NARA Date 7-1-01

3

POL 7 INDON
012670
26004280

OUTGOING TELEGRAM Department of State

INDICATE: ☐ COLLECT
☐ CHARGE TO

CONFIDENTIAL
Classification

Origin ACTION: Amembassy DJAKARTA

Info INFO: CINCPAC HONOLULU

STATE 12670

CINCPAC FOR POLAD

LIMDIS

Subject: Sudjono Visit

1. Sudjono and Murtopo, in call on Rostow July 18, stated primary purpose was to express to President, through Rostow, General Suharto's strong personal hope for White House support Indonesian aid needs. Murtopo said American officials invariably showed sympathy and understanding for Indonesian requirements but that this sympathy was not being translated into assistance of kind or magnitude which Indonesia urgently required.

2. When pressed for specifics, Sudjono and Murtopo made three requests:

a. \$50 million in balance of payments support for CY 1967 in addition to \$65 million pledged at Amsterdam;

b. U.S. assistance in rehabilitating transportation and communications system; and

c. "Switching" of U.S. military assistance to transportation

3

Created by: EA/IND:FTUnderhill:111

Tel. Rm: 3628

Telegraphic transmission and classification approved by: EA - Samuel D. Berger

White House - Mr. Wright (subs) [signature]

S/S - Mr. Meehan [signature]

CONFIDENTIAL
Classification

FORM 8-65 DS-322

12670

Lampiran 13. Pemerintah Orde Baru sangat mengharapkan bantuan dari AS.

Authority 964000
By NARA Date 7-1-01

30 Drafted by: BAFleck (EA)

CONFIDENTIAL /LIMDIS
SecDel/MC/23

Approved in S
10/3/67

SECRETARY'S DELEGATION
TO THE
TWENTY-SECOND SESSION OF THE
UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY
New York, September-October, 1967

17222

MEMORANDUM OF CONVERSATION

Date: September 29, 1967

LIMDIS

Time: 3:00 P.M.

Place: Secretary's Office
U.S. Mission

Subject: INDONESIAN INTERNATIONAL RELATIONS
(Part 4 of 4)

Participants:

U.S.
The Secretary
Mr. Benjamin A. Fleck,
EA Adviser to US Delegation

Indonesia
Foreign Minister Malik
Mr. Abu Bakar Lubis, Chief of
Cabinet, Department of Foreign
Affairs
Mr. Abdullah Kamil, Minister,
UN Mission
Mr. Elkana Tobing, Adviser

Distribution:

Complete dist. made in CMS
10/9/67

S/S	INR/OD	Amembassies	DJAKARTA
S/P	CIA		TOKYO
G	EA		COLOMBO
WH	NEA		RANGOON

Carded
The Secretary praised the steps taken by the Indonesian Government in cooperative ventures in Southeast Asia, particularly in its joining ASEAN. He asked if Ceylon would join. Malik replied that Ceylon had applied for membership but had encountered domestic opposition. The Ceylonese Prime Minister had requested postponement of any action on his country's membership application. Malik thought that Ceylon would renew its application after some solution had been found to problems connected with the rice/rubber deal with the Chinese Communists.

CONFIDENTIAL

MICROFILMED
BY S/S: CMS

Lampiran 14. Menlu Adam Malik menemui para pejabat AS.

Membongkar Supersemar: Dari CIA hingga Kudeta Merangkak Melawan Bung Karno

ORIGINALITY REPORT

13%	12%	2%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	perlawanan-hati.blogspot.com	4%
	Internet Source	
2	Submitted to Universitas Sanata Dharma	1%
	Student Paper	
3	eprints.uny.ac.id	1%
	Internet Source	
4	djokoawcollection.blogspot.com	1%
	Internet Source	
5	nsc.anu.edu.au	1%
	Internet Source	
6	blogger-terselebung.blogspot.com	1%
	Internet Source	
7	ebooks.cambridge.org	<1%
	Internet Source	
8	dokumen.tips	<1%
	Internet Source	
9	figur.kotaberita.com	<1%
	Internet Source	
10	discus.web.id	<1%
	Internet Source	
11	repository.upi.edu	<1%
	Internet Source	
12	lpm-dimensi.blogspot.com	<1%
	Internet Source	

13	Sue Thompson. "British Military Withdrawal and the Rise of Regional Cooperation in South-East Asia, 1964–73", Springer Nature, 2015 Publication	<1 %
14	id.scribd.com Internet Source	<1 %
15	distributorbukukita.com Internet Source	<1 %
16	harefatika.blogspot.com Internet Source	<1 %
17	albastari.blogspot.com Internet Source	<1 %
18	history.state.gov Internet Source	<1 %
19	kannutuan.blogspot.com Internet Source	<1 %
20	www.state.gov Internet Source	<1 %
21	documents.mx Internet Source	<1 %
22	es.scribd.com Internet Source	<1 %
23	edepot.wur.nl Internet Source	<1 %
24	jhojho-jhoula.blogspot.my Internet Source	<1 %
25	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
26	pojoksatu.id Internet Source	<1 %
27	Submitted to British International School,	

	Jakarta Student Paper	<1 %
28	The Transnational and the Local in the Politics of Islam, 2015. Publication	<1 %
29	ses.library.usyd.edu.au Internet Source	<1 %
30	www.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
31	discover.meetinggoodlookingexposed.com Internet Source	<1 %
32	www.atria.nl Internet Source	<1 %
33	www.scribd.com Internet Source	<1 %
34	akselnawastralabsky.blogspot.com Internet Source	<1 %
35	www.watchindonesia.org Internet Source	<1 %
36	citralekha.com Internet Source	<1 %
37	sejarahunj.blogspot.com Internet Source	<1 %
38	www.arkeologi.web.id Internet Source	<1 %
39	Submitted to University of Kent at Canterbury Student Paper	<1 %
40	Submitted to University of Melbourne Student Paper	<1 %
41	www.sejarahsosial.org Internet Source	<1 %

42	fcmscsp.edu.br Internet Source	<1 %
43	bukuohbuku.wordpress.com Internet Source	<1 %
44	coretcoretkuliah.wordpress.com Internet Source	<1 %
45	theses.ucalgary.ca Internet Source	<1 %
46	www.dataphone.se Internet Source	<1 %
47	documents.tips Internet Source	<1 %
48	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
49	lesliehowardsteiner.blogspot.com Internet Source	<1 %
50	Submitted to University of Nottingham Student Paper	<1 %
51	history.wiscweb.wisc.edu Internet Source	<1 %
52	Submitted to Murdoch University Student Paper	<1 %
53	www.tionghoa.info Internet Source	<1 %
54	migs.concordia.ca Internet Source	<1 %
55	pure.uva.nl Internet Source	<1 %
56	httpriwansutandi.blogspot.co.id Internet Source	<1 %

57	www.pusatbahasa.diknas.go.id Internet Source	<1 %
58	raconquista.files.wordpress.com Internet Source	<1 %
59	www.detik.com Internet Source	<1 %
60	Menale, Bruno, Olga De Castro, Ciro Cascone, and Rosa Muoio. "Ethnobotanical investigation on medicinal plants in the Vesuvio National Park (Campania, Southern Italy)", Journal of Ethnopharmacology, 2016. Publication	<1 %
61	marxists.anu.edu.au Internet Source	<1 %
62	bimoboim.blogspot.com Internet Source	<1 %
63	sitohangdaribintan.blogspot.com Internet Source	<1 %
64	kadergmni.blogspot.com Internet Source	<1 %
65	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
66	id.wikipedia.org Internet Source	<1 %
67	www.nyatanyatafakta.info Internet Source	<1 %
68	www.usd.ac.id Internet Source	<1 %
69	repository.upnyk.ac.id Internet Source	<1 %
70	hilmyelhasan95.wordpress.com	

	Internet Source	<1 %
71	ermanhukum.com Internet Source	<1 %
72	www.bpadjogja.info Internet Source	<1 %
73	lenterahati.web.id Internet Source	<1 %
74	srikandinusantara.blogspot.com Internet Source	<1 %
75	www.tirilolok.com Internet Source	<1 %
76	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
77	www.al-ikhwan.net Internet Source	<1 %
78	jakarta45.wordpress.com Internet Source	<1 %
79	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
80	www.hastamitra.org Internet Source	<1 %
81	www.carikredit.com Internet Source	<1 %
82	free.vlsm.org Internet Source	<1 %
83	www.pa-kalianda.go.id Internet Source	<1 %
84	www.tempointeractive.com Internet Source	<1 %

85	www.docstoc.com Internet Source	<1 %
86	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
87	symbianku.my Internet Source	<1 %
88	www.sinarharapan.co.id Internet Source	<1 %
89	usckrasen.blogspot.com Internet Source	<1 %
90	berita.kafedago.com Internet Source	<1 %
91	megamercusuar.blogspot.com Internet Source	<1 %
92	aditya25u.wordpress.com Internet Source	<1 %
93	www.osdir.com Internet Source	<1 %
94	sdpd1bpp.sch.id Internet Source	<1 %
95	anwarkohley.blogspot.com Internet Source	<1 %
96	soeharto.co Internet Source	<1 %
97	jejakpetualang.org Internet Source	<1 %
98	ayouk91.blogspot.com Internet Source	<1 %
99	www.panyingkul.com Internet Source	<1 %

100

poskota.co.id
Internet Source

<1 %

101

sya2.multiply.com
Internet Source

<1 %

102

Adnan H., Tadjudin D., Yuliani L., Komarudin H., Lopulalan D., Siagian Y., Munggoro D., (eds.). "Belajar dari Bungo: mengelola sumberdaya alam di era desentralisasi", Center for International Forestry Research (CIFOR), 2008
Publication

<1 %

103

galangpress.com
Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off